

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD Negara RI Tahun 1945) dikatakan, bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Hal demikian berarti, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam segala aspek kehidupan, seperti : ideologi; politik; sosial dan budaya; pertahanan dan keamanan, serta ekonomi, harus didasarkan atas hukum (*supremacy of law*).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, UUD Negara RI Tahun 1945 mempunyai peranan yang sangat penting, karena sering disebut sebagai *National Symbol and Myth*.² Reformasi telah mendorong perubahan konstitusi (UUD Negara RI Tahun 1945) yang “singkat dan supel”, tetapi ternyata mempunyai beberapa kelemahan, sebagaimana diungkapkan oleh Mahfud MD, sebagai berikut :

1. UUD 1945 membangun sistem politik yang (*executive heavy*) dengan memberi porsi yang sangat besar kepada kekuasaan Presiden tanpa adanya mekanisme *checks and balances* yang memadai;

¹ Anonymous, 2002, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4 dan hlm. 67.
Redaksi Pasal 1 ayat (3) ini merupakan hasil perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001.

² Nyoman Serikat Putra Jaya, 2014, *Politik Hukum*, Penerbit Universitas Diponegoro Press, Semarang, hlm. 3.

2. UUD 1945 selalu banyak memberi *atribusi* dan *delegasi kewenangan* kepada Presiden untuk mengatur lagi hal-hal penting dengan undang-undang maupun dengan peraturan pemerintah;
3. UUD 1945 memuat beberapa pasal yang *ambigu* atau *multi-tafsir*, sehingga dapat ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsir, tetapi tafsir yang harus diterima adalah tafsir yang dibuat Presiden;
4. UUD 1945 lebih mengutamakan semangat penyelenggara negara daripada sistemnya.³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, maka dalam negara hukum pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara adalah bukan manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.⁴ Pengakuan hukum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menempatkan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang sangat penting. Kekuasaan kehakiman di dalamnya terkandung arti kekuasaan di dalam penegakan hukum pidana, termasuk di dalamnya kekuasaan melakukan penyidikan atas suatu perkara, kekuasaan melakukan penuntutan atas suatu perkara, kekuasaan mengadili suatu perkara, serta kekuasaan melaksanakan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan.⁵

Konsep Negara Hukum dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental dikenal sebagai *rechtsstaat*, sebagaimana dikembangkan oleh Julius Stahl, Fichte, Paul Laband dan Immanuel Kant. Di dalam Sistem Hukum Anglo Amerika konsep Negara Hukum ini dikenal dengan istilah *the rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Konsep Negara Hukum menurut Julius Stahl, memiliki unsur-unsur, sebagai berikut :

³ Mohamad Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Penerbit Gama Media, Yogyakarta, hlm.96.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm.1-20.

⁵ Lihat Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm.7.

(1).Adanya pengakuan hak asasi (*grondrechten*); (2).Adanya pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*); (3).Adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*); dan (4).Adanya Peradilan Administrasi (*Administratieve rechtspraak*). Sedangkan unsur-unsur Negara Hukum menurut konsep *the rule of law*, adalah sebagai berikut : (1).Adanya supremasi hukum (*supremacy of law*); (2).Adanya persamaan di muka hukum (*equality before the law*); dan (3).Adanya konstitusi yang berdasarkan hak-hak asasi manusia (*constitution base on human rights*). Oleh *The International Commission of Jurist* ditambahkan satu prinsip, yaitu (4). Adanya peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*).⁶ Sejalan dengan itu, Franz Magnis Suseno menyebutkan adanya empat syarat terselenggaranya Negara Hukum, yaitu : (1).Adanya asas legalitas, yang berarti Negara bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; (2).Adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan; (3).Adanya jaminan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia; dan (4).Adanya pemerintahan berdasarkan konstitusi atau hukum.⁷ Sedangkan Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji mengemukakan, bahwa terdapat tiga ciri khusus Negara Hukum Indonesia yang digariskan oleh ilmu hukum melalui prinsip-prinsip *Rule of Law* (dalam pengertian yang lebih luas daripada Dicey), yaitu : (1).pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang

⁶ Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Cet.I*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 90.

Lihat pula di dalam Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Rep. Indonesia, Jakarta, hlm.152.

Menurut A.V. Dicey, unsur-unsur *the rule of law*, yaitu : *supremacy of law*; *equality before the law* dan *due process of law*.

⁷ Franz Magnis Suseno, 1993, *Etika Politik : Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Penerbit Gramedia, Jakarta, hlm. 298-301.

mengandung perlakuan yang sama di bidang-bidang politik, hukum, sosial ekonomi, budaya dan pendidikan; (2).legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya; dan (3).peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.⁸ Adapun, Satjipto Rahardjo mengemukakan konsep *Rule of Law* terdiri dari : (1).Supremasi hukum; (2).Kesamaan di hadapan hukum; dan (3).Pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.⁹

Menurut Phillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum yang bersifat *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa (kejahatan), yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan *diskresi*. Perlindungan hukum yang bersifat *represif* bertujuan untuk menanganinya di lembaga peradilan.¹⁰ Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar *adaptif* dan *fleksibel*, melainkan juga *prediktif* dan *antipatif*.¹¹

Di lain sisi, Saparinah Sadli sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.¹² Selanjutnya oleh Barda Nawawi

⁸ Oemar Seno Adji, 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum, Cet.II*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.167 dan lihat pula dalam Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, hlm.14.

⁹ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 157.

¹⁰ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

¹¹ Lili Rosjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 118.

¹² Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, hlm.11.

Arief dikatakan, bahwa :

Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹³

Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu realitas sosial. Berkaitan dengan itu I.S. Susanto menyatakan, sebagai berikut :

Kejahatan adalah suatu realitas sosial, sehingga di masyarakat manapun di dunia ini tidak ada yang terlepas dari menghadapi masalah kejahatan yang terjadi di alam masyarakatnya. Kejahatan merupakan bentuk tertentu dari perbuatan manusia dalam masyarakat yang dipandang merugikan masyarakat selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan atau perubahan masyarakat yang bersangkutan.¹⁴

Selanjutnya dikatakan oleh I.S. Susanto, bahwa kejahatan merupakan produk sejarah hubungan antar manusia dalam masyarakatnya sebagaimana diungkapkan, sebagai berikut :

“Kejahatan sebagai gejala sosial selalu merupakan hasil dari keseluruhan proses-proses sosial, politik, ekonomi dan budaya yang ada di dalam suatu masyarakat yang kesemuanya itu merupakan produk sejarah hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat.”¹⁵

Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa kejahatan sebagai masalah sosial tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (nasional), melainkan juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia.

¹³ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Loc. Cit.

¹⁴ I.S. Susanto, 1988, *Membangun Kriminologi yang Bercirikan Indonesia*, “Masalah-masalah Hukum” No.3 Tahun XIII-1988, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.12.

¹⁵ I.S. Susanto, 1988, *Membangun Kriminologi yang Bercirikan Indonesia*, Loc. Cit.

Dengan mengutip pendapat Seiichiro Ono, kejahatan merupakan suatu “*universal phenomenon*”.¹⁶ Pada bagian lain dari disertasi yang berjudul *Kebijakan Legislatif Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Barda Nawawi Arief menyatakan, sebagai berikut :

Pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat yang berbentuk negara merupakan suatu pertumbuhan dan perkembangan yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut pada umumnya ingin dicapai dengan melakukan pembangunan berencana secara nasional untuk mencapai suatu kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna, dalam arti ada suatu keselarasan kehidupan manusia dan masyarakat. Pembangunan nasional tidak hanya untuk mengejar dan memenuhi kebutuhan lahiriah berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan batiniah yang antara lain berupa rasa aman, rasa keadilan dan sebagainya.¹⁷

Selanjutnya dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, kebutuhan sosial budaya yang terganggu oleh adanya kejahatan dapat mengancam eksistensi manusia dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana disebutkan berikut :

Keselarasan dan keserasian hidup manusia akan terganggu apabila dalam pergaulan hidup antara sesamanya tidak terdapat rasa aman, tidak ada ketenteraman hidup dan tidak ada jaminan perlakuan yang adil. Kehidupan yang tenteram dan aman dari gangguan keadaan ataupun sikap tindak anggota masyarakat lainnya yang melanggar nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan sebagainya jelas merupakan kebutuhan sosial budaya manusia yang sangat mendasar. Kebutuhan sosial budaya yang sangat mendasar ini diperlukan untuk menjamin adanya kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna. Apabila kebutuhan sosial budaya yang fundamental ini tidak terjamin atau tidak terpenuhi, maka akan timbul frustrasi,

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Op.Cit., hlm.11-12.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.32.

kecemasan atau keresahan dalam kehidupan manusia yang pada gilirannya dapat membawa kehancuran eksistensi manusia dan keutuhan masyarakat itu sendiri.¹⁸

Berkaitan dengan itu, apa yang dinyatakan oleh Rudolf von Jhering sebagaimana dikutip oleh Soedjono Dirdjosisworo, hukum merupakan penjamin syarat-syarat penghidupan di dalam masyarakat, syarat-syarat itu berbentuk memaksa.¹⁹ Selanjutnya, P.A.F. Lamintang menyatakan, bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.²⁰

Wirjono Prodjodikoro memandang kejahatan atau tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.²¹ Menurut R. Soesilo sebagaimana dikutip oleh A. Gumilang, kejahatan sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.²² Menurut M.A. Elliot sebagaimana dikutip oleh A. Gumilang, kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman.²³ Menurut J.E. Sahetapy sebagaimana dikutip oleh A. Gumilang, kejahatan adalah suatu penekanan belaka dari penguasa (pemerintah)

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Loc. Cit.

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XIV, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

²⁰ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Cet.IV, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

²² A. Gumilang, 1991, *Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Penerbit Angkasa, Bandung, hlm.3.

²³ *Ibid.*, hlm. 4.

yang dalam pelaksanaannya kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya merupakan perbuatan pidana atau bukan.²⁴ Menurut J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh A. Gumilang, kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.²⁵ Di dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Stb.1915 Nomor 732)*²⁶, yang melalui Pasal VI Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, diubah namanya menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP).²⁷ Di dalam KUHP, tindak pidana ini terbagi ke dalam kejahatan (*misdriften*) yang termuat di dalam Buku I KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat di dalam Buku II KUHP.²⁸

Menurut Bambang Poernomo, bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggar.²⁹ Roeslan Saleh melihat “kejahatan” sebagai perbuatan pidana. Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Buku II KUHP dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP. Perbuatan pidana itu juga

²⁴ A. Gumilang, 1991, *Kriminalistik, Loc. Cit.*

²⁵ A. Gumilang, 1991, *Kriminalistik, Loc. Cit.*

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2009, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.5.

²⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Penerbit Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 3.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 4. Konsep RUU-KUHP (terakhir tahun 2015) tidak lagi membedakan “kejahatan” dan “pelanggaran”. Konsep RUU-KUHP tahun 2015 terdiri dari Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Lihat Dirjend Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM, 2015, *Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, halaman daftar isi.

²⁹ Bambang Poernomo, 1988, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 18.

meliputi tindakan pelanggaran-pelanggaran.³⁰ Arif Gosita menyatakan, dalam arti luas, kejahatan tidak hanya ditentukan oleh perundang-undangan dalam hukum pidana saja, melainkan pula perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan adanya nestapa atau kerugian.³¹

Pada tahun 1976, Alvin Toffler menerbitkan buku yang diberi judul *Future Shock* di mana akan terjadi perubahan dahsyat di bidang teknologi, terjadi eksplorasi angkasa, perubahan dalam teori edukasi serta terobosan di bidang pengobatan.³² Selanjutnya, futurolog tersebut menyatakan, bahwa tak seorang pun tahu secara rinci bagaimana masa depan itu atau apa yang akan paling berguna di dalam masyarakat Gelombang Ketiga. Oleh karena itu, janganlah hanya memikirkan satu *reorganisasi* yang *massif* atau satu perubahan besar yang revolusioner yang diperintahkan dari atas, tetapi pikirkanlah ribuan *eksperimen* yang diselenggarakan secarasadar dan *terdesentralisasi*, sehingga kita menguji-coba berbagai model baru pengambilan keputusan politik pada tingkat *lokal* maupun *regional*, sebelum hal itu dapat diterapkan pada tingkat nasional dan *transnasional*.³³

Istilah pembangunan hukum berbeda dengan istilah pembinaan hukum dan pembaharuan hukum. Pembinaan hukum lebih mengacu pada efisiensi dalam arti meningkatkan efisiensi hukum. Pembaharuan hukum mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Pembangunan hukum mempunyai makna yang lebih luas dan mendasar daripada

³⁰ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet.III, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, hlm. 17.

³¹ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Edisi I, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 77.

³² Jan Hoesada dalam *Teknologi Fisika dan Perkembangan Umat Manusia* dalam Kutut Suwondo dkk, 2009, *Merenung Pembangunan, Punjung Tulis 70 Tahun Liek Wilardjo*, Penerbit FTE dan Program Pascasarjana Studi Pembangunan UKSW, Salatiga, hlm. 261.

³³ Alvin Toffler, 1989, *The Third Wave*, Sri Koesdyantinah SB., Terj. 1992, *Gelombang Ketiga (Bagian Kedua)*, Penerbit PT. Pantja Simpati, Jakarta, hlm. 386.

Alvin Toffler membagi ke dalam tiga kurun peradaban, yaitu : Gelombang Pertama : peradaban agrikultural, Gelombang Kedua : peradaban industrial dan Gelombang Ketiga : peradaban saat ini.

istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. Oleh sebab itu, pembangunan hukum tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat.³⁴

Peran sistem hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi di negara Indonesia, antara lain :

1. memberikan jaminan kepastian hukum terhadap semua subjek hukum pada khususnya serta anggota masyarakat pada umumnya dalam segala kegiatan hukum baik di tingkat nasional, regional dan internasional serta mampu menjaga stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan nasional;
2. memberikan kesebandingan dan kesetaraan terhadap semua subjek hukum pada khususnya, serta anggota masyarakat pada umumnya dalam segala kegiatan hukum baik di tingkat nasional, regional maupun internasional;
3. memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak menjadi objek (korban) dari kegiatan yang berkaitan dengan teknologi informasi, melainkan menjadi subjek yang berusaha memperoleh kesejahteraan sosial dengan cara beraktifitas di dalam kegiatan kemasyarakatan, pemerintahan dan kenegaraan;
4. memberikan landasan penegakan hukum yang kuat, profesional, proporsional, kredibel, visibel, sehingga terwujud lembaga pengadilan yang independen serta terwujudnya sistem hukum dan sistem

³⁴ Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Penerbit Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, hlm. 15.
Lihat pula Satjipto Rahardjo dalam *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta : BPHN, 1993) dan Satjipto Rahardjo dalam *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung : Penerbit Alumni, 1983). Pembangunan hukum sudah disinggung oleh Satjipto Rahardjo dalam *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan* (Bandung : Penerbit Alumni, 1980) pada halaman 152.

pemerintahan yang *clean and good governance*.³⁵

Tatanan kehidupan umat manusia secara keseluruhan ataupun secara nasional mengalami perubahan yang sangat cepat terutama pada akhir abad ke-20 dan mengawali abad ke-21 dikarenakan adanya globalisasi.³⁶ Di dalam buku yang bermula dari disertasi dengan judul “*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Ekonomi dalam Menghadapi Perkembangan Globalisasi Ekonomi*”, Supanto mengatakan globalisasi menyangkut perubahan struktur politik ekonomi internasional, dan seolah-olah kedaulatan negara berkurang serta lemahnya dan kemampuan mengelola ekonomi nasional oleh negara menjadi lemah.³⁷ Selanjutnya di dalam kesempatan lain, dikatakan bahwa globalisasi utamanya berawal pada perubahan dan perkembangan di bidang ekonomi. Adanya untuk menuju tataran tata ekonomi ini dengan mewujudkan tata ekonomi antar bangsa yang adil dan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat dunia.³⁸

Globalisasi adalah suatu proses sosial dan budaya yang dimulai dengan berinteraksinya suatu bangsa dengan bangsa lain. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai kondisi saling tergantung dalam jaringan internasional meliputi transportasi, distribusi, komunikasi dan ekonomi yang melampaui garis batas territorial negara.³⁹ Menurut George C. Lodge sebagaimana dikutip oleh Jamal Wiwoho, *globalization is a fact and a process. The fact is that the world's people and nations are more interdependent than ever before and becoming more so. The measures of interdependence are global flows of such things as trade, investment, and capital and related degradation of the ecosystem on which all life depends.*

³⁵ Disarikan dari pendapat Jamal Wiwoho dalam www.jamalwiwoho.com, serta apa yang dikemukakan oleh Ai Siti Farida, 2011, dalam *Sistem Ekonomi Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 127-192.

³⁶ Riant Nugroho Dwidjowijoto dan Marco P. Sumampouw Ed., 1997, *Manajemen dalam Era Globalisasi*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 153.

³⁷ Supanto, 2010, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 2.

³⁸ Supanto dkk., 2011, *Criminal Policy Memberantas Pembajakan Program Komputer*, Penerbit LPP UNS dan UPT UNS Press, Surakarta, hlm. 2.

³⁹ www.jamalwiwoho.com diunduh pada tanggal 10-12-2014 jam 11.00 wib.

*The process of globalization is both technological and human.*⁴⁰ Emmanuel Ritcher mengungkapkan, bahwa globalisasi adalah jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia.⁴¹ Malcolm Waters berpendapat, bahwa globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma di dalam kesadaran orang.⁴² Princeton N. Lyman menyatakan, bahwa globalisasi merupakan pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal dan perdagangan dan keuangan.⁴³ Selanjutnya, Thomas L. Friedman menyatakan, bahwa globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi ideologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia.⁴⁴ Menurut Riant Nugroho Dwidjowijoto, globalisasi terjadi karena adanya revolusi di bidang teknologi, transportasi dan telekomunikasi serta perkembangan turisme.⁴⁵

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah melahirkan era *the end of geography*, karena pergerakan arus manusia dan barang serta jasa menjadi sangat cepat dan perpindahan arus modal antar kawasan atau antar negara menjadi semakin mudah. Investasi tidak lagi mengenal bendera nasional, karena sudah menerobos dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bahkan dari satu negara ke negara lain yang lebih menguntungkan. Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi melahirkan era *the end of timelines*, karena telah memungkinkan seseorang atau sekelompok orang dari satu belahan dunia dapat berhubungan dengan seseorang atau sekelompok orang lain dari belahan dunia lain tanpa ada hambatan waktu, transportasi, akomodasi dan biaya yang besar. Di

⁴⁰ www.jamalwiwoho.com diunduh pada tanggal 10-12-2014 jam 11.00 wib.

⁴¹ www.jamalwiwoho.com diunduh pada tanggal 10-12-2014 jam 11.00 wib.

⁴² www.jamalwiwoho.com diunduh pada tanggal 10-12-2014 jam 11.00 wib.

⁴³ www.jamalwiwoho.com diunduh pada tanggal 10-12-2014 jam 11.00 wib.

⁴⁴ www.jamalwiwoho.com diunduh pada tanggal 10-12-2014 jam 11.00 wib.

⁴⁵ Riant Nugroho Dwidjowijoto dan Marco P. Sumampouw Ed., 1997, *Manajemen dalam Era Globalisasi*, Op. Cit., hlm. 153.

samping itu, keserempakan komunikasi melalui media massa, terutama media televisi *via satelit* telah memungkinkan sebuah berita atau informasi dapat diterima oleh seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia. Perkembangan turisme telah menyebabkan terjadinya peningkatan arus pertukaran manusia yang mengikis hambatan-hambatan sosial, budaya dan politik.⁴⁶

Globalisasi ditandai dengan kemajuan pesat di bidang transportasi, komunikasi dan informatika modern. Globalisasi mengandung makna yang dalam dan terjadi di segala aspek kehidupan, seperti ekonomi; sosial budaya; politik; ilmu pengetahuan dan teknologi; hukum dan sebagainya. Globalisasi di bidang politik ditandai dengan menguatnya tuntutan demokratisasi, transparansi hak asasi manusia, dan lain-lain. Globalisasi di bidang hukum ditandai dengan hilangnya batas-batas kenegaraan dan tidak ada lagi negara yang mengklaim bahwa negara tersebut menganut satu sistem hukum secara absolut. Sudah terjadi percampuran dan penetrasi satu sistem hukum ke sistem hukum lainnya. Globalisasi di bidang ekonomi ditandai dengan meningkatnya arus informasi, uang, barang dan jasa melalui perusahaan multinasional.⁴⁷

Larry Cata Backer dalam *Preface* buku berjudul *Harmonizing Law in an Era of Globalization, Convergence, Divergence, and Resistance* mengungkapkan, sebagai berikut :

Today, in much of the world, globalization is commonly conceived of as the emerging system of private interactions structured, for the most part, through economic relationships. Within this framework, the value of particular expressions of social and political action is to be judged on the basis of the way in which each might contribute to the optimization of free, transparent and fair markets : For this purpose, for example,

⁴⁶ Arief Hidayat dalam *Menegaskan Kembali Peran Negara di Tengah Melemahnya Kedaulatan Negara di Era Global* dalam Anonymous, 2009, *Bunga Rampai : Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 22-23.

⁴⁷ Zudan Arif Fakrulloh dalam *Membangun Hukum yang Berstruktur Sosial Indonesia dalam Kancah Trends Globalisasi* dalam Valerine J.L.K. dkk, 2000, *Wajah Hukum di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 51-52.

*democratic political systems might be thought “better” than other systems. Likewise, “free market” economic norms might be judged better at optimizing private market functioning than systems based on “command economy” principles. This form of globalization, like the others described above, is believed to transcend the more limited autonomous self-contained political, economic, social and religious communities. The nation-state, in partyicular, is meant to serve as a cog in the great wheel of global markets, devoting its law-making power to enchancing the transparency, fairness, and efficiency of those markets.*⁴⁸

Joseph Stiglitz (2003) dalam *Globalization and Its Discontent* sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita berpendapat berbeda, bahwa globalisasi justru membantu masyarakat dunia menikmati kesejahteraan dan keuntungannya melalui iklim kompetitif dan pembebasan regulasi, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat akan produk asing dengan harga murah. Globalisasi telah mengurangi perasaan keterasingan negara berkembang dan telah memberikan kesempatan rakyat di negara berkembang untuk mengakses pengetahuan yang luar biasa sekalipun bagi negara kaya. Namun ia mengkhawatirkan perkembangan arah globalisasi yang masih diliputi oleh kepentingan negara maju yang bercokol di IMF dan Bank Dunia, sehingga globalisasi telah tidak menepati janjinya untuk menciptakan stabilitas dan mengurangi kemiskinan. Hal demikian ini juga disebabkan karakter negara maju yang hipokrit di mana mereka menekan negara miskin untuk menghapuskan hambatan perdagangan, namun di sisi lain mereka menetapkan larangan ekspor negara miskin atas beberapa produksi hasil pertanian sehingga menghapus harapan negara miskin untuk memperoleh devisa dari ekspor tersebut.⁴⁹ Pendapat tersebut sebagaimana diungkapkan, sebagai berikut :

⁴⁸ Larry Cata Backer, 2007, *Harmonizing Law in an Era of Globalization, Convergence, Divergence, and Resistance*, Durham, North Carolina : Carolina Academic Press, page xiii.

⁴⁹ Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 30-31.

*Globalization today is not working for many of the world's poor. It is not working for much of the environment. It is not working for the stability of the global economy. The transition from communism to a market economy has been so badly managed that, with the exception of China, Vietnam, and a few Eastern European countries, poverty has soared as incomes have plummeted.*⁵⁰

Joseph Stiglitz (2006) dalam *Making Global Work* sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasmita mengemukakan, bahwa tidak relevan lagi memperdebatkan tentang “pro” dan “kontra” globalisasi karena harus disadari terdapat sisi positif dari globalisasi yakni hampir separuh manusia di Asia terintegrasi ke dalam suatu ekonomi global.⁵¹ Globalisasi tidak bisa dihindari, Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, harus menjalin kerjasama dengan negara atau kelompok negara lain. Dalam era globalisasi, masalahnya bukan pada kerjasama. Namun bagaimana kita dapat mengelola bangsa kita dengan potensinya yang besar untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁵²

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, juga memunculkan pelaku usaha yang semula dilakukan perorangan berkembang dalam bentuk kelompok-kelompok usaha yang bergabung dalam bentuk korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kegiatan ekonomi para pelaku usaha yang selalu mengejar keuntungan, bahkan sering dilakukan dengan cara-cara *illegal* pada akhirnya memunculkan jenis kejahatan yang berdimensi ekonomi atau yang disebut dengan kejahatan ekonomi (*economic crimes*) atau kejahatan di bidang bisnis (*business crimes*).⁵³ Menurut Romli Atmasasmita, kejahatan bisnis atau *business crimes* makna lengkapnya adalah *crimes in*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 31.

⁵¹ Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Loc. Cit.*

⁵² KOMPAS, Sabtu 5 Oktober 2013, hlm. 17.

⁵³ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2014, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Penerbit Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm.1.

*international and domestic business transaction*⁵⁴. Jacques Gelinas membedakan perkembangan ekonomi dunia ke dalam tiga tahapan perkembangan, yaitu : abad merkantilisme tahun 1498-1763 Masehi; abad perluasan kapitalisme tahun 1763-1883 Masehi, dan abad korporasi multinasional tahun 1883-1980 Masehi.⁵⁵ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memunculkan apa yang dinamakan sebagai *Cyber Crime* atau kejahatan dunia maya (*cyber space* atau *virtual space offence*), dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dari *transnational crime*, dan dimensi baru dari *white collar crime*.⁵⁶ Volodymyr Golubev menyebut tindak pidana ini sebagai *the new form of anti social behavior*.⁵⁷

Sejak tahun 1985 di dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa dikemukakan adanya kejahatan-kejahatan yang merupakan dampak negatif dari pembangunan ekonomi yang dikatakan sebagai dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan, sebagaimana diungkapkan : *a new dimension of criminality is the very substantial increase in the financial volume of certain conventional economic crimes*. Berbeda dengan pendapat lama (pendekatan dengan hubungan negatif) yang melihat kejahatan sebagai salah satu akibat dari buruknya keadaan ekonomi (yang berarti pula bahwa bilamana keadaan ekonomi membaik, kejahatan akan menurun), maka pendekatan dengan hubungan positif (*direct relationship*) melihat bahwa gejala kriminalitas ini merupakan pula suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya : pelanggaran hukum pajak, transfer modal yang melanggar hukum, penipuan asuransi, pemalsuan *invoice*, pelanggaran terhadap lingkungan hidup (*environmental offences*), pelanggaran terhadap konsumen (*consumer offences*) penipuan konsumen (*consumer fraud*), *misleading advertisement*, *merchandising*

⁵⁴ Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Op. Cit., hlm. 5 dan 75.

⁵⁵ Jacques Gelinas, 2003, *"Juggernaut Politics" : Understanding The Predatory of Globalization*, Oxford University Press, London, England, pages 4-9.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Loc. Cit.

fraud, business opportunity swindles, penyelundupan dan lain-lain. Kejahatan tersebut tidak atau jarang dilakukan dengan kekerasan fisik, tetapi lebih sering dilakukan berkedok *legitimate economic activities*. Kejahatan demikian ini dapat dinamakan kejahatan ekonomi (*economic crimes*).⁵⁸

Meningkatnya kuantitas dan kualitas kejahatan di kebanyakan negara ditegaskan lagi pada Kongres PBB kelima tahun 1975 di Jenewa, sehingga dalam kongres ini ada topik khusus yang membicarakan :

1. Perubahan-perubahan bentuk dan dimensi kejahatan, baik secara transnasional maupun nasional; dan
2. Akibat-akibat ekonomi dan sosial dari kejahatan. (Biaya kejahatan yang tersembunyi lebih besar daripada biaya kejahatan yang diketahui. Hal ini disebabkan biaya kejahatan yang diketahui sebenarnya hanya merupakan “*the tip of iceberg*”).⁵⁹

Kejahatan lain yang juga sangat mengganggu ekonomi nasional adalah korupsi yang dapat dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dengan menyalahgunakan kedudukan mereka, yang dapat berupa penyuapan (*bribery*) dan penerimaan komisi secara tidak sah (*kickbacks*). Kegiatan semacam ini juga dapat dilakukan oleh pihak swasta, sehingga August Bequai (1978) membedakan antara *bureaucratic corruption* dan *private corruption*. Pelaku korupsi adalah pemegang kuasa dalam masyarakat, yaitu kuasa pemerintahan (*public power*) ataupun kuasa ekonomi (*economic power*) yang melakukan *abuse of power*.⁶⁰ Gene Kassebaum sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, salah satu usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara paling tua setua peradaban manusia itu sendiri,

⁵⁸ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu*, Lab. Kriminologi UI dan Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 42-44.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. IV, *Op. Cit.*, hlm. 12-13.

⁶⁰ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, Op. Cit.*, hlm. 42-43.

sehingga disebut sebagai “*older philosophy of crime control*”.⁶¹ Usaha-usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut masih sering dipermasalahkan, sehingga perdebatan mengenai penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi masalah kejahatan memunculkan kelompok-kelompok yang *pro* dan *kontra* serta di tengah-tengah antara *pro* dan *kontra*.⁶² Di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat RUU-KUHP) dirumuskan Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, yang bertolak dari pemikiran, bahwa : (1).Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan; (2).Tujuan pidana merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pemidanaan di samping subsistem lainnya (subsistem tindak pidana dan subsistem pertanggungjawaban pidana); (3).Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi kontrol dan sekaligus memberikan dasar rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan; dan (4).Dilihat secara fungsional sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.⁶³

Terlepas dari ketiga pandangan tersebut, penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi masalah kejahatan beroperasi melalui suatu sistem yang biasa disebut sebagai sistem peradilan pidana, yang berpusat pada permasalahan mengadili yang dilakukan oleh Hakim dalam lembaga yang

⁶¹ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Op. Cit., hlm.18.

⁶² Perbedaan didasarkan pada tujuan utama pemidanaan/hukum pidana memunculkan :
a. Kelompok Pro Hukum Pidana, seperti Cesare Beccaria yang menyatakan “*let the punishment fit the crime*”.
b. Kelompok Kontra Hukum Pidana, seperti Filippo Gramatica yang menginginkan “hukum perlindungan sosial”, “perbuatan anti sosial”, “integrasi ke dalam tertib sosial”.
c. Kelompok yang berada di tengah-tengah, seperti Marc Ancel yang menganggap kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan sosial.

Lihat *Pidana dan Pemidanaan* dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.1-51.

⁶³ Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.3-4.

disebut Pengadilan. Menurut Barda Nawawi Arief, usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁶⁴ Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan criminal, yaitu : (1).dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; (2).dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan (3).dalam arti paling luas (diambil dari pendapat Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁶⁵ Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat di dalam menanggulangi kejahatan.⁶⁶ Sedangkan Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief merumuskan politik kriminal itu sebagai *the rational organization of control of crime by society*.⁶⁷ Sejalan dengan pendapat Marc Ancel adalah apa yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels, yaitu *criminal policy is the rational organization of social reactions to crime*.⁶⁸

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP) tidak memberikan definisi

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 29.

⁶⁵ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 113-114. Lihat juga Sudarto, 1981, dalam *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 161.

⁶⁶ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 38.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁶⁸ G. Peter Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland, p. 139.

mengenai apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana atau Peradilan Pidana. Di dalam KUHAP hanya diberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan “mengadili” serta apa/siapa yang dimaksud dengan “hakim”. Berdasarkan Pasal 1 butir ke-9 KUHAP, yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁶⁹ Adapun yang dimaksud dengan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir ke-8 KUHAP).

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, yang dimaksud dengan peradilan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan, yang menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peradilan itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan-badan Pengadilan yang dibentuk dengan undang-undang.⁷⁰ Di dalam Pasal 24 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan, sebagai berikut :

Pasal 24

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

⁶⁹ Lihat M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition*, Penerbit Reality Publisher, Surabaya, hlm.429.M.Marwan dan Jimmy P. memberikan batasan sama dengan yang ada di dalam KUHAP.

⁷⁰ Subekti dan Tjitrosoedibio, 1972, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 83. Sekarang ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjalani proses amandemen sampai empat kali, yaitu Amandemen I disahkan tanggal 19-10-1999, Amandemen II disahkan tanggal 18-08-2000, Amandemen III disahkan tanggal.10-11-2001 serta Amandemen IV disahkan tanggal 10-08-2002.

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.⁷¹

Adapun pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang.⁷² Dalam tulisan ini yang dibahas hanyalah peradilan pidana yang berarti berkaitan dengan permasalahan memeriksa dan memutusi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana atau undang-undang hukum pidana. Menurut M. Marwan dan Jimmy P., yang dimaksud dengan peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.⁷³

Proses penyelesaian perkara pidana secara operasional melalui suatu sistem yang disebut sebagai sistem peradilan pidana. Joan Miller sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan, sebagai berikut :

Tetapi menurut pendapat Andi Hamzah, harus diingat, bahwa istilah hukum acara pidana di satu pihak dan sistem peradilan pidana di lain pihak sangat berbeda ruang lingkupnya. Kalau hukum acara pidana hanya mempelajari “hukum”, maka sistem peradilan pidana lebih luas, juga meliputi bukan hukum. Menurut Joan Miller, sistem peradilan pidana mulai dari pembentukan undang-undang pidana di Dewan Perwakilan Rakyat sampai pada pembinaan narapidana hingga keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.⁷⁴

⁷¹ Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan hasil amandemen ketiga, sedangkan Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan hasil amandemen keempat.

⁷² Subekti dan Tjitrosoedibio, 1972, *Kamus Hukum, Op.Cit.*, hlm.82.

⁷³ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum, Op.Cit.*, hlm.505.

⁷⁴ Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, hlm.3.

Berkaitan dengan itu, Frank Remington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita mengemukakan, sebagai berikut:

Sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁷⁵

Romli Atmasasmita dengan mengutip pendapat Frank Hagan, membedakan pengertian antara *criminal justice process* dengan *criminal justice system*. *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *criminal justice system* adalah *interkoneksi* antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat di dalam proses peradilan pidana.⁷⁶ Muladi mengemukakan, bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana, namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.⁷⁷ Mardjono Reksodiputro dalam pidato pengukuhan guru besarnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia memberikan batasan, bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan

⁷⁵ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, hlm.14.

⁷⁶ Romli Atmasasmita, 1996, *Loc.Cit.*

⁷⁷ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.1-2.

pemasyarakatan terpidana.⁷⁸ Dalam kesempatan lain, Mardjono Reksodiputro mengemukakan, bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi mempunyai pengertian sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁷⁹

Menurut Suryono Sutarto, proses penyelesaian perkara pidana merupakan proses yang panjang yang membentang dari awal sampai akhir melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. tahap penyelidikan dan penyidikan;
2. tahap penuntutan;
3. tahap pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
4. tahap pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.⁸⁰

Adapun Mardjono Reksodiputro membedakan tahapan dalam sistem peradilan pidana meliputi tiga tahapan, sebagai berikut:

1. tahap pra adjudikasi, yang meliputi subsistem penyidikan dan subsistem penuntutan;
2. tahap adjudikasi, yang meliputi subsistem pemeriksaan dan penjatuhan putusan di sidang Pengadilan;
3. tahap purna adjudikasi, yang meliputi subsistem pelaksanaan pidana.⁸¹

⁷⁸ Mardjono Reksodiputro, 30 Oktober 1993, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.1.

⁷⁹ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Ketiga*, Lab. Kriminologi UI-Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.84.

⁸⁰ Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.40.

⁸¹ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Kelima*, Lab. Kriminologi UI-Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.166.

Suryono Sutarto membedakan berdasarkan bentuk atau jenis pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa dan saksi dan atau ahli, terdiri dari :

1. Pemeriksaan Pendahuluan (*Vooronderzoek*);
2. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (*Gerechterlijke Onderzoek*).⁸²

Pintu masuk utama ke dalam sistem peradilan pidana adalah proses penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan. Menurut Gatot Supramono, penyidikan merupakan pintu gerbang masuknya perkara pidana, karena setiap perkara pidana tidak dapat dituntut atau diajukan ke pengadilan sebelum melalui tingkat penyidikan.⁸³ Masuknya perkara ini melalui empat pintu, yaitu : (1).tertangkap tangan; (2).adanya laporan; (3).adanya pengaduan; dan (4).diketahui sendiri oleh penyelidik/penyidik.

Tindakan dan kewajiban pertama di tempat kejadian perkara adalah usaha permulaan yang maha penting untuk menyidik lebih lanjut peristiwa-peristiwa itu. Berhasil tidaknya penyidikan lebih lanjut itu, sebagian besar tergantung dari usaha tindakan dan kewajiban pertama dari petugas yang sedang melakukan usaha pekejaan itu di tempat kejadian perkara.⁸⁴ Menurut Amiruddin Hamzah, pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan pertama kali, yaitu pada saat tersangka diperiksa karena melakukan suatu kejahatan ataupun pelanggaran.⁸⁵ Menurut Suryono Sutarto, pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan pada tahap penyidikan termasuk di dalamnya pemeriksaan lanjutan yang dilakukan atas petunjuk dari penuntut umum setelah dilakukannya pra-penuntutan.⁸⁶ Sedangkan pemeriksaan di sidang Pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan atas diri tersangka/terdakwa di depan sidang

⁸² Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I, Op. Cit.*, hlm.40.

⁸³ Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 6.

⁸⁴ M. Karjadi, 1979, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Penerbit Politeia, Bogor, hlm. 1

⁸⁵ Amiruddin Hamzah, 2003, *Kebutuhan Surat dalam Praktek Proses Pidana (Proses Beracara)*, Cet. III, Penerbit C.V. Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

⁸⁶ Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum, Op.Cit.*, hlm.40-41.

pengadilan, yang mengadili tersangka/terdakwa atas perbuatan-perbuatan karena dianggap bersalah melakukan pelanggaran atau kejahatan-kejahatan.⁸⁷

Penyidikan (*investigation*) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir ke-2 KUHAP). Penyidikan dilakukan oleh penyidik yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir ke-1 KUHAP).

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana dengan tujuan :

1. untuk mencari, mengumpulkan dan mendapatkan keterangan-keterangan atau informasi-informasi atau data tentang :
 - a. tindak pidana apa yang terjadi (*what*);
 - b. kapan tindak pidana itu terjadi (*when*);
 - c. dimana tindak pidana itu terjadi (*where*);
 - d. siapa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut dan siapa yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut (*who*);
 - e. mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut (*why*);
 - f. dengan alat apa atau dengan cara apa pelaku melakukan tindak pidana tersebut (*with*);
 - g. bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut (*how*).

⁸⁷ Amiruddin Hamzah, 2003, *Kebutuhan Surat dalam Praktek Proses Pidana (Proses Beracara)*, Cet. III, *Op. Cit.*, hlm. 4.

Ketujuh hal tersebut dikenal sebagai *7W from Joachim George Darjes*⁸⁸.

2. untuk membuat terang mengenai tindak pidana yang terjadi;
3. untuk menemukan tersangkanya.

KUHAP mengintrodusir fungsi penyelidikan (*inquiry*) dengan tujuan guna mengawali fungsi penyidikan tersebut. Tugas dari fungsi penyelidikan adalah *immediately informs of the discovery of crime and the opening of inquiry*.⁸⁹ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir ke-5 KUHAP). Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Ia merupakan fungsi yang mendahului tindakan lain yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.⁹⁰

Penyelidikan mempunyai tujuan, sebagai berikut :

1. untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia;
2. adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya-upaya paksa;
3. untuk dapat dilakukannya penyidikan;
4. ketatnya pengawasan;

⁸⁸ Lihat dalam Soedjono Dirdjosisworo, 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut K.U.H.A.P.*, Alumni, Bandung, hlm. 98-99.

Menurut penulis *point f* dan *g* menjadi satu pertanyaan sehingga dapat dikatakan *5W+1H* (*what, who, where, when, why* dan *how*).

⁸⁹ Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I, Op.Cit*, hlm.46.

⁹⁰ Anonymous, 1982, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

5. adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi;
6. setiap peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana tidak selalu menampakkan secara jelas sebagai suatu tindak pidana.⁹¹

Setelah dari tahap Penyelidikan dan Penyidikan lalu masuk ke tahap Penuntutan. Berdasarkan Pasal 1 butir ke-7 KUHAP, yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Adapun pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan disebut sebagai Penuntut Umum, yang berdasarkan Pasal 1 butir ke-6 huruf b KUHAP, adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Adapun yang dimaksud dengan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir ke-6 huruf a KUHAP).

Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik, Penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan (Pasal 139 KUHAP). Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 15 KUHAP *jo* Pasal 137 KUHAP). Surat Dakwaan atau Surat Tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat

⁹¹ Suryono Sutarto, 2005, *Loc.Cit.*

dijatuhi hukuman.⁹² Di dalam KUHAP hanya diberikan syarat formal dan syarat materiil suatu Surat Dakwaan (Pasal 143 ayat (2) KUHAP), sebagai berikut :

Pasal 143 ayat (2) KUHAP

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁹³

Berkaitan dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap tersebut, menurut W.J.S. Poerwadarminta, yang dimaksud dengan kata cermat, jelas dan lengkap adalah :

Cermat = seksama, teliti, dengan penuh perhatian;

Jelas = terang, nyata, tegas;

Lengkap = genap (tidak ada kurangnya, komplit).⁹⁴

Berdasarkan cara pemeriksaannya, perkara pidana dapat dibedakan dalam : (1).Perkara biasa; (2).Perkara singkat; dan (3).Perkara cepat. Perkara cepat dapat dibedakan dalam perkara cepat tindak pidana ringan (untuk selanjutnya disingkat tipiring) dan perkara cepat pelanggaran lalu lintas jalan (tidak akan dibahas lebih lanjut, sebab lebih banyak bersifat administratif, jadi merupakan pelanggaran hukum administrasi negara yang dapat dikenakan sanksi pidana melalui proses peradilan pidana). Adapun perbedaan antara perkara biasa, perkara singkat dan

⁹² A. Karim Nasution, 1972, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 75.

⁹³ Anonymous, 2008, *KUHAP Lengkap*, Cet.II, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.

⁹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 202, 410 dan 587.

perkara cepat, dapat disampaikan dalam Tabel I, sebagai berikut :

Tabel I

Perbedaan Perkara Biasa, Perkara Singkat dan Perkara Cepat Tipiring

No.	Perkara Biasa	Perkara Singkat	Perkara Cepat Tipiring
1.	<p>Diatur di dalam Pasal 152 dan Pasal 202 KUHAP.</p> <p>Untuk perkara kejahatan atau pelanggaran yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya tidak mudah dan sifatnya tidak sederhana.</p>	<p>Diatur di dalam Pasal 203 sampai dengan Pasal 204 KUHAP.</p> <p>Untuk perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHAP dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana (Pasal 203 ayat (1) KUHAP).</p>	<p>Diatur di dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP.</p> <p>Untuk perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini (Pasal 205 ayat (1) KUHAP).</p>
2.	<p>Yang mengajukan terdakwa ke sidang Pengadilan adalah Penuntut Umum dengan cara melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan membuat akte pelimpahan perkara (<i>acte van verwijzing</i>) yang berisi-</p>	<p>Yang mengajukan terdakwa ke sidang Pengadilan adalah Penuntut Umum.</p>	<p>Yang mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan adalah Penyidik atas kuasa Penuntut Umum.</p>

	kan surat dakwaan, berkas perkara dan permintaan penuntut umum agar Pengadilan segera mengadili perkara tersebut.		
3.	Jalannya pemeriksaan lama, paling tidak ada sekitar delapan kali, atau sembilan kali lebih persidangan, bahkan sampai beberapa bulan lamanya.	Jalannya pemeriksaan lebih singkat, yaitu sekitar tiga atau empat kali persidangan sudah putusan.	Jalannya pemeriksaan lebih cepat, yaitu : -tiga hari sejak BAP selesai dibuat harus menghadapkan terdakwa, saksi, brg-barang bukti, dll ke sidang pengadilan.- perkara diperiksa pada hari saat berkas diterima oleh Pengadilan.
4.	Ada Surat Dakwaan yang dibuat Penuntut Umum.	Catatan tindak pidana yang didakwakan yang dibuat tertulis yang ada di dalam BAP sebagai pengganti Surat Dakwaan.	Register perkara yang. Berisikan iden titas terdakwa, urai an kejadian dan tin dak pidana yang di dakwakan sebagai pengganti Surat Dakwaan.
5.	Hakim yang memeriksa adalah Hakim Majelis yang terdiri dari tiga atau lima orang hakim.	Hakim yang memeriksa adalah Hakim Majelis yang terdiri dari tiga atau lima orang hakim. -Dalam hal perkara menjadi sulit,hakim memandang perlu dapat mengadakan pemeriksaan tam-	Hakim yang memeriksa adalah hakim tunggal(<i>unus judex</i>) dan diperiksa pada tingkat pertama dan terakhir <i>judex fac-tie</i> -nya kecuali apabila putusan berupa pidana perampasan

		<p>bahan selama empat belas hari, apabila belum selesai, maka hakim memerintahkan penuntut umum mengajukan dengan acara pemeriksaan biasa.</p> <p>-Terdakwa dapat mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan guna pembelaan paling lama tujuh hari.</p>	kemerdekaan.
6.	Saksi di dalam memberikan keterangan di bawah sumpah atau sebelumnya berjanji di hadapan hakim.	Saksi di dalam memberikan keterangan di bawah sumpah atau sebelumnya berjanji di hadapan hakim.	Saksi tidak mengucapkan sumpah/janji, kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHP),
7.	<p>-Panitera akan membuat Berita Acara Sidang yang isinya adalah uraian kejadian apa yang sebenarnya terjadi di persidangan.</p> <p>-Putusan tidak menjadi satu dengan Berita Acara Sidang.</p>	<p>-Panitera akan membuat Berita Acara Sidang yang isinya adalah uraian kejadian apa yang sebenarnya terjadi di persidangan.</p> <p>-Tidak ada putusan tersendiri atau terpisah, melainkan menjadi satu dengan Berita Acara Sidang</p>	<p>-Berita acara sidang tidak perlu dibuat, kecuali dalam persidangan ada hal yang tidak sama dengan BAP dari Penyidik (Pasal 209 KUHP),</p> <p>-Putusan menjadi satu dengan BAP dari Penyidik.</p>

Keterangan : BAP adalah berita acara pemeriksaan pendahuluan atau berita acara pemeriksaan atau berkas perkara.

Kriteria mudah/sulit pembuktiannya dan penerapan hukumnya serta sifatnya sederhana/tidak sederhana terlalu subjektif, karena bergantung pada subjektivitas dari jaksa selaku penuntut umum. Hal ini berbeda dengan *Herziene Inlandsch Reglement Stb.1941 Nomor 44* (untuk selanjutnya disingkat *HIR*), yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/Pidana⁹⁵ yang berlaku sebelum KUHAP (di dalam Pasal 335 *HIR*), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 335 HIR

Magistraat boleh membawa si tertuduh ke hadapan persidangan pengadilan negeri dengan tidak berbicara apa-apa, bila, setelah diperiksanya surat-surat yang dikirimkan oleh magistraat-pembantu kepadanya, ditimbangnnya, bahwa perkara itu perkara bersahaja, demikian juga mengenai bukti serta perihal menjalankan undang-undang, dan hukuman utama yang akan dikenakan pada perkara itu tidak lebih berat dari hukuman penjara selama-lamanya satu tahun.⁹⁶

Setelah tahap Penuntutan adalah tahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Tahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan terdiri dari Pemeriksaan Sidang Tingkat Pertama, Pemeriksaan Sidang Tingkat Banding serta Pemeriksaan Sidang Tingkat Akhir atau Kasasi. Adapun pejabat yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum adalah Hakim. Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana tersebut melalui pembuktian terbukti/tidaknya perbuatan yang didakwakan kepadanya serta

⁹⁵ HIR diberlakukan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 /Drt./1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Pengadilan-pengadilan Sipil. *HIR* berisikan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata dan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana (dalam satu buku).

⁹⁶ R. Tresna, 1975, *Komentar, atas Reglemen Hukum Acara di dalam pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri atau HIR*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 281. Pada tahun 1941, Pemerintahan Militer Hindia Belanda menaikkan menjadi tiga tahun, kemudian Pemerintahan Bala Tentara Jepang menetapkan tiga tahun. Setelah merdeka timbul dua pendapat, yaitu : pendapat pertama tetap tiga tahun, dan pendapat kedua satu tahun (mengikuti *HIR*). Lihat pula dalam R. Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cet. X, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, hlm.59-60.

bersalah/tidaknya terdakwa atas perbuatan tersebut. Menurut Mohamad Isnaini, mengadili dengan singkat dapat dikatakan : memecahkan, bagaimana menurut hukumnya, tiap-tiap masalah yang diajukan untuk dimintakan pendapatnya, *oordeel*-nya, tegasnya : memutuskan, apa yang harus berlaku, berdasarkan ketentuan hukum yang ada, terhadap soal yang bersangkutan.⁹⁷ Menurut R. Soesilo, dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, para hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.⁹⁸

Menurut Sidik Sunaryo, hakim memang tugas utamanya menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara, namun dalam konteks dan sistem penegakan hukum di pengadilan-pengadilan, hakim belum mampu menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan. Hakim yang sebagai manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangannya, ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan. Keyakinan hakim menjadi ukuran perasaan keadilan yang subjektif dan sepihak.⁹⁹

Menurut Cardozo sebagaimana dikutip oleh W. Van Gerven, hakim dan pembuat undang-undang mempunyai tugas yang serupa, meskipun pekerjaan pembuatan undang-undang, yakni penetapan norma, bergerak dalam batas-batas yang lebih sempit, yaitu jika penerapan kaidah perundang-undangan tidak memberikan penyelesaian yang jelas dan memuaskan. Tugas yang sama ini terdiri atas menimbang-nimbang nilai-nilai kemasyarakatan. Salah satu nilai kemasyarakatan adalah, sebagai dikatakan di atas, kesatuan bentuk dan tidak memihak sebagai digambarkan dalam simetri logis. Apakah hakim sebagai

⁹⁷ Mohamad Isnaini, 1971, *Hakim dan Undang-Undang*, Cet. II, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia Cabang Semarang, Semarang, hlm. 6.

⁹⁸ R. Soesilo, 1978, *Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik (Dalam Penyelesaian Perkara Sebagai Penegak Hukum)*, Penerbit Politeia, Bogor, hlm. 10.

⁹⁹ Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet. III, UMM Press, Malang, hlm. 27-28.

“pembuat undang-undang” sudah menjalankan “kebijaksanaan”.¹⁰⁰

Selanjutnya adalah tahap Pelaksanaan Putusan serta Pengawasan dan Pengamatan terhadap Pelaksanaan Putusan. Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Suatu putusan dinyatakan *in kracht van gewijsde*, apabila :

1. terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan yang bersangkutan di tingkat pertama di Pengadilan Negeri atau di tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau putusan tersebut merupakan putusan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung;
2. tenggang waktu untuk mengajukan *Verzet* terhadap *Verstek*, Banding atau Kasasi telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak;¹⁰¹
3. permohonan *Verzet* terhadap *Verstek* telah diajukan lalu pemohon tidak hadir kembali pada saat hari sidang yang telah ditetapkan;
4. permohonan Banding atau Kasasi telah diajukan lalu pemohon mencabut kembali permohonannya;
5. terdapat permohonan Grasi yang diajukan tanpa disertai permohonan penangguhan pelaksanaan putusan.¹⁰²

Institusi yang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dibedakan dengan institusi yang melaksanakan

¹⁰⁰ W. van Gerven, 1973, *Het Beleid van de Rechter*, NV. Scriptoria, Antwerpen, Holland, Terj. Hartini Tranggono, *Kebijaksanaan Hakim*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 61.

¹⁰¹ KUHAP menggunakan istilah “perlawanan” untuk menyebut “*verzet*” (Pasal 214 ayat (6) KUHAP) dan “*requisitoir verzet*” (Pasal 149 ayat (2) dan (3) KUHAP). Perlawanan dapat diajukan terhadap putusan “*verstek*”. KUHAP menggunakan istilah “putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa” untuk menyebut “*verstek*” (Pasal 214 ayat (4) KUHAP).

¹⁰² Bambang Dwi Baskoro, 2016, *Buku Ajar Hukum Eksekusi Pidana*, Penerbit LP2MP Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 3.
Grasi merupakan upaya hukum yang diatur di luar KUHAP, yaitu UU Negara Rep. Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi jo UU Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Negara Rep. Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

pidana. Institusi yang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah Jaksa, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 270 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 270 KUHAP

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Terdapat tiga macam putusan hakim/putusan pengadilan (*vonnis*), yaitu :

(1).putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (putusan bebas atau

vrijspraak);

(2).putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan

hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*); dan

(3).putusan yang mengandung suatu penghukuman/pemidanaan terhadap

terdakwa.¹⁰³

Putusan pemidanaan adalah putusan yang berisikan penjatuhan sanksi pidana untuk dijalani oleh si terdakwa. Jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan Pasal 10 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie Staatsblad 1915 Nomor 723*¹⁰⁴ atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP), yang berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan

¹⁰³ Hendrastanto Yudowidagdo dkk., 1987, *Kapita Selektta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 89-90.

¹⁰⁴ R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cet. X, Penerbit Politeia, Bogor, hlm. 23.

Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP) *jis* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, terdiri dari :

1. Pidana Pokok, yang terdiri dari :
 - a. Pidana Mati¹⁰⁵ ;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Hukuman Tutupan¹⁰⁶ ;
 - d. Pidana Kurungan; dan
 - e. Pidana Denda.
2. Pidana Tambahan, yang terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Adapun institusi yang melaksanakan pidana tersebut, sebagai berikut :

1. Pidana Pokok :
 - a. Pidana Mati dilakukan oleh Regu Tembak dari Satuan Brigadir Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia;¹⁰⁷

¹⁰⁵ Pelaksanaan pidana mati diatur lebih lanjut dengan UU Negara Rep. Indonesia Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

¹⁰⁶ S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, 1996, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, hlm.106-115.

UU Negara Rep. Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 dibuat tanggal 31 Oktober 1946 (setelah peristiwa 3 Juli 1946) dan Perpem No.8 Tahun 1948 dibuat tanggal 4 Mei 1948 (putusan dijatuhkan tanggal 27 Mei 1948). UU Negara Rep. Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 dibuat dengan alasan *custodia honesta* terhadap pelaku kudeta 3 Juli 1946, yaitu : Mayjend. Soedarsono, Mr. Moh Yamin, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri dkk.

Hukuman tutupan sebenarnya sudah tidak berlaku secara efektif , namun secara yuridis normatif UU Negara Rep. Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan tidak pernah dicabut oleh Pemerintah.

¹⁰⁷ Pidana mati dilaksanakan setelah ada Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi yang diterima oleh terpidana, sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 UU Negara Rep. Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi jo UU Negara Rep. Indonesia Nomor 5

- b. Pidana Penjara dan Pidana Kurungan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Pidana Tutupan dilaksanakan oleh Rumah Tutupan¹⁰⁸ ;
- d. Pidana Denda dilakukan oleh Jaksa.

2. Pidana Tambahan :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu, bergantung macam haknya yang dicabut, misal : hak perwalian dicabut berdasarkan putusan pengadilan;
- b. Perampasan barang-barang tertentu dilakukan oleh Jaksa;
- c. Pengumuman putusan hakim dilaksanakan oleh Panitera.¹⁰⁹

Pada Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (untuk selanjutnya disingkat UUTPE) ancaman pidana dapat terdiri dari : a.Pidana Pokok (Pasal 6 UUTPE); b.Pidana Tambahan (Pasal 7 UUTPE); dan c.Tindakan Tata tertib (Pasal 8 UUTPE).¹¹⁰

Pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan terdapat lembaga pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (untuk selanjutnya disingkat Kimwasmat). Perlu dikemukakan, bahwa

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Negara Rep. Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Lihat Hadi Setia Tunggal, 2002, *Undang-Undang Grasi (UU No.22/2002)*, Penerbit Havarindo, Jakarta, hlm. 9.

¹⁰⁸ Rumah Tutupan adalah tempat untuk menampung terpidana tutupan diatur lebih lanjut dengan Perpem Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

¹⁰⁹ Macam sanksi pidana terhadap tindak pidana di luar KUHP lebih beragam, misalnya : Dalam Undang-Undang Nomor 7 /Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi terdapat sanksi pidana berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terdakwa, di mana tindak pidana ekonomi dilakukan untuk waktu selama-lamanya satu tahun (Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi).

Lihat K. Wantjik Saleh, 1985, *Pelengkap KUH Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.40.

¹¹⁰ K. Wantjik Saleh, 1985, *Pelengkap KUH Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.15.

wewenang dari Hakim Pengawas dan Pengamat terbatas terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (penjara dan kurungan) serta pidana bersyarat, sehingga dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana mati atau pidana denda tidak termasuk ruang lingkup wewenangnya.¹¹¹

Berkaitan dengan peradilan pidana sebagai suatu sistem Romli Atmasasmita menyatakan, bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu kajian hukum merupakan kajian yang menggunakan pendekatan manajemen dalam melihat peradilan pidana. Selanjutnya dikatakan, sebagai berikut :

Perspektif manajemen peradilan pidana memusatkan perhatian kepada uraian dan pembahasan tentang mekanisme kerja unsur-unsur pendukung dalam proses penegakan hukum dan bagaimana pengaruh mekanisme tersebut satu sama lain serta dampaknya terhadap penegakan hukum secara menyeluruh.¹¹²

Pendapat Romli Atmasasmita sebagaimana dimaksud sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sanford Kadish, bahwa pengertian sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan saling memengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.¹¹³

Menurut Romli Atmasasmita, kata penanggulangan kejahatan mengandung makna “pengendalian” yang merupakan bahasa manajemen, sehingga di dalam penanggulangan kejahatan terkandung aspek manajemen. Sedangkan sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum mengandung aspek hukum yang menitikberatkan pada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya penanggulangan kejahatan dan sistem

¹¹¹ Suryono Sutarto, 2008, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit Universitas iponegoro, Semarang, hlm.137.

¹¹² Lihat dalam Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Op.Cit., hlm.xi.

¹¹³ *Ibid.*, hlm.16.

peradilan pidana sebagai pelaksanaan *social defence* dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial mengandung aspek sosial dengan menitikberatkan pada kegunaan/kemanfaatan¹¹⁴

Berkaitan dengan aspek manajemen, menurut G.R. Terry sebagaimana dikutip oleh M. Anton Athoillah, manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹¹⁵ Menurut Malayu S.P. Hasibuan sebagaimana dikutip oleh Dyah Hariani, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹⁶ Menurut Ralph Currier Davis dalam *The Fundamental of Top Management* sebagaimana dikutip oleh Dyah Hariani menyatakan, manajemen adalah fungsi dari pimpinan eksekutif di manapun posisinya (*management is the function of executive leadership anywhere*).¹¹⁷ Sedangkan Patterson dan E.G. Ploman dalam *Business Organization and Management* sebagaimana dikutip oleh Dyah Hariani mengatakan, manajemen adalah suatu teknik, maksud dan tujuan dari sekelompok manusia tertentu yang ditetapkan, dijelaskan dan dijalankan.¹¹⁸ Selanjutnya dikatakan oleh M. Anton Athoillah, bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian ini terdapat dua sistem yang selalu harus ada dalam manajemen, yaitu sistem organisasi dan sistem administrasi.¹¹⁹ Sistem organisasi adalah integritas berbagai komponen yang saling memengaruhi dan berperan menurut tugas dan fungsi

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm.15-16.

¹¹⁵ M. Anton Athoillah, 2010, *Dasar-dasar Manajemen*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, hlm.16.

¹¹⁶ Dyah Hariani, 2013, *Buku Ajar Azas-azas Manajemen*, Penerbit LP2MP Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 8.

¹¹⁷ Dyah Hariani, 2013, *Buku Ajar Azas-azas Manajemen*, *Op. Cit.*, hlm. 9.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

¹¹⁹ M. Anton Athoillah, 2010, *Dasar-dasar Manajemen*, *Op. Cit.*, hlm.14.

masing-masing sekaligus terkait dengan komponen-komponen administratif. Adapun sistem administrasi berperan mencatat dan merekam semua proses *manajerial* secara bertahap, *periodik*, dan *akuntable*. Seluruh aktivitas manusia dalam suatu organisasi dikendalikan oleh prinsip-prinsip yang berlaku dalam manajemen.¹²⁰

Sebenarnya pusat perhatian pada manajemen peradilan pidana telah disolusikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disingkat PBB) dalam Kongres tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* Kedelapan, yang diselenggarakan di Havana, Cuba pada tahun 1990. Di dalam Resolusi Kongres PBB tersebut dikatakan di dalam Butir 19 mengenai *Management of Criminal Justice and Development of Sentencing Policies*. Di dalam pertimbangannya dikatakan, sebagai berikut :

- (a) *Only if the criminal justice system is well managed can rational change be made to improve the situation;*
- (b) *Inadequate management of the criminal justice system can result in certain practices, such as long delays before trial, that may create injustices for person whose cases are being processed by the system;*
- (c) *Satisfactory relations between different agencies of the criminal justice system can contributed to effective alocation of resources.*¹²¹

Sistem peradilan pidana merupakan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari beberapa lembaga peradilan yang menjadi sub-sub sistem pendukung dari keseluruhan sistem tersebut yang berupa organisasi birokrasi pemerintahan pelaksana dari kekuasaan negara di bidang kehakiman. Pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan melihat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan serta lembaga-lembaga peradilan lain bukan sebagai instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan

¹²⁰ M. Anton Athoillah, *Loc. Cit.*

¹²¹ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, *Op.Cit.*, hlm.xi-xii.

unsur penting yang berkaitan erat satu sama lain.¹²²

Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia yang terdiri dari lembaga-lembaga peradilan dalam kenyataannya belum menunjukkan sebagai lembaga negara yang terpadu, mandiri, berwibawa dan menjadi tempat mencari serta mendapatkan keadilan (*good judiciary*), seperti dicontohkan di dalam beberapa kasus sebagai berikut :

1. Penahanan terhadap Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya disingkat KPK) Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah yang dilakukan oleh Kepolisian karena tuduhan keduanya telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dikarenakan adanya suap terhadap keduanya.¹²³ Di dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan, sebagai berikut :

Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹²² *Ibid.*, hlm.9.

¹²³ Lihat Media Indonesia : Selasa 3 November 2009, Suara Merdeka : Kamis 10 September 2009, Kompas : Jumat 30 Oktober 2009.

Terlepas dari bersalah tidaknya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus yang bersangkutan, peristiwa sebagaimana dimaksud di atas menunjukkan adanya *ego sektoral* dan tidak dilakukannya koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disingkat POLRI) dengan KPK.

2. Perebutan kewenangan penyidikan dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korps Lalu Lintas POLRI (Korlantas Polri) antara KPK dengan POLRI.¹²⁴ Di dalam Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan, sebagai berikut :

Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002

(3).Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

(4).Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Dalam peristiwa sebagaimana dimaksud, menunjukkan adanya *instansional sentris* dan mengabaikan fungsi koordinasi yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹²⁵

3. Dalam kondisi sakit dan terbaring di ranjang, seorang nenek berusia 77 (tujuh puluh tujuh) tahun, Loeana Kanginnadhi harus menghadapi

¹²⁴ Lihat Kompas : Rabu 1 Agustus 2012, Kompas : Sabtu 4 Agustus 2012 dan Suara Merdeka : Rabu 8 Agustus 2012.

¹²⁵ Dalam Pasal 6 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa KPK mempunyai fungsi koordinasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan serta monitoring terhadap penyelenggara negara.

persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar Bali pada Selasa tanggal 26 Juni 2012.¹²⁶ Di dalam Pasal 154 ayat (6) KUHAP dikatakan, sebagai berikut :

Pasal 154 ayat (6) KUHAP

“Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.”

Di dalam KUHAP memang tidak ada satu pun pasal yang mengatur boleh/tidaknya terdakwa yang sakit dihadirkan paksa di persidangan, namun memeriksa seorang terdakwa dalam keadaan sakit di persidangan menimbulkan kesan bahwa Pengadilan tidak manusiawi. Di samping itu, di dalam peristiwa yang bersangkutan menunjukkan tidak adanya koordinasi yang baik antara lembaga penuntut umum dengan lembaga pengadilan.

4. Eksekusi terhadap Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji, yang divonis tiga tahun enam bulan penjara yang ditolak oleh terpidana yang bersangkutan sehingga tidak berhasil.¹²⁷ Masalah eksekusi juga terjadi pada hari Rabu 5 Nopember 2014, Kejaksaan Negeri Ambon melalui Kepala Seksi Pidana Khusus mengeksekusi Lodewyk Breemer, terpidana kasus korupsi anggaran Sekretariat Daerah Maluku tahun 2006 senilai Rp.15.000.000.000,-(lima belas miliar rupiah). Upaya eksekusi mantan Bendahara Biro Keuangan itu sebelumnya terhambat oleh belum adanya salinan putusan dari Mahkamah Agung Juni 2014, Lodewyk Breemer divonis 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus

¹²⁶ Lihat Suara Merdeka : Rabu 27 Juni 2012.

¹²⁷ Lihat Kompas: Kamis 25 April 2013, Kompas : Jumat 26 April 2013 dan Suara Merdeka : Sabtu 27 April 2013.

juta rupiah) oleh Mahkamah Agung. Vonis tersebut dijatuhkan atas pengajuan kasasi oleh jaksa Kejaksaan Negeri Ambon atas Putusan Pengadilan Tipikor Ambon yang membebaskan Lodewyk Breemer. Putusan Mahkamah Agung tersebut lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut dengan pidana 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan.¹²⁸

5. Ketidakprofesionalan penegak hukum dapat dilihat dari banyaknya kasus yang dikerjakan serampangan. Hal ini dapat terlihat dari tersangka yang dipaksa mengakui sesuatu yang tidak dilakukan. Hukum bukan lagi sebagai alat untuk mencari keadilan, melainkan untuk sekedar mencari kesalahan, apabila tidak diketemukan “benang merah” untuk menghubungkan seseorang yang menjadi sasaran bidik untuk dijadikan tersangka, maka diobarak-abrik lagi sisi lain yang sebenarnya hubungannya dipaksa-paksakan. Sebagai manusia biasa, aparat penegak hukum polisi, jaksa, hakim mendapatkan beban psikologis, yang memengaruhi di dalam menangani suatu perkara.¹²⁹ Fakta-fakta yang tidak dapat dipungkiri, antara lain : Kasus perkosaan Sumariyem (Sum Kuning) pada tanggal 21 September 1970¹³⁰, kasus terbunuhnya Sulaiman-Siti Haya dengan terdakwa Sengkon dan Karta pada Oktober 1977¹³¹, kasus terbunuhnya

Dice Budimuljono pada tanggal 8 September 1986 dengan terdakwa Muhammad Siradjudin (alias Pak De)¹³², kasus terbunuhnya

¹²⁸ Kompas, Kamis 6 November 2014.

¹²⁹ E.A. Pamungkas, 2010, *Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Penerbit Navila Idea, Yogyakarta, hlm. 8-12.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 27-45.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 49-55.

¹³² *Ibid.*, hlm.59-73.

Marsinah pada 9 Mei 1993¹³³, kasus terbunuhnya Fuad Muhammad Syafrudin pada tanggal 13 Agustus 1996 dengan terdakwa Dwi Sumaji alias Iwik¹³⁴, kasus terbunuhnya Heriana Syuhada pada tanggal 19 Mei 1998 dengan terdakwa Syaiful Bahri (pelaku sebenarnya) dan terdakwa Abdullah bin Andah (atas penunjukan terdakwa Syaiful Bahri)¹³⁵, kasus kerangka itu korban atas nama Alta Lakoro)¹³⁶, kasus terbunuhnya Ali Harta Winata pada tanggal 17 November 2002 dengan terdakwa Budi Harjono (anak korban)¹³⁷, kasus terbunuhnya Arni dengan terdakwa Adi bin Tuda alias Adis pada Maret 2004¹³⁸, dan masih banyak kasus lagi.

Dalam beberapa kasus tersebut di atas, apabila dicermati, maka dapat dikatakan, bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum terpadu karena tidak adanya koordinasi yang baik antar sesama subsistem pendukung sistem peradilan pidana, masih terdapat fenomena *instansional sentris* atau masih kuatnya *ego sektoral* di dalam masing-masing subsistem pendukung sistem peradilan pidana, masih terdapat adanya *maladministrasi* di dalam pelaksanaan tugas masing-masing subsistem pendukung sistem peradilan pidana. Hal-hal demikian menunjukkan, bahwa Sistem Peradilan Pidana di Indonesia belum dimanajemen secara baik, sehingga belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hal-hal demikian membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum/penulisan hukum dengan judul :

¹³³*Ibid.*, hlm.77-90.

¹³⁴*Ibid.*, hlm.109-134.

¹³⁵*Ibid.*, hlm. 95-105.

¹³⁶*Ibid.*, hlm.139-147.

¹³⁷*Ibid.*, hlm. 151-156.

¹³⁸*Ibid.*, hlm. 161-167.

REFORMASI MANAJEMEN SISTEM PERADILAN PIDANA GUNA MEWUJUDKAN PERADILAN PIDANA TERPADU, MANDIRI DAN BERWIBAWA BERLANDASKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN.

B. PERUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang penulis kemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor bagaimana yang menyebabkan reformasi manajemen sistem peradilan pidana guna mewujudkan peradilan pidana di Indonesia yang terpadu, mandiri dan berwibawa dengan berlandaskan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan belum dapat diwujudkan?
2. Bagaimana upaya-upaya yang seharusnya dilakukan guna mewujudkan reformasi sistem peradilan pidana terpadu, mandiri dan berwibawa berlandaskan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis dengan judul:

REFORMASI MANAJEMEN SISTEM PERADILAN PIDANA GUNA MEWUJUDKAN PERADILAN PIDANA TERPADU, MANDIRI DAN BERWIBAWA BERLANDASKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN bertujuan :

1. untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan reformasi manajemen sistem peradilan pidana guna mewujudkan peradilan pidana di Indonesia yang terpadu, mandiri dan berwibawa dengan berlandaskan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan itu belum dapat

diwujudkan.

2. untuk menganalisis upaya-upaya yang seharusnya dilakukan guna mewujudkan reformasi sistem peradilan pidana yang terpadu, mandiri dan berwibawa dengan berlandaskan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian hukum ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :

- a. diharapkan hasil penelitian hukum ini dapat menunjang ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana dan atau Sistem Peradilan Pidana, yang akan berguna di dalam meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. diharapkan dengan melakukan penelitian hukum ini, penulis dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang penelitian (penelitian hukum) serta penulisan karya ilmiah di bidang penelitian.

2. Manfaat Praktis :

- a. diharapkan hasil penelitian hukum ini dapat menambah informasi faktual tentang Hukum Acara Pidana dan atau Sistem Peradilan Pidana;
- b. diharapkan hasil penelitian hukum ini dapat menambah kelengkapan bahan-bahan pustaka mengenai proses peradilan pidana pada umumnya dan manajemen peradilan pidana pada khususnya;
- c. diharapkan hasil penelitian hukum ini dapat memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah, badan pembentuk peraturan perundang-undangan terutama di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tentang atau menyangkut permasalahan dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan manajemen peradilan pidana

pada khususnya.

- d. diharapkan hasil penelitian hukum ini dapat berguna bagi para para pengambil keputusan dan aparat penegak hukum sebagai bahan untuk menentukan kebijakan serta bagi orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum dan/atau proses peradilan pidana.

E. SISTEMATIKA PENULISAN DISERTASI

Dalam penyusunan disertasi ini penulis membagi dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama tentang Pendahuluan, yang terdiri dari lima subbab, yaitu : Subbab A tentang Latar Belakang Permasalahan; Subbab B tentang Perumusan Permasalahan; Subbab C tentang Tujuan Penelitian; Subbab D tentang Kontribusi Penelitian, serta Subbab E tentang Sistematika Penulisan Disertasi.

Bab Kedua tentang Landasan/Kajian Teori, terdiri dari empat subbab, yaitu : Subbab A tentang Landasan Teori dan Kerangka Konseptual, yang terdiri dari beberapa pokok bahasan, yaitu : (1).Teori Organisasi Sosial dari Suatu Sistem Peradilan Pidana; (2).Hukum dan Sistem Hukum; (3).Penegakan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana; (4).Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang Kompleks; (5).Teori Manajemen dalam Peradilan Pidana; dan (6).Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana.

Selanjutnya Subbab B tentang Kerangka Berpikir; Subbab C tentang Hipotesa; serta Subbab D tentang Penelitian yang Relevan dan Kebaruan Penelitian.

Bab Ketiga tentang Metode Penelitian, yang terdiri dari lima subbab, yaitu : Subbab A tentang Spesifikasi Penelitian; Subbab B tentang Metode Pendekatan; Subbab C tentang Metode Pengumpulan Data; Subbab D tentang Batasan Operasional Variabel Penelitian, serta Subbab E tentang Metode Analisa

dan Penyajian Data.

Bab Keempat tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari : Subbab A tentang Faktor-faktor yang Menyebabkan Lembaga/Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Belum Terpadu, Mandiri dan Berwibawa Berlandaskan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, yang terdiri dari beberapa pokok bahasan, yaitu : (1).Sistem/Lembaga Peradilan Pidana Belum Terpadu; (2).Sistem/Lembaga Peradilan Pidana Belum Mandiri; (3).Sistem/Lembaga Peradilan Pidana Belum Berwibawa; dan (4).Sistem/Lembaga Peradilan Pidana Belum Mencerminkan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.

Selanjutnya Subbab B tentang Upaya Reformasi Manajemen Sistem Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Peradilan Pidana yang Terpadu, Mandiri dan Berwibawa Berlandaskan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, yang terdiri dari beberapa pokok bahasan, yaitu : (1).Reformasi Manajemen Sistem/Lembaga Peradilan Pidana; (2).Sistem Peradilan Pidana dalam Kajian Perbandingan; dan (3).Upaya-upaya Mewujudkan Peradilan Pidana yang Terpadu, Mandiri dan Berwibawa Berlandaskan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.

Bab Kelima merupakan bagian akhir dari disertasi ini yang merupakan Bab Penutup, yang terdiri dari : Subbab A tentang Kesimpulan; Subbab B tentang Saran-saran, serta Subbab C tentang Implikasi.

BAB II

LANDASAN/KAJIAN TEORI

A. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

1. Teori Organisasi Sosial dari Suatu Sistem Peradilan Pidana

Teori berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa Latin yang berarti “perenungan”, yang berasal dari kata “*thea*” dalam bahasa Yunani yang berarti “cara atau hasil pandang” adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya.¹³⁹ Di dalam penelitian hukum guna menyusun disertasi ini, peneliti menggunakan teori-teori hukum yang masuk pada aliran neo positivisme, seperti yang dikemukakan oleh Max Weber. Max Weber di dalam buku : *The Theory of Social and Economic Organization* menyimpulkan, bahwa hukum itu cerminan rasionalitas dan otoritas dari masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Max Weber, tingkat rasionalitas suatu masyarakat akan menentukan warna hukum dalam masyarakat tersebut, yang dapat terbagi dalam tiga tingkat rasionalitas, yaitu :

a. Substantif-irasional;

Tipe yang pertama ini melekat pada masyarakat yang masih dikuasai alam pikiran mistis yang serba alamiah dan naluriah. Pada tipe rasionalitas yang substantif-irasional, hukum tampil dalam wujud yang informal-irasional. Hukum hanya berupa intuisi, tanpa aturan.

¹³⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Penerbit Setara Press, Malang, hlm. 5.

b. Substantif dengan sedikit kandungan rasional;

Tipe yang kedua ini dimiliki oleh masyarakat tradisional yang bertopang pada adat dan kebiasaan tradisional. Pada tipe yang kedua ini hukum mewajah dalam bentuk informal-rasional yaitu berupa aturan umum yang serba informal.

c. Rasional penuh.

Tipe yang ketiga ini menjadi ciri masyarakat maju dan modern. Pada tipe yang formal-rasional hukum sudah mengambil sosok dalam bentuk aturan-aturan rinci, khusus dan terkodifikasi.¹⁴⁰

Max Weber juga mengemukakan, bahwa tipe otoritas (model kekuasaan) suatu masyarakat menentukan warna hukum dalam masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tipe rasionalitas masyarakat tersebut masing-masing, sebagai berikut :

a. Tipe otoritas yang karismatik;

Otoritas ini bertumpu pada kesetiaan terhadap orang-orang yang dianggap memiliki keistimewaan spiritual dan transendental. Dalam rezim otoritas karismatik ini tidak terdapat “pembuatan hukum”, yang ada hanyalah “penemuan hukum”, itu pun lewat intuisi dan “bisikan” supranatural. Akibatnya, penerapan hukum hanya mengandalkan “kebijaksanaan” etis moral yang unik dari tokoh karismatik. Karena sifatnya sangat individual dan penuh misteri, bisa jadi penerapan hukum didasarkan pada emosi, intuisi dan rasa pribadi sang pengadil.

¹⁴⁰ Bernard L. Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.120.

b. Tipe otoritas yang tradisional;

Otoritas ini bertumpu pada kepercayaan menurut tradisi terhadap orang yang dianggap layak memimpin masyarakat. Dalam rezim otoritas tradisional ini, meski belum ada pembuatan hukum secara khusus, namun sudah ada aturan-aturan umum yang terbangun secara sosial dalam bentuk adat dan kebiasaan. Penemuan hukum sudah lebih real dan masuk akal. Sudah terdapat pedoman-pedoman umum yang siap dideduksi pada kasus-kasus konkrit. Di samping itu, secara substantif tersedia pula prinsip-prinsip dari suatu sistem sosial, seperti etika, agama, politik dan lain sebagainya. Tinggal kecermatan dan kecerdikan para pengadil untuk mendapatkan secara tepat ketentuan-ketentuan umum itu pada kasus-kasus empirik yang khas. Keputusan-keputusan terdahulu yang serupa dapat dijadikan dasar analogi bagi kasus aktual.

c. Tipe otoritas yang rasional;

Otoritas ini bertumpu pada kekuasaan formal untuk berkuasa berdasarkan kualitas dan kemampuan teknis yang dikukuhkan secara formal oleh negara. Dalam rezim legal formal ini, pembentukan hukum sudah dilakukan secara terencana dan sistematis sesuai kebutuhan. Penemuan hukum mudah dilakukan karena tinggal membuka kitab hukum, seorang aparat dapat menemukan hukum mengenai suatu kasus. Jika toh kurang jelas aturan dalam kitab hukum, dengan bantuan asas dan doktrin hukum, penegak hukum dapat melakukan interpretasi yang memungkinkan penerapan hukum secara tepat. Dalam rezim ini, penerapan hukum ditangani secara profesional oleh tenaga-tenaga terdidik yang

terbina secara khusus untuk menjalankan hukum.

Menurut Max Weber peradilan dalam hukum modern sebagaimana dapat disimak dalam pengalaman dan perkembangan di dunia barat, adalah peradilan yang harus dinilai paling rasional. Peradilan rasional adalah peradilan yang bekerja atas dasar asas-asas kerja sebuah organisasi birokrasi, yang hasilnya pada galibnya memiliki daya berlaku yang universal. Hukum Barat yang berkembang sejauh ini adalah hukum yang paling rasional karena ditangani oleh ahli-ahlinya yang profesional di bidang kehakiman dan kepengacaraan. Pengorganisasian dan penegakannya amat mengandalkan kesahihan analisis-analisis yang logis (menurut silogisme deduktif) guna menggali makna-makna dan konsep-konsep dari aturan-aturan umum yang berlaku. Dalam perkembangannya, hukum barat yang modern itu akan kian terlambangkan melalui proses-proses birokratisasi yang berlangsung di tubuh aparat-aparat negara, dan dengan demikian juga kian rasional sifatnya, dengan isi keputusan-keputusan yang didugakan kelugasan dan kepastiannya.¹⁴¹

Dengan menggunakan bagan, Max Weber menjelaskan mengenai *Typology of Forms of Law and Legal Thought*,¹⁴² sebagai berikut :

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm.121-123. Masing-masing tipe otoritas menentukan model penyelenggaraan hokum masing-masing (*law making*, *law finding* dan *law enforcement*-nya).

¹⁴² Dragan Milovanovic, 1994, *A Primer in The Sociology of Law*, Harrow and Heston Publishers, New York, USA, pg.42.

BAGAN I:

Degree of Rationality dan Degree of Formality

Degree of rationality

I.	Formal Rationality	Formal Irrationality
	Substantive Rationality	Substantive Irrationality

2. Hukum dan Sistem Hukum

Hukum menurut P. Borst sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.¹⁴³ Kantorowich sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan.¹⁴⁴ E. Utrecht sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso menyatakan, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat.¹⁴⁵ Menurut O. Noto Hamidjojo sebagaimana dikutip oleh

¹⁴³ R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.XIII, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hm.35.

Nyoman Serikat Putra Jaya, hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara, yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹⁴⁶ Menurut Oliver Wendel Holmes sebagaimana dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, hukum adalah (*law is*) *what the court will do in fact*.¹⁴⁷ Sedangkan C.F.G. Sunaryati Hartono menyatakan, bahwa hukum adalah rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik yang tertulis, maupun tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat.¹⁴⁸

Teori hukum yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman masuk ke dalam aliran neo positivisme sama halnya dengan Max Weber. Lawrence M. Friedman menyoroti masalah hukum sebagai suatu sistem (sistem hukum). Lawrence M. Friedman di dalam *The Legal System, A Social Science Perspective (Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial)* mengemukakan, bahwa hukum sebagai suatu sistem (*legal system*) merupakan suatu unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu.

Berdasarkan cara pandang dan perbedaan tujuan hukum, Lawrence M. Friedman menyatakan, bahwa hukum yang terdapat di dalam suatu sistem dapat dilihat sebagai berikut :

a. Hukum yang bersifat institusional;

Orang-orang tertentu dan institusi merupakan bagian dari sistem hukum, sehingga sistem hukum dibatasi oleh profesi yang relevan,

¹⁴⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2014, *Politik Hukum*, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro Press, Semarang, hlm. 81.

¹⁴⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2014, *Politik Hukum, Loc. Cit.*

¹⁴⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 39.

seperti hakim, pengacara, polisi, legislator, administrator, notaris dan lain sebagainya.

b. Hukum merupakan sekumpulan peraturan;

Hukum merupakan kumpulan norma-norma bersama dalam suatu masyarakat yang memiliki aturan mengenai hak dan kewajiban.

c. Hukum yang bersifat fungsional;

Salah satu fungsi hukum adalah menyelesaikan sengketa yang terjadi karena adanya konflik di antara para kelompok kepentingan, dan lain sebagainya.

d. Hukum merupakan suatu proses atau tatanan;

Lon Fuller mengungkapkan, bahwa hukum itu sebagai daya upaya untuk menundukkan perilaku manusia kepada pemberlakuan peraturan-peraturan. Philip Selznick mendefinisikan pemberlakuan peraturan-peraturan sebagai rangkuman bagi suatu sistem atau tatanan yang mengandung mekanisme khusus untuk mengesahkan peraturan-peraturan sebagai hal yang otoritatif dan untuk menjaga pembuatan peraturan dan penerapan peraturan itu dari masuknya bentuk-bentuk kontrol dan perintah yang lain.¹⁴⁹

Sistem hukum sama dengan sistem atau proses pada umumnya, di mana terdapat *input*, yaitu bahan-bahan mentah yang masuk pada satu sisi sistem tersebut. Kemudian sistem mulai *memproses* bahan-bahan yang masuk tersebut. Berikutnya, sistem menghasilkan suatu *output* berupa putusan atau ketetapan atau peraturan umum. *Output* diabaikan atau tidak bisa menghasilkan efek besar ataupun kecil di mana informasi

¹⁴⁹ Lawrrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, USA, hlm.6-12.

mengenai efek ini akan mengalir kembali ke dalam sistem tersebut. Proses demikian ini disebut sebagai *umpan balik*. Kita tidak bisa memprediksi *output* secara utuh dari struktur dan peraturan paling tidak, tidak selalu bisa.¹⁵⁰

Menurut Lawrence M. Friedman, *Struktur* sistem hukum secara keseluruhan bukan Tuhan dan juga bukan mesin. *Struktur* adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. *Substansi* (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. *Struktur* sebuah sistem adalah kerangka badannya, bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tuang-tuang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya.¹⁵¹

Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah. Sementara *substansi* tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.¹⁵²

Struktur dan *substansi* adalah komponen-komponen riil dari sebuah sistem hukum, tetapi semua itu paling jauh hanya merupakan cetak biru atau rancangan, bukan sebuah mesin yang tengah bekerja. Sistem hukum yang digambarkan semata-mata sebagai *struktur* dan *substansi formal* adalah seperti ruang pengadilan yang diam, membeku dan mandek, yang memberi nyawa dan realitas pada sistem hukum adalah dunia sosial eksternal. Sistem hukum tidak terisolasi atau terasing, ia bergantung secara mutlak pada *input-input* dari luar. Elemen sosial ini yang mencairkan kebekuan gambaran di atas dan menggerakkan sistem. Kekuatan-kekuatan sosial terus menerus menggerakkan hukum merusak di sana, memilih bagian mana dari hukum yang beroperasi dan bagian

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm.12-14.

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm.15-16.

¹⁵² *Ibid.*, hlm.16.

mana yang tidak, mengganti, memintas dan melewati apa yang muncul, perubahan-perubahan apa yang akan terjadi secara terbuka, atau diam-diam. Bagian dari kekuatan-kekuatan ini dinamakan sebagai *kultur hukum*. *Kultur hukum* adalah elemen sikap dan nilai sosial.¹⁵³

Substansi hukum dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. *Herziene Inlandsch Reglement Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44*;
- c. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie Staatsblad Tahun 1915 Nomor 723* yang berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- d. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan;
- e. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1/Drt./1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Pengadilan-pengadilan Sipil;
- f. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Izin Kepada Dokter dan Dokter Gigi;
- g. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

¹⁵³*Ibid.*, hlm.16-17.

- h. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana;
- i. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- j. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16/Prp/1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- k. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18/Prp/1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945;
- l. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer;
- m. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama;
- n. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
- o. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;
- p. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;

- q. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- r. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jis* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- s. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- t. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- u. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- v. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- w. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- x. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- y. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- z. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- aa. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

- bb. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- cc. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- dd. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- ee. dan lain sebagainya.

Adapun struktur hukum dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut :

- a. Penyidik, yang terdiri dari :
 - 1) Penyidik POLRI;
 - 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Bea dan Cukai;
 - 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - 4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Kelautan dan Perikanan;
 - 5) Penyidik Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 6) Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
 - 7) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Penuntut Umum, yang terdiri dari :
 - 1) Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2) Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, yang terdiri dari :
 - 1) Pengadilan Anak;
 - 2) Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - 3) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 - 4) Pengadilan Perikanan.
- d. Pelaksana Putusan dan Pelaksana Pidana, yang terdiri dari :
 - 1) Lembaga Pemasyarakatan;

- 2) Balai Pemasyarakatan;
- 3) Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun unsur yang ditambahkannya itu adalah : nilai-nilai dan sikap-sikap anggota masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Oleh Lawrence M. Friedman, nilai-nilai dan sikap-sikap ini dianggapnya sebagai semacam bensin yang akan menggerakkan motor tatanan hukum yang ada. Dikatakan juga, bahwa tanpa motor penggerak ini, maka pranata hukum itu akan menjadi lembaga yang mati belaka. Apabila misalnya, masyarakat mempunyai keyakinan bahwa sengketa itu harus diselesaikan dalam lingkungan yang intim dan secara tertutup, maka jelas bahwa kantor-kantor Pengadilan akan kosong dan hakim-hakim serta pengacara harus bermain kartu atau catur untuk mengisi waktunya yang kosong tersebut. Unsur nilai-nilai dan sikap-sikap inilah yang kemudian dikenal dengan nama kultur hukum.¹⁵⁴

Selanjutnya H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman menyatakan, bahwa kultur hukum, yang merupakan bagian dari kultur-kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan diterima oleh masyarakat.¹⁵⁵

Kesadaran hukum merupakan suatu nilai atau pandangan-pandangan mengenai kebaikan atau keburukan hukum yang berlaku dan yang diharapkan. Pandangan-pandangan tersebut akan diidentifikasi

¹⁵⁴ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Cet.II, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 36-37.

¹⁵⁵ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 156.

melalui beberapa indikator, seperti : (1).pengetahuan (*awareness*); (2).pemahaman (*acquaintance*); (3).sikap (*attitude*); dan (4).perilaku (*behavior*).Dengan penjelasan, sebagai berikut : (1).*Law awareness is awareness of the very fact that a certain type of behavior is regulated by law.* (2).*Law acquaintance is the amount of information a person has about the content matter of a certain normative regulation.* (3). *Legal attitude is (a).a disposition to accept some legal norm or precept because it deserves respect as a valid piece of law, or (b).a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful.*(4).*Legal behavior is legally desired behavior.*¹⁵⁶

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, perkembangan sistem hukum yang tidak lagi mendasarkan diri pada kebenaran moral, melainkan lebih pada *preskripsi-preskripsi* yang diundangkan di dalam kitab-kitab hukum oleh para penguasa sebagaimana yang terkisah di muka sesungguhnya lewat berbagai pergeseran paradigma telah melahirkan *konfigurasi* sistem hukum Barat yang ditengarai oleh kehadiran sekurang-kurangnya lima karakteristik, yaitu : (1).berupa aturan-aturan yang dinyatakan secara eksplisit dalam rumus-rumus pasal/ayat yang tertulis dan tersistematisasi (*corpus iuris*); (2).mengklaim punya otoritas sebagai satu-satunya hukum yang berlaku pada suatu wilayah *territorial* bangsa; (3).dilandasi suatu ajaran atau doktrin, bahwa hukum dalam wujudnya yang demikian itu berstatus tertinggi, mengatasi norma-norma sosial lain (*ius*) yang tidak atau belum dirumuskan dalam bentuknya yang eksplisit; (4).memiliki karakter historisitas, yang berarti bahwa hukum Barat ini selalu berada dalam suatu ruang dan waktu, yang oleh sebab itu selalu mengalami proses perubahan dialektik-dialogik secara berterusan, menuju ke kesempurnaannya yang fungsional, dalam upaya menemukan

¹⁵⁶ Soerjono Soekanto, 1988, *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm. 4-5.

keseimbangan yang tepat antara stabilitas dan fleksibilitas, seolah tak sekali-kali akan dapat bersifat *final*; dan (5).dibangun dan dikelola secara rasional dan eksklusif oleh suatu kaum professional tertentu, dan yang ditunjang oleh hadirnya suatu institusi keilmuan dan pendidikan pada tingkat *universiter*.¹⁵⁷

3. Penegakan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide tersebut merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁵⁸ Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum serta setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹⁵⁹ Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶⁰

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan *sarana penal* (hukum pidana) dan dengan menggunakan *sarana non penal* (hukum perdata dan hukum tata usaha negara). Menurut Sudarto, penegakan hukum dalam masyarakat dapat dilakukan melalui :

¹⁵⁷ Soetandyo Wignjosebroto, 2013, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Penerbit Setara Press, Malang, hlm.34-38.

¹⁵⁸ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm.15.

¹⁵⁹ *Loc. Cit.*

¹⁶⁰ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.8. Merupakan pernyataan yang terkandung dalam salah satu laporan Seminar Hukum Nasional ke-IV tahun 1979.

a. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana), misalnya :

- 1) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dan objeknya dengan sarana pengamanan atau pemberian pengawasan pada objek kriminalitas;
- 2) mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan;
- 3) penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

b. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu pemberian sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelaku kejahatan.¹⁶¹

Menurut Muladi, upaya penegakan hukum pidana dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif;

¹⁶¹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.60.

- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai dengan Pengadilan. Tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif;
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret atau *in concreto* oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.¹⁶²

Di dalam buku *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya saja;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk hukum maupun menerapkan hukum dan menegakkan hukum;
- c. Faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan merupakan esensi dari dari penegakan hukum itu sendiri. Di samping itu juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹⁶³

Berkaitan dengan penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa kebutuhan rohani dan sosial budaya yang

¹⁶² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, *Op.Cit.*, hlm.13-14.

¹⁶³ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.5-6.

mendasar yang berupa rasa aman akan perlindungan hak-hak asasi manusia, adanya jaminan perlakuan yang adil, adanya saling kepercayaan dan kasih sayang antar sesama, adanya kejujuran dan kebenaran, serta tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan di berbagai bidang kehidupan menjadi sasaran penegakan hukum. Oleh sebab itu, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan lebih bermakna.¹⁶⁴

Pada bagian lain oleh Barda Nawawi Arief dikatakan, bahwa masalah penegakan hukum dapat dilihat baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*” merupakan masalah aktual yang selalu mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum. Faktor itu dapat berupa kualitas individual (sumber daya manusia), kualitas institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana/prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum) dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya (termasuk budaya hukum masyarakat)).¹⁶⁵

Dalam usaha meningkatkan kualitas penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief paling tidak terdapat empat masalah yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. masalah kualitas SDM calon penegak hukum;
- b. masalah kualitas penegakan hukum *in abstracto* (proses pembuatan produk perundang-undangan);
- c. masalah kualitas penegakan hukum *in concreto*; dan

¹⁶⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm.18-20.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm.19-20.

- d. masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat.¹⁶⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu. Misalnya : untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu.¹⁶⁷

Dilihat dari dasar-dasar pembenaran/penjatuhan pidana yang diberikan oleh penguasa dan tujuan pemidanaan, maka terdapat tiga macam teori pemidanaan atau tiga macam aliran dengan karakteristik yang berbeda-beda, yaitu :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theory* atau *vergeldings theorieen*), yang digunakan oleh aliran klasik;
- b. Teori *relatif* atau teori tujuan (*utilitarian theory* atau *doeltheorieen*), yang digunakan oleh aliran modern;
- c. Teori gabungan, yang digunakan oleh aliran neo klasik.¹⁶⁸

Ad.a.Teori Absolut

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm.18.

¹⁶⁷ Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hlm. 11.

¹⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.10. Muladi dan Barda Nawawi Arief hanya menyebut dua macam teori pemidanaan yaitu teori absolut dan teori relatif. Berbeda dengan Lili Rosyidi yang membedakan ke dalam tiga macam yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Menurut Johannes Andenaes sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan utama/tujuan primer dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁶⁹

Teori pembalasan berpendirian bahwa pidana itu perlu dikenakan sebagai pembalasan atas apa yang telah dibuatnya yang bersifat mengganggu ketertiban masyarakat. Jika pembalasan itu ditujukan pada kesalahan yang tercela dari si pelaku, maka teori pembalasan ini disebut teori pembalasan yang bersifat subjektif. Jika ditujukan pada perbuatan si pelaku, maka disebut teori pembalasan yang bersifat objektif. Teori pembalasan subjektif dianut oleh Julius Stahl dan Immanuel Kant. Teori pembalasan objektif dianut oleh Herbert L. Packer.¹⁷⁰ Adapun tokoh-tokoh dari teori pembalasan, antara lain : Cesare Beccaria, John Kaplan, Jeremy Bentham, Johannes Andenaes, Julius Stahl, Immanuel Kant, dan lain sebagainya.

Ad.b.Teori Tujuan

Teori tujuan menganggap bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban di dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadi tujuan utamanya di samping tujuan-tujuan lainnya. Pada teori tujuan ini mendasarkan pada pemikiran, bahwa kejahatan itu menimbulkan kerugian yang

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm.10-11.

¹⁷⁰ Lili Rosyidi, 1982, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.60-62.

bersifat ideal pada masyarakat. Pada teori tujuan ini terdapat beberapa pendapat tentang cara untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁷¹ Adapun tokoh-tokoh dari teori tujuan antara lain, adalah Filippo Gramatica, Van Hamel, Enrico Ferri, Roger Hood, Marc Ancel, Hulsman, Raffaele Garofalo, dan lain-lain.

Bambang Poernomo sebagaimana dikutip Lili Rosyidi, memerinci tujuan-tujuan pembedaan sebagai berikut :

- a. Prevensi Umum, tujuan pokok pidana adalah pencegahan agar orang-orang tidak melakukan perbuatan pidana.
- b. Prevensi Khusus, tujuan pidana adalah agar yang melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- c. *vertebering van de dader*, tujuan pidana adalah untuk memperbaiki penjahat dengan *reklasering*.
- d. *onschadelijk maken de misdadiger*, pidana yang dijatuhkan bersifat menyingkirkan pelaku, baik untuk seumur hidup atau dikenakan pidana mati oleh karena tidak mungkin diperbaiki lagi.
- e. *herstel van gelenden maatschappelijk nadeel*, tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi pada masa lalu.¹⁷²

Ad.c.Teori Gabungan

Teori gabungan menggabungkan pendapat teori pembalasan dan teori tujuan. Pidana dikenakan bukan saja untuk membalas perbuatannya yang merugikan masyarakat, akan tetapi juga untuk mempertahankan ketertiban masyarakat itu sendiri. Dalam teori ini terdapat tiga aliran, yakni yang

¹⁷¹*Ibid.*, hlm.61.

¹⁷²*Ibid.*, hlm.63.

menitikberatkan pada pembalasan itu sendiri, yang menitikberatkan pada mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan yang menitikberatkan kedua-duanya secara sama.¹⁷³

Adapun tokoh-tokoh dari teori gabungan, antara lain adalah Van Bemmelen, Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick, Pellegrino Rossi, dan lain-lain.

Sudarto dalam *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, berkaitan dengan tujuan pemidanaan dapat disampaikan pendapat beberapa pakar hukum, sebagai berikut :

a. Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick

Sanksi pidana dimaksudkan untuk :

- 1) mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
- 2) mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
- 3) menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

b. Emile Durkheim

Fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create a possibility for the release of*

¹⁷³*Ibid.*, hlm.62.

emotions that are aroused by the crime).

c. Roger Hood

Sasaran pidana di samping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana juga untuk :

- 1) memperkuat kembali nilai-nilai sosial (*reinforcing social values*);
- 2) menenteramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (*allaying public fear of crime*).

d. Fouconnet

Penghukuman dalam arti pemidanaan dan pelaksanaan pidana pada hakikatnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan dirubah oleh adanya kejahatan itu (*..... the conviction and execution of the sentences is essentially a ceremonial reaffirmation of the societal values that are violated and challenged by the crime*).

e. Peter Hoefnagels

Tujuan pidana adalah untuk :

- 1) penyelesaian konflik (*conflict resolution*);
- 2) mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain keadaan perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influenceing offenders and possibly other than offenders toward more or less law conforming*

behaviour).¹⁷⁴

Dalam KUHP tujuan pemidanaan tidak dicantumkan secara eksplisit, namun secara implisit tujuan pemidanaan di samping memberikan pengimbalan juga untuk menjamin ketertiban di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, aliran yang dianut oleh KUHP adalah aliran neo klasik atau menggunakan teori gabungan dalam pemidanaan.

Pembicaraan mengenai peradilan pidana berkaitan erat dengan pembicaraan mengenai sistem karena peradilan pidana merupakan suatu sistem, sehingga disebut sebagai sistem peradilan pidana. Menurut Dewey sebagaimana dikutip Tolib Effendi, sistem adalah suatu keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan antara bagian-bagiannya.¹⁷⁵ Jadi sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.¹⁷⁶

Pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalam sistem antara lain, adalah : sistem selalu berorientasi pada tujuan; sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yakni lingkungannya (keterbukaan sistem); bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga ; masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).¹⁷⁷ Menurut Lili Rosyidi dan I.B. Wyasa Putra, ciri-ciri dari suatu sistem adalah, sebagai berikut :

¹⁷⁴ Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, “Masalah-masalah Hukum”, Edisi Khusus Th.XVII, 1987, hlm.22-23.

¹⁷⁵ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm.2.

¹⁷⁶ Tolib Effendi, 2013, *Loc. Cit.*

¹⁷⁷ Saptio Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.48.

- a. merupakan suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (*process*);
- b. masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling tergantung (*interdependence of its parts*);
- c. merupakan kesatuan elemen yang kompleks yang membentuk satu kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
- d. keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*);
- e. bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*);
- f. bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem tersebut.¹⁷⁸

Secara teoritis sistem peradilan pidana merupakan upaya pengendalian kejahatan melalui kerjasama dan koordinasi di antara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu.¹⁷⁹

Komponen-komponen utama dari sistem peradilan pidana bertanggung jawab atas fungsinya masing-masing, yaitu :

- a. fungsi penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan lain-lain;
- b. fungsi penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dan KPK;
- c. fungsi peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lain di bawahnya; dan

¹⁷⁸ Lily Rosyidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.43.

¹⁷⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum, Op. Cit.*, hlm.20.

- d. fungsi pelaksanaan putusan/pidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dan lain-lain; serta
- e. fungsi bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat.

Muladi mengemukakan, bahwa sebagai sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang sifatnya institusional maupun yang non institusional, yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar efisien dan efektif.¹⁸⁰ Pada bagian sebelumnya, Muladi menyatakan, bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pidana pelaksanaan pidana.¹⁸¹ Dalam sistem peradilan pidana ini terkandung gerak sistemik dari komponen-komponen pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.¹⁸² Gerak sistemik ini secara keseluruhan dan totalitas berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi sasaran kerja sistem peradilan pidana, yaitu sasaran jangka pendek yang berupa *resosialisasi* pelaku kejahatan, sasaran jangka menengah yang berupa pencegahan kejahatan serta sasaran jangka panjang sebagai tujuan akhir yakni kesejahteraan masyarakat.¹⁸³ Berkaitan dengan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem, Barda Nawawi Arief menyatakan, sebagai berikut :

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana terpadu yang

¹⁸⁰ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, *Op.Cit.*, hlm.21.

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm.22.

¹⁸² *Ibid.*, hlm.vii.

Lembaga Pemasyarakatan hanya merupakan salah satu lembaga penitensier, masih ada lembaga penitensier lain, seperti regu tembak, kejaksaan dan sebagainya.

¹⁸³ Muladi, 1995, *Loc.Cit.*

diimplementasikan dalam empat subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana serta kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana.¹⁸⁴

Dalam sistem peradilan pidana dikenal ada tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan normatif, pendekatan administratif dan pendekatan sosial. Pendekatan itu, sebagai berikut:

- a. Pendekatan normatif, memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
- b. Pendekatan administratif, memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.
- c. Pendekatan sosial, memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm.9.

¹⁸⁵ Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media, Jakarta, *Op. Cit.*, hlm.6-7.

Pendekatan normatif di dalam sistem peradilan pidana mengakibatkan munculnya model sistem peradilan pidana. Model-model sistem peradilan pidana dapat dibedakan dalam, antara lain :

a. *Adversary Model/Battle Model*

Peradilan pidana merupakan karena pertentangan dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan negara yang diwakili oleh penuntut umum dengan kepentingan individu pelaku tindak pidana beserta penasihat hukumnya. Herbert L. Packer sebagaimana dikutip oleh R.B. Sularto, membedakan *adversary model* dalam dua model, yaitu *crime control model* dan *due process of law model*.¹⁸⁶

1) *Crime Control Model*

Model ini menekankan pada efisiensi menanggulangi kejahatan, sehingga memunculkan kondisi diabaikannya hak-hak individu (hak-hak asasi manusia), serta digunakannya asas *presumption of guilt*. Model ini mendasarkan pada pertimbangan bahwa hukum pidana dapat mengendalikan (*to control*) kejahatan. Model ini berangkat dari asumsi bahwa pembedaan merupakan suatu keharusan dalam pengendalian kejahatan. Kritik yang dilontarkan terhadap *crime control model* adalah *the criminal sanction is assumed to be a positive guarantor of social freedom and necessary for the maintenance of public order*.¹⁸⁷

¹⁸⁶ R.B. Sularto, 2012, Orasi Ilmiah : *Pendekatan Humanistik terhadap Sistem Peradilan Pidana (Sebuah Dialektika dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Fakultas Hukum UNDIP, hlm.6

¹⁸⁷ R.B. Sularto, 2012, Orasi Ilmiah, *Loc.Cit.*

2) *Due Process of Law Model*

Dalam perkembangannya kemudian muncul konsep tentang perlindungan hak-hak asasi manusia serta adanya pembatasan kekuasaan negara dalam penyelenggaraan peradilan pidana sebagai suatu nilai yang harus ditaati bersama. Model ini dilandasi oleh asas *presumption of innocence*. Kritik yang dilontarkan terhadap *due process of law model* adalah *skepticism about the morality and utility of the criminal sanction*.¹⁸⁸

b. *Non Adversary Model*

Model ini dipakai oleh negara-negara yang tidak menggunakan *common law system*. Menurut model ini kebenaran suatu perkara pidana hanya dapat diperoleh melalui suatu penyelidikan oleh pihak pengadilan yang tidak memihak. Pembuktian ditujukan untuk mencapai kebenaran materiil dari suatu perkara pidana yang dilakukan dengan cara tidak banyaknya aturan yang membatasi proses pemeriksaan pendahuluan, keterbatasan tersangka dalam mengajukan pembelaan dan peranan hakim aktif dalam menilai kebenaran atas fakta yang diajukan di muka persidangan.¹⁸⁹

c. *Family Model*

Model ini ditawarkan oleh John Griffith, yang menekankan pada proses rekonsiliasi antara pelaku, korban, keluarga dan masyarakat. Model ini berangkat dari asumsi bahwa negara dan pelaku pada dasarnya memiliki kepentingan yang sama yang didasarkan pada kenyataan, bahwa adanya keberlangsungan

¹⁸⁸ R.B. Sularto, 2012, Orasi Ilmiah, *Loc. Cit.*

¹⁸⁹ Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, *Op. Cit.*, hlm. 43-47.

kehidupan bersama setelah pembedaan diterapkan.¹⁹⁰

d. Punitive Model of Victim's Rights dan A Non Punitive Model of Victim's Rights

Model yang ditawarkan oleh Kent W. Roach merupakan reaksi/ kritik atas *crime control model* dan *due process of law model*. Perbedaannya terletak pada *a punitive model of victim's rights* mempunyai fokus utama pada sanksi pidana dan pembedaannya, sedangkan pada *a non punitive model of victim's rights* mempunyai fokus utama pada pencegahan kejahatan dan perwujudan keadilan restoratif.¹⁹¹

Non punitive model of victim's rights pada dasarnya merupakan suatu pendekatan yang lebih bersifat humanistik terhadap sistem peradilan pidana. Pandangan ini sejalan dengan perkembangan pemikiran yang muncul di kalangan masyarakat internasional dalam menanggulangi kejahatan.¹⁹²

e. Model Keseimbangan Kepentingan

Model ini ditawarkan oleh Muladi yang mengacu pada *daad- dader strafrecht*. Model ini merupakan model yang realistik sebab memerhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.¹⁹³

¹⁹⁰ R.B. Sularto, 2012, *Op. Cit.*, hlm.7-8.

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm.8

¹⁹² R.B. Sularto, *Loc. Cit.*

¹⁹³ Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Op. Cit.*, hlm.13.

4. Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang Kompleks

Sistem Peradilan Pidana Indonesia dapat dikatakan kompleks karena terdiri dari :

- a. Peradilan Umum,¹⁹⁴ dan
- b. Peradilan Khusus¹⁹⁵ dalam lingkup Peradilan Umum, yang terdiri dari :
 - 1) Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - 2) Pengadilan Anak;
 - 3) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan
 - 4) Pengadilan Perikanan.

Ad.a.Peradilan Umum

Proses penanganan perkara pidana diawali dengan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik. Setelah menemukan tersangka pelaku tindak pidananya, dilanjutkan dengan proses penyidikan oleh Penyidik. Dalam proses penyidikan, Penyidik sudah dapat menggunakan upaya-upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya. Penyidik dengan dibantu Penyidik Pembantu membuat Berita Acara Pemeriksaan (untuk

¹⁹⁴ Di dalam UU Negara Rep. Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan ada empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 18, yang berbunyi sebagai berikut :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

¹⁹⁵ Di dalam Pasal 27 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikatakan, sebagai berikut :

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.”

Di dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan, sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

selanjutnya disingkat BAP) atau Berkas Perkara yang kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara pidana yang merupakan kompetensi Peradilan Umum terdapat beberapa Penyidik mandiri,¹⁹⁶ seperti :

- 1) Penyidik POLRI yang oleh KUHAP ditempatkan sebagai penyidik utama. Di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dikatakan, bahwa Penyidik adalah :
 - a) pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sebenarnya KUHAP bermaksud untuk mendudukan Penyidik POLRI sebagai penyidik tunggal, namun pada akhirnya muncul beberapa instansi penyidik yang bersifat mandiri. Pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP disebutkan adanya penyidik pegawai negeri sipil tertentu (untuk selanjutnya disingkat PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁹⁷ Undang-undang khusus yang terkadang bersifat administrative ini banyak memunculkan PPNS-PPNS, seperti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Negara Republik Indonesia

¹⁹⁶ Istilah “penyidik mandiri” menunjukkan bahwa lembaga yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak harus melakukan koordinasi dengan lembaga lain yang mempunyai kewenangan sama sebagai subordinat. “Penyidik tidak mandiri” di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus melakukan koordinasi dengan lembaga lain yang mempunyai kewenangan sama sebagai subordinat, yang dalam hal ini berarti di bawah koordinasi Penyidik POLRI sebagai penyidik utama menurut KUHAP.

¹⁹⁷ Bambang Dwi Baskoro, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.190.

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,¹⁹⁸ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, Penyidik POLRI menjadi koordinator dan pengawas terhadap aktivitas kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS-PPNS tersebut di atas.¹⁹⁹

- 2) PPNS Kepabeanan dan Cukai, merupakan PPNS yang pada mulanya oleh KUHAP ditempatkan sebagai penyidik tidak mandiri karena harus menyampaikan BAP ke Penyidik POLRI terlebih dahulu sebelum ke Penuntut Umum. Kemudian, berdasarkan Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *jo* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *jo* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukaiserta Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan di atas, PPNS Kepabeanan dan Cukai memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya langsung ke Penuntut Umum.

¹⁹⁸ Sudah diganti dengan UU Negara Rep. Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁹⁹ UU Negara Rep. Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membentuk PPNS Lingkungan yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya melakukan koordinasi dengan Penyidik POLRI (lihat Pasal 94 ayat (3), (4) dan (5) UU Negara Rep. Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

- 3) PPNS Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- 4) PPNS Kelautan dan Perikanan;
- 5) Penyidik Perwira TNI AL, yang berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pasal 31 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, serta Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, menjadi penyidik tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan sebagaimana dimaksud oleh undang-undang tersebut di atas.
- 6) Penyidik Kejaksaan, yang berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak-tindak pidana khusus sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7/Drt/Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah mendapatkan berkas perkara dari Penyidik, Jaksa penuntut umum memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut. Apabila berkas perkara tersebut dianggap kurang lengkap, maka berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik dengan disertai petunjuk apa-apa yang harus dilengkapi dalam tenggang waktu yang

telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu 14 (empat belas) hari.²⁰⁰ Apabila berkas perkara dianggap sudah lengkap, maka Jaksa penuntut umum akan membuat Surat Dakwaan atau Catatan Penuntut Umum.²⁰¹ Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan cara mendaftarkannya ke Register Perkara yang bersangkutan.

Ketua Pengadilan Negeri setelah memeriksa berkas perkara, menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan hari sidang dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum memanggil pihak-pihak²⁰² untuk dapat hadir pada hari sidang yang bersangkutan. Setelah melalui proses pembuktian, majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang selanjutnya apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dilaksanakan oleh Jaksa dan kemudian terpidana menjalani pidananya/melaksanakan apa yang ditetapkan di dalam amar putusan hakim. Pada tahap pelaksanaan putusan terdapat lembaga hakim pengawas dan pengamat pelaksanaan putusan (Kimwasmat).

Keterpaduan sub-sub sistem di dalam sistem peradilan pidana dapat digambarkan dengan bagan, sebagai berikut (Lihat Bagan II dan Bagan III):

²⁰⁰ Di dalam teori hukum acara pidana tindakan ini dikenal dengan istilah *prapenuntutan*.

²⁰¹ Berdasarkan KUHAP terdapat 3 (tiga) macam cara melakukan penuntutan terhadap perkara pidana/jenis perkara, yaitu :

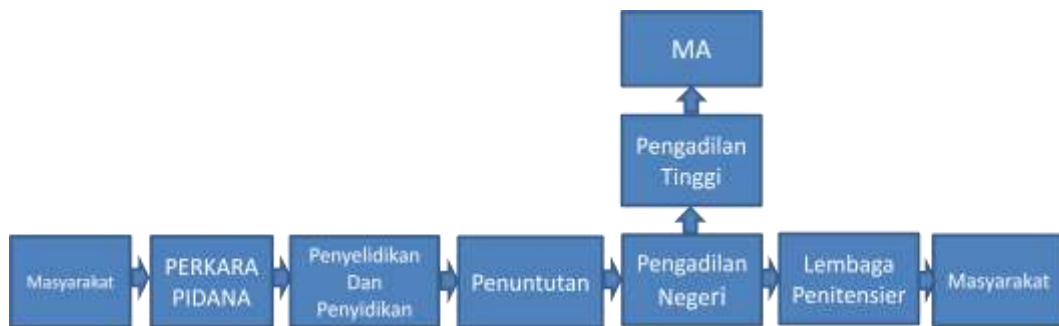
- a. perkara cepat, yang terdiri dari perkara cepat pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dan perkara cepat tindak pidana ringan;
- b. perkara singkat; dan
- c. perkara biasa.

Di dalam perkara biasa jaksa penuntut umum membuat Surat Dakwaan, di dalam perkara singkat jaksa penuntut umum membuat Catatan Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana yang Didakwakan, dalam perkara cepat tindak pidana ringan penyidik atas kuasa penuntut umum melakukan penuntutan dan dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu penyidik melakukan penuntutan.

²⁰² Yang dimaksud dengan “pihak-pihak” dalam hal ini adalah terdakwa/para terdakwa, saksi-saksi, termasuk saksi korban, maupun saksi ahli.

BAGAN II

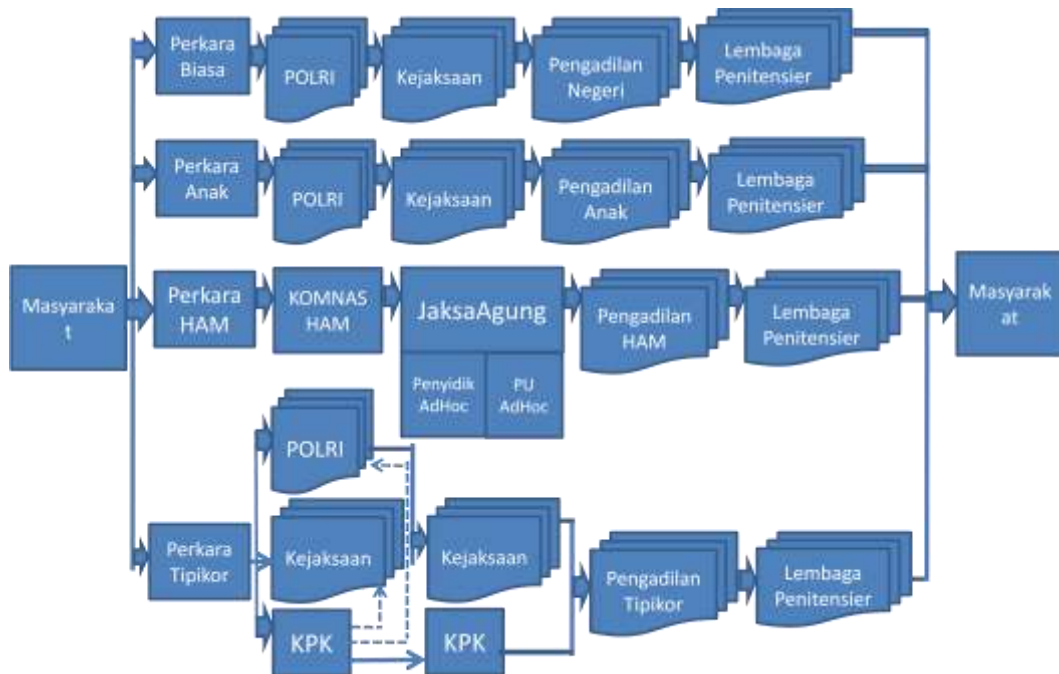
SISTEM PERADILAN PIDANA YANG TERPADU 1



NB: - masuknya perkara pidana dari masyarakat melalui empat pintu, yaitu : tertangkap tangan, laporan, penganduan dan diketahui sendiri oleh penyidik.

BAGAN III

SISTEM PERADILAN PIDANA YANG TERPADU 2



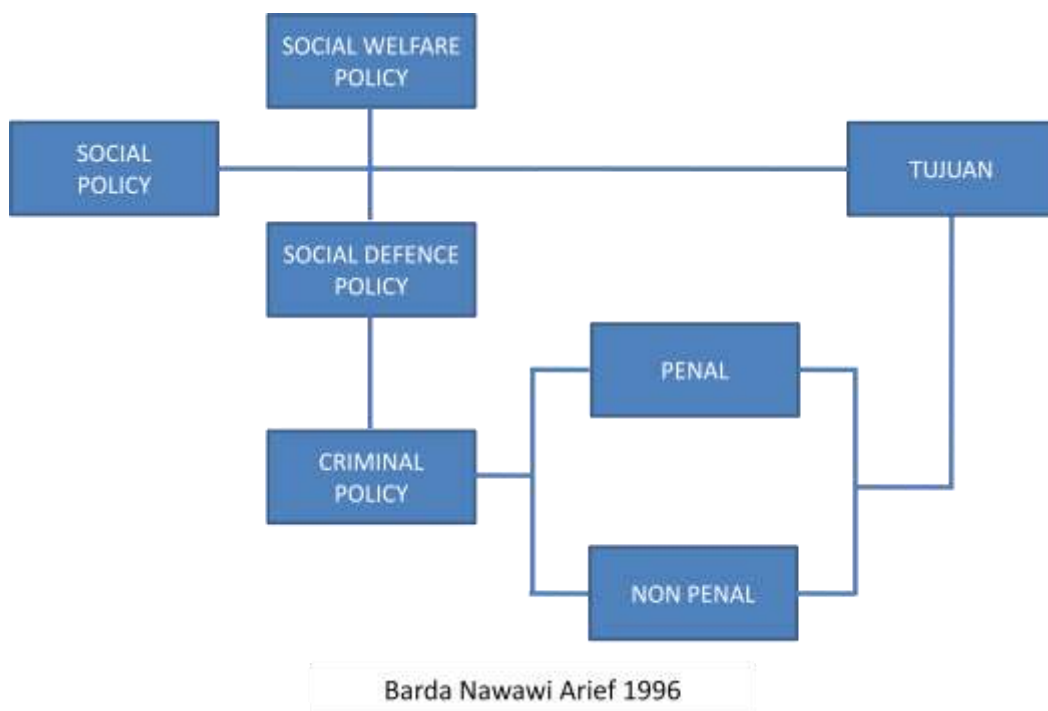
Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Umum

NB : - pada beberapa instansi ada instansi vertikal di atasnya.

- pada lembaga penitensier terdapat beberapa institusi yang diberi kewenangan terhadap jenis pidana masing-masing.

Ada keterkaitan antara kebijakan penegakan hukum pidana dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan kesejahteraan masyarakat di dalam suatu sistem peradilan pidana. Dengan menggunakan bagan, keterkaitan antara *social defence policy* dan *social welfare policy* dengan *criminal policy* dapat dijelaskan, sebagai berikut :

BAGAN IV
HUBUNGAN ANTARA SOCIAL WELFARE POLICY,
SOCIAL DEFENCE POLICY DENGAN CRIMINAL POLICY



Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : 1996 : 3-4

Ad.b.1).Pengadilan HAM

Merupakan suatu prestasi negara bahwa amanat Pasal 104 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia,²⁰³ dalam waktu 1 (satu) tahun melahirkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan hanya dalam waktu sekitar 2 (dua) tahun telah dapat membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disingkat Pengadilan HAM) dan sudah dapat mulai melaksanakan tugasnya menyusul Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2001 tanggal 12 Januari 2002 tentang Hakim Ad Hoc. Menyusul pelantikan Hakim HAM Ad Hoc Tingkat Pertama tanggal 31 Januari 2002, kemudian Jaksa Agung Republik Indonesia melalui keputusan Jaksa Agung Nomor Kep.092/A/02/2002 tertanggal 7 Februari 2002 telah mengangkat sejumlah 24 (dua puluh empat) orang sebagai Jaksa Ad Hoc. Selanjutnya, penyerahan perkara oleh Jaksa kepada Pengadilan HAM tanggal 21 Februari 2002, dan pada tanggal 14 Maret 2002 Pengadilan HAM memulai persidangan perkara pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste (Timor Timur).²⁰⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran

²⁰³ Pasal 104 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan :

- (1). Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum.
- (2). Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (3). Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

²⁰⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5-6 dan 34.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan pelaksana dari Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia). Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan HAM terdapat 2 (dua) macam Pengadilan HAM, yaitu :

- 1) Pengadilan HAM Permanen (Pasal 4 *jo* Pasal 45 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia);
- 2) Pengadilan HAM *Ad Hoc* (Pasal 4 *jo* Pasal 43 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).²⁰⁵

Adapun kompetensi absolut dari Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM *Ad Hoc* adalah Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM *Ad Hoc* berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana berupa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang meliputi :

- 1) kejahatan genosida (*genocide crime*);
- 2) kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).²⁰⁶

Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disingkat Komnas HAM) yang kemudian setelah melakukan penyelidikan²⁰⁷ akan membuat berkas perkara atau BAP. Selanjutnya BAP tersebut diserahkan kepada Jaksa Agung selaku Penyidik/Penyidik *Ad Hoc*. Setelah memeriksa kelengkapan berkas perkara, Penyidik/Penyidik *Ad Hoc* dapat menyatakan berkas perkara sudah lengkap atau belum. Apabila Penyidik/Penyidik *Ad Hoc* menganggap BAP belum lengkap, maka ia

²⁰⁵ Bambang Dwi Baskoro, 2011, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.25-26.

²⁰⁶ *Ibid.*, hlm.26-27.

²⁰⁷ Dalam melakukan penyelidikan Komnas HAM dapat membentuk Tim *Ad Hoc* Penyelidik yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat setempat.

mengembalikan BAP tersebut kepada Penyelidik dengan disertai petunjuk apa-apa yang harus dilengkapi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.²⁰⁸ Apabila BAP dianggap sudah lengkap, maka Penyelidik mulai melakukan proses penyidikan di mana ia sudah bisa melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan lain sebagainya. Setelah itu BAP diserahkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum atau kepada Penuntut Umum *Ad Hoc* untuk dibuatkan Surat Dakwaan. Dalam hal Penyelidik tidak menemukan bukti yang cukup, maka Jaksa Agung selaku Penyelidik harus mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dalam hal korban atau keluarga korban sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga tidak dapat menerima SP3 tersebut, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum/Penuntut Umum *Ad Hoc* melimpahkan berkas perkara dengan cara mendaftarkan perkara tersebut ke Pengadilan HAM atau Pengadilan HAM *Ad Hoc* yang berwenang.²⁰⁹ Pengadilan HAM atau Pengadilan HAM *Ad Hoc* yang berwenang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan membentuk majelis hakim yang terdiri dari 2 (dua) hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*. Setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dilaksanakan oleh Jaksa, yang pelaksanaannya diawasi oleh Kimwasmat.

²⁰⁸ Dalam teori hukum acara pidana, tindakan ini dapat disebut dengan istilah *prapenyidikan* dengan menggunakan analog terhadap tindakan yang disebut *prapenuntutan*.

²⁰⁹ Pengadilan HAM *Ad Hoc* memeriksa dan memutus perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (lihat Pasal 43 ayat (1) UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Pengadilan HAM *Ad Hoc* dibentuk di Pengadilan HAM yang bersangkutan dengan wilayah hukum sama dengan Pengadilan HAM permanennya.

Ad.b.2).Pengadilan Anak

Penyelenggaraan peradilan bagi anak-anak telah lama berjalan dalam sistem dan tata peradilan Indonesia, termasuk perlakuan-perlakuan khusus bagi anak-anak tersebut. Di dalam KUHP (Pasal 45, Pasal 46 dan pasal 47 KUHP) dijumpai beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak. Demikian pula di dalam reglemen kepenjaraan (Pasal 36 dan Pasal 59 ayat (3)), reglemen pendidikan paksa (Stb. 1917 No. 741) dan pemasyarakatan (Pasal 18 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Pemasyarakatan) telah mengatur perlakuan khusus bagi anak-anak.²¹⁰

Pengadilan Anak merupakan pelaksanaan dari amanah internasional sebagaimana diharapkan di dalam instrumen-instrumen internasional seperti *Declaration of The Rights of the Child*, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, *Convention of The Rights of the Child*, *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*, dan lain-lain serta pelaksanaan dari amanah nasional sebagaimana diharapkan dalam instrumen-instrumen nasional seperti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara

²¹⁰ Bagir Manan dkk, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 4.

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Setelah mengalami pembahasan yang amat pelik di Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, maka pada tanggal 3 Januari 1997 lahirlah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.²¹¹ Pada tanggal 30 Juli 2012 telah diundangkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.²¹²

Istilah “Pengadilan Anak” sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diganti dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana Anak” sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana (Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Sedangkan, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang

²¹¹ Bambang Dwi Baskoro, 2012, *Pengadilan Anak di Indonesia (Suatu Pengantar dan Reorientasi)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.81.

²¹² *Ibid.*, hlm.83.

Sistem Peradilan Pidana Anak).²¹³ Berdasarkan ketentuan Pasal 108 dan Pasal 107 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini berlaku efektif mulai tanggal 30 Juli 2015.

Penyidikan perkara yang pelakunya anak di bawah umur dilakukan oleh Penyidik Anak, yang dalam hal ini ada kewajiban Penyidik untuk melakukan diversifikasi²¹⁴ dengan cara melakukan mediasi dengan para pihak yang bersangkutan. Menurut Paulus Hadisuprpto, diversifikasi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi.²¹⁵ Menurut *Black's Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Paulus Hadisuprpto, *diversion is a disposition of criminal defendant either before or after adjudication of guilt in which the court directs the defendant to participate in work or educational program as part of probation.*²¹⁶ Menurut Kenneth Polk sebagaimana dikutip oleh Paulus Hadisuprpto, *diversion as program and practices*

²¹³ Dalam Pasal 1 butir ke-3 UU No.11 Tahun 2012 tentang SPP Anak, dikatakan :
“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Dalam Pasal 1 butir ke-4 UU No.11 Tahun 2012 tentang SPP Anak, dikatakan :

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Dalam Pasal 1 butir ke-5 UU No.11 Tahun 2012 tentang SPP Anak, dikatakan :

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

²¹⁴ Yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

²¹⁵ Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 131.

²¹⁶ Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Penerbit Selaras, Malang, hlm. 167.

*which are employed for young people who have initial contact with the police, but are diverted from the traditional juvenile justice process before children's court adjudication.*²¹⁷

Dalam hal diversi berhasil, maka penyidikan terhadap kasus yang bersangkutan tidak dilanjutkan. Dalam hal diversi gagal, maka penyidikan terhadap kasus yang bersangkutan dilanjutkan. Dalam hal penyidikan dilanjutkan, sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan kepada pejabat pembimbing kemasyarakatan terlebih dahulu. Dalam proses penyidikan, penyidik anak membuat BAP atau berkas perkara.

Selanjutnya berkas perkara yang telah dibuat oleh Penyidik Anak diserahkan kepada Penuntut Umum Anak. Dalam hal berkas perkara dianggap belum lengkap, maka Penuntut Umum Anak mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Anak dengan disertai petunjuk apa-apa yang harus dilengkapi. Dalam hal berkas perkara sudah lengkap, maka Penuntut Umum Anak melakukan diversi dengan memanggil para pihak yang bersangkutan. Dalam hal diversi berhasil, maka kasus tersebut dihentikan. Namun apabila diversi gagal, maka Penuntut Umum Anak membuat Surat Dakwaan yang kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Anak yang berwenang.

Setelah memeriksa berkas perkara Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan Hakim/Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut adalah Hakim Anak. Hakim Ketua Sidang melakukan diversi dengan cara melakukan mediasi dengan para pihak yang bersangkutan. Dalam hal diversi berhasil, Hakim Ketua Sidang menetapkan penghentian perkara. Namun, apabila diversi gagal, Hakim Ketua Sidang akan menetapkan

²¹⁷ Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Loc. Cit.

hari sidang dan memerintahkan Penuntut Umum Anak untuk menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan pada hari sidang yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan terhadap anak dilakukan dengan menghadirkan orang tua/wali anak yang bersangkutan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum serta Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan. Pemeriksaan terhadap anak dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dalam suasana kekeluargaan. Namun, putusan hakim harus dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan akan dilaksanakan oleh Jaksa dan pelaksanaannya diawasi oleh Kimwasmat.

Pada sistem peradilan pidana anak ini dibentuk beberapa lembaga baru dan/ atau lembaga lama yang disesuaikan dengan sistem peradilan pidana anak dengan diberi tugas dan kewenangan baru atau diberi nama baru, seperti :

- 1) Pembimbing Kemasyarakatan, adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Pasal 1 butir ke-13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- 2) Pekerja Sosial Profesional, adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak (Pasal 1 butir ke-14 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

- 3) Tenaga Kesejahteraan Sosial, adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara professional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan social anak (Pasal 1 butir ke-15 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- 4) Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya (Pasal 1 butir ke-20 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Lembaga ini menggantikan kedudukan Lembaga Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disingkat LAPAS) Anak.
- 5) Lembaga Penempatan Anak Sementara, yang selanjutnya disingkat LPAS, adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung (Pasal 1 butir ke-21 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Lembaga ini menggantikan kedudukan Rumah Tahanan Negara (untuk selanjutnya disingkat RUTAN) Anak.²¹⁸
- 6) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat LPKS, adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak (Pasal 1 butir ke-22 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).²¹⁹
- 7) Balai Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Bapas, adalah unit

²¹⁸ Rumah Tahanan (RUTAN) Khusus Anak selama ini belum ada, sehingga anak yang menjalani masa penahanannya ditempatkan pada ruang tersendiri terpisah dari tahanan dewasa, yang terkadang dititipkan di LAPAS Anak.

²¹⁹ Yang dimaksud dengan “Anak” di sini adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (lihat Pasal 1 butir ke-3 UU No.11 Tahun 2012 tentang SPP Anak).

pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan (Pasal 1 butir ke-24 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).²²⁰

Anak yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebut sebagai Anak Didik Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 butir ke-8 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

- 1) Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

²²⁰ Balai Pemasyarakatan sudah dilembagakan berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Di dalam Pasal 1 butir ke-4 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan Balai Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Adapun yang dimaksud dengan Klien Pemasyarakatan menurut Pasal 42 ayat (1) UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah terdiri dari :

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

- 3) Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Istilah-istilah anak pidana, anak negara dan anak sipil di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak digunakan lagi.

Ad.b.3).Pengadilan Tipikor

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi (Pasal 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dikatakan, sebagai berikut :

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a) tindak pidana korupsi;
- b) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c) tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Terhadap perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi,

penyelidikan dan penyidikannya dapat dilakukan oleh :

- 1) Penyelidik dan Penyidik Kejaksaan;
- 2) Penyelidik dan Penyidik POLRI;
- 3) Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya disingkat KPK), yang berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.²²¹

Dalam tahap penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyerahkan perkara tersebut kepada Penyidik POLRI atau Penyidik Kejaksaan untuk dilakukan penyidikan. Berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik POLRI atau Penyidik Kejaksaan selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan yang untuk itu dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas perkara. Apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas perkara belum lengkap, maka berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik dengan disertai petunjuk apa-apa yang harus dilengkapi. Apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas perkara sudah lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum segera membuat Surat Dakwaan terhadap perkara tersebut. Sedangkan perkara yang disidik oleh KPK, berkas perkara dari Penyidik KPK diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum KPK yang

²²¹ Pasal 6 UU No.30 Tahun 2002 berbunyi, sbb:

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

untuk itu dibuatkan Surat Dakwaan.

Selanjutnya perkara tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh Kejaksaan maupun oleh KPK dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disingkat Pengadilan Tipikor) yang untuk itu diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim *Ad Hoc* dan Hakim Karir. Setelah melalui proses pembuktian Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang setelah memperoleh kekuatan hukum tetap akan dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan RI dengan pengawasan oleh Kimwasmat.

5. Teori Manajemen dalam Peradilan Pidana

Cara bangsa-bangsa di dunia ini berhukum berbeda-beda, sebagaimana dipetakan oleh Max Weber yaitu melalui tahap-tahap. Prinsip yang mendasari pentahapan tersebut adalah tingkat formalisasi dan rasionalisasi hukumnya : (1).substantive irrational; (2).formal irrational; (3).substantive rational; dan (4).formal rational. Puncak perkembangan hukum adalah pada saat menjadi formal dan rasional.²²²

Sebagaimana dikatakan oleh Max Weber, bahwa peradilan rasional adalah peradilan yang bekerja atas dasar asas-asas kerja sebuah organisasi birokrasi. Berkaitan dengan pengelolaan organisasi birokrasi, maka di dalamnya terkandung aspek manajemen yang menurut G.R. Terry, manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dengan didukung oleh sumber-sumber daya

²²² Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 42.

lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan di mana terdapat dua sistem yang selalu ada di dalam manajemen, yaitu sistem organisasi dan sistem administrasi.

Menurut Satjipto Rahrdjo, penggunaan istilah administrasi keadilan memungkinkan kita untuk mengamati prosesnya secara lebih baik mulai dari awal sampai dengan akhirnya dan bahkan melibatkan juga faktor interaksi dengan lingkungan, umpan balik dan lain sebagainya.²²³ Berangkat dari berbagai pendapat di muka, berkaitan dengan aspek immateriil dari sistem hukum khususnya dalam hal ini adalah sistem peradilan pidana terdapat aspek manajerial di dalamnya. Reformasi dapat diarahkan pula pada reformasi manajemen peradilan pidana yang selama ini belum tertata secara efektif dan efisien. Menurut Richard L. Daft, manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya-sumber daya organisasional.²²⁴ Mary Parker Follet sebagaimana dikutip oleh M. Anton Atoillah mengartikan manajemen sebagai suatu seni karena untuk melakukan suatu pekerjaan dibutuhkan keterampilan khusus.²²⁵ Harold Koontz dan Cyril O' Donnel sebagaimana dikutip oleh M. Anton Atoillah mengartikan manajemen sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.²²⁶ James A.F. Stoner sebagaimana dikutip oleh M. Anton Atoillah mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya dari

²²³ Satjipto Rahrdjo dalam *Bantuan Hukum Sebagai Sarana Pemerataan Keadilan* dalam Muladi dan Sulaiman Mubarak, 1984, *Masalah Bantuan Hukum Oleh Pegawai Negeri*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 44.

²²⁴ Richard L. Daft, 2008, *New Era of Management*, Cengage Learning, New York, USA., Terj. Tita Maria Kanita, *Era Baru Manajemen*, Penerbit Salemba, Jakarta, 2010, hlm.6.

²²⁵ M. Anton Atoillah, 2010, *Dasar-dasar Manajemen, Op. Cit.*, hlm.16.

²²⁶ M. Anton Atoillah, 2010, *Dasar-dasar Manajemen, Loc.Cit.*

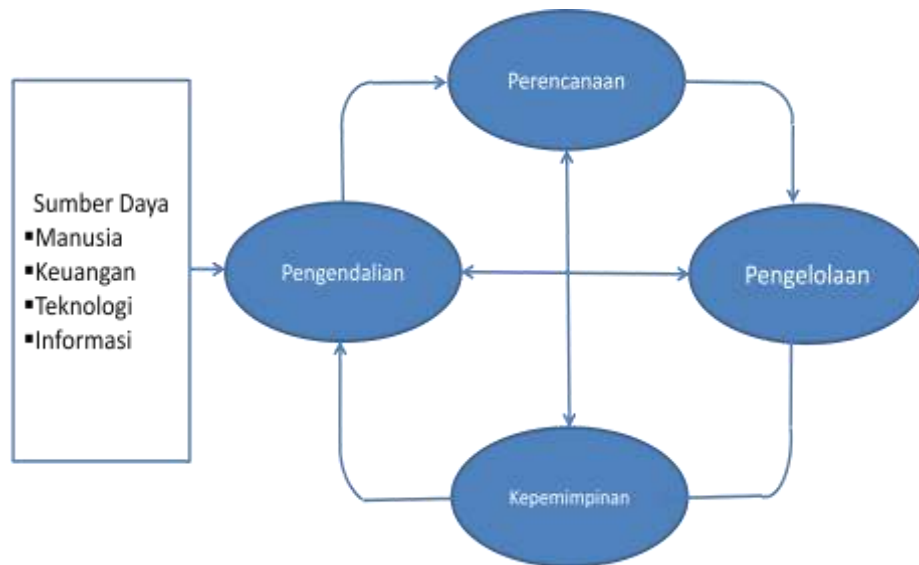
organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.²²⁷ Dengan mengutip pendapat Lawrence A. Appley dan Oey Liang Lee, M. Anton Athoillah menjelaskan, bahwa sebagai seni dan ilmu, dalam manajemen terdapat strategi memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam manajemen terdapat teknik-teknik yang kaya dengan nilai-nilai estetika kepemimpinan dalam mengarahkan, memengaruhi, mengawasi dan mengorganisasikan semua komponen yang saling menunjang untuk tercapainya tujuan yang dimaksudkan.²²⁸

Fungsi manajemen dalam suatu kelembagaan dapat diterangkan dengan bagan sebagaimana dimaksud di bawah ini :

²²⁷ M. Anton Athoillah, 2010, *Dasar-dasar Manajemen, Loc.Cit.*

²²⁸ M. Anton Athoillah, 2010, *Dasar-dasar Manajemen, Loc.Cit.*

BAGAN V
FUNGSI MANAJEMEN DI DALAM SUATU KELEMBAGAAN



Richard L.Daft

Era Baru Manajemen: 2010: 7

Di dalam pengertian manajemen terdapat aktivitas yang saling berhubungan baik dari sisi fungsionalitasnya maupun dari sisi tujuan yang ditargetkan sebelumnya, yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut :

- a) organisasi sebagai wadah utama adanya manajemen;
- b) manajer, yang memimpin dan memikul tanggung jawab penuh dalam organisasi;
- c) aturan main dalam organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d) tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya;
- e) perencanaan yang di dalamnya mengandung berbagai program yang akan dilaksanakan;

- f) pengarahan yang memberikan jalan kepada sumber daya manusia yang ada dalam organisasi;
- g) teknik-teknik dan mekanisme pelaksanaan kegiatan organisasi;
- h) pengawasan terhadap semua aktivitas organisasi agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan;
- i) sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan perencanaan;
- j) penempatan personalitas sesuai dengan keahlian atau profesionalitas pekerjaan masing-masing;
- k) evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan; dan
- l) pertanggungjawaban akhir dari semua aktivitas yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajiban personal organisasi.²²⁹

Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian pendahuluan, bahwa di dalam pengertian manajemen terdapat sistem administrasi dan sistem organisasi, sehingga dalam penulisan ini menggunakan pendekatan manajemen administratif dan pendekatan manajemen birokratis.

a. Pendekatan manajemen administratif.

Menurut Ulber Silalahi, pendekatan manajemen administratif disebut juga pendekatan proses manajemen (*management process approach*), pendekatan manajemen umum (*general management approach*), teori manajemen administratif (*administrative management theory*), pendekatan proses universal (*universal process approach*), pendekatan fungsional (*functional approach*) atau pendekatan prinsip-

²²⁹ *Ibid.*, hlm.16-17.

prinsip administratif (*administrative principle approach*).²³⁰

Menurut Robert Kreitner sebagaimana dikutip oleh Ulber Silalahi, manajemen proses adalah sistem manajemen tradisional yang menitikberatkan pada manajer dan tindakannya daripada struktur organisasi secara menyeluruh serta pegawai.²³¹ Sedangkan menurut Kathryn M. Bartol dan David C. Martin sebagaimana dikutip oleh Ulber Silalahi, manajemen administratif adalah suatu pendekatan yang berpusat pada prinsip-prinsip yang dapat digunakan oleh manajer untuk koordinasi kegiatan internal dari organisasi.²³²

Berkaitan dengan pendekatan manajemen administratif, Ulber Silalahi dengan mengutip pendapat Henry Fayol mengemukakan empat pokok pikiran sebagaimana dimaksud di dalam buku *Industrial and General Administration* yang salah satunya adalah Prinsip-prinsip Manajemen. Terdapat 14 (empat belas) prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol, sebagai berikut :

- 1).Adanya pembagian kerja (*division of work*);
- 2).Adanya wewenang dan tanggung jawab (*authority dan responsibility*);
- 3).Adanya disiplin (*discipline*);
- 4).Adanya kesatuan perintah (*unity of command*);
- 5).Adanya kesatuan arah (*unity of direction*);
- 6).Adanya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi (*subordination of individual to the general interests*);

²³⁰ Ulber Silalahi, 2011, *Asas-asas Manajemen*, Penerbit Refika Aditama, Bandung., hlm.87. Menurut Ulber Silalahi pendekatan ini dipopulerkan kembali pada kurun waktu 1960-an oleh antara lain George R.Terry serta Koontz and O'Donnel.

²³¹ Ulber Silalahi, 2011, *Asas-asas Manajemen*, Loc.Cit.

²³² Ulber Silalahi, 2011, *Asas-asas Manajemen*, Loc. Cit.

- 7).Adanya imbalan (*remuneration*);
- 8).Adanya sentralisasi (*centralization*);
- 9).Adanya rantai skalar (*scalar chain*);
- 10).Adanya keteraturan (*order*);
- 11).Adanya keadilan dalam keseimbangan (*equity in equally*);
- 12).Adanya stabilitas masa jabatan personalia (*stability of tenure of personel*);
- 13).Adanya prakarsa (*initiative*); dan
- 14).Adanya semangat korps (*esprit's de corps*).²³³

Menurut Ulber Silalahi, keempat belas prinsip tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga prinsip manajemen utama, yaitu :

- 1) Prinsip-prinsip Struktural (*structural principles*) yang terdiri atas pembagian kerja, kesatuan arah, sentralisasi, otoritas, dan hirarki.
 - 2) Prinsip-prinsip Proses (*process principles*) yang terdiri atas keadilan, disiplin, remunerasi, kesatuan komando, dan mengutamakan kepentingan umum.
 - 3) Prinsip-prinsip Hasil Akhir (*end-result principles*) yang terdiri atas keteraturan, stabilitas, inisiatif dan solidaritas kelompok.²³⁴
- b. Pendekatan manajemen birokratis.

Pendekatan manajemen birokratis (*bureaucratic management approach*) atau disebut juga sebagai *the structural approach* dipelopori oleh Max Weber. Istilah birokrasi berasal dari bahasa Jerman “*buro*” yang

²³³ *Ibid.*, hlm. 88-91.

²³⁴ *Ibid.*, hlm. 91.

berarti kantor yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi organisasi besar yang bekerja berdasarkan dasar-dasar rasional. Menurut Don Hellriegel dan John W. Slocum sebagaimana dikutip oleh Ulber Silalahi, pendekatan manajemen birokratis adalah suatu pendekatan manajemen ideal untuk organisasi besar yang menekankan pada aturan-aturan, seperangkat hirarki, pembagian kerja yang jelas dan tuntas, mengikuti prosedur-prosedur serta menitikberatkan pada struktur keorganisasian secara menyeluruh.²³⁵ Menurut Ulber Silalahi dengan mengutip pendapat dari Don Hellriegel dan J. W. Slocum serta Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, manajemen birokrasi menggambarkan suatu cetak biru rasional tentang bagaimana organisasi harus beroperasi dalam cara rasional.²³⁶

Tipe ideal organisasi menurut Max Weber sebagaimana dikutip oleh Ulber Silalahi harus memiliki sejumlah karakteristik dasar, sebagai berikut :

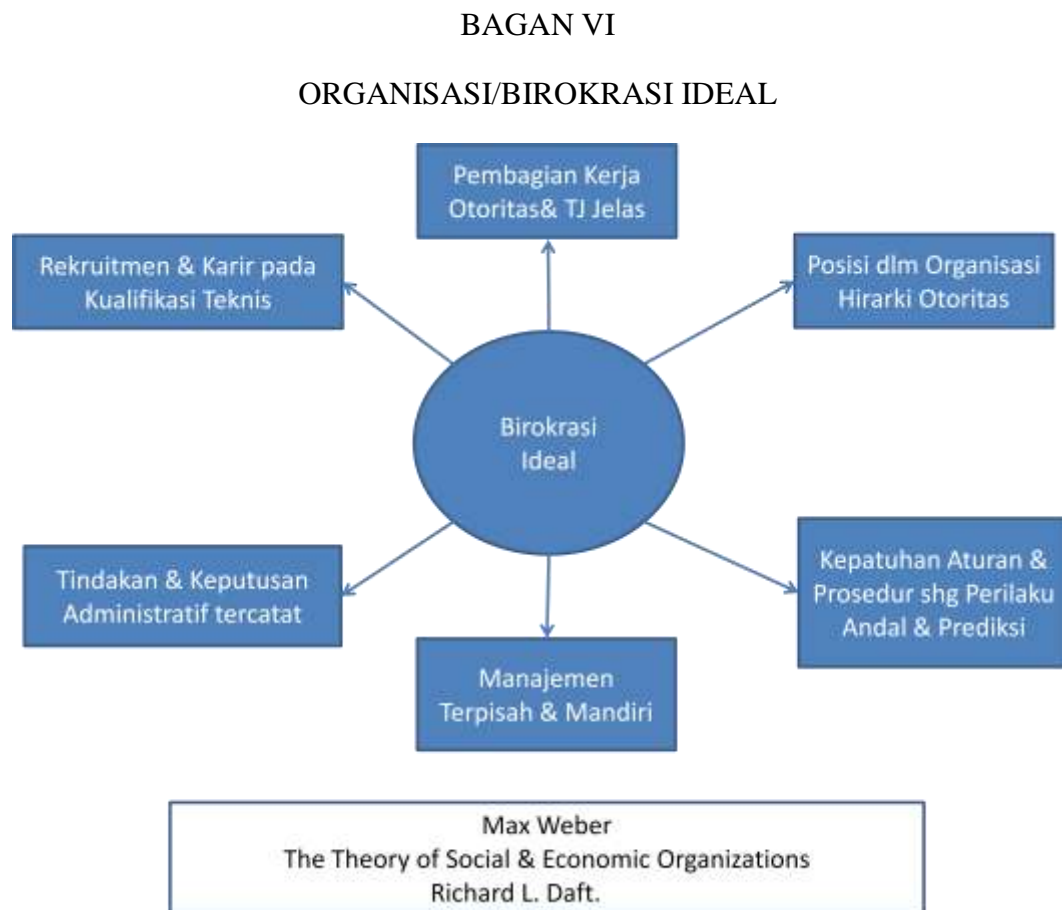
- 1) Adanya pembagian kerja (*division of labor*);
- 2) Adanya struktur hirarkis (*hierarchical structure*);
- 3) Adanya aturan dan prosedur formal (*formal rules and procedure*);
- 4) Adanya impersonalitas (*impersonality*);
- 5) Adanya karir yang didasarkan atas prestasi (*career based on merit*);
dan
- 6) Adanya rasionalitas (*rasionalitas*).²³⁷

²³⁵ *Ibid.*, hlm.92.

²³⁶ Ulber Silalahi, 2011, *Asas-asas Manajemen, Loc. Cit.*

²³⁷ *Ibid.*, hlm.92-94.

Dengan menggunakan bagan, Organisasi Ideal dapat digambarkan sebagai berikut :



Lembaga-lembaga peradilan pidana masing-masing merupakan suatu organisasi dan secara keseluruhan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem itu sendiri sebenarnya adalah suatu organisasi, organisasi sangat besar yang terdiri dari organisasi-organisasi besar. Organisasi merupakan suatu sistem dalam mana sebagai suatu sistem organisasi merupakan suatu sistem terbuka, sehingga lingkungan organisasi akan mempengaruhi keseluruhan kinerja organisasi dan strategi manajemen, baik masukan, proses transformasi serta keluaran. Terdapat dua tipe lingkungan manajemen, yaitu lingkungan luar dan lingkungan dalam.

Lingkungan dalam dan lingkungan luar tersebut berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas manajerial, sehingga responsivitas dan penyesuaian kebijakan manajemen terhadap lingkungannya adalah penting dan menentukan kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan. Oleh sebab itu, kemampuan adaptabilitas organisasi terhadap lingkungannya menjadi indikator dari efektivitas organisasi yang bersangkutan.²³⁸

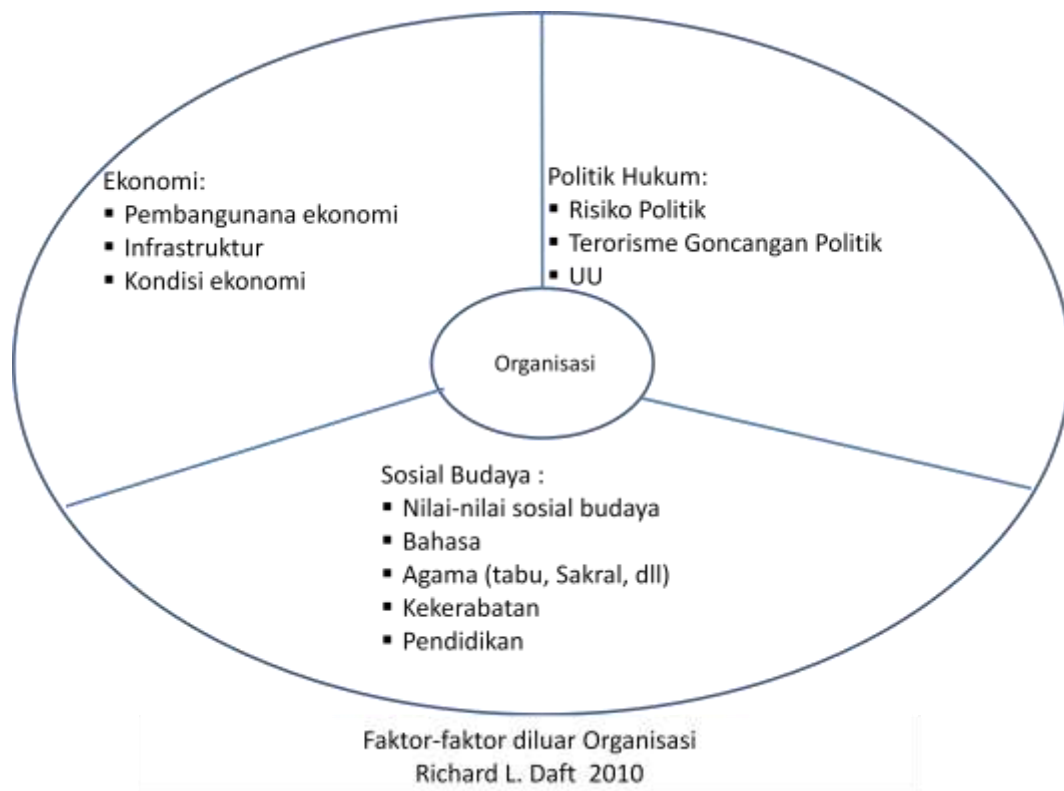
Menurut Ulber Silalahi, lingkungan organisasi atau lingkungan manajemen dapat diartikan sebagai keseluruhan elemen baik di dalam maupun di luar batas organisasi, baik yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas manajerial untuk mencapai tujuan organisasional. Lingkungan dalam (*internal environment*) ialah keseluruhan komponen yang ada di dalam suatu organisasi yang menentukan kelangsungan aktivitas manajerial, sedangkan lingkungan luar (*external environment*) ialah keseluruhan komponen yang ada di luar suatu organisasi yang berpotensi secara signifikan mempengaruhi aktivitas manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.²³⁹

Lingkungan luar dari suatu organisasi dapat digambarkan dengan menggunakan bagan, sebagai berikut :

²³⁸ *Ibid.*, hlm.118.

²³⁹ *Ibid.*, hlm.118-119.

BAGAN VII
FAKTOR-FAKTOR DI LUAR ORGANISASI

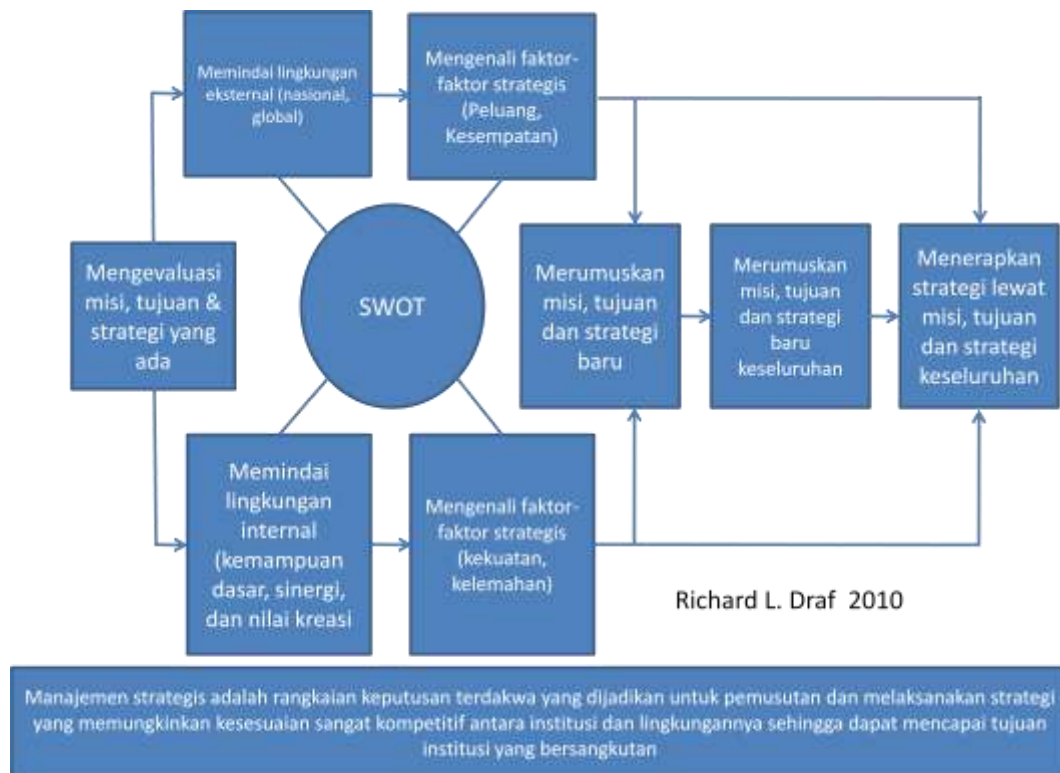


Lingkungan luar dapat menjadi peluang (*opportunity*) atau dapat menjadi ancaman (*threats*), sedangkan lingkungan dalam dapat menjadi kekuatan (*strength*) atau dapat menjadi kelemahan (*weakness*). Analisis suatu organisasi dengan melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu organisasi serta melihat bagaimana menggunakan peluang dan mengatasi ancaman-ancaman yang mungkin timbul terhadap organisasi tersebut dikenal dengan sebutan Analisis S.W.O.T.

Dengan menggunakan bagan, maka analisis S.W.O.T. dari suatu organisasi dapat digambarkan sebagai berikut :

BAGAN VIII

ANALISIS S.W.O.T. SUATU ORGANISASI



Menurut Michael Allison dan Jude Kaye sebagaimana dikutip oleh Ulber Silalahi, analisis *SWOT* (akronim dari *Strength*, *Weakness*, *Opportunity* dan *Threats*) adalah pandangan sekilas yang menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan internal organisasional yang paling penting dan peluang serta ancaman atau hambatan eksternal organisasional yang paling penting. Analisis *SWOT* memberikan suatu pemahaman realistik tentang organisasi dalam hubungannya dengan lingkungannya. Ia juga harus membantu menciptakan strategi, yaitu membuat keuntungan maksimum dari kekuatan dan peluang dengan meminimalisasi kelemahan

serta hambatan.²⁴⁰

Lembaga peradilan pidana sebagai organisasi penegakan hukum pidana tentu saja tidak boleh meninggalkan etika di dalam tugas dan fungsinya. Hal tersebut diungkapkan oleh Linda Klebe Trevino, Laura P. Hartman dan Michael Brown sebagaimana dikutip oleh digambarkan dalam Bagan IX, sebagai berikut :

BAGAN IX
MORAL PERSON DAN MORAL MANAGER
DALAM SUATU ORGANISASI



Di adaptasi dari Linda Klebe Trevino, Laura P. Hartman, Michael Brown dalam "Moral Person and Moral Manager"

²⁴⁰ *Ibid.*, hlm.135.

Organisasi merupakan suatu unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas dua atau lebih orang, yang berfungsi dalam suatu basis kontinu untuk mencapai suatu tujuan bersama atau serangkaian tujuan. Sedangkan orang-orang yang mengawasi aktivitas orang lain dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dalam organisasi disebut sebagai manajer (kadang disebut sebagai administrator).²⁴¹

Menurut Henri Fayol, semua manajer melakukan lima fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi dan pengendalian.²⁴² Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge menggabungkan kelima fungsi tersebut menjadi empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian.²⁴³ Selanjutnya menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, yang dimaksud dengan :

- a. Fungsi Perencanaan, mencakup mendefinisikan tujuan menyusun strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengembangkan serangkaian rencana untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan aktivitas.
- b. Fungsi Pengorganisasian, mencakup menentukan tugas-tugas apa yang akan dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas ini dikelompokkan, siapa yang melapor kepada siapa, dan di mana keputusan harus dibuat.
- c. Fungsi Kepemimpinan, mencakup memotivasi dan mengarahkan aktivitas serta mengoordinasikan orang-orang yang ada di dalam organisasi, memilih saluran komunikasi yang paling efektif, serta menyelesaikan konflik di antara anggota.

²⁴¹ Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, 2015, *Perilaku Organisasi, Organizational Behavior*, Ratna Saraswati dan Febriella Sirait, Pearson Education Inc., New Jersey, USA, hlm.2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2015.

²⁴² Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, 2015, *Organizational Behavior, Loc.Cit.*

²⁴³ Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, 2015, *Organizational Behavior, Loc. Cit.*

- d. Fungsi Pengendalian, mencakup memastikan semua hal berjalan sebagaimana mestinya, mengawasi kinerja organisasi dan membandingkannya dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya, sehingga apabila ada banyak deviasi maka menjadi tugas manajemen untuk mengembalikan organisasi ke jalur yang benar (pengawasan, perbandingan dan koreksi potensial).²⁴⁴

Henry Mintzberg, mengemukakan bahwa manajer melaksanakan sepuluh peran atau serangkaian perilaku yang berbeda tetapi berhubungan satu dengan yang lain, yaitu *peran interpersonal* (peran figur pemimpin berkaitan dengan tanggung jawab yang bersifat seremonial dan simbolis, peran pemimpin dan peran perantara); *peran informasional* (peran pengawas, peran penyebar dan peran juru bicara) serta *peran memutuskan* (peran wirausaha, peran pengendali gejolak, peran pengalokasi sumber daya dan peran negosiator).²⁴⁵

Keterampilan bermasyarakat suatu organisasi dikenal dengan istilah perilaku organisasi (*organizational behavior*) yang oleh Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge disebut sebagai suatu studi mengenai apa yang orang-orang lakukan dalam sebuah organisasi dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kinerja organisasi.

Beberapa tema/topik di dalam perilaku organisasi, antara lain : motivasi, perilaku dan kekuasaan pemimpin, komunikasi interpersonal, struktur dan proses kelompok, pengembangan dan persepsi sikap, proses perubahan, konflik dan negosiasi serta rancangan kerja.²⁴⁶

Pada Bagan X digambarkan mengenai pencapaian tujuan dari suatu Organisasi sebagaimana dimaksud di bawah ini :

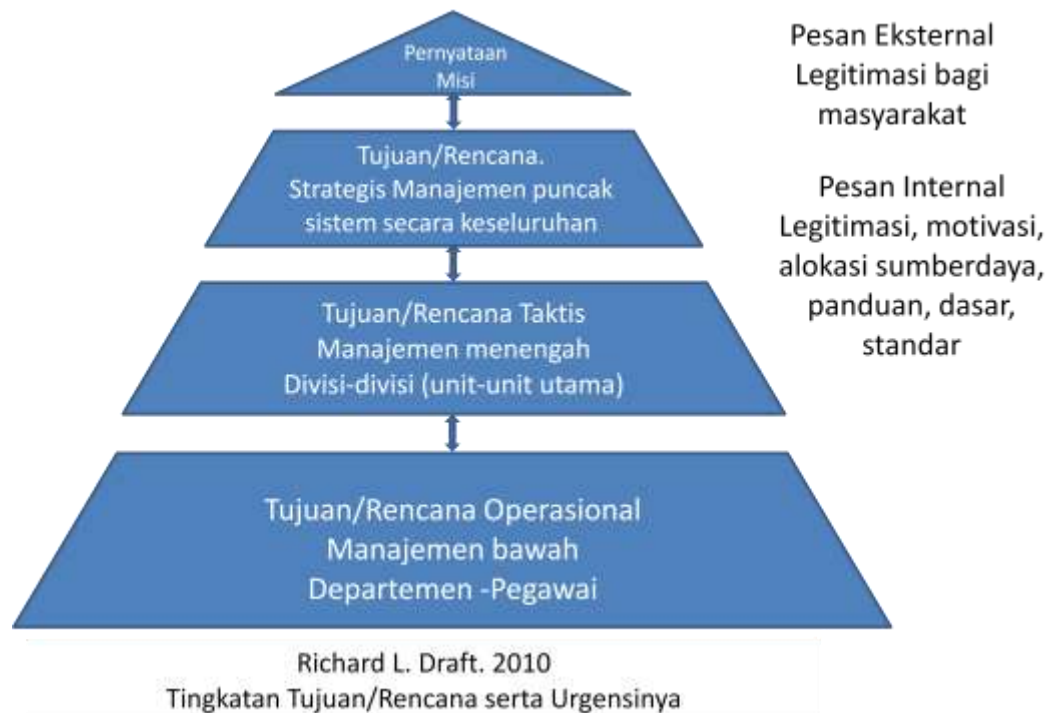
²⁴⁴ *Ibid.*, hlm.2-3.

²⁴⁵ *Ibid.*, hlm.3-4.

²⁴⁶ *Ibid.*, hlm.5-6.

BAGAN X

MISI ORGANISASI DAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN



6. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana

Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Suryono Sutarto, hukum acara pidana ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.²⁴⁷ Jadi hukum acara pidana berfungsi untuk melaksanakan atau menegakkan hukum pidana.²⁴⁸ Atas dasar fungsi tersebut, hukum acara pidana mempunyai tugas-tugas pokok, sebagai berikut :

- mencari dan mendapatkan kebenaran materiil;
- memberikan suatu putusan hakim;

²⁴⁷ Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I, Op. Cit.*, hlm.2.

²⁴⁸ *Ibid.*, hlm.3.

c. melaksanakan putusan hakim.²⁴⁹

Tekanan harus diletakkan pada fungsi mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, sebab kebenaran materiil yang harus menjadi dasar dari suatu putusan hakim. Dalam menjalankan fungsi mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, hukum acara pidana mempunyai tujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materiil serta memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia.²⁵⁰

Pada dasarnya asas-asas dalam hukum acara pidana dapat dibagi dua, yaitu : asas-asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan yang baik dan asas-asas yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia.²⁵¹ Asas-asas dalam hukum acara pidana tersebut, antara lain :

a. Asas-asas yang Berkaitan dengan Perlindungan Hak-hak Asasi

Manusia, terdiri dari:

1). Asas Perlakuan yang Sama di Depan Hukum, yaitu asas yang menyatakan, bahwa setiap orang di hadapan hukum harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Asas ini lazim disebut asas *isonomia* atau *equality before the law*.²⁵² Asas ini tercantum di dalam rumusan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas ini mengandung makna perlindungan yang sama di depan hukum (*equal protection on the*

²⁴⁹ *Ibid.*, hlm.11.

²⁵⁰ Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I, Loc. Cit.*

²⁵¹ *Ibid.*, hlm.19.

²⁵² Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I, Op.Cit.*, hlm.19.

law) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum (*equal justice under the law*).²⁵³

Asas ini juga dituangkan di dalam Penjelasan Umum Angka Ke-3

huruf a KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Adapun asas tersebut antara lain adalah :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.”

2). Asas Praduga Tidak Bersalah, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Asas ini lazim disebut asas *presumption of innocence*.²⁵⁴ Asas ini tercantum di dalam rumusan Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

²⁵³ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif Teoretis dan Praktik*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.18.

²⁵⁴ Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I, Op. Cit.* hlm.19.

Berdasarkan asas ini, selama proses peradilan masih berjalan baik di tingkat *judex factie* maupun di tingkat *judex iuris* dan belum ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa belum dapat dikategorisasikan bersalah sebagai pelaku tindak pidana, sehingga selama proses peradilan pidana terdakwa harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu : hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, hak untuk memperoleh bantuan hukum, dan lain sebagainya.²⁵⁵ Asas ini juga dituangkan di dalam Penjelasan Umum Angka Ke-3 huruf c KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 3). Asas Pembelaan Hukum atau Asas *Legal Assistance*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Asas ini tercantum di dalam rumusan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi bahwa Setiap orang yang

²⁵⁵ Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif Teoretis dan Praktik, *Op.Cit.*, hlm.14.

tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Asas ini juga tertuang di dalam Penjelasan Umum Angka Ke-3 huruf f KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Asas ini juga tertuang di dalam rumusan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 62 KUHAP serta Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Di samping itu, juga ditegaskan di dalam beberapa yurisprudensi putusan Mahkamah Agung, seperti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 510 K/Pid/1988 tertanggal 28 April 1988 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993.

b. Asas-asas yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Peradilan yang Baik, antara lain:

- 1). Asas *Principle of Legality*, yaitu asas yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.²⁵⁶ Asas ini dirumuskan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

²⁵⁶ Suryono S utarto, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I, Op. Cit.*, hlm.19.

berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 7

Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Nomor 48 Tahun 2009

“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Asas ini juga terdapat di dalam Penjelasan Umum Angka Ke-3 huruf b KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.”

2).Asas Kelangsungan Pemeriksaan Pengadilan atau disebut Asas

Onmiddelijke van het Onderzoek, yaitu asas yang menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.²⁵⁷

Asas ini dicantumkan di dalam rumusan Pasal 12 ayat (1)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

²⁵⁷ *Ibid.*, hlm.20.

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Nomor 48 Tahun 2009

“Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Asas ini juga tertuang di dalam Penjelasan Umum Angka Ke-3 huruf h KUHAP, yang berbunyi bahwa Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

3).Asas Keterbukaan atau Asas *Openbaarheid van het Proces*, yaitu asas yang menyatakan, bahwa sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.²⁵⁸ Asas ini dirumuskan di dalam rumusan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Asas ini juga dituangkan di dalam Penjelasan Umum Angka

²⁵⁸ Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Loc.Cit.

Ke-3 huruf i KUHAP, yang menyatakan bahwa sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

4).Asas Bantuan Hukum atau Asas *Legal Aid*, yaitu asas yang menyatakan bahwa kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu hak- haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum. Asas ini tertuang di dalam Penjelasan Umum Angka Ke-3 huruf g KUHAP dengan redaksi seperti tersebut di atas.

5).Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, yaitu asas yang menyatakan bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Asas ini dikenal sebagai asas *contante justitie* atau asas *speedy trial* atau *asas fair trial*.²⁵⁹ Asas ini dirumuskan di dalam rumusan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang

²⁵⁹ Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana Jid I, Loc. Cit.*

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, sebagai berikut :

Pasal 2

Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Nomor 48 Tahun 2009

- (1).Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- (2).Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3).Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4).Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁶⁰

Selanjutnya, di dalam Pasal 4 dikatakan, sebagai berikut :

Pasal 4

Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Nomor 48 Tahun 2009

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁶¹

²⁶⁰ Anonymous, 2010, *Himpunan Undang-Undang Tentang Tipikor, Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Agama dan PTUN*, Penerbit Pustaka Fahima, Yogyakarta, hlm. 35.

²⁶¹ *Ibid.*, hlm. 36.

Asas ini tertuang juga di dalam Penjelasan Umum Angka Ke-3

huruf e KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.”

Asas ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa berlarut-larut, kemudian memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebaninya.²⁶² Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992 tertanggal 21 Oktober 1992 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tertanggal 10 September 1998 membatasi waktu penanganan perkara pada tingkat *judex factie* selama 6 (enam) bulan dan apabila dalam waktu 6 (enam) bulan belum selesai diputus Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi harus melaporkan hal tersebut beserta alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung. Adapun pembebanan biaya perkara bagi terdakwa yang dijatuhi pidana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/155/X/1981 tertanggal 19 Oktober 1981 *jo* Surat Edaran Mahkamah Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor SEMA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983 dan Angka ke-27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tertanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman

²⁶² Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm.15.

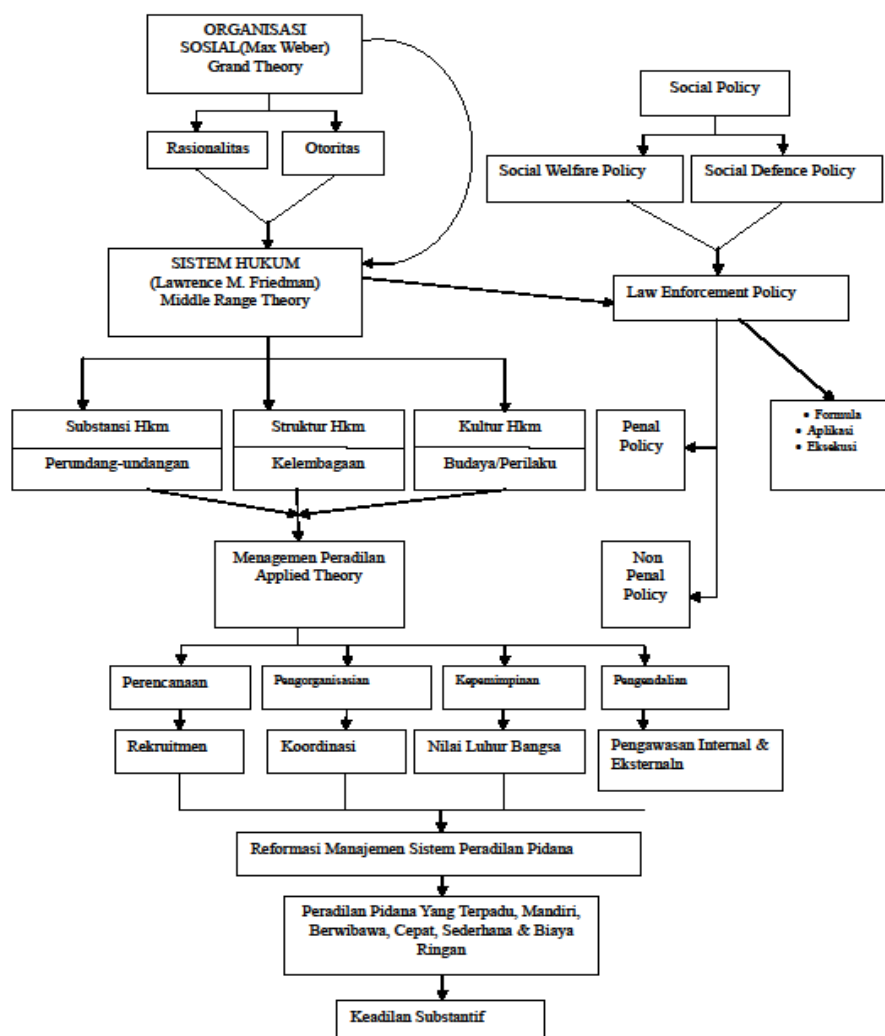
Pelaksanaan KUHAP ditentukan biaya perkara minimal Rp.500,00 dan maksimal Rp.10.000,00 dengan perincian Rp.7.500,00 bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Rp.2.500,00 bagi Pengadilan Tingkat Banding.²⁶³

²⁶³ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Loc. Cit.

B. KERANGKA BERPIKIR

Di dalam penelitian hukum guna menyusun disertasi ini, peneliti menggunakan teori-teori sebagai dasar penyusunan hipotesa yang dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :

BAGAN XI



C. HIPOTESA

Adapun hipotesa²⁶⁴ yang diajukan oleh peneliti dalam disertasi ini merupakan hipotesa kerja (*research hypotheses* atau *working hypotheses*). Berdasarkan pada permasalahan yang diajukan dalam penelitian hukum ini, maka dapat dikemukakan hipotesa kerja, sebagai berikut :

1. Peradilan pidana dapat dikatakan terpadu, mandiri dan berwibawa, dengan berlandaskan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan apabila mampu memberikan keadilan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
2. Untuk mewujudkan peradilan pidana yang terpadu, mandiri, dan berwibawa dengan berlandaskan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan diperlukan adanya suatu reformasi manajemen sistem peradilan pidana.

Dengan demikian menurut hal tersebut di atas :

1. Ada hubungan antara reformasi manajemen sistem peradilan pidana yang terpadu, mandiri dan berwibawa dengan berlandaskan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Ada hubungan antara peradilan pidana yang terpadu, mandiri, dan berwibawa cepat, sederhana dan berbiaya ringan dengan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

²⁶⁴ Lihat Suharsimi Arikunto, 2013, *Manajemen Penelitian*, Cet. XII, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 45.

Istilah “hipotesa” merupakan gabungan dari kata “hipo” yang artinya “di bawah” dan “tesis” yang artinya “kebenaran”. Secara keseluruhan “hipotesis/hipotesa” berarti “di bawah kebenaran”, yaitu kebenaran yang masih di bawah (belum tentu benar, masih harus dibuktikan).

3. Keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dapat diwujudkan apabila sistem peradilan pidana itu terpadu, mandiri, berwibawa, cepat, sederhana dan berbiaya ringan.
4. Sistem peradilan pidana itu akan terpadu, mandiri, berwibawa, cepat, sederhana dan berbiaya ringan apabila dimanajemen secara baik yang untuk itu perlu dilakukan suatu reformasi di dalam manajemen sistem peradilan pidana.

D. PENELITIAN YANG RELEVAN DAN KEBARUAN PENELITIAN

Ahmad Fadlil Sumadi dalam buku yang berjudul *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan, Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945* yang berasal dari disertasi pada Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro mengemukakan, sebagai berikut :

1. Potret desain fakta hukum (*ius constitutum*) tentang pengawasan dan pembinaan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi terhadap pengadilan di bawahnya dapat dilihat dalam aras konstitusional, aras undang-undang pokok dan undang-undang organik, dan aras peraturan teknis Mahkamah Agung, yang secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Aras Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasca perubahan/amandemen) secara konstitusional menentukan:

- 1) Pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman terdiri atas empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung;
- 2) Dalam perspektif manajemen, Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berkedudukan sebagai atasan mempunyai fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pengadilan di bawahnya;
- 3) Pengawasan dan pembinaan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara atasan terhadap pengadilan di bawahnya merupakan pengawasan dan pembinaan internal (*internal audit*) oleh sesama pelaku kekuasaan kehakiman; dan
- 4) Komisi Yudisial mempunyai wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sehingga merupakan pengawasan eksternal (*external audit*) oleh lembaga non kekuasaan kehakiman khusus terhadap perilaku hakim.

b. Aras Undang-Undang Pokok dan Undang-Undang Organik

Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman maupun undang-undang organik masing-masing tentang Mahkamah Agung dan pengadilan yang berada di bawahnya menentukan:

- 1) Sistem satu atap (*one roof system*) peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, dalam pengertian yudisial maupun manajemen, terhadap pengadilan di bawahnya;
- 2) Pengawasan dan pembinaan terhadap pengadilan dan hakim, termasuk pengawasan eksternal tentang perilaku hakim, tidak boleh mengurangi independensi dan imparsialitas;
- 3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sebagai tolok ukur Pengawasan terhadap perilaku hakim dan Majelis Kehormatan Hakim sebagai forum adjudikasi, dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial secara bersama-sama.

c. Aras Peraturan Teknis Mahkamah Agung

Pengawasan dan pembinaan Mahkamah Agung diselenggarakan dengan desain pengaturan yang mengembangkan fungsi dan unit kepemimpinan manajemen serta pengawasan masyarakat sebagai berikut :

- 1) Pengawasan melekat;
- 2) Penanganan pengaduan masyarakat;
- 3) Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yustisial;
- 4) Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan;
- 5) Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pembinaan;
- 6) Badan Pengawasan Mahkamah Agung; dan
- 7) Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung.²⁶⁵

²⁶⁵ H.Ahmad Fadlil Sumadi, 2013, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan, Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, hlm. 281-282.

Desain konsep hukum (*ius constituendum*) tentang pengawasan dan pembinaan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi terhadap pengadilan di bawahnya, yang mengalokasikan secara proporsional antara kepentingan-kepentingan yang antinomik dalam perspektif prinsip manajemen dan prinsip pengadilan dalam negara hukum yang demokratis harus didasarkan kepada :

- a. Ukuran efektivitas penyelenggaraan peradilan adalah *saksama dan sewajarnya*”, ukuran efisiensinya adalah *sederhana, cepat, dan biaya ringan*”;
- b. Pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berkarakter independen dan imparial; demikian pula hakim sebagai pejabat pelaksananya;
- c. Hakim adalah anggota dari komunitas yang di dalamnya terdapat keanggotaan yang sejajar (*community of equal*) yang kepemimpinannya *primus inter pares*;
- d. Pengaturan pengawasan manajerial terhadap pengadilan dan hakim harus tetap dapat menjamin independensi dan imparialitas, kesejajaran dan kepemimpinan *primus inter pares* sebagai karakternya, sehingga merupakan implementasi dari pengawasan yang khas terhadap pengadilan dan hakim;
- e. Pembinaan hakim merupakan forum interaksi antara senior dan junior dalam rangka transfer ilmu pengetahuan, keahlian, dan etika.²⁶⁶

2. Menuju Pengawasan dan Pembinaan yang Ideal

Pengawasan dan pembinaan oleh Mahkamah Agung harus dapat memberikan dampak secara internal maupun eksternal. Untuk itu, pengawasan dan pembinaan pengadilan mesti ditata secara komprehensif

²⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 282-283.

berdasarkan suatu *grand design* yang meliputi: Substansi hukum yang mengaturnya, struktur hukum yang menjalankannya, dan budaya hukum yang mendukungnya.²⁶⁷ Secara internal, pengawasan dan pembinaan pengadilan dan hakim, yang bertujuan untuk memelihara independensi, imparsialitas, kompetensi, dan profesionalitas, harus dapat memberikan dampak bagi terwujudnya putusan pengadilan yang mencerminkan keadilan substantif bukan keadilan prosedural. Selain itu, harus pula dapat mencegah terhadap calon-calon pelaku pelanggaran. Sementara itu, secara eksternal harus dapat membangun kepercayaan publik (*public trust*) kepada pengadilan. Untuk maksud dan tujuan yang demikian itu, prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas haruslah benar-benar diimplementasikan dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengadilan, terutama dalam merespon keluhan (*complaint*) masyarakat mengenai penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan peradilan, baik terkait dengan hukum maupun kode etik dan perilaku hakim (*unprofessional conduct*).²⁶⁸

Dalam merespons keluhan masyarakat, proses penanganan, pengambilan keputusan, dan penjatuhan sanksi atau pembebasan merupakan hal yang terdapat aspek keadilan di dalamnya. Untuk itu, keseriusan atau kesungguhan, objektivitas, kejujuran, dan keadilan dalam penanganannya bukan saja harus dilaksanakan, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana hal itu tampak dan terdengar oleh mata dan telinga publik, sehingga secara rasional publik dapat diyakinkan. Atas dasar itulah, secara internal hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman dapat terpelihara integritas dan profesionalitasnya, serta kepercayaan publik (*public trust*) dapat terbangun dengan baik.²⁶⁹

²⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 283.

²⁶⁸ H. Ahmad Fadlil Sumadi, 2013, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, Loc.Cit.

²⁶⁹ *Ibid.*, halaman 283-284.

Marwan Effendy dalam buku yang berjudul *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* yang didasarkan pada disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran di Bandung dengan judul *Eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasi Dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* mengemukakan, sebagai berikut :

1. Meskipun Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan kata badan terhadap institusi penegak hukum yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, belum secara eksplisit mengatur kedudukan dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai “badan negara”. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sendiri masih menetapkan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai “lembaga pemerintahan” dan Jaksa Agung adalah pembantu Presiden, karena diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Faktor yang menstimulus (memengaruhi) kedudukan dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum secara negatif adalah sistem hukum itu sendiri :

Pertama, karena ditetapkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia berada di lingkungan eksekutif yang menyebabkan Kejaksaan Republik Indonesia tidak mandiri dan independen dalam penegakan hukum;

Kedua, adanya pengurangan dan pembatasan kewenangan oleh undang-undang baik dalam bidang penyidikan maupun dalam bidang penuntutan;

Ketiga, dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kewenangan yang begitu besar, tidak saja berdampak terhadap struktur ketatanegaraan yang semakin besar, yang mengesampingkan asas *dominus litis* dan prinsip *een en ondelbaar*, tetapi juga menimbulkan *social cost* yang cukup besar yang berdampak terhadap anggaran belanja negara.

3. Di masa datang, Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan karakteristik sistem ketatanegaraan Indonesia, diharapkan dapat menjadi “badan negara” secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terpisah dari lembaga eksekutif, dan Jaksa Agung diangkat serta diberhentikan oleh Presiden berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bertanggung jawab kepada publik secara transparan melalui media akuntabilitas kinerja (*performance of work accountability*). Fungsinya (tugas dan wewenangnya) diatur di dalam undang-undang, baik tugasnya sebagai penyidik tindak pidana tertentu maupun dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang mandiri dan independen.
4. Untuk menghindari tunggakan perkara dan agar penegakan hukum dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat serta meningkatkan kompetisi yang sehat antar penyidik, seyogyanya Kejaksaan Republik Indonesia tetap diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, tidak hanya terbatas terhadap tindak pidana korupsi dan Hak Asasi Manusia serta bertindak selaku koordinator penyidik. Sedangkan untuk menghindari dan mengawasi terjadinya

penyalahgunaan wewenang perlu dibentuk segera Komisi Kejaksaan yang kedudukan dan fungsinya diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, seperti halnya Komisi Kepolisian Nasional yang mengacu kepada Komisi Yudisial.

5. Agar tidak menimbulkan *social cost* yang membebani anggaran belanja negara karena pengembangan struktur organisasi di luar sistem, seyogyanya tidak perlu lagi dibentuk badan/komisi baru yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana tertentu. Yang perlu dilakukan adalah memberdayakan institusi penegak hukum yang ada dengan melengkapi kewenangannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menerobos prosedur khusus yang selama ini dipandang menghambat proses penyidikan dan penuntutan, selain meningkatkan kesejahteraan aparaturnya pemerintah serta memberdayakan pengawasan secara efektif dan efisien.²⁷⁰

J. Djohansjah dalam buku yang berjudul *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman* yang didasarkan pada disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung berkaitan dengan reformasi Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kesimpulan, bahwa :

1. Landasan pemikiran mengenai independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia dipengaruhi oleh landasan teoritis keadilan, falsafah Pancasila dan hukum. Landasan teori keadilan yang abstrak dan terkandung dalam setiap jiwa manusia telah dikonkretkan melalui produk-produk hukum, baik hukum positif maupun putusan lembaga peradilan. Pemikiran landasan falsafah Pancasila juga terkait erat dengan teori keadilan, di mana dalam pandangan Keindonesiaan, falsafah Pancasila memuat prinsip Ketuhanan,

²⁷⁰ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.183-184.

Kemanusiaan yang adil dan beradab dan prinsip Keadilan Sosial. Perkembangan prinsip-prinsip ini dapat dilihat wujudnya seiring perubahan irah-irah yang tercantum dalam setiap putusan lembaga peradilan. Irah-irah yang tadinya berbunyi “ Atas Nama Negara Republik Indonesia” telah dikembangkan menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang di dalamnya terkandung suatu konsep luhur, bahwa setiap putusan lembaga peradilan dipertanggungjawabkan secara personal kepada rakyat (dalam garis horisontal) dan Tuhan Yang Maha Esa (dalam garis vertikal). Dalam landasan pemikiran hukum, independensi kekuasaan kehakiman diakui sebagai syarat mutlak dari sistem demokrasi ketatanegaraan yang berlandaskan pada konsep Trias Politica serta *checks and balances*.

Independensi kekuasaan kehakiman diakui sebagai salah satu pilar dari sistem demokrasi ketatanegaraan. Secara struktural kekuasaan kehakiman berfungsi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan memperhatikan prinsip persamaan hak dan prinsip pembedaan. Perubahan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjadikan kekuasaan kehakiman Indonesia memperoleh legitimasi hukum untuk menjalankan independensinya secara penuh dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain di luar struktur kekuasaan kehakiman. Seluruh landasan pemikiran independensi kekuasaan kehakiman (landasan teoritis, falsafah dan hukum) menjadi dasar bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menetapkan arah reformasi Mahkamah Agung Republik Indonesia di masa kini dan masa depan, yaitu melalui independensi kekuasaan kehakiman yang difokuskan kepada independensi hakim.

2. Reformasi ketatanegaraan menjadi motor penggerak terjadinya reformasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimulai dengan melepaskan diri dari kontrol pemerintah dan menyatukan seluruh lingkungan peradilan maupun lembaga-lembaga kuasi peradilan ke bawah hirarki Mahkamah Agung Republik Indonesia (konsep satu atap). Dengan demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia secara utuh (administrasi, sumber daya, maupun teknis) telah menjadi puncak lembaga peradilan di Indonesia sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Reformasi Mahkamah Agung Republik Indonesia di masa depan menuntut pelaksanaan wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai penjaga supremasi hukum melalui perannya sebagai personifikasi hukum di Indonesia.²⁷¹

Senada dengan itu, dalam disertasi yang ditulis oleh Pujiyono dengan judul : *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, yang merupakan disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dinyatakan sebagai berikut :

1. Realitas normatif fungsi dan kedudukan subsistem sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana, terdiri dari:
 - a. Subsistem Penyidikan, yang terdiri dari Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu (PPNS), Penyidik

²⁷¹ J.Djohansjah, 2008, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Penerbit Kesaint Blanc, Jakarta, hlm. 294-295.

Kejaksaan, Penyidik KPK, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dalam mana:

- 1) Fungsi penegakan hukum yang dilakukan POLRI dan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif, sehingga menjadi tidak independen, tidak non partisan dan tidak imparsial sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) PPNS tertentu yang tadinya menjalankan fungsi penegakan hukum di bawah koordinasi Penyidik POLRI, berdasarkan beberapa undang-undang menjadi tidak lagi di bawah koordinasi Penyidik POLRI.
- 3) Kewenangan Kejaksaan untuk menyidik suatu tindak pidana tertentu yang sebenarnya berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP bersifat sementara, justru dikukuhkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4) Terbatasnya personil, sarana dan prasarana,serta kemampuan POLRI di dalam penegakan hukum di wilayah perairan, memberikan kewenangan kepada Perwira TNI AL untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu.

- b. Subsistem Penuntutan, yang terdiri dari Penuntut Umum Kejaksaan dan Penuntut Umum KPK;
 - 1) Fungsi penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif.
 - 2) Penuntut Umum KPK di dalam menjalankan fungsi penuntutan tidak bisa independen, karena tidak didukung oleh personil yang murni sumber daya manusia dari KPK sendiri, melainkan berasal dari Kejaksaan yang di BKO (Bawah Komando Operasi)
 - c. Subsistem Peradilan, susunan dan organisasi sistem peradilan secara konstitusional diatur di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengisyaratkan Mahkamah Agung sebagai puncak dari peradilan, sehingga membawa konsekuensi adanya *one roof system*.
 - d. Subsistem Pelaksana Pidana, yang merupakan rangkaian akhir dalam penegakan hukum pidana.
2. Faktor penyebab tidak merdekanya kekuasaan kehakiman dalam
 - a. Faktor Perundang-undangan dan Kelembagaan;
 - b. Faktor Budaya Hukum
 3. Implikasi yang timbul sehubungan tidak mandiri/merdekanya Kekuasaan Kehakiman, antara lain adanya intervensi kekuasaan terhadap berjalannya proses penegakan hukum mengakibatkan kasus berjalan tersendat-sendat, bahkan sering dimentahkan, terhenti, terjadi perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif, sehingga tidak ada kepastian hukum;
 4. Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana menuju kekuasaan kehakiman yang merdeka secara integral
 - a. Rekonstruksi Substansi Hukum, yang berupa:

- 1) menghindari aturan yang bersifat parsial/sektoral;
 - 2) menghindari aturan yang bersifat *overlapping*;
 - 3) menghindari aturan yang bersifat *me-negasi*-kan kewenangan lembaga penegak hukum lain;
 - 4) menghindari aturan yang tidak *sinkron* dengan semangat reformasi;
 - 5) menghindari aturan yang bersifat *men-subordinasi*-kan lembaga penegak hukum lain.
- b. Rekonstruksi Lembaga Hukum, yang berupa mengupayakan penyelenggaraan peradilan yang *one roof system* dengan Mahkamah Agung sebagai *the top law officer*.

5. Langkah-langkah Rekonstruksi, berupa :

- a. Penataan perangkat hukum;
 - 1) Penataan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Penataan Undang-undang Organik;
 - 3) Penciptaan Undang-Undang Baru
- b. Penataan Kelembagaan Sistem Peradilan Pidana;
- c. Revitalisasi Pendekatan Keilmuan.

Letak kebaruan dalam penelitian hukum (disertasi ilmu hukum) ini, adalah di dalam penelitian hukum (disertasi ilmu hukum) ini melihat sistem peradilan pidana secara keseluruhan (holistik) bukan pada masing-masing subsistem pendukungnya secara terpisah.

Objek kajian dalam disertasi penulis adalah sistem peradilan pidana secara keseluruhan, meskipun dibatasi hanya pada sistem peradilan pidana pada lingkup peradilan umum. Penulis melihat sistem peradilan pidana tersebut sebagai suatu

organisasi maha besar yang terdiri dari beberapa organisasi yang sebenarnya merupakan suatu suborganisasi dari organisasi maha besa tadi, sehingga sebagai suatu organisasi harus dilihat dari aspek manajemen (manajemen peradilan pidana) yang meliputi beberapa aspek yaitu pengorganisasian, perencanaan, kepemimpinan dan pengendalian.

Objek kajian tersebut bisa saja sudah pernah dibahas orang lain, yang berarti dalam hal ini penulis berusaha untuk menguatkan dan berusaha untuk melengkapi/menyempurnakan yang sudah ada, di samping melakukan pendekatan yang berbeda (pendekatan manajemen/pendekatan organisasi).

BAB III

METODE PENELITIAN

Ilmu pengetahuan berawal pada kekaguman manusia akan alam yang dihadapinya, baik alam besar (*macro cosmos*) maupun alam kecil (*micro cosmos*). Manusia sebagai *animal rational* dibekali hasrat ingin tahu. Hasrat ingin tahu manusia terpuaskan kalau dia memperoleh pengetahuan mengenai hal yang dipertanyakannya.²⁷² Pengetahuan yang benar atau kebenaran memang secara inherent dapat dicapai manusia, baik melalui pendekatan non-ilmiah maupun pendekatan ilmiah. Ada beberapa pendekatan non-ilmiah yang banyak digunakan, yaitu : (1).akal sehat; (2).prasangka; (3).intuisi; (4).penemuan kebetulan dan coba-coba; dan (5).pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis.²⁷³ Pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah diperoleh melalui penelitian ilmiah dan dibangun di atas teori tertentu. Teori itu berkembang melalui penelitian ilmiah, yaitu penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasar atas data empiris.²⁷⁴

Penelitian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademis.²⁷⁵ Penelitian adalah sarana utama dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal tersebut dikarenakan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut lalu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.²⁷⁶ Menurut

²⁷² Sumadi Suryabrata, 1992, *Metodologi Penelitian*, Cet.VII, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

²⁷³ *Ibid.*, hlm. 3-5.

²⁷⁴ Sumadi Suryabrata, 2014, *Metodologi Penelitian*, Cet.XXV, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

²⁷⁵ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Cet.II, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 19.

²⁷⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

Suharsimi Arikunto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Kegiatan penelitian merupakan rangkaian proses pengayaan ilmu pengetahuan.²⁷⁷ Selanjutnya dikatakan, bahwa mengingat fungsi dan kedudukannya tersebut, maka kegiatan penelitian tidak dapat dilepaskan dari perbendaharaan kaidah, konsep, kebenaran, dan lain-lain yang sudah berhasil dikompilasikan, dihimpun, diramu, disintesis hingga membentuk satu bodi keilmuan yang mantap.²⁷⁸ Tyrin Haliway sebagaimana dikutip oleh Anthon F. Susanto menyatakan, bahwa penelitian merupakan metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu, sekurangnya dapat diperoleh suatu pemecahan bagi masalah itu.²⁷⁹ Bakker dan Zubair sebagaimana dikutip oleh Anthon F. Susanto menyatakan, bahwa perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan mensyaratkan dan memutlakkan adanya kegiatan penelitian. Tanpa penelitian itu ilmu pengetahuan tidak dapat hidup.²⁸⁰

Kata “penelitian” sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah “*research*”, yang semula digunakan dalam arti “penelitian untuk digunakan bagi suatu tujuan praktis (*applied research*)”, sehingga berkaitan dengan kata “*development*” (pengembangan).²⁸¹ Anthon F. Susanto menambahkan, penelitian dalam bahasa Inggris “*research*” berasal dari kata “*reserare*” dalam bahasa Latin yang berarti “mengungkapkan”. Secara etimologi kata “*research*” berasal dari kata “*re*” dan “*to search*” yang berarti “mencari kembali”. Namun makna “*research*” lebih luas dari itu, yaitu : *research can be describe as systematic and*

²⁷⁷ Suharsimi Arikunto, 2013, *Manajemen Penelitian, Op. Cit.*, hlm. 7.

²⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

²⁷⁹ Anthon F. Susanto, 2015, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris, Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Methode) dalam Penelitian Hukum*, Penerbit Setara Press, Malang, hlm. 161.

²⁸⁰ Anthon F. Susanto, 2015, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris, Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Methode) dalam Penelitian Hukum, Loc. Cit.*

²⁸¹ C.F.G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Cet.II*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 96 dan 100.

*organized effort to investigate a specific problem that needs a solution. It is a series of steps designed and followed, with the goal of finding answers to the issues that are of concern to us in the work environment. Research is a systematic investigation to find answers to a problem.*²⁸² Sejalan dengan itu, apa yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa “penelitian” sebagai terjemah dari “*research*” sebenarnya kurang tepat baik ditilik dari sisi epistimologi maupun dari sisi aktivitas operasionalnya. Terjemahan yang tepat dari kata “*research*” ialah “usaha pencarian” (yang dalam artinya yang khusus berarti “pencarian pengetahuan yang benar untuk menjawab dan/atau untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupannya”).²⁸³

Kata “metodologis” berasal dari kata “metode” yang dapat diartikan sebagai “jalan ke”, namun menurut kebiasaan “metode” diartikan sebagai :

1. suatu tipe pemikiran yang digunakan di dalam penelitian dan penilaian;
2. suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²⁸⁴

Menurut Setiono, metodologi dalam arti yang umum berarti suatu studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan suatu penelitian (ilmiah). Metodologi juga berarti cara ilmiah untuk mencari kebenaran.²⁸⁵ Untuk melengkapi kebutuhan dalam penelitian serta penyusunan laporan hasil penelitian, maka di dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut:

1. metode pendekatan;

²⁸² Anthon F. Susanto, 2015, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris, Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Methode) dalam Penelitian Hukum*, Op. Cit., hlm. 160-161.

²⁸³ Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum : Konsep dan Metode*, Penerbit Setara Press, Malang, hlm. 3.

²⁸⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI-Press, Jakarta, hlm.5-6.

²⁸⁵ Setiono, 2010, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PDIH Fakultas Hukum UNS, Surakarta, hlm.3.

2. metode pengumpulan data;
3. metode analisa data;
4. metode pengolahan dan penyajian data.

Metode-metode sebagaimana tersebut disajikan di dalam beberapa sub bab, sebagai berikut:

- a. Spesifikasi Penelitian;
- b. Metode Pendekatan;
- c. Metode Pengumpulan Data;
- d. Batasan Operasional Variabel Penelitian;
- e. Metode Analisa dan Penyajian Data.

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- (1).mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- (2).pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
- (3).melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- (4).menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
dan
- (5).memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di

dalam kesimpulan.²⁸⁶

Selanjutnya, dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.²⁸⁷

A. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif sekaligus bersifat eksplanatoris, yaitu suatu penelitian di dalam bidang ilmu hukum yang bermaksud untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori.²⁸⁸ Menurut Vredenberg (1978) sebagaimana dikutip Soejono dan H. Abdurrahman membedakan penelitian deskriptif ke dalam : (1).penelitian yang bersifat menjelajah atau eksploratif; (2).penelitian yang bersifat deskriptif; dan (3).penelitian yang bersifat menerangkan (*explanatoris*) atau penelitian yang bersifat menguji satu atau beberapa hipotesis (*testing research*).²⁸⁹

Penelitian hukum ini juga bersifat preskriptif dan evaluatif, karena penelitian hukum ini bermaksud untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa

²⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Rev., Cet.VIII, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta , hlm. 213.

²⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Rev., Cet. VIII, *Loc. Cit.*

²⁸⁸ *Ibid.*, hlm.5.

²⁸⁹ Soejono dan H. Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet.II, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta , hlm.19.

yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang bersangkutan juga dimaksudkan untuk menilai suatu program yang dijalankan.²⁹⁰ Penelitian ini merupakan penelitian *problem solution* karena bermaksud untuk mengatasi masalah.²⁹¹

Adapun rumusan normatif yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah normatif doktrinal yang artinya bertumpu pada pencarian asas-asas hukum positif yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan hukum yang bersangkutan untuk selanjutnya diterapkan dalam mengatasi suatu perkara *in concreto*.²⁹² Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam :

1. Penelitian inventarisasi hukum positif;
2. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
3. Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*;
4. Penelitian terhadap sistematis hukum;
5. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.²⁹³

Menurut Johnny Ibrahim, penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam

²⁹⁰ Setiono, 2010, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Op. Cit.*, hlm.5-6.

²⁹¹ *Ibid.*, hlm.6.

²⁹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.12-13.

²⁹³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet.V, Penerbit Ghalia Indonesia, hlm. 12.

Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan itu mencakup :

- 1.penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2.penelitian terhadap sistematis hukum;
- 3.penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal;
- 4.penelitian perbandingan hukum;
- 5.penelitian sejarah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001 : 14).

hukum positif.²⁹⁴ Karakteristik utama penelitian hukum normatif terletak pada sumber data yang digunakan di dalam melakukan pengkajian hukum.²⁹⁵

Sedangkan penelitian hukum empiris/sosiologis sebagaimana dibedakan oleh Soerjono Soekanto, macamnya adalah sebagai berikut :

1. penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis);
2. penelitian terhadap efektivitas hukum.²⁹⁶

Penelitian hukum ini lebih bersifat empiris/sosiologis, karena dengan mendasarkan pada segi normatif saja permasalahan yang hendak dipecahkan tidak akan berhasil diselesaikan dengan baik. Di samping itu dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan dari ilmu di luar hukum yaitu manajemen. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian-penelitian nondoktrinal yang sosial dan empirik atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial.²⁹⁷

Menurut Sumadi Suryabrata, berdasarkan atas sifat-sifat masalahnya itu, berbagai macam penelitian dapat digolongkan ke dalam :

- (1). penelitian historis;

Penelitian historis bertujuan membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, serta mensintesisakan bukti-bukti untuk menegaskan

²⁹⁴ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayu Media Publishing, hlm. 295.

²⁹⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 92.

²⁹⁶ Soejono dan H. Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan*, *Op. Cit.*, hlm. 55.

²⁹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum : Konsep dan Metode*, *Op. Cit.*, hlm. 125.

fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.

(2).penelitian deskriptif;

Penelitian deskriptif bertujuan membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

(3).penelitian perkembangan;

Penelitian perkembangan bertujuan menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan dan/atau perubahan sebagai fungsi waktu.

(4).penelitian kasus dan penelitian lapangan;

Penelitian kasus dan lapangan bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang (termasuk interaksinya) sesuatu unit sosial.

(5).penelitian korelasional;

Penelitian korelasional bertujuan mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi.

(6).penelitian kausal komparatif;

Penelitian kausal komparatif bertujuan menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada mencari kembali faktor yang mungkin menjadi

penyebab melalui data tersebut.

(7).penelitian eksperimental sungguhan;

Penelitian eksperimental sungguhan bertujuan menyelidiki kemungkinan saling berhubungan sebab akibat dengan cara mengenakan satu atau lebih kondisi perlakuan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental dan memperbandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenal kondisi perlakuan itu.

(8).penelitian eksperimental semu;

Penelitian eksperimental semu bertujuan memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan/atau memanipulasikan semua variabel yang relevan; dan

(9).penelitian tindakan.

Penelitian tindakan bertujuan mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual yang lain.²⁹⁸

²⁹⁸ Sumadi Suryabrata, 2014, *Metodologi Penelitian*, Cet.XXV, Op. Cit., hlm. 72-98.

B. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang dipergunakan di dalam penelitian hukum ini adalah metode yuridis empiris yang berarti, bahwa di dalam penelitian hukum ini dipergunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan hukum yang bersangkutan dan data dasar hukum dari bahan-bahan kepustakaan sebagai pedoman kerja yang utama, namun tidak mengabaikan implementasinya di dalam kehidupan masyarakat sebenarnya. Dalam penelitian hukum ini, peneliti mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses peradilan pidana yang kemudian diujikan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam praktik peradilan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut :

(1).pendekatan undang-undang (*statute approach*);

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

(2).pendekatan kasus (*case approach*);

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

(3).pendekatan historis (*historical approach*);

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang

dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

(4).pendekatan komparatif (*comparative approach*);

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

(5).pendekatan konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁹⁹

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto sebagaimana dikutip oleh Setiono, terdapat lima konsep hukum, yaitu :

1. Hukum adalah asa kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal;
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional;
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematiskan sebagai *judge made law*;
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik;
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.³⁰⁰

²⁹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cet.VIII, *Op. Cit.*, hlm. 133-180.

³⁰⁰ Setiono, 2010, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Op. Cit.*, hlm.20.

Dengan demikian hukum yang akan diteliti tersebut dapat berupa hukum dalam artian, sebagai berikut :

1. Hukum yang bersifat universal;
2. Hukum positif;
3. Hukum putusan hakim;
4. Hukum sosial yang terlembagakan;
5. Hukum yang ada pada benak manusia.³⁰¹

Konsep yang keempat dan kelima bukan merupakan konsep normatif, melainkan sesuatu yang *nomologik*. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai *rules* tetapi sebagai *regularities* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Hukum merupakan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual dan potensial akan terpola.

Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris, maka penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini disebut sebagai penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian non doktrinal.³⁰² Penelitian ini diarahkan pada penelitian tentang pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan hukum positif dan terhadap berlakunya hukum positif serta kesadaran hukum masyarakat terhadap berlakunya hukum positif.³⁰³

Menurut van Apeldoorn sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, objek ilmu hukum adalah hukum sebagai gejala kemasyarakatan. Ilmu hukum tidak hanya menjelaskan apa yang menjadi ruang lingkup dari hukum itu sendiri, tetapi juga menjelaskan hubungan antara gejala-gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk mencapai tujuannya itu, maka digunakan metode sosiologis,

³⁰¹ *Ibid.*, hlm.21.

³⁰² *Ibid.*, hlm.22.

³⁰³ *Ibid.*, hlm.25.

sejarah dan perbandingan hukum, sebagai berikut :

- (1).metode sosiologis, dimaksudkan untuk meneliti hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya;
- (2).metode sejarah, untuk meneliti perkembangan hukum; dan
- (3).metode perbandingan hukum, untuk membandingkan berbagai tertib hukum dari bermacam-macam masyarakat.³⁰⁴

Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa ketiga metode tersebut saling mengisi dalam mengembangkan penelitian hukum. Seorang ilmuwan di bidang hukum yang berhasil menerapkan ketiga metode tersebut, melakukan penelitian yang sangat berguna dan mendekati kelengkapan. Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa metode atau pendekatan yuridis normatif juga memerlukan pendekatan empiris (sosiologis), historis dan komparatif. Keempat metode atau pendekatan itu sangat penting, karena kecenderungan penelitian hukum masa kini tidak lagi dapat menggunakan hanya satu metode atau pendekatan saja.³⁰⁵ Bahkan, C.F.G. Sunaryati Hartono sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menegaskan, bahwa untuk meneliti satu fenomena sosial seringkali dibutuhkan *kombinasi* berbagai metode penelitian, walaupun selalu bertitik tolak dan didominasi oleh satu disiplin ilmu.³⁰⁶ Menurut Julia Brannen, penggabungan dua metode yang berbeda dalam sebuah rangkaian penelitian memunculkan persoalan gerak antara paradigma-paradigma pada tingkat epistemologi dan teori.³⁰⁷

³⁰⁴ Barda Nawawi Arief, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Rev., Cet. X., Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

³⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁰⁶ Barda Nawawi Arief, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Rev., Cet. X., *Loc. Cit.*

³⁰⁷ Julia Brannen, 1999, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Penerbit Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda-Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 9.

C. METODE PENGUMPULAN DATA

Secara harfiah “data” berarti fakta atau kenyataan (*fact*). Akan tetapi, dalam penelitian, istilah data dipakai dalam arti yang lebih luas, karena di samping data primer, penelitian sosiologi juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan pustaka, seperti monografi dan laporan penelitian. Dengan demikian, juga untuk penelitian sosiologi, istilah “data” lebih dipakai dalam arti keterangan informasi, bahan atau rumus-rumus yang menjadi bahan dasar penelitian untuk diolah dan dianalisis, sehingga kita dapat menarik beberapa kesimpulan.³⁰⁸ Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa di dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan data primer maupun data sekunder. Data Primer berupa perilaku lembaga penegak hukum serta hasil dari perilaku lembaga penegak hukum yang bersangkutan. Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat publik bukan bersifat pribadi. Data Sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan penelitian yang terdiri dari :³⁰⁹

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat ke dalam,³¹⁰ yang dapat berupa :
 - a. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Peraturan dasar, yang berupa : batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. Peraturan perundang-undangan mengenai proses peradilan pidana

³⁰⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Cet.II, *Op. Cit.*, hlm. 150.

Lihat pula dalam Wojowasito dan Poerwodarminta, 1980, *Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia –Inggris*, Penerbit Hasta, Bandung, hlm. 37.

³⁰⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Op. Cit.*, hlm. 52.

³¹⁰ Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

serta kelembagaan terkait, termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan produk jaman Penjajahan Hindia Belanda yang masih berlaku;

- d. Yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah proses peradilan pidana serta kelembagaan terkait.
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat berupa :
 - a. Rancangan Undang-Undang;
 - b. Hasil-hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan dengan materi penelitian;
 - c. Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan materi penelitian.
3. Bahan-bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat berupa :
 - a. Bibliografi yang relevan dengan materi penelitian;
 - b. Kamus/ensiklopedia yang relevan dengan materi penelitian.

Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan di sini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.
 - a. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie Stb.1915 Nomor 723*;
 - b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan;
 - d. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Ijin kepada Dokter dan Dokter Gigi;
 - e. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7/Drt/1955

- tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
- f. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana;
 - g. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - h. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16/Prp./Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - i. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18/Prp./Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945;
 - j. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1/Pnps./Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama;
 - k. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
 - l. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;
 - m. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
 - n. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- o. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- p. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- q. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- r. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- s. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- t. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- u. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- v. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- w. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- x. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- y. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- z. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- aa. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

bb.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

cc.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak;

dd.dan lain sebagainya.

Sedangkan data primer dapat diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu dengan menggunakan kuesioner yang disusun secara terbuka maupun tertutup dan dengan melakukan wawancara dengan para responden.

Dalam menentukan objek penelitian, peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan instansi-instansi yang diteliti;
2. Menentukan narasumber atau responden;

Penentuan narasumber/responden dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menunjuk secara langsung narasumber/responden yang akan diteliti sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai karena alasan yang terdapat di dalam institusi. Narasumber terdiri dari pejabat/praktisi di bidang hukum, yang dapat berupa :

1. Pejabat yang berwenang yang ada di Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Pejabat yang berwenang yang ada di Pengadilan Negeri;
3. Pejabat yang berwenang yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penelitian hukum ini direncanakan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak mulai disetujuinya usulan penelitian hukum / penulisan disertasi dengan judul :

“Reformasi Manajemen Sistem Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Peradilan Pidana yang Terpadu, Mandiri dan Berwibawa Berlandaskan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan”.

Secara umum pelaksanaannya meliputi, sebagai berikut :

1. Persiapan penelitian, selama 1 (satu) bulan, mempersiapkan bahan-bahan kepustakaan serta penyusunan materi penelitian, daftar wawancara dan daftar kuesioner.
2. Pelaksanaan penelitian, yaitu melaksanakan pengumpulan data di lapangan selama 2 (dua) bulan.
3. Penyempurnaan pengumpulan data di lapangan, dilakukan selama 1 (satu) bulan.
4. Penganalisaan data serta penyusunan laporan hasil penelitian, dilakukan selama 2 (dua) bulan. Penyusunan laporan hasil penelitian berupa penyusunan data hasil penelitian, pembuatan laporan, penggandaan serta seminar hasil penelitian.

Metode sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* maksudnya narasumber/responden yang digunakan di dalam penelitian hukum ini sudah ditentukan terlebih dahulu di mana narasumber/responden tersebut memiliki ciri-ciri sebagai objek penelitian (objek permasalahan).³¹¹

Untuk mendapatkan data tersebut dan data lain yang diperlukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah, sebagai berikut :

- a. Studi Pustaka (Penelitian Kepustakaan), yang berkaitan erat dengan penelitian hukum ini. Hal demikian ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum (sarjana hukum) atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga guna memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal ataupun data melalui naskah-naskah resmi yang ada. Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpulan

³¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Op. Cit., hlm. 51.

data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.³¹²

- b. Angket merupakan terjemahan dari istilah Inggris “*questionnaire*”.³¹³
Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia memberikan respons sesuai dengan permintaan pengguna. Menurut cara memberikan respons, angket dibedakan menjadi angket terbuka dan angket tertutup.³¹⁴
Menurut Suharsimi Arikunto, kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.³¹⁵
- c. Studi Observasi (Penelitian Lapangan), yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian langsung ke tempat-tempat objek penelitian. Hal demikian ini dimaksudkan guna mendukung data hasil penelitian kepustakaan.³¹⁶ Dalam penelitian kualitatif dikenal adanya tiga tahapan observasi, yaitu : (1).observasi deskriptif atau *deskriptive observation*; (2).observasi terfokus atau *focused observation*; dan (3).observasi terseleksi atau *selected observation*.³¹⁷
- d. Wawancara.

Di dalam penelitian hukum ini jenis wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin yang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan kepada responden sehingga dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan (*interview guide*). Catatan mengenai pokok-pokok yang akan

³¹² Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.Cit., hlm. 21.

³¹³ Sanapiah Faisal, 1981, *Dasar dan Teknik Menyusun Angket*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 1.

³¹⁴ Suharsimi Arikunto, 2013, *Manajemen Penelitian*, Op. Cit., hlm. 102-103.

³¹⁵ Suharsimi Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Rev. III, Cet.X, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 139-144.

³¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Op. Cit., hlm. 54.

³¹⁷ Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Penerbit Yayasan Asih Asah Asuh Malang, Malang, hlm.80.

ditanyakan tersebut bertujuan agar arah wawancara tetap dapat dikendalikan serta tidak menyimpang dari pedoman sebelumnya, sedangkan bebas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah untuk menghindari kekakuan dalam proses wawancara.³¹⁸

D. BATASAN OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN

Berkaitan dengan judul penelitian “Reformasi Manajemen Sistem Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Peradilan Pidana yang Terpadu, Mandiri dan Berwibawa Berlandaskan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Berbiaya Ringan”, maka di dalam penelitian ini:

Yang dimaksud dengan peradilan pidana yang terpadu adalah sebagai berikut: peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengadilan dapat diartikan sebagai :

1. dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah.
2. proses mengadili; keputusan hakim.
3. sidang hakim ketika mengadili perkara.
4. rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.³¹⁹

Kata “terpadu” menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengandung arti “sudah dipadu (disatukan, dilebur menjadi satu, dan sebagainya).”³²⁰ Sedangkan “mandiri” mempunyai arti “dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung kepada orang lain.”³²¹ “Berwibawa” mempunyai arti “mempunyai wibawa (sehingga disegani dan dipatuhi)”, sedangkan “kewibawaan” mempunyai arti :

- “1. hal yang menyangkut wibawa; yang mempunyai sifat wibawa atau

³¹⁸ *Ibid.*, hlm.57.

³¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.7.

³²⁰ *Ibid.*, hlm.713.

³²¹ *Ibid.*, hlm.625.

2. kekuasaan yang diakui dan ditaati.”³²²

Adapun “cepat” mempunyai makna, sebagai berikut :

- “1. dalam waktu singkat dapat mencapai jarak jauh (perjalanan, gerakan, kejadian, dan sebagainya), laju,deras.
2. cekatan, tangkas.
3. terdahulu (tentang arloji, jam) maju, mendahului.
4. dalam waktu singkat, lekas, segera.”³²³

Dalam konteks “peradilan yang cepat” adalah “peradilan yang dilakukan dalam waktu singkat, lekas, segera”.

Sedangkan “sederhana” mengandung makna :

- “1. sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya).
2. bersahaja, tidak berlebih-lebihan.
3. tidak banyak seluk beluknya (kesulitan dan sebagainya), tidak banyak pernik, lugas”.³²⁴ Dalam konteks “peradilan yang sederhana” adalah peradilan yang dilaksanakan tidak banyak seluk beluknya, tidak banyak kesulitan dan sebagainya, tidak banyak pernik dan bersifat lugas.

“Biaya” mengandung makna “uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan dan sebagainya) sesuatu, ongkos, belanja, pengeluaran.”³²⁵ Adapun kata “ringan” mengandung makna :

- “1. sedikit bobotnya, enteng, tidak berat.
2. tidak membahayakan, tidak parah.
3. mudah dikerjakan.

³²² *Ibid.*, hlm.1129.

³²³ *Ibid.*, hlm.184.

³²⁴ *Ibid.*, hlm.888.

³²⁵ *Ibid.*, hlm.129.

4. sedikit (tidak besar) jumlahnya.
5. sebentar (tidak lama).”³²⁶Dalam konteks “peradilan yang berbiaya ringan” mengandung makna, bahwa “peradilan tersebut diselenggarakan dengan biaya sedikit (tidak besar) jumlahnya.”

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari sub-sub sistem pendukungnya, yaitu lembaga penyidikan, lembaga penuntutan, lembaga pemeriksaan dan penjatuhan putusan serta lembaga pelaksana pidana termasuk di dalamnya adalah lembaga penasihat hukum/ pendampingan hukum serta lembaga perlindungan saksi dan korban.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem harus memenuhi ciri-ciri, sebagai berikut:

- a. adanya kerjasama yang terpadu antara subsistem;
- b. adanya suatu tujuan yang tertentu dari keseluruhan sistem;
- c. adanya transformasi nilai antar subsistem tersebut;
- d. adanya sistem kontrol baik yang positif maupun negatif yang bersifat efektif untuk mengendalikan keterpaduan;
- e. adanya *interface* yang mencakup *interaksi* (saling mempengaruhi), *interkoneksi* (saling keterhubungan satu sama lain) dan *interdependensi* (saling ketergantungan sesuai hirarki yang ada).³²⁷

Menurut William A. Schrode dan Voich dalam Satjipto Rahardjo, sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain yang meliputi pengertian-pengertian dasar, sebagai berikut :

- a. sistem itu berorientasi kepada tujuan;
- b. keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*);
- c. suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yaitu

³²⁶ *Ibid.*, hlm.842.

³²⁷ Bambang Dwi Baskoro, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.187.

- lingkungannya (keterbukaan sistem);
- d. bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (*transformasi*);
- e. masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
- f. ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).³²⁸

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan *the network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*. Sistem peradilan pidana merupakan sistem fisik (*physical system*) sebab kerjasama antara bagian-bagian secara terpadu guna mencapai tujuan bersama tersebut bersifat fisik. Di samping itu, ia juga bersifat abstrak (*abstract system*) karena kerjasama yang terpadu tersebut dapat dilihat sebagai suatu konsistensi pemikiran dan tata nilai antar sub sistem guna mencapai suatu tujuan bersama.³²⁹ Keterpaduan tersebut meliputi keterpaduan substansi, keterpaduan struktur dan keterpaduan budaya.

Dalam judul penelitian hukum (disertasi) ini penulis memilih menggunakan kata “reformasi” daripada kata lain, seperti ”restrukturisasi” dengan beberapa pertimbangan. Dalam ilmu politik, pengertian “reformasi” dibedakan, tetapi tidak dipertentangkan dengan pengertian “revolusi”. “Reformasi” menghendaki perubahan dalam sistem yang berlaku atau *a change within the system*. Sedangkan pada “revolusi” menghendaki *a change of the system itself* (H.Roeslan Abdulgani dalam orasi ilmiah *Pancasila dan Reformasi* dalam rangka peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni 1998 di Gedung Pancasila Deparlu, Pejambon Jakarta).³³⁰

Reformasi hukum yang mendesak untuk dilakukan itu karena gagalnya sistem hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya bukan semata-mata karena

³²⁸ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.48-49.

³²⁹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.vii dan hlm.15.

³³⁰ H. A. Arjoso, *Hakikat Reformasi Total, Tanggapan atas Tulisan J.B. Mangunwijaya*, KOMPAS, Selasa 21 Juli 1998, hlm.4.

kegagalan lembaga hukum dalam masyarakat. Kegagalan dari suatu lembaga dalam masyarakat tidak berdiri sendiri, sebab lembaga-lembaga dalam masyarakat saling berhubungan satu sama lain secara *sistematik* dan *sinergis* sedemikian rupa sehingga kegagalan pada suatu bidang merupakan kegagalan pula dari fungsi bekerjanya lembaga-lembaga lain dalam satu masyarakat. Di samping itu *reformasi hukum* yang hendak dilakukan dan sedang dilakukan harus meliputi *reformasi* seluruh unsur sistem hukum, yakni : substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (aparatus pelaksana hukum, penegak hukum dan pembuat hukum) serta budaya hukum (semangat penyelenggara negara, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat dan lain sebagainya). Dengan demikian reformasi hukum itu meliputi pada tahap atau tingkat *formulasi/legislasi* (tahap pembuatan peraturan perundang-undangan), tahap atau tingkat *aplikasi* atau *enforcement* (tahap penegakan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan) serta tahap atau tingkat *eksekusi* atau *judiciary* di tingkat peradilan.

Menurut Barda Nawawi Arief, reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan substansi hukum (*legal substance reform*) tetapi juga pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) serta pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*). Bahkan dalam situasi krisis saat ini yang penting justru pembaharuan aspek immateriil dari hukum, yaitu pembaharuan budaya hukum, etika/moral hukum dan ilmu/pendidikan hukum. Aspek immateriil dari pembaharuan hukum inilah seyogyanya lebih diutamakan apalagi apabila sasaran utamanya adalah penegakan keadilan. Terlebih lagi hakikat pembaharuan/pembangunan hukum bukan terletak pada aspek formal (seperti terbentuknya undang-undang baru), struktur kelembagaan dan mekanisme/ prosedur baru, bertambahnya bangunan dan sarana/prasarana lainnya yang serba baru), melainkan justru terletak pada aspek immateriil ini, yaitu membangun budaya dan nilai-nilai kejiwaan dari hukum.³³¹

³³¹ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Hukum dan Keadilan*, KOMPAS, Kamis 23 April 1998, hlm.4.

Proses penegakan hukum (*law enforcement process*) dan proses pembentukan hukum nasional (*law making process*) saling berkaitan satu sama lain, karena proses penegakan hukum yang baik, benar dan bertanggung jawab dapat dipengaruhi oleh proses pembentukan hukum yang aspiratif, proaktif dan kredibel pada masanya. Proses pembentukan hukum yang aspiratif, proaktif dan kredibel hanya dapat berlangsung dengan baik jika dilaksanakan dengan memenuhi 3 (tiga) koridor utama yaitu : (1).koridor akademik (penyusunan naskah akademik); (2).koridor administratif (koordinasi horisontal antar departemen terkait); dan (3).koridor sosial politik (pembahasan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan/atau Dewan Perwakilan Daerah), sehingga dalam proses pembentukan hukum perlu dimasukkan dan dipertimbangkan pula kendala-kendala dalam proses penegakan hukumnya. Di dalam proses pembentukan hukum itu pula partisipasi masyarakat luas perlu ditingkatkan sebagai bagian penting dalam upaya sosialisasi hukum secara merata (*law illumination process*). Faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (pejabat pemasyarakatan, hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum), akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³³²

Dengan demikian, variabel-variabel penelitian di dalam penelitian hukum ini antara lain:

1. Fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi kepemimpinan serta fungsi pengendalian.
2. Peradilan pidana yang terpadu, mandiri dan berwibawa dengan berlandaskan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

³³² Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

E. METODE ANALISA DATA DAN PENYAJIAN DATA

Setelah data diperoleh, maka data tersebut diolah dengan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut :

1. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan peneliti;
2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya;
3. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penulisan, sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.³³³

Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas, yang dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai berikut :

1. mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;
2. memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian;
3. mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum atau doktrin;
4. menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada;
5. menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif.³³⁴

³³³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

³³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

Semua data yang diperlukan setelah dikumpulkan, dipilah-pilah dan dipilih yang representatif untuk kemudian dianalisa. Menurut Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.³³⁵ Selanjutnya oleh Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad dikatakan, bahwa analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat-sifat seperti deskriptif, evaluatif dan preskriptif. (1).Deskriptif; Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam

menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Analisis dapat dilakukan secara *deskriptifanalitis*, maksudnya memaparkan data yang ada kemudian menganalisisnya serta mengkaitkan dengan teori-teori yang ada relevansinya dan dengan norma-norma yang mempunyai kualitas guna menyelesaikan permasalahan.

(2).Evaluatif; Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesa dari teori yang diajukan diterima atau tidak.

(3).Preskriptif; Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi ini untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.³³⁶

³³⁵ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, Op. Cit.*, hlm. 183.

³³⁶ *Ibid.*, hlm. 183-184.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.³³⁷

Penelitian dilakukan dengan bertumpu pada unsur-unsur normatif kualitatif namun tidak mengesampingkan unsur-unsur normatif kuantitatifnya sehingga penyelesaian permasalahan dapat diharapkan efektif dan efisien. Data yang terkumpul dari penelitian ini dianalisa secara normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian hukum ini bertitik tolak pada norma-norma hukum positif. Kualitatif, karena data yang relevan dengan materi penelitian diinventarisasikan lalu dikaji secara kritis dengan norma-norma hukum positif untuk selanjutnya dicari pemecahannya/penyelesaiannya sehingga didapat suatu simpulan berupa hukum positif *in concreto* yang dicari.³³⁸ Menurut David D. Williams sebagaimana dikutip oleh Sanapiah Faisal menyebutkan penelitian kualitatif berbeda dalam tiga hal, yaitu :

- (1).pandangan-pandangan dasar (*axioms*) tentang sifat realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, kemungkinan penarikan generalisasi, kemungkinan dalam membangun jalinan hubungan kausal, serta peranan nilai dalam penelitian;
- (2).karakteristik pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri; dan
- (3).proses yang diikuti untuk melaksanakan penelitian kualitatif.³³⁹

Dengan menggunakan metode kualitatif tidaklah semata-mata bertujuan

³³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Op. Cit., hlm.98.

³³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.22-23.

³³⁹ Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Op. Cit., hlm. 17.

untuk mengungkapkan kebenaran belaka akan tetapi guna memahami kebenaran itu sendiri. Analisa juga dilakukan secara kuantitatif dengan melakukan tabulasi data yang masuk yang diperoleh dari wawancara dengan para responden dan data yang diperoleh dari instansi-instansi yang bersangkutan untuk memudahkan dianalisa secara kualitatif dengan dukungan kepustakaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Menurut Sanapiah Faisal, penelitian kualitatif sebagai suatu “alat penelitian” , haruslah digunakan untuk menjawab masalah-masalah yang memang sesuai diselesaikan dengan penelitian kualitatif itu sendiri.³⁴⁰

Untuk memudahkan penggarapan penulisan laporan hasil penelitian, maka dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengolahan dan penyajian data, sebagai berikut :

1. Editing, yaitu memeriksa atau meneliti data yang diperoleh guna menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kenyataan ataukah belum.³⁴¹ Lexy J. Moleong menyatakan *editing* sebagai tindakan melakukan pengecekan terhadap kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidakserasian informasi.³⁴²
2. Klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan data yang telah diperoleh kemudian menggabung-gabungkannya ke dalam golongan yang sejenis. Menurut Vredendregt, *classifying* ialah mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan suatu analisis.³⁴³
3. Aplikasi, yaitu menerapkan data yang telah diklasifikasikan dan digolong-golongkan tersebut ke dalam bab-bab serta sub-sub bab dari laporan hasil penelitian ini.

³⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 31.

³⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Op. Cit., hlm.64.

³⁴² Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 216-217.

³⁴³ Vredendregt, 1978, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Penerbit Gramedia, Jakarta, hlm. 126.

Khusus untuk peraturan perundangan-undangan, langkah-langkah yang dilakukan, sebagai berikut :

1. Memilih pasal-pasal yang berisi norma-norma hukum yang mengatur masalah tindak pidana yang dilakukan
2. Menyusun sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu.
3. Menyusun konstruksi yuridis guna mengatasi permasalahan yang bersangkutan.

Data tersebut di atas kemudian penulis sajikan di dalam Bab IV. Hasil-hasil Penelitian dan Pembahasan, khususnya mengenai hal-hal dari studi kepustakaan sebagian penulis sajikan di dalam Bab II. Tinjauan Pustaka serta Bab IV. Hasil-hasil Penelitian dan Pembahasan. Adapun simpulan dari data tersebut kemudian penulis sajikan di dalam Bab V. Penutup.

BAB IV

HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN LEMBAGA/PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BELUM TERPADU, MANDIRI DAN BERWIBAWA SERTA BELUM BERLANDASKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

Hukum pidana materiil atau lazim disebut hukum pidana mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat menjatuhkan pidana dan sanksi pidana itu sendiri. Suryono Sutarto menyatakan, bahwa hukum pidana tidak mengatur tentang cara bagaimana atau tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan, apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana itu sendiri. Untuk itulah kemudian muncul hukum acara pidana yang berfungsi untuk melaksanakan atau menegakkan hukum pidana.³⁴⁴ Pembicaraan yang menyangkut masalah penegakan hukum pidana pada umumnya dan penegakan hukum pidana di Indonesia pada khususnya, pada hakikatnya merupakan pembicaraan tentang masalah penanggulangan kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat (Indonesia). Hal ini berkaitan erat dengan politik kriminal (Indonesia) yang merupakan usaha yang rasional pemerintah (Indonesia) dan masyarakat (Indonesia) dalam menanggulangi kejahatan yang secara operasional dapat dilakukan dengan *sarana penal* (hukum pidana) maupun *sarana non penal* (selain hukum pidana). Penanggulangan kejahatan melalui *sarana penal* dan *non penal* tidak dapat dipisahkan, melainkan saling melengkapi oleh karenanya keduanya harus diintegrasikan di dalam pelaksanaannya.

³⁴⁴ Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.1.

Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan melalui *sarana penal* secara operasional dilakukan melalui tahapan-tahapan yang saling melengkapi. Diawali dari tahap *formulasi*, yakni tahap penyusunan peraturan perundang-undangan hukum pidana secara luas oleh badan-badan pembentuk peraturan perundang-undangan. Disusul dengan tahap *aplikasi*, yaitu tahap penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan hukum pidana tersebut. Selanjutnya adalah tahap *eksekusi*, yakni tahap penegakan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan hukum pidana tersebut.³⁴⁵ Pada tahap *formulasi*, perumusan norma-norma hukum pidana yang diharapkan tersebut di dalamnya terkandung unsur substantif (*legal substance*), unsur struktural (*legal structure*) serta unsur kultural (*legal culture*) dari suatu masyarakat di mana sistem hukum pidana yang bersangkutan itu berlaku (Indonesia). Pada tahap *aplikasi*, peraturan perundang-undangan hukum pidana tersebut diberlakukan pada saat diundangkan di Lembaran Negara/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia atau sesuai ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pada tahap *eksekusi*, sistem hukum pidana tersebut secara operasional bekerja melalui suatu sistem yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari sub-subsistem pendukungnya, yaitu lembaga penyidikan, lembaga penuntutan, lembaga pemeriksaan dan penjatuhan putusan serta lembaga pelaksana pidana, termasuk di dalamnya adalah lembaga jasa pelayanan hukum/pendampingan hukum serta lembaga perlindungan saksi dan korban. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem harus memenuhi ciri-ciri, sebagai berikut:

1. adanya kerjasama yang terpadu antara subsistem;
2. adanya suatu tujuan yang tertentu dari keseluruhan sistem;
3. adanya transformasi nilai antar subsistem tersebut;

³⁴⁵ Barda Nawawi Arief, Tanpa Tahun, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.30-31.

4. adanya sistem kontrol baik yang positif maupun negatif yang bersifat efektif untuk mengendalikan keterpaduan;
5. adanya *interface* yang mencakup *interaksi* (saling mempengaruhi), *interkoneksi* (saling keterhubungan satu sama lain) dan *interdependensi* (saling ketergantungan sesuai hirarki yang ada).³⁴⁶

Adapun William A. Schrode dan Voich sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain yang meliputi pengertian-pengertian dasar, sebagai berikut :

1. sistem itu berorientasi kepada tujuan;
2. keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*);
3. suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem);
4. bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (*transformasi*);
5. masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
6. ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).³⁴⁷

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan *the network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*. Sistem peradilan pidana merupakan sistem fisik (*physical system*), sebab kerjasama antara bagian-bagian secara terpadu guna mencapai tujuan bersama tersebut bersifat fisik. Keterpaduan tersebut meliputi keterpaduan substansi, keterpaduan struktur dan dan keterpaduan budaya. Di samping itu, ia juga bersifat abstrak (*abstract system*), karena kerjasama yang terpadu tersebut dapat dilihat sebagai suatu konsistensi pemikiran dan tata nilai antar subsistem guna mencapai suatu

³⁴⁶ Bambang Dwi Baskoro, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm.187.

³⁴⁷ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.48-49.

tujuan bersama.³⁴⁸ Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terbuka, karena tampak sekali adanya pengaruh yang sangat besar dari masyarakat dalam proses untuk mencapai tujuan bersama yang bersangkutan. Dengan demikian, faktor-faktor yang ada di luar sistem yang dapat berupa : ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses pencapaian tujuan yang dimaksud. Dapat dikatakan, bahwa sistem peradilan pidana itu juga bersifat *indeterministik* (tidak dapat menentukan diri sendiri secara penuh) serta bersifat *probabilistik* (terbuka pada setiap kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses pencapaian tujuan).³⁴⁹

Penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana merupakan *penal policy*. *Penal policy* merupakan bagian dari *criminal policy*, yaitu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana *penal*. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana mempunyai dua muka, yaitu :

Pertama, sistem peradilan pidana merupakan bagian dari *social defence policy* (kebijakan perlindungan masyarakat), dan;

Kedua, sistem peradilan pidana merupakan bagian dari *social welfare policy* (kebijakan kesejahteraan masyarakat). Oleh sebab itu, tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yakni kesejahteraan masyarakat.³⁵⁰

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka menurut Mardjono Reksodiputro, tugas sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut :

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta
3. berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi

³⁴⁸ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.15. Muladi menggunakan definisi dari *Black's Law Dictionary*.

³⁴⁹ *Ibid.*, hlm.vii dan 15. Muladi mengutip pendapat Gordon B. Davis, 1974 dalam *Management Information System Conceptual Foundation Structure and Development*, (Mc.Graw-Hill: Tokyo, Sidney, 81-86).

³⁵⁰ *Ibid.*, hlm.8.

lagi perbuatannya.³⁵¹

1. Sistem/Lembaga Peradilan Pidana Belum Terpadu

I Made Gelgel menyatakan, sistem peradilan pidana adalah sistem penegakan hukum di dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sistem tersebut akan dapat berhasil apabila sebagian laporan dan keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat ditangani dan diselesaikan, yang pada akhirnya diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang setimpal. Keberhasilan sistem tersebut sangat tergantung pada kerjasama dan koordinasi semua komponen yang terlibat di dalam sistem tersebut, di dalam apa yang disebut sebagai *integrated criminal justice system*.³⁵²

Masih tampaknya gejala *fragmentaris* pada gerak operasional sub-subsistem peradilan pidana pada satu sisi dan pada sisi lain adanya urgensi pemahaman pendekatan sistem terhadap penegakan hukum pidana sudah merupakan suatu hal yang mendesak. Pendekatan sistem terhadap penegakan hukum pidana berkaitan dengan adanya kebutuhan *sinkronisasi* pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum di bidang hukum pidana sebagai upaya untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Pada dasarnya sistem peradilan pidana merupakan subsistem penegakan hukum dan lebih luas lagi merupakan subsistem sosial, oleh sebab itu kultur penegakan hukum serta segi kemasyarakatan harus diperhatikan.

Terdapat beberapa hal yang terjadi selama ini dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang perlu diperhatikan untuk segera diubah dan diperbaiki, agar dapat tercapai suatu sistem peradilan pidana yang terpadu, sebagai berikut :

Pertama, masih tampak adanya gejala *fragmentaris* dan *instansional sentris* pada sub-subsistem pendukung sistem peradilan pidana, bukan pada arah

³⁵¹ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Kedua*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.140-147.

³⁵² Bambang Dwi Baskoro, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm.188.

pencapaian tujuan sistem peradilan pidana (tujuan bersama). Bahkan gejala ini tampak pula pada subsistem itu sendiri, misalnya : pada subsistem lembaga penyelidikan dan penyidikan. Mekanisme tata kerja serta koordinasi antara pejabat penyidik yang bervariasi ini menyebabkan adanya suatu lembaga penyidikan yang kurang mandiri dan terpadu.

Di dalam lembaga penyidikan terdapat beberapa instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, yaitu :

a) Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (untuk selanjutnya disingkat Penyidik POLRI), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf

a. KUHAP, sebagai berikut :

Penyidik adalah :

- a. pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewenangan Penyidik POLRI melakukan penyidikan ditegaskan kembali di dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebenarnya Pembentuk KUHAP bermaksud untuk mendudukan Penyidik POLRI sebagai Penyidik Tunggal (tidak ada penyidik lain selain penyidik POLRI), namun pada akhirnya muncul beberapa instansi/institusi yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik secara penuh (bersifat mandiri). Di samping itu, sebenarnya ada penyidik yang tidak mandiri/tidak mempunyai kewenangan penuh sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yakni yang oleh Pembentuk Undang-Undang disebut sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu (untuk selanjutnya disingkat PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Undang-undang khusus yang terkadang bersifat administratif ini banyak memunculkan PPNS-PPNS,

misalnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Pasal 399 ayat (1) dan Pasal 400 ayat (1) Undang-Undang Penerbangan). Di dalam Pasal 399 ayat (1) Undang-Undang Penerbangan dikatakan, sebagai berikut :

Pasal 399 ayat (1) Undang-Undang Penerbangan :

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

PPNS juga disebutkan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan lain sebagainya. Di dalam Pasal 77 Undang-Undang Tentang Kehutanan dikatakan, sebagai berikut :

Pasal 77 Undang-Undang Kehutanan :

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.³⁵³

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, Penyidik POLRI menjadi koordinator dan pengawas terhadap aktivitas kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS-PPNS tersebut di atas,³⁵⁴ sebagaimana ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (2) KUHAP :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

- b) PPNS Kepabeanan dan Cukai³⁵⁵ , yang didasarkan pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan :

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik

³⁵³ Lihat pula di dalam ketentuan Pasal 29 UU Negara RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (redaksi isi pasalnya hampir sama). PPNS yang dimaksud dalam hal ini adalah PNS di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kewenangan POLRI dalam melakukan penyidikan dikukuhkan dengan UU Negara RI Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diganti dengan UU Negara RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁵⁵ Kedua bidang yang berbeda ini disatukan dalam satu gugus tugas yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau ke luar Daerah Pabean dan Pemungutan Bea Masuk (Pasal 1 butir ke-1 UU Negara RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan), sedangkan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir ke-1 UU Negara RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai).

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.

Di dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Cukai :

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.

Pada mulanya PPNS Kepabeanan dan Cukai menjalankan tugas dan kewenangannya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI, kemudian berdasarkan Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *jo* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *jo* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai menjadi penyidik mandiri. Adapun bunyi Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagai berikut :

Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Kepabeanan :

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.³⁵⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PPNS Kepabeanan dan Cukai memberitahukan tentang dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya langsung ke Penuntut Umum.

- c) Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (untuk selanjutnya disingkat Penyidik Perwira TNI AL), yang berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pasal 31 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan,³⁵⁷ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran³⁵⁸, menjadi koordinator penyidik di wilayah perairan³⁵⁹ sebagaimana dimaksud oleh undang-undang tersebut. Di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dikatakan, sebagai berikut :

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia :

³⁵⁶ Lihat pula di dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3) UU Negara RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang secara redaksional sama dengan bunyi Pasal 112 ayat (3) UU Negara RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

³⁵⁷ Sudah diganti dengan UU Negara RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Negara RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dapat dilakukan bersama PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepolisian Air (Polair) dan TNI Angkatan Laut. Lihat Kompas, Selasa 20 Oktober 2015, hlm.17.

³⁵⁸ Sudah diganti dengan UU Negara RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

³⁵⁹ Ketentuan ini dianulir berdasarkan Pasal 110 huruf b UU Negara RI Nomor 45 Tahun 2009 ttg Perubahan Atas UU Negara RI Nomor 31 Tahun 2004 ttg Perikanan.

Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Ketentuan tersebut di atas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 110 huruf b Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110 huruf b Undang-Undang Perikanan :

Ketentuan mengenai penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan ketentuan mengenai pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sedangkan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya menyatakan, sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya

Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.³⁶⁰

³⁶⁰ www.hukumonline.com diunduh Selasa 15 Desember 2015 jam 17.00 WIB.

Jadi, ketentuan ini merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Pasal 31 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009.

- d) Penyidik Kejaksaan, yang berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak-tindak pidana khusus sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7/Drt./1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dan undang-undang lain yang juga memberikan kewenangan kepada instansi/institusi Kejaksaan di dalam penyidikan³⁶¹, sebagaimana ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 284 ayat (2) KUHAP :

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.³⁶²

³⁶¹ Lihat Barda Nawawi Arief, 1997, "Seminar Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia": *Kebijakan Legislatif Tentang Kewenangan Penyidikan dalam Konteks Kebijakan Penegakan Hukum Pidana yang Integral*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 20 Desember 1997, hlm.6-10.

³⁶² Waktu dua tahun tersebut berlanjut sampai sekarang, bahkan kemudian dikukuhkan di dalam Undang-Undang Kejaksaan (UU Negara RI Nomor 16 Tahun 2004).

Kewenangan lembaga Kejaksaan di dalam melakukan penyidikan tindak pidana khusus dikukuhkan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 huruf b Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, jaksa penuntut umum berkewajiban melakukan penyidikan dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, sebagaimana ditegaskan berikut : dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;³⁶³

- e) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi.³⁶⁴ Di Dalam Pasal 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan, sebagai berikut :

Pasal 6 Undang-Undang KPK :

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan

³⁶³ www.hukumonline.com diunduh Kamis 10 Februari 2016 jam 19.00 WIB.

³⁶⁴ Di samping itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga berwenang melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi sama halnya dengan Kejaksaan. Lihat pula dalam Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.168-173.

- pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c. melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
 - d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.
- f) PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang berdasarkan Pasal 94 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disingkat UUPPLH), PPNS Lingkungan dan Kehutanan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum. Namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (3) dan ayat (4) UUPPLH, UUPPLH tetap mengharuskan PPNS lingkungan untuk berkoordinasi dengan Penyidik Polri dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan serta di dalam memberitahukan penuntut umum tentang dimulainya penyidikan dengan memberikan tembusan kepada Penyidik Polri.³⁶⁵ Di samping itu berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dikatakan, sebagai berikut :

Pasal 32 Undang-Undang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

³⁶⁵ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.259. Di dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, kedua lingkup ini dijadikan satu kementerian yaitu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Juga berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan :

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Namun di dalam Penjelasan Pasal 77 ayat (3) -nya dikatakan, sebagai berikut :

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik POLRI, dan hasil penyidikan diserahkan kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik POLRI. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan.

Mekanisme hubungan koordinasi antara pejabat pegawai negeri sipil dengan pejabat penyidik POLRI dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g) Penyidik Badan Narkotika Nasional (untuk selanjutnya disingkat BNN), yang berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berwenang

melakukan penyelidikan serta penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta prekursor narkoba³⁶⁶, sebagaimana ditegaskan di dalam rumusan sebagai berikut :

Pasal 71

Undang-Undang Narkotika

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 80 huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyidik BNN³⁶⁷ berwenang mengajukan langsung berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika, penyidikan juga dapat dilakukan oleh Penyidik POLRI, sebagaimana ditegaskan dalam rumusan Pasal 81 sebagai berikut :

Pasal 81

Undang-Undang tentang Narkotika

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN Berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan

³⁶⁶ Menurut Pasal 1 butir ke-1 UU Negara RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Adapun yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir ke-2 UU Negara RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

³⁶⁷ Berdasarkan Peraturan Presiden Rep. Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 ttg Badan Narkotika Nasional, di samping ada BNN pada tingkat pusat, terdapat pula BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota pada tingkat provinsi atau pada tingkat kabupaten/kota.

Undang-Undang ini.”

- h) PPNS Kelautan dan Perikanan³⁶⁸, yang berdasarkan Pasal 73 ayat (1) *jo* ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan sebagai penyidik mandiri sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Perikanan yang berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 73 ayat (5)

Undang-Undang tentang Perikanan

“Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.”³⁶⁹

Berdasarkan Pasal 276 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pemerintah membentuk direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (untuk selanjutnya disingkat KPLP) yang dalam bahasa Inggris disebut *Sea and Coast Guard* dengan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 278, bahwa KPLP memiliki kewenangan :

- a. melaksanakan patroli laut;
- b. melakukan pengejaran seketika (*hotpursuit*);
- c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan
- d. melakukan penyidikan.³⁷⁰

³⁶⁸ Berdasarkan Pasal 276 UU Negara RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Penyidik ini berada di Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai.

³⁶⁹ www.hukumonline.com diunduh Selasa tanggal 9 Februari 2016 jam 17.00 WIB.

³⁷⁰ Soleman B. Ponto, 2015, *Antara Direktorat, KPLP dan Bakamla*, Kompas, Senin 13 Juli 2015, hlm. 7.

Pembentukan KPLP ini berbenturan dengan keberadaan Badan Keamanan Laut (untuk selanjutnya disingkat Bakamla) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang sebenarnya berdasarkan Pasal 60 Undang-undang tersebut hanya berwenang melakukan patrol laut.³⁷¹

Masing-masing instansi yang berwenang melakukan penyidikan tersebut berdiri mandiri secara administratif. Penyidik Polri berada di bawah Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Perwira TNI AL berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan, Penyidik Kejaksaan berada di bawah Kejaksaan Agung, PPNS Kepabeanan dan Cukai berada di bawah Departemen Keuangan, Penyidik BNN berada di bawah Badan Narkotika Nasional. Sedangkan PPNS-PPNS lain berada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (2) KUHAP

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Jadi Penyidik POLRI dinyatakan sebagai koordinator dan pengawas PPNS. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol.: Skep/369/XI/1985 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri

³⁷¹ *Ibid.*

Sipil, pada Romawi V butir ke-2 disebutkan, bahwa pembinaan koordinasi POLRI dengan PPNS dilaksanakan berdasarkan asas-asas :

- a. Kemandirian, dalam arti bahwa koordinasi dan pengawasan tidak akan mengurangi dan akan dijalankan secara proporsional sesuai dengan asas kemandirian dari setiap departemen;
- b. Kebersamaan, dalam arti bahwa koordinasi tidak akan mengurangi integritas pimpinan dan kewenangan dari departemen tersebut;
- c. Legalitas, dalam arti bahwa koordinasi berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu sebagaimana tercantum dalam KUHAP.³⁷²

Sedangkan pada butir ke-3 disebutkan, bahwa :

- a. Kebijakan dalam koordinasi dan pengawasan adalah upaya mewujudkan kesamaptan PPNS agar mampu secara mandiri menanggulangi tindak pidana dalam lingkup kewenangan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya;
- b. Strategi koordinasi adalah mewujudkan kemampuan PPNS yang memenuhi persyaratan kecepatan dan mobilitas.³⁷³

Dengan demikian, koordinasi dan pengawasan terhadap aktivitas kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS-PPNS selain PPNS Kepabeanan dan Cukai yang dilakukan oleh Penyidik POLRI sebenarnya juga dimaksudkan untuk tetap menghormati kemandirian.

³⁷² Eddhi Sutarto, 1997, "Seminar Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia": *Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 20 Desember 1997, hlm.12-13.

³⁷³ *Ibid.*, hlm.13. Ketentuan ini sudah diangkat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.

Mekanisme pengaturan demikian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa. Di dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut dikatakan, sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan.
- (2) Koordinasi di bidang operasional penyidikan dilaksanakan dengan cara :
 - a. menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
 - c. memberikan bantuan, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS;
 - d. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS;
 - f. menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan ke Penuntut Umum;
 - g. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan
 - h. menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.

Adapun pejabat yang berwenang menunjuk/mengangkat pejabat penyidik tersebut di atas adalah :

- a. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), untuk Penyidik Polri (Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- b. Panglima Tentara Nasional Indonesia, untuk Perwira TNI AL (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan).³⁷⁴
- c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk PPNS berdasarkan usulan dari Departemen/Kementerian yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- d. Jaksa Agung, untuk penyidik Kejaksaan.
- e. Pimpinan KPK, untuk penyidik KPK.
- f. Kepala BNN, untuk penyidik BNN Pusat, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

³⁷⁴ Lihat Kompas, Selasa 20 Oktober 2015, hlm.17. Undang-Undang ini sudah diganti dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang tersebut penyidikan kapal ilegal dapat dilakukan bersama oleh PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Penyidik POLRI dalam hal ini Kepolisian Air (Polair) dan Penyidik TNI Angkatan Laut.

Di samping itu, di dalam tindak-tindak pidana tertentu seperti pelanggaran hak asasi manusia³⁷⁵ yang berat, instansi yang berwenang melakukan penyelidikan tidak sama dengan instansi yang berwenang melakukan penyidikan.³⁷⁶ Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disingkat KOMNAS HAM) yang dapat membentuk tim *ad hoc* penyidik yang terdiri dari KOMNAS HAM dan unsur masyarakat (Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).³⁷⁷ Didalam peristiwa-peristiwa kecelakaan dengan menggunakan alat transportasi massal *investigasi* dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (untuk selanjutnya disingkat KNKT)³⁷⁸, yang kemudian menyampaikan hasil *investigasi* tersebut kepada Badan Reserse Kriminal (untuk selanjutnya disingkat Bareskrim) POLRI sebagaimana diungkapkan di media massa, sebagai berikut :

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menerjunkan penyidiknya guna melakukan investigasi kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501. Tim penyidik akan menelusuri ada tidaknya unsur pidana dalam kasus kecelakaan ini. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan, tim ini bekerja independen dan tidak terkait dengan investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi

³⁷⁵ Berdasarkan Pasal 1 butir ke-2 UU Negara RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

³⁷⁶ Penyelidikan merupakan tindakan yang mendahului proses penyidikan, sehingga institusi yang berwenang melakukan penyidikan juga berwenang melakukan penyelidikan.

³⁷⁷ Bambang Dwi Baskoro, 2011, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.41.

³⁷⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Nasional_Keselamatan_Transportasi diunduh Sabtu tgl.5 Desember 2015 jam 10.00 WIB. KNKT dibentuk sejak 1999 berdasarkan Keppres Nomor 105 Tahun 1999 tentang KNKT *jo* Perpres Nomor 2 Tahun 2012 tentang KNKT. KNKT di dalam Bahasa Inggris disebut *National Transportation Safety Committee (NTSC)*. Lihat pula Kompas, Sabtu 5 Desember 2015, hlm.19.

(KNKT).³⁷⁹

KNKT ini kemudian dikukuhkan di dalam Pasal 357 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan³⁸⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT bertugas :

- a. melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi;
- b. memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait, dan
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi.

Di dalam pelestarian, pencegahan dan pemberantasan jual beli secara *illegal* terhadap tanaman atau satwa yang dilindungi, penyelidikan dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (untuk selanjutnya disingkat BKSDA).³⁸¹ Untuk tindak-tindak pidana di bidang kefarmasian, produk makanan dan minuman dan kosmetika penyelidikan dilakukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Illegal Badan Pengawas Obat dan Makanan (untuk selanjutnya disingkat BPOM).³⁸² Untuk tindak pidana korupsi, penyelidikan dilakukan dengan meminta/mendapatkan bantuan berupa hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (untuk selanjutnya disingkat

³⁷⁹ Koran Sindo, Jumat 9 Januari 2015, hlm.2.

³⁸⁰ Kewenangan KNKT juga dituangkan di dalam UU Negara RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan UU Negara RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

³⁸¹ Kompas, Rabu 5 Agustus 2015, hlm.23.

³⁸² Kompas, Rabu 26 Agustus 2015, hlm.23; Kompas, Selasa 22 September 2015, hlm. 26 dan Kompas, Rabu 28 Oktober 2015, hlm.13.

PPATK)³⁸³ atas permintaan penyidik untuk menghitung ada/tidaknya kerugian negara atau ada/ tidaknya transaksi yang mencurigakan³⁸⁴ dalam suatu rekening milik seseorang. Menurut Johan Budi SP, audit BPK tidak berkorelasi langsung dengan penetapan seseorang menjadi tersangka oleh KPK. Audit investigasi hanya menjadi pelengkap penyidikan yang sudah dilakukan KPK. Penghitungan kerugian negara oleh BPK menjadi sangat penting dalam penyidikan kasus korupsi oleh KPK, karena menjadi salah satu alat bukti yang digunakan KPK untuk menjerat koruptor.³⁸⁵ Aparat penegak hukum seyogianya mendasari penyidikannya pada hasil audit BPK dan BPKP sebab kedua lembaga tersebut ditugasi oleh Negara, secara professional melakukan audit. Akan tetapi, yang terjadi sekarang, aparat penegak hukum seringkali mengingkari hasil audit BPK dan BPKP dan menggunakan hasil dan cara hitungannya sendiri.³⁸⁶ Berkaitan dengan PPATK, sebagaimana diungkapkan di *Media Indonesia*, sebagai berikut :

Sepanjang tahun ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan 127 transaksi mencurigakan yang diduga terkait dengan korupsi. Selain itu, masih ada ratusan transaksi lain yang diduga bersangkut paut dengan tindak pidana, dari narkoba hingga terorisme. Temuan transaksi mencurigakan tersebut dilaporkan ke KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian R.I.³⁸⁷

³⁸³ Kompas, Jumat 17 Mei 2013, hlm. 1.

Kepala PPATK M. Yusuf mengatakan, dana dari rekening Fathonah mengalir ke banyak pihak. Dana itu mengalir ke pribadi-pribadi antara lain lebih dari 20 perempuan.

³⁸⁴ Kompas, Kamis 31 Desember 2015, hlm. 1-11. Transaksi keuangan mencurigakan merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan profil pendapatan pemilik rekening. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Ciri umum : a. tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas; b. menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar, dilakukan secara berulang di luar kewajiban; c. di luar kebiasaan dan kewajiban aktivitas transaksi nasabah.

³⁸⁵ Kompas, Jumat 2 November 2012, hlm. 4.

³⁸⁶ Hamid Awaluddin, 2015, *Kriminalisasi Diskresi*, Kompas, Jumat 28 Agustus 2015, hlm. 7.

³⁸⁷ Media Indonesia, Selasa 29 Desember 2015, hlm. 5.

Gejala fragmentaris yang demikian ini juga tampak pada sub-subsistem lainnya, yaitu :

- a. Subsistem penuntutan, yang menjadi kewenangan lembaga Kejaksaan untuk lingkup Peradilan Umum (dalam lingkup peradilan umum terdapat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya dibaca Pengadilan Tipikor) di mana Kejaksaan dan KPK diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi) serta Oditur Militer untuk Peradilan Militer.³⁸⁸

Di dalam Pasal 13 KUHAP ditegaskan, bahwa Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kewenangan ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut :

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

³⁸⁸ Di dalam tulisan ini tidak akan dibahas mengenai Oditur Militer dan Pengadilan Militer. Pada awalnya lembaga penuntut umum dimonopoli oleh Kejaksaan, tetapi dengan diundangkannya UU Negara RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPTPK terdapat *dual system prosecution*, di mana di samping Kejaksaan berwenang melakukan penuntutan, KPK juga berwenang melakukan penuntutan.

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- b. Subsistem lembaga pemeriksaan/penjatuhan putusan yang dipegang oleh Badan-badan Pengadilan yang masing-masing berdiri mandiri secara fungsional, tetapi diarahkan oleh Mahkamah Agung. Terdapat dua macam peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana, yakni Peradilan Umum dan Peradilan Militer dengan kewenangan masing-masing terlepas dari masalah koneksitas. Dalam menangani kasus-kasus koneksitas saja dapat terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa yang berwenang menangani, apakah akan diadili melalui Peradilan Umum ataupun melalui Peradilan Militer dan yang sering terjadi adalah *splitsing*, padahal KUHAP dibuat untuk menghindari hal demikian terjadi. Belum lagi mengingat bahwa di dalam lingkup peradilan umum telah diadakan *differensiasi* atau *spesialisasi* dalam bentuk adanya Pengadilan Anak (berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), Pengadilan Hak Asasi Manusia (berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (dibentuk berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diatur kembali dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).

Di samping itu, juga terdapat Pengadilan Perikanan yang dibentuk pada Pengadilan-pengadilan negeri berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.³⁸⁹ Di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dikatakan, bahwa Dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.³⁹⁰ Di samping itu, terdapat *kuasi pengadilan khusus dalam lingkup peradilan umum*, yaitu di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pemeriksaan perkara perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), pada pengadilan negeri dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim karir di pengadilan negeri setempat dan dua orang hakim ad hoc.³⁹¹

³⁸⁹ Kompas, Rabu 15 April 2015, hlm. 22 dan Kompas, Jumat 15 Mei 2015, hlm.18.

³⁹⁰ Pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 71 ayat (2) UU Neg.R.I. No.45 Tahun 2009 ttg Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 ttg Perikanan). Daerah hukum pengadilan perikanan sesuai dengan daerah hukum PN ybs (Pasal 71 ayat (4) UU Perubahan atas UU Perikanan). Untuk pertama kali dibentuk pengadilan perikanan di PN. Jakarta Utara, PN. Medan, PN. Pontianak, PN. Bitung dan PN. Tual (Pasal 71 ayat (3) UU Perubahan atas UU Perikanan).

³⁹¹ www.hukumonline.com diunduh Sabtu tanggal 5 Desember 2015 jam 17.00 WIB.Ciri khas pengadilan khusus adalah adanya hakim *ad hoc*, kecuali dalam Pengadilan Anak.

c. Subsistem lembaga pelaksanaan putusan dan pelaksanaan pidana³⁹² yang terdiri dari:

- 1) lembaga pelaksana putusan Pengadilan, yaitu Kejaksaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 270 KUHP, yang menyatakan bahwa Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.
- 2) lembaga pelaksana pidana, yang terdiri dari :
 - a) Regu Tembak dari Satuan Brigadir Mobil Kepolisian Republik Indonesia (Sat Brimob POLRI) sebagai pelaksana pidana mati (diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 /Pnps/1964 tentang Tata Cara Pidana Mati *jo* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi)³⁹³;
 - b) Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana penjara dan pidana kurungan (diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan);
 - c) Rumah Tutupan (diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang

³⁹² Ide perbedaan ini gagasan Prof. Sudarto (guru besar FH Undip).

³⁹³ Pidana mati dilaksanakan setelah ada Keppres tentang penolakan permohonan grasi dari terpidana.

Rumah Tutupan)³⁹⁴;

- d) Jaksa sebagai pelaksana pidana denda (Pasal 270 KUHP)³⁹⁵ dan pidana perampasan barang-barang tertentu (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHP); dan
- e) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai pengganti Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA)³⁹⁶ untuk menangani pelaku tindak pidana yang belum dewasa yang dijatuhi putusan pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak (diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan kemudian diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).³⁹⁷

Di samping itu, masing-masing komponen ternyata merumuskan fungsi dan tugas mereka secara terkotak-kotak komponen lainnya tanpa mengingat tujuan bersama yang sebenarnya hendak dicapai oleh sistem peradilan pidana.³⁹⁸ Sebagai contoh, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Negara

³⁹⁴ Berdasarkan alasan yuridis normatif peraturan perundang-undangan ini masih berlaku karena belum pernah dicabut, tetapi menurut yuridis sosiologis lembaga ini sudah tidak ada.

³⁹⁵ Lihat pula bunyi Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHP.

³⁹⁶ Balai Bispa didirikan berdasarkan Srt.Kepala Dir.Jend. Bina Tuna Warga Dep. Kehakiman RI No.PN.DDP.3.1./2219/1977 yang kemudian berdasarkan Kep.Men. Kehakiman RI No.M.01. PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai BISPA tgl.12-2-1997 berubah nama menjadi BAPAS.

³⁹⁷ Berdasarkan UU Negara RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pemerintah membentuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya; Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung; Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan sosial bagi Anak. Adapun BAPAS ditunjuk sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

³⁹⁸ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Op. Cit., hlm.143.

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka menurut Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-undang itu : Jaksa dapat melakukan “pemeriksaan tambahan” untuk mengantisipasi proses bolak-baliknya berkas perkara berdasar Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.³⁹⁹ Kemudian di dalam Pasal 29 Undang-undang tersebut juga ditegaskan kembali kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana khusus berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP.⁴⁰⁰ Selanjutnya Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah dan Badan Legislatif mengeluarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-undang tersebut menegaskan, bahwa Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap “semua tindak pidana” sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁰¹ Hal demikian ini dapat mengurangi keharmonisan hubungan antar instansi penegak hukum yang pada akhirnya dapat mengurangi “kewibawaan aparat penegak hukum”.

³⁹⁹ Ketentuan yang sama dituangkan di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e UU Negara RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan pengganti UU Negara RI Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan hukum ini merupakan ketentuan hukum yang bersifat *disfungsional* (tidak berfungsi karena tidak pernah digunakan).

⁴⁰⁰ Ketentuan yang sama dituangkan di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Negara RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan pengganti UU Negara RI Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴⁰¹ Ketentuan yang sama dituangkan di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Negara RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggantikan UU Negara RI Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan asas *lex posterior derogate legi priori*, maka yang dipakai adalah UU Negara RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di dalam Pasal 39 huruf b UU Negara RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pembentuk Undang-Undang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan dalam hal berkas perkara belum lengkap.

Menurut Satya Arinanto, “gesekan-gesekan” antara Kejaksaan dengan Kepolisian merupakan masalah klasik yang sudah ada sejak tahun 1946 dan tampak memuncak setelah keluarnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1997 tersebut.⁴⁰² Pada perkembangan selanjutnya ternyata permasalahan yang terjadi di antara kedua tersebut semakin memuncak dengan terjadinya penangkapan dan penahanan empat orang jaksa dan seorang staf tata usaha Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diduga telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Tambahan dan keterangan palsu atas kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi di bawah sumpah dalam kasus pembunuhan Nyo Beng Seng dengan tersangka Eng San pada tanggal 4 Desember 1997 yang lalu.⁴⁰³

Permasalahan ini sebenarnya tidak akan terjadi, apabila ada kesadaran pemahaman terhadap sejarah terbentuknya kewenangan kedua lembaga tersebut. Pada Jaman Pemerintahan Hindia Belanda, kedudukan lembaga Kejaksaan dapat dibagi dalam dua masa, yaitu :

- a. masa sebelum berlakunya *Het Herziene Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya disingkat *HIR*), dan
- b. masa berlakunya *HIR* (*Staatsblad* 1941 Nomor 44).⁴⁰⁴

Pada masa sebelum berlakunya *HIR*, yang berlaku adalah *Inlandsch Reglement* (*Staatsblad* 1848 Nomor 16). Kedudukan

⁴⁰² Satya Arinanto, 1997, “Seminar Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Pokok-pokok Pikiran tentang Pengalokasian Kewenangan Penyidikan dalam Peraturan Perundang-undangan (Kebijakan Legislatif)*, Semarang : 20 Desember 1997, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), hlm.1-7.

⁴⁰³ *Loc.Cit.*

Gesekan antara lembaga Kejaksaan dengan lembaga Kepolisian dapat diperparah dengan munculnya Pasal 39 huruf b UU Negara R.I. Nomor 18 Tahun 2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁴⁰⁴ R. Soesilo, 1978, *Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik (Dalam Penyelesaian Perkara Sebagai Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, hlm.28.

lembaga Kejaksaan pada masa itu tidak jelas, sebab :

- 1). Berdasarkan Pasal 62 *Rechterlijke Ordonnantie* (*Staatsblad* 1848 Nomor 57) dinyatakan, bahwa pekerjaan penuntut umum di Pengadilan Negeri (*Landraad*) dilakukan oleh para jaksa yang melakukan tugasnya sesuai kedudukannya di bawah Kepala-kepala Karesidenan, sehingga dalam praktiknya :
 - a). jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut perkara (yang berwenang menuntut adalah *Assistant Resident*);
 - b) jaksa tidak boleh membuat *requisitoir*, ia hanya memberikan perasaan dan pendapatnya saja (lihat Pasal 292 *Inlandsch Reglement*);
 - c) jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan putusan Pengadilan (eksekusi putusan Pengadilan), yang berwenang adalah *Assistant Resident* (lihat Pasal 325 *Inlandsch Reglement*).
- 2). Berdasarkan Pasal 57 *Inlandsch Reglement*, jaksa juga berada di bawah kekuasaan Bupati yang dapat memerintah kepadanya.⁴⁰⁵

Dengan berlakunya *HIR*, maka terjadi perubahan yakni *Assistant Resident* berubah menjadi *magistraat* (penuntut umum), sedangkan jaksa menjadi *ajunct magistraat*.⁴⁰⁶

Pada Masa Pemerintahan Balatentara Jepang, semua pekerjaan *Assistant Resident* diserahkan kepada Jaksa dengan

⁴⁰⁵ *Ibid.*, hlm.28-29

⁴⁰⁶ *Ibid.*, hlm.29-30.

pangkat *Tio Kensatsu Kyokuco* (Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri) yang berada di bawah pengawasan *Kotoo Kensatsu Kyokuco* (Kepala Kejaksaan Tinggi), sehingga Jaksa menjadi “Penuntut Umum”. Kemudian dengan *Osamu Seirei* Nomor 49, lembaga Kejaksaan dimasukkan ke dalam *Cianbu* (Departemen Keamanan) dengan tugas mencari kejahatan dan pelanggaran yang terjadi (sebagai pejabat penyidik), menuntut perkara (sebagai pejabat penuntut umum) dan menjalankan putusan hakim (sebagai pejabat eksekusi).⁴⁰⁷

Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia dengan Maklumat Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 1 Oktober 1945, menetapkan lembaga kejaksaan masuk ke dalam Departemen Kehakiman, sedangkan Kepolisian masuk ke dalam Departemen Dalam Negeri. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tertanggal 10 Oktober 1945, ditetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang dulu berlaku tetap berlaku sampai undang-undang itu diganti, sehingga perkataan-perkataan *magistraats* di dalam *HIR* diganti dengan “jaksa”⁴⁰⁸

Adapun kedudukan lembaga Kepolisian, sebenarnya adalah sebagai *hulp magistraat* dalam peradilan pidana. Mengenai tugas kepolisian dapat dibedakan antara :

- a. tugas kepolisian preventif, yaitu mencegah agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar kepentingan hukum di dalam masyarakat;
- b. tugas kepolisian represif, yaitu melakukan tindakan-tindakan

⁴⁰⁷ *Ibid.*, hlm.30.

⁴⁰⁸ *Ibid.*, hlm.30-32.

setelah terjadi pelanggaran kepentingan hukum di dalam masyarakat guna menemukan tindak pidana apa yang telah terjadi serta siapa pelakunya. Tugas ini merupakan tugas kepolisian yustisi/kepolisian kehakiman yang berawal sejak saat timbulnya atau setelah terjadinya suatu tindak pidana sampai pada diserahkannya Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri guna mendapatkan keadilan.⁴⁰⁹

Di dalam Pasal 38 *HIR* ditentukan antara lain, bahwa yang *Yustisi* dan *Magistraat* pada Pengadilan Negeri, juga para *substitut* dan *ajunct magistraat* yang diperbantukan kepada Jaksa masing-masing untuk daerah kekuasaan di mana mereka diangkat. Menurut pasal tersebut jelaslah, bahwa yang disertai pimpinan kepolisian represif/kepolisian kehakiman adalah para jaksa yang semuanya itu menurut undang-undang berada di bawah pimpinan Jaksa Agung, yang merupakan Penuntut Umum Tertinggi. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa guna kepentingan penuntutan perkara pidana, para jaksa itu melakukan tugasnya dengan dibantu oleh para pejabat penyidik.⁴¹⁰

Kedua, belum/tidak adanya pemimpin utama dari keseluruhan sistem peradilan pidana (*the top law enforcement officer/the top of leader*), yang baru ada hanyalah pemimpin utama (*the head of institution*) dari masing-masing subsistem (*from the subsystem of criminal justice system*) yang antara subsistem satu dengan subsistem yang lain tidak saling terkait.

⁴⁰⁹ *Ibid.*, hlm.53.

⁴¹⁰ *Ibid.*, hlm.53-81.

Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan batasan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “kekuasaan kehakiman” melainkan hanya menegaskan badan mana yang disertai tugas/kewenangan untuk melakukan atau melaksanakan kekuasaan kehakiman (yaitu diserahkan kepada Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya menurut undang-undang). Demikian pula di dalam Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang hanya menegaskan sifat/kedudukan/eksistensi dari kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai kekuasaan yang merdeka dan mandiri terlepas dari pengaruh/intervensi kekuasaan pemerintah.⁴¹¹

Batasan pengertian “kekuasaan kehakiman” dimunculkan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sejak diundangkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 dijelaskan, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

⁴¹¹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.25-26.

Pengertian demikian ini oleh Barda Nawawi Arief dikatakan sebagai pengertian *kekuasaan kehakiman dalam arti sempit*, karena diidentikkan dengan *kekuasaan peradilan* atau *kekuasaan mengadili*, namun apabila dikaji mendalam kekuasaan kehakiman pada hakikatnya adalah *kekuasaan negara dalam menegakkan hukum* atau *kekuasaan penegakan hukum*. Jadi, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Di dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana, kekuasaan kehakiman atau kekuasaan penegakan hukum di bidang hukum pidana mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan oleh badan/lembaga penyidikan, kekuasaan penuntutan oleh badan/lembaga penuntut umum, kekuasaan mengadili oleh badan/lembaga pengadilan, kekuasaan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, serta kekuasaan melaksanakan putusan/pidana oleh badan/lembaga eksekusi.⁴¹²

Dengan demikian, kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana dilaksanakan oleh enam badan/lembaga yang dapat disebut sebagai badan-badan kehakiman yang tidak identik dengan badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (lembaga penyelidikan dan penyidikan, lembaga penuntutan, lembaga pemeriksaan dan penjatuhan putusan, lembaga pelaksanaan putusan dan pidana, lembaga perlindungan saksi dan korban serta lembaga jasa pelayanan hukum/bantuan hukum. Kekuasaan kehakiman di bidang pidana terdiri dari empat tahap (tahap penyelidikan dan

⁴¹² *Ibid.*, hlm.26-28.

penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dan tahap pelaksanaan putusan dan pidana). Keempat tahap kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang biasa dikenal sebagai sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).⁴¹³

Untuk itu pula perlu diadakan kebijakan legislatif yang menegaskan pejabat mana yang bertanggung jawab sebagai pengendali atau *the top law enforcement officer* dalam keseluruhan proses penegakan hukum, bukan hanya sekedar pejabat tertinggi/puncak pada masing-masing tahapan/proses penegakan hukum. Dengan melihat, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum/undang-undang, maka Mahkamah Agung adalah pejabat pengendali. Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi mengawasi penegakan hukum oleh badan-badan pengadilan, tetapi juga mengawasi seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan pengadilan dijatuhkan dan dilaksanakan/dieksekusi.⁴¹⁴

Ketiga, proses pemeriksaan perkara masih kurang terkoordinasi secara baik, karena adanya *ego sektoral* pada masing-masing institusi sehingga dapat mengakibatkan pengesampingan asas *contante justitie* (asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan). Keengganan untuk berkoordinasi dengan institusi terkait lainnya serta sikap lebih mengutamakan kepentingan institusi sendiri yang demikian jelas dapat merusak “sistem” secara

⁴¹³ *Ibid.*, hlm.28. Tahapan tersebut adalah tahapan penyelidikan dan penyidikan, tahapan penuntutan, tahapan pemeriksaan sidang pengadilan serta tahapan pelaksanaan putusan.

⁴¹⁴ *Ibid.*, hlm.33.

keseluruhan yang pada akhirnya menurunkan kewibawaan aparat penegak hukum dan/atau kewibawaan hukum secara keseluruhan. *Ego sektoral* tersebut memicu terjadinya konflik antar penegak hukum.

Terjadinya konflik antar penegak hukum karena dugaan melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih penegak hukum dari suatu lembaga/instansi oleh penegak hukum dari lembaga/instansi lain atau karena perebutan kewenangan dalam menangani suatu perkara atau rivalitas yang negatif. Misalnya penahanan terhadap komisioner KPK, yaitu Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah yang dilakukan oleh POLRI karena tuduhan keduanya telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dikarenakan adanya suap terhadap keduanya.⁴¹⁵ Dalam peristiwa tersebut menunjukkan adanya pengabaian fungsi koordinasi yang dimiliki oleh KPK sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, perebutan kewenangan penyidikan dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korlantas antara KPK dengan POLRI. Dalam peristiwa tersebut juga menunjukkan adanya pengabaian fungsi koordinasi yang dimiliki oleh KPK.⁴¹⁶

Secara garis besar dapat dikatakan, bahwa persinggungan atau “gesekan-gesekan” antar lembaga penegak hukum tersebut dapat dikemukakan, antara lain sebagai berikut :

⁴¹⁵ Lihat Suara Merdeka, Kamis 10 September 2009, hlm.1-11; Kompas, Jumat 30 Oktober 2009, hlm.1-15 dan Media Indonesia, Selasa 3 November 2009, hlm.5.

⁴¹⁶ Lihat Kompas, Rabu 1 Agustus 2012, hlm.3 dan hlm.1-15; Kompas, Sabtu 4 Agustus 2012, hlm.3, hlm.7 dan hlm.15 dan Suara Merdeka, Rabu 8 Agustus 2012, hlm.6-7.

a. Persinggungan antara KPK dengan POLRI memiliki “sejarah” yang panjang, tercatat beberapa kejadian, antara lain :

- 1) Penarikan dua pejabat KPK (Brigjen. Pol. Bambang Widaryatmo, Direktur Penyidikan pada Deputi Penindakan KPK dan Ajun Komisaris Besar (AKBP) Akhmad Wiyagus, Direktur Pengaduan Masyarakat KPK) oleh Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri secara tiba-tiba yang dinilai tidak objektif oleh KPK dan sarat kepentingan.⁴¹⁷
- 2) Tanggal 19 Juni 2009 pimpinan KPK Chandra Hamzah diperiksa penyidik Kepolisian Daerah (Polda) terkait penyadapan yang dilakukan KPK terhadap Nasrudin dan Rani Juliani.⁴¹⁸
- 3) Tanggal 30 Juni 2009 Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komisaris Jenderal (Komjen) Susno Duadji mengaku disadap oleh KPK terkait penggelapan dalam kasus Bank Century, yang kemudian dibantah sendiri oleh Komjen Susno Duadji pada tanggal 2 Juli 2009.⁴¹⁹
- 4) Komjen Susno Duadji di dalam Majalah *Tempo* edisi 6-12 Juli 200 melontarkan polemik yang dikenal oleh masyarakat sebagai “Cicak versus Buaya Jilid I”.⁴²⁰
- 5) Penahanan terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, dua pimpinan KPK *nonaktif* sejak dinyatakan tersangka oleh POLRI sejak tanggal 15 September 2009 dengan tuduhan yang berubah-ubah: mulai dari penyadapan yang melanggar hukum, penyalahgunaan

⁴¹⁷ Kompas, Senin 24 Nopember 2008, hlm.3 dan Koran Sindo, Rabu 26 Nopember 2008, hlm.11.

⁴¹⁸ Suara Merdeka, Kamis 10 September 2009, hlm.1-11.

⁴¹⁹ Suara Merdeka, Kamis 10 September 2009, hlm.1-11.

⁴²⁰ Suara Merdeka, Kamis 10 September 2009, hlm.1-11.

wewenang, menerima suap, sampai yang terakhir pemerasan. Bahkan, disebutkan alasan penahanan adalah karena keduanya sering mengadakan jumpa pers untuk meracuni opini publik.⁴²¹

- 6) Tanggal 27-30 Juli 2012 KPK menetapkan Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) POLRI, sebagai tersangka kasus simulator Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan dilanjutkan dengan penggeledahan markas Korlantas POLRI.⁴²²
- 7) POLRI mengirim surat ke KPK, isinya tidak memperpanjang masa tugas 20 penyidik yang akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2012. Pada tanggal 3 Oktober 2012 masih ada 5 (lima) penyidik yang bertahan di KPK, sehingga pada tanggal 5 Oktober 2012 POLRI mengancam akan menjemput paksa 5 (lima) penyidik (Kompol Bambang Sukoco, Kompol Rilo Pambudi, Kompol Rizka Anungnata, Kompol Hendri N. Christian dan Kompol Sugiyanto) yang bertahan di KPK tersebut.⁴²³ Tanggal 5 Oktober 2012 bersamaan waktunya dengan maksud akan menjemput paksa 5 (lima) penyidik yang bertahan di KPK, POLRI hendak melakukan penangkapan terhadap Komisaris Polisi (Kompol) Novel Baswedan atas tuduhan melakukan penganiayaan terhadap 6 (enam) orang tersangka pencurian sarang burung walet di

⁴²¹ Tjipta Lesmana, 2009, *Biang Keladi Bernama Anggoro*, Suara Merdeka, Selasa 3 Nopember 2009, hlm.6-11.

⁴²² Suara Merdeka, Sabtu 6 Oktober 2012, hlm.1-11.

⁴²³ Suara Merdeka, Sabtu 6 Oktober 2012, hlm.1-11 dan Suara Merdeka, Selasa 9 Oktober 2012, hlm.1-7.

Bengkulu pada tanggal 18 Februari 2004.⁴²⁴

- 8) Tanggal 8 Oktober 2012, 5 (lima) penyidik yang bersangkutan telah diangkat oleh KPK menjadi penyidik tetap KPK, padahal mereka belum mengundurkan diri sesuai prosedur dan masih menjadi anggota POLRI.⁴²⁵
- 9) Penangkapan terhadap Komisaris Polisi Novel Baswedan pada tanggal 1 Mei 2015 atas tuduhan penganiayaan di Bengkulu tanggal 18 Februari 2004 yang dilanjutkan dengan tindakan penahanan oleh Bareskrim POLRI.⁴²⁶
- 10) Penetapan tersangka oleh KPK kepada Komjen. Budi Gunawan pada tanggal 13 Januari 2015 atas kasus penerimaan gratifikasi, tiga hari setelah Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo mengusulkan nama Komjen. Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.⁴²⁷
- 11) Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada tanggal 23 Januari 2015 yang diikuti dengan penahanan atas dugaan pemberian keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi R.I. pada 7 Juli 2010.⁴²⁸
- 12) Tanggal 28 April 2015 Polda Sulawesi Selatan Barat (Sulselbar) melakukan penahanan terhadap Ketua KPK Abraham Samad setelah menetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen atas nama

⁴²⁴ Kompas, Kamis 11 Oktober 2012, hlm.1-15; Kompas, Jumat 12 Oktober 2012, hlm.1; Kompas, Sabtu 13 Oktober 2012, hlm.1 dan Kompas, Selasa 23 Oktober 2012, hlm.5.

⁴²⁵ Suara Merdeka, Selasa 9 Oktober 2012, hlm.1-7.

⁴²⁶ Suara Merdeka, Sabtu 2 Mei 2015, hlm.1-7; Media Indonesia, Sabtu, 2 Mei 2015, hlm.1 dan Suara Merdeka, Minggu 3 Mei 2015, hlm.1-9.

⁴²⁷ Kompas, Minggu 18 Januari 2015, hlm.1.

⁴²⁸ SoloPos, Sabtu 24 Januari 2015, hlm.1-2. Saksi Ratna terbukti memberikan kesaksian palsu di sidang MK Juli 2010 atas perkara sengketa Pilkada Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah dan telah dijatuhi pidana lima bulan penjara oleh PN. Jakarta Pusat pada Maret 2011.

Feriyani Lim, meskipun pada akhirnya penahanan tersebut ditanggguhkan.⁴²⁹

- b. Persinggungan antara KPK dengan MA juga pernah terjadi saat KPK melakukan penangkapan pada akhir September 2005 terhadap Kepala Bagian Kepegawaian MA Malam Pagi Sinoaji, Wakil Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) MA Suhartoyo, staf bagian perdata Sriyadi, staf KORPRI MA Sudi Ahmad dan staf bagian perjalanan Pono Waluyo serta mantan hakim di Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (PT DIY) yang kemudian menjadi pengacara, Harini Wiyoso. Penangkapan dilakukan atas dugaan kasus suap yang melibatkan pengusaha Probosutedjo sebesar Rp.5 miliar untuk memperlulus permohonan kasasi. Bahkan pada tanggal 27 Oktober 2005 dilakukan penggeledahan di ruang kerja Bagir Manan dan dua hakim anggota perkara Probosutedjo lainnya, Parman Suparman dan Usman Karim.⁴³⁰
- c. Selanjutnya, persinggungan juga terjadi antara KPK dengan Kejaksaan Agung pada awal Maret 2008 ketika KPK menangkap salah satu Ketua Tim Penyelidikan Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Urip Tri Gunawan. Urip tertangkap tangan saat menerima suap dari pengusaha Artalyta Suryani sebesar 660 ribu dollar AS atau senilai lebih Rp.6 miliar. Dalam persidangan terungkap, Artalyta tidak hanya menghubungi Urip, melainkan juga Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman dan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung M. Salim serta Jaksa

⁴²⁹ Kompas, Senin 25 Mei 2015, hlm.1-15.

⁴³⁰ Lihat Suara Merdeka, Selasa 21 Juli 2009, hlm.1-15.

Agung Muda Bidang Intelijen Wisnu Subroto.⁴³¹

- d. Persinggungan juga terjadi antara KPK dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada kurun Mei 2009 ketika BPKP berencana menarik 25 auditornya yang ditugaskan di KPK .Kemudian diikuti pernyataan Kepala BPKP Didi Widayadi yang “ngotot” akan melakukan audit terhadap KPK, padahal selama ini KPK telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁴³²
- e. Persinggungan juga terjadi antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung terutama pada saat ditetapkannya sebagai tersangka pada Jumat tanggal 10 Juli 2015 kepada Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrohman Syahuridalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Sarpin Rizaldi, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setelah Mahkamah Mahkamah Agung menolak usulan Komisi Yudisial untuk penjatuhan sanksi nonpalu selama enam bulan terhadap hakim Sarpin Rizaldi.⁴³³

Sebelumnya, sejumlah hakim yang tergabung dalam wadah Ikatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama mengajukan keberatan atas turut campurnya Komisi Yudisial.⁴³⁴

Permasalahan tersebut di atas sebenarnya dapat dihindari, apabila lembaga-lembaga penegak hukum yang bersangkutan mematuhi ketentuan hukum yang ada pada Pasal

⁴³¹ Lihat Suara Merdeka, Selasa 21 Juli 2009, hlm.1-15.

⁴³² Lihat Suara Merdeka, Selasa 21 Juli 2009, hlm.1-15.

⁴³³ Kompas, Minggu 12 Juli 2015, hlm. 5; Kompas, Rabu 15 Juli 2015,hlm.5 dan Kompas, Sabtu 22 Agustus 2015,hlm.3

⁴³⁴ Kompas, Selasa 28 April 2015, hlm.3.

6 huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun di luar tindak pidana korupsi, dalam beberapa tindak pidana, seperti tindak pidana kepabeanan dan cukai terdapat dua lembaga penyidik yang berwenang⁴³⁵ (Penyidik POLRI dan PPNS Kepabeanan dan Cukai), tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan terdapat dua lembaga penyidik yang berwenang (Penyidik POLRI dan Penyidik PNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan)⁴³⁶, tindak pidana narkoba terdapat dua lembaga penyidik yang berwenang (Penyidik POLRI dan Penyidik BNN), tindak pidana di bidang perikanan terdapat tiga lembaga penyidik yang berwenang (Penyidik POLRI, Penyidik Perwira TNI AL dan PPNS Kelautan dan Perikanan), tanpa menyebutkan mengenai fungsi koordinasi itu diserahkan kepada siapa.⁴³⁷

Keempat, ketentuan hukum yang kurang jelas atau ketentuan hukum yang tumpang tindih antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya, seperti ketiadaan standar mengenai terbukti secara sah dan meyakinkannya suatu perbuatan (*beyond a reasonable doubt*). Penilaian kesalahan terdakwa haruslah berdasarkan bukti yang berakibat terjadinya perbedaan persepsi antara penyidik, jaksa penuntut umum dan/atau hakim.

⁴³⁵ Yang dimaksud adalah penyidik mandiri, yaitu penyidik yang setelah membuat berkas perkara dapat menyerahkan berkas perkara tersebut langsung kepada penuntut umum.

⁴³⁶ Dalam tindak pidana perusakan hutan lembaga kejaksaan juga berwenang, sehingga menjadi tiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan. Berdasarkan Pasal 39 huruf b UU Negara RI Nomor 18 Tahun 2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, jaksa penuntut umum wajib melakukan penyidikan tindak pidana perusakan hutan, apabila berkas perkara dari penyidik belum lengkap.

⁴³⁷ Berdasarkan Pasal 73 ayat (3) UU Negara RI Nomor 45 Tahun 2009 ttg Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 ttg Perikanan, maka Menteri Perikanan dan Kelautan menjadi koordinator dengan membentuk forum koordinasi. Ini merupakan hal yang tidak lazim.

Sebagai contoh, adalah kasus dibebaskannya enam terdakwa dalam perkara korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2010 senilai Rp.27,5 miliar pada Senin 19 Januari 2015 oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan alasan mereka telah menyalurkan dana bantuan sosial tersebut sesuai prosedur, sedangkan sebagian dana yang tidak sampai kepada si penerima berada di luar tanggung jawab mereka dan mereka terbukti tidak memperoleh kekayaan dari perbuatan tersebut.⁴³⁸ Sedangkan, pada sisi lain mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi terpaksa berurusan dengan hukum karena penyaluran dana bantuan sosial sebesar Rp.1,2 miliar.⁴³⁹ Konsistensi serta konsekuensi terhadap risiko yang mungkin timbul karena kekuranglengkapan di dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat penegak hukum harus disadari oleh aparat penegak hukum lainnya.

Ketiadaan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 1 butir ke-14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum. Menurut Eddy OS Hiariej, “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP ada pada *bewijsminimum* atau minimum bukti yang diperlukan untuk memproses seseorang dalam perkara pidana, yakni dua alat bukti. Hal ini pun masih menimbulkan perdebatan apakah dua alat bukti tersebut secara kualitatif atau

⁴³⁸ Kompas, Selasa 20 Januari 2015, hlm. 22. Mereka itu adalah mantan Sekda Muchlis Gafuri, mantan Kabiro Kesra yang kini Wakil Bupati Banjar Akhmad Fauzan Saleh, mantan Asisten II Fitri Rifani, mantan Kabiro Kesra Anang Bakhranie, serta dua mantan Bendahara Biro Kesra Mahliana dan Sarmili.

⁴³⁹ Suara Merdeka, Jumat 9 Januari 2015, hlm. 10.

kuantitatif. Secara kualitatif, dua alat bukti itu harus ada keterangan saksi dan keterangan ahli atau keterangan saksi dan surat atau keterangan ahli dan surat dan seterusnya. Secara kuantitatif, dua saksi sudah dihitung sebagai dua alat bukti.⁴⁴⁰

Ketiadaan standar batasan praperadilan mengakibatkan kerawanan adanya penyelundupan hukum. Menurut Indriyanto Seno Adji, praperadilan yang dipimpin hakim tunggal dengan kewenangan sangat besar, sangat rawan adanya penyelundupan hukum dan berharap agar Mahkamah Agung mengeluarkan batasan terkait prosedural persidangan praperadilan. Pedoman MA diperlukan sepanjang tidak membatasi kebebasan hakim. Memperbaiki prosedural praperadilan merupakan suatu kewajiban, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas, yakni putusan berbeda untuk hal yang sama. Sebagai contoh, dalam beberapa perkara praperadilan memang terjadi perbedaan tafsir putusan. Putusan hakim Haswandi yang menggunakan dalil bahwa penyelidik dan penyidik KPK non-POLRI tidak sah sehingga berimbas pada perintah dihentikannya kasus Hadi Poernomo. Sedangkan dalam kasus Jero Wacik dan Suryadharma Ali, keabsahan penyelidik dan penyidik non-POLRI dianggap valid.⁴⁴¹ Begitu pula dengan apa yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Udjiati dalam kasus permohonan Praperadilan R. J. Lino yang menyatakan, bahwa semua upaya yang dilakukan oleh KPK sah, termasuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.⁴⁴² Jadi, ke depan tantangan dalam pemberantasan kejahatan bertambah berat terutama setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor

⁴⁴⁰ Eddy OS Hiarij, 2015, *Menyandera dengan Status Tersangka*, Kompas, Rabu 21 Januari 2015, hlm. 7.

⁴⁴¹ Suara Merdeka, Sabtu 30 Mei 2015, hlm.3.

⁴⁴² Kedaulatan Rakyat, Rabu 27 Januari 2016, hlm.1-7.

21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang antara lain menyatakan, Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan merupakan objek praperadilan.⁴⁴³

Ketiadaan standar penetapan kerugian negara dalam suatu peristiwa yang diduga terdapat adanya/merupakan tindak pidana korupsi. Permohonan agar Mahkamah Konstitusi memperjelas penetapan kerugian negara sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diajukan oleh Faisal yang terlibat kasus korupsi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang.⁴⁴⁴ Kegelisahan itu juga dirasakan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mempertanyakan standar penilaian Badan Pemeriksa terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, sehingga mendapatkan opini wajar dengan pengecualian.⁴⁴⁵

Kelima, ketidaksinkronan, ketidakserasian dan ketidakharmonisan hubungan antar lembaga di dalam kemitraan dan di dalam menjalankan kinerja yang terjadi di dalam sistem peradilan pidana dapat mengakibatkan berkurangnya/melemahnya keterpaduan antar lembaga-lembaga pendukung sistem peradilan pidana dalam arti secara keseluruhan.

Di dalam istilah *sinkronisasi* terkandung makna keserempakan dan keselarasan. *Sinkronisasi* dalam pelaksanaan

⁴⁴³ Kompas, Jumat 4 Desember 2015, hlm.3.

⁴⁴⁴ Media Indonesia, Kamis 17 Juli 2014, hlm.6.

⁴⁴⁵ Kompas, Rabu 8 Juli 2015, hlm. 25 dan Kompas, Kamis 9 Juli 2015, hlm. 25.

penegakan hukum pidana meliputi *sinkronisasi struktural*, *sinkronisasi substansial* serta *sinkronisasi kultural*. Di dalam *sinkronisasi struktural* dituntut adanya keserempakan dan keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum yang harmonis. Sedangkan di dalam *sinkronisasi substansial* dituntut adanya keserempakan dan keselarasan baik secara *vertikal* maupun *horisontal* terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku positif. Sedangkan di dalam *sinkronisasi kultural* dituntut adanya keserempakan dan keselarasan dalam penghayatan pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. *Sinkronisasi kultural* membawa pengaruh pada adanya kesatuan dalam *visi* dan *misi* bersama dari aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga penegak hukum.⁴⁴⁶ Pemahaman terhadap tiga kerangka *sinkronisasi* tersebut di atas sangat penting, mengingat apa yang dinamakan sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terbuka, sehingga dalam keberhasilan pencapaian tujuannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan faktor-faktor lain yang ada di sekitar sistem tersebut.

Ketidaksinkronan di bidang formulasi/legislasi tampak nyata di dalam menyusun mekanisme kerja antara PPNS tertentu dengan Penyidik POLRI, terdapat ketentuan yang menyatakan PPNS tertentu tersebut memberitahukan dimulainya penyidikan serta menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, namun dalam ketentuan lain disebutkan adanya kewajiban memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil

⁴⁴⁶ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Op. Cit., hlm.1-2.

penyidikan tersebut melalui Penyidik POLRI, misalnya apa yang terjadi pada Penyidik PNS Kehutanan dan Lingkungan Hidup (ketidaksinkronan substansial). Ketidaksinkronan struktural tampak nyata pada tahap pelaksanaan putusan dan pelaksanaan, juga di dalam sistem peradilan pidana pemberantasan tindak pidana korupsi terutama dengan tidak berjalannya fungsi koordinasi dan supervisi di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketidaksinkronan kultural tampak nyata dengan tidak adanya visi dan misi bersama dalam penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana. Ketidaksinkronan substansial, struktural dan kultural tersebut pada akhirnya berakibat munculnya konflik antar penegak hukum.

Keenam, belum/tidak adanya mekanisme pengawasan eksternal terutama terhadap keseluruhan subsistem dalam sistem peradilan pidana. Yang ada pengawasan internal serta pengawasan eksternal masing-masing subsistem. Pengawasan internal, seperti terhadap anggota-anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat Divisi Pengawas Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pengawasan Daerah pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda)⁴⁴⁷ serta Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Propam Polda)⁴⁴⁸. Untuk anggota-anggota Kejaksaan Republik Indonesia terdapat Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubagbin) pada Kejaksaan Negeri, Asisten Pengawasan Daerah (Aswasda) pada Kejaksaan Tinggi serta Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) pada Kejaksaan Agung

⁴⁴⁷ Kompas, Sabtu 5 Desember 2015, hlm.15.

⁴⁴⁸ <https://id-id.facebook.com/DivHumasPolri/posts/425807430781452> diunduh tanggal 17 Januari 2016 pukul 10.00 WIB. Lihat juga Kompas, Senin 11 Mei 2015, hlm.15. Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dibentuk sejak 27 Oktober 2002 (Kep. Kapolri Nomor : Kep/54/X/2002) sebagai pengganti Dinas Provos atau Satuan Provos Polri yang merupakan bagian dari Polisi Organisasi Militer (POM) ABRI.

Republik Indonesia.⁴⁴⁹ Adapun pengawasan internal terhadap hakim dilakukan berjenjang juga, mulai dari Ketua Pengadilan Negeri sampai dengan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, di samping itu ada pula Badan Pengawasan (untuk selanjutnya disingkat Bawas) Mahkamah Agung.⁴⁵⁰

KPK telah melakukan penangkapan terhadap Kepala Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara erdata di Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata MA, Andri Trisianto Sutrisna, pada Jumat tanggal 12 Februari 2016 karena diduga menerima suap dari terdakwa korupsi Ichsan Suadi. Peristiwa tersebut seharusnya menjadi momentum bagi lembaga peradilan tertinggi itu untuk meningkatkan peran pengawasan internal. Badan Pengawasan MA perlu memiliki unit khusus yang mengawasi dan mengaudit kinerja lembaga tersebut secara berkala.⁴⁵¹ Menurut Harifin A Tumpa, pengawasan terhadap pegawai MA selama ini hanya merupakan pengawasan melekat yang dilakukan atasan, tidak ada pengawasan fungsional di MA. Bawas hanya fokus mengawasi pengadilan di daerah, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Ada sejumlah hal yang membuat Bawas MA belum efektif meredam penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai MA. Penanganan perkara tidak sepenuhnya di bawah panitera.⁴⁵² Julius Ibrani, pegiat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menambahkan, alur perkara di MA yang mencakup 27 tahapan menjadi celah terjadinya penyelewengan. Alur ini melibatkan tiga Unit kerja, yaitu Biro Umum yang berada di bawah Badan Urusan Administrasi, Direktorat Pranata dan Tata

⁴⁴⁹ Suara Merdeka, Jumat 11 Desember 2015, hlm.3.

⁴⁵⁰ Suara Merdeka, Senin 11 Maret 2013, hlm. 10.

⁴⁵¹ Kompas, Senin 22 Februari 2016, hlm. 4 dan Kompas, Rabu 24 Februari 2016, hlm. 2.

⁴⁵² Kompas, Senin 22 Februari 2016, hlm. 4.

Laksana di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, serta Kepaniteraan Muda yang berada di bawah Panitera MA.⁴⁵³

Adapun pengawasan eksternal, seperti pengawasan eksternal terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut sebagai Komisi Kepolisian Nasional atau Kopolnas⁴⁵⁴ (Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional), Komisi Kejaksaan⁴⁵⁵ (Pasal 38 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) yang merupakan pengawas eksternal pada Kejaksaan Republik Indonesia⁴⁵⁶, serta pengawas eksternal pada para hakim yang disebut sebagai Komisi Yudisial (Bab IX, Pasal 24A ayat (2) dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial)⁴⁵⁷. Di samping itu, masih ada Ombudsman Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang independen, tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Lembaga ini bertujuan memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik secara luas, termasuk di dalamnya

⁴⁵³ Kompas, Senin 22 Februari 2016, hlm. 4.

⁴⁵⁴ Kompas, Sabtu 12 September 2015, hlm.3

⁴⁵⁵ Kompas, Jumat 7 Agustus 2015, hlm.3.

⁴⁵⁶ Media Indonesia, Rabu 28 Januari 2015, hlm.4. Komisi Kejaksaan bermaksud untuk meningkatkan kinerja lembaga kejaksaan.

⁴⁵⁷ Sudah diganti dengan UU Negara RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Lihat Kompas, Rabu 15 Juli 2015 dan Kompas, Sabtu 22 Agustus 2015, hlm.3.

sebenarnya pelaksanaan proses peradilan pidana melalui sistem peradilan pidana.⁴⁵⁸

Pengawasan eksternal penting sekali terutama terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, mengingat bahwa mereka melaksanakan kekuasaan negara di dalam menegakkan hukum yang berlaku positif. Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan cenderung korup, seperti yang dikatakan oleh John Emerich Edward Dalberg Acton (Lord Acton: 1877) kepada Mandell Creighton dalam surat pribadinya yang berisikan kata-kata, antara lain : “*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*”.⁴⁵⁹ Namun demikian, fungsi pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud belum berjalan sebagaimana yang diidealkan.

Ketujuh, *tidak berfungsinya* fungsi supervisi dan fungsi koordinasi KPK di dalam sistem peradilan pidana pemberantasan tindak pidana korupsi (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).⁴⁶⁰ Menurut Kompas, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dapat dikemukakan, sebagai berikut :

Koordinasi antar lembaga penegak hukum lemah sehingga mafia hukum dan penyanderaan berbagai kasus di antara kelompok elit politik masih marak terjadi. Jika dibiarkan, kondisi itu berbahaya karena mempersulit upaya penegakan hukum di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengungkapkan, lemahnya koordinasi terlihat dari rebutan kewenangan antara KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam penyidikan dugaan korupsi simulator surat izin mengemudi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Masalah tersebut

⁴⁵⁸ Amzulian Rifai, 2015, *Mengawasi Pelayanan Publik*, Kompas, Rabu 4 November 2015, hlm.6.

⁴⁵⁹ Kompas, Minggu 8 November 2015, hlm. 5.

⁴⁶⁰ Media Indonesia, Kamis 3 September 2015, hlm.1-2.

sebenarnya bisa dipecahkan jika semua merujuk ke undang-undang.⁴⁶¹

Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu :

- 1) Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam keadaan normal, adalah sistem peradilan pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (berdasarkan hukum tata negara dalam keadaan normal).
- 2) Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam keadaan luar biasa, adalah sistem peradilan pidana Indonesia saat ini secara faktual di mana Negara Indonesia dalam keadaan darurat tindak pidana korupsi.

Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam keadaan darurat tindak pidana korupsi memunculkan adanya Pengadilan Tipikor dengan lembaga KPK sebagai :

- 1) penyelidik, penyidik, sekaligus penuntut umum;
- 2) *koordinator dan supervisor*;
- 3) *trigger mechanism institution*;
- 4) *grand designer*.

KPK memang tidak perlu ada apabila lembaga kepolisian dan kejaksaan optimal di dalam menjalankan tugasnya. Namun selagi kedua lembaga tersebut belum efektif dan optimal dalam

⁴⁶¹ Kompas, Kamis 16 Agustus 2012, hlm. 5.

menjalankan tugasnya, keberadaan lembaga baru yang khusus menangani pencegahan, penindakan dan pengawasan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih atau rebutan kasus.⁴⁶²

Aksi-aksi KPK memang tidak memberikan manfaat secara langsung terhadap perekonomian. Namun, pemberantasan korupsi oleh KPK menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan, sebab yang diberantas oleh KPK adalah esensi korupsi, yakni korupsi politik.⁴⁶³ Menurut Arnold Heidenheimer dan Michael Johnston (*ed*) sebagaimana dikutip M. Fajar Marta, korupsi politik adalah korupsi yang dilakukan aktor-aktor politik di eksekutif ataupun legislatif dengan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok politik.⁴⁶⁴ Menurut M. Fajar Marta, di Indonesia korupsi politik berkaitan dengan *patronage democracy*, yakni hubungan antara orang yang memegang jabatan politik bisnis memberikan dana kepada pejabat publik agar menggunakan wewenang dan pengaruh untuk menguntungkan pelaku bisnis. Di negara berkembang, termasuk Indonesia, korupsi politik jadi sumber dari segala korupsi.⁴⁶⁵ Tidak heran apabila sejak reformasi hingga kini, sudah delapan menteri, dua gubernur Bank Indonesia, delapan belas gubernur, seorang jenderal bintang empat dan tiga berbintang tiga, sekitar empat puluh anggota DPR dan sekitar dua ratus bupati/walikota masuk bui.⁴⁶⁶ Berdasarkan data Kompas, Kamis 22 Januari 2015, jumlah perkara yang ditangani

⁴⁶² Lihat Kedaulatan Rakyat, Selasa 29 Desember 2015, hlm.10.

⁴⁶³ M. Fajar Marta, 2015, *Korupsi Membuat Indonesia Terempas*, Kompas, Rabu 16 September 2015, hlm.5.

⁴⁶⁴ *Ibid.*

⁴⁶⁵ *Ibid.*

⁴⁶⁶ Hamid Awaluddin, 2015, *Kriminalisasi Diskresi*, Kompas, Jumat 28 Agustus 2015, hlm.7.

oleh KPK, sebagai berikut :⁴⁶⁷

TABEL II
PERKARA YANG DITANGANI KPK SEJAK TAHUN 2006

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Penyelidikan	36	70	70	67	54	78	77	81	80
Penyidikan	27	24	47	37	40	39	48	70	58
Penuntutan	23	19	35	32	32	40	36	41	45
“Inkracht”	17	23	23	39	34	34	28	40	40
Eksekusi	13	23	24	37	36	34	32	44	48

Namun dalam perjalanannya, kehadiran lembaga ini diabaikan oleh lembaga kenegaraan lainnya. Menurut Yonki Karman, banyak orang (politisi dan penyelenggara negara yang korup) merasa terancam dengan KPK sebagai institusi penegak hukum yang tidak bisa dikendalikan kekuasaan politik.⁴⁶⁸

Bahkan, dalam perjalanannya sampai sekarang ini telah terjadi beberapa upaya pelemahan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain :

- 1) kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Dapat dikatakan, bahwa sehingga kini, ada lima unsur pimpinan KPK yang pernah dan telah dijadikan tersangka sehingga harus nonaktif. Mereka adalah tiga

⁴⁶⁷ Kompas, Kamis 22 Januari 2015, hlm. 1-15. Kompas mengambil data mulai dari tahun 2004, penulis hanya menggunakan data per tahun 2006

⁴⁶⁸ Yonki Karman, 2015, *Politik (dan) Hukum*, Kompas, Rabu 21 Januari 2015, hlm. 7.

unsur pimpinan KPK periode kedua (2007-2011), yaitu Antasari Azhar, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, serta Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang merupakan unsur pimpinan KPK periode ketiga (2011-2015).⁴⁶⁹ Menurut media massa tersebut, Antasari Azhar bahkan divonis penjara 18 tahun karena dinyatakan terlibat pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen tahun 2009. Sampai saat ini perkara itu masih menyimpan sejumlah pertanyaan.⁴⁷⁰

- 2) uji materi terhadap UU KPK , tercatat sudah ada 13 kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi.⁴⁷¹
- 3) mempersoalkan legitimasi pimpinan KPK, ketika salah satu pimpinan KPK berada dalam tahanan, karena di dalam UU KPK dinyatakan, bahwa KPK dipimpin lima orang secara kolektif kolegial. Oleh sebab itu, dalam hal terjadi demikian pimpinan KPK dianggap sudah tidak memiliki legitimasi karena kolektif kolegialnya sudah habis.⁴⁷²
- 4) revisi peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang KUHP yang baru (dengan memasukkan tindak pidana korupsi ke dalam KUHP)⁴⁷³, revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan revisi Undang-Undang KPK (dengan mengusulkan : membatasi kewenangan penyadapan, penghapusan penuntutan dan hak (wewenang) KPK menerbitkan Surat Perintah

⁴⁶⁹ Kompas, Senin 25 Mei 2015, hlm.1-15.

⁴⁷⁰ Kompas, Senin 25 Mei 2015, hlm.1-15.

⁴⁷¹ Lihat Kompas, Senin 6 Agustus 2012, hlm.3; Kompas, Senin 17 September 2012, hlm.3; dan Kompas, Kamis, 4 Oktober 2012, hlm.3. Menurut Ketua MK Mahfud M D, sampai hari ini sudah 14 kali MK diminta untuk membatalkan. Namun, MK selama 14 kali itu menyatakan KPK sah, konstitusional dan harus didukung (lihat Kompas, Kamis 4 Oktober 2012, hlm.1-15).

⁴⁷² Kompas, Kamis 4 Oktober 2012, hlm. 1-15.

⁴⁷³ Suara Merdeka, Senin 14 September 2015, hlm.3. Dengan memasukkan tindak pidana korupsi ke dalam RUU KUHP, maka tindak pidana korupsi akan kehilangan sifat kekhususannya, yang berdampak pada pola penanganan perkara.

Penghentian Penyidikan (SP3), pembentukan Dewan Pengawas KPK dan membatasi masa kerja KPK adalah 12 tahun serta kasus korupsi di bawah Rp.5 miliar tidak lagi ditangani KPK).⁴⁷⁴ Revisi ini ditengarai oleh J. Kristiadi sebagai upaya membubarkan KPK, sebagaimana diungkapkan, sebagai berikut :

Berbagai cara telah mereka lakukan, antara lain dengan mencoba menghilangkan sifat *lex specialis* dalam menyusun RUU KUHP dan merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ketentuan di draf revisi UU KPK dikhawatirkan mengakibatkan komisi anti rasuah itu gugur, antara lain, adalah batas eksistensi KPK 12 tahun, penghapusan kewenangan penuntutan, pembatasan penanganan perkara kerugian negara harus di atas Rp.50 miliar, kewenangan penyadapan, penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), serta tiadanya kewenangan merekrut penyelidik dan penyidik independen.⁴⁷⁵

Menurut Saldi Isra, munculnya draf revisi UU KPK menunjukkan upaya nyata melemahkan KPK melalui jalur legislasi.⁴⁷⁶

- 5) penganggaran dan pembangunan gedung KPK yang tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.⁴⁷⁷ Meskipun, pada akhirnya KPK mempunyai gedung baru yang diresmikan Presiden Ir. Joko Widodo pada Selasa 29 Desember 2015, setelah ada gerakan terutama dari kalangan netizen berupa “saweran” rakyat untuk pembangunan gedung KPK.⁴⁷⁸

⁴⁷⁴ Lihat Kompas, Kamis 16 Agustus 2012, hlm.5; Kompas, Selasa 2 Oktober 2012, hlm.15 dan Suara Merdeka, Jumat 9 Oktober 2015, hlm.1-7. Bahkan *Koran Sindo* edisi Jumat 9 Oktober 2015 pada halaman 1-7 menyoroti revisi ini dengan judul “Revisi UU KPK Dinilai Titipan Koruptor”.

⁴⁷⁵ J. Kristiadi, 2015, *Meruwat Lakon Gugurnya KPK*, Kompas, Selasa 13 Oktober 2015, hlm. 15.

⁴⁷⁶ Kompas, Jumat 9 Oktober 2015, hlm. 1.

⁴⁷⁷ Lihat Kompas, Senin 17 September 2012, hlm.3.

⁴⁷⁸ Kompas, Rabu 30 Desember 2015, hlm. 1-15.

6) penarikan penyidik,⁴⁷⁹ dan lain-lain.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia di Komisi Pemberantasan Korupsi dikatakan, bahwa masa penugasan pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada KPK paling lama 4 (empat) tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali.⁴⁸⁰ Menurut Febri Diansyah (peneliti dari Indonesia Corruption Watch), penarikan penyidik oleh Polri sebelum yang bersangkutan bertugas selama empat tahun bisa melanggar hukum. Pengaturan soal masa tugas pegawai negeri dari instansi lain yang bekerja di KPK bukan tanpa alasan. Ini untuk mencegah potensi intervensi terhadap KPK. Apalagi, pegawai yang dipekerjakan tersebut mendapat tugas-tugas utama sebagai penyidik atau penuntut umum. Untuk mencegah itu, di dalam Pasal 39 Undang-Undang KPK ditegaskan, bahwa penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai KPK diberhentikan sementara dari kepolisian atau kejaksaan selama menjadi pegawai KPK.⁴⁸¹

Berdasarkan survei yang dilakukan *Indo Barometer* pada tanggal 14-22 September 2015 di 34 provinsi dengan 1.200 responden, KPK merupakan lembaga dengan tingkat kepercayaan publik paling tinggi di Indonesia, yaitu 82%. Di urutan kedua adalah TNI (81%) selanjutnya Presiden (78,6 %). Di antara sesama aparat penegak hukum, kepuasan publik terhadap kinerja KPK

⁴⁷⁹ Kompas, Senin 24 September 2012, hlm.4; Suara Merdeka, Sabtu 6 Oktober 2012, hlm.1-11 dan Suara Merdeka, Selasa 9 Oktober 2012, hlm.1-7. Defisit tenaga penyidik di KPK berakibat KPK berinisiatif mengangkat penyidik sendiri dari luar tenaga yang diberikan oleh instansi Kepolisian atau Kejaksaan (lihat Media Indonesia, Kamis 28 Mei 2015, hlm. 1).

⁴⁸⁰ Donal Fariz, 2012, *Defisit Penyidik KPK*, Kompas, Kamis 27 September 2012, hlm.7. Lihat juga Kompas, Kamis 27 September 2012, hlm.1.

⁴⁸¹ Kompas, Senin 24 September 2012, hlm. 4.

68,2 %, disusul Kepolisian 44,8 %, Kejaksaan 37,7 %, Kehakiman 40,7 % dan pengacara 27,2 %. Hasil survei menunjukkan bahwa Pemerintah masih membutuhkan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kinerjanya paling bersih dan dipercaya.⁴⁸²

Kedelapan, belum atau tidak adanya satu lembaga yang disertai tugas dan kewenangan menjalankan/melaksanakan putusan atau pidana berikut siapa yang ditunjuk menjadi pimpinannya (*leader*). Di dalam Pasal 270 KUHAP dinyatakan, bahwa Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Adapun pelaksanaan pidana hanya disinggung sedikit di dalam KUHAP (Pasal 271, Pasal 272, Pasal 273, Pasal 274, Pasal 275 dan Pasal 276 KUHAP). Pelaksanaan pidana juga disinggung sedikit di dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dinyatakan sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP). Yakni, di dalam Pasal 11 KUHP (pidana mati), Pasal 12-Pasal 14 KUHP (pidana penjara), Pasal 14a-Pasal 14f KUHP (pidana bersyarat), Pasal 15, Pasal 15a-Pasal 15b, Pasal 16 dan Pasal 17 KUHP (pelepasan bersyarat), Pasal 18-

⁴⁸² Kompas, Jumat 9 Oktober 2015, hlm.1.

Pasal 29 KUHP (pidana kurungan), Pasal 30-Pasal 31 KUHP (pidana denda), Pasal 35-Pasal 38 KUHP (pidana pencabutan hak-hak tertentu), Pasal 39-Pasal 42 KUHP (pidana perampasan barang-barang tertentu) dan Pasal 43 KUHP (pidana pengumuman putusan hakim), serta Pasal 32-Pasal 33a KUHP dan Pasal 34 yang berisikan pelbagai ketentuan. Jadi belum ada kodifikasi hukum pidana pelaksanaan pidana atau kodifikasi hukum penitensier.

Dalam sistem peradilan pidana terdapat tiga jenis putusan pengadilan, yang terdiri atas putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP) dan putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Berdasarkan Pasal 1 butir ke-11 KUHP, yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ketiga putusan tersebut termasuk putusan pemidanaan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa. Dengan melihat bahwa tujuan pemidanaan adalah *resosialisasi* (pemasyarakatan kembali), maka tahapan pelaksanaan putusan ini bisa disebut juga sebagai tahapan pemasyarakatan kembali.

Berbicara mengenai pemasyarakatan, selama ini gambaran buruk tentang dunia pemasyarakatan banyak diberitakan di media massa. Sejumlah kasus pelanggaran tata tertib Lapas dan Rutan, antara lain :

- a. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin dan alat elektronik lainnya; pada tanggal 10 Januari 2010, sejumlah ruangan di dalam gedung perkantoran Rutan Khusus Wanita

Kelas II A Pondok Bambu, Jakarta Timur disulap menjadi ruang pribadi terpidana yang fasilitasnya setara hotel.

- b. menyimpan senjata tajam, narkoba dan memiliki telepon genggam; pada tanggal 31 Desember 2013, sejumlah barang terlarang, seperti senjata api, senjata tajam dan sabu serta puluhan telepon seluler ditemukan petugas dalam pengeledahan di Lapas Batu, Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
- c. menyimpan senjata api, mengonsumsi narkoba dan menggunakan telepon genggam; pada tanggal 10 Desember 2015, polisi merazia 11 blok napi di Lapas Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, dan menemukan 129 telepon seluler, berbagai jenis senjata api, senjata tajam berupa pedang, pisau dan tombak serta 1 pot tanaman ganja.
- d. mengedarkan narkoba;

Pada tanggal 14 Januari 2016, GP diketahui pernah mengendalikan peredaran narkoba, saat dipenjara di Lapas Nusakambangan (Cilacap) dan Lapas Cipinang (Jakarta) tahun 2000-2010. Setelah keluar penjara, GP masih mengedarkan narkoba ke-4 bandar lain yang mendekam di Lapas Medaeng (Surabaya), Lapas Nusakambangan (Cilacap) dan Lapas Cipinang (Jakarta).⁴⁸³

Sebenarnya, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, hal-hal tersebut merupakan larangan. Larangan-larangan tersebut, antara lain:

- a. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan mengonsumsi narkoba dan obat-obatan lain yang berbahaya serta minuman beralkohol; melengkapi kamar

⁴⁸³ Kompas, Kamis 28 Januari 2016, hlm.1-15.

- b. hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi dan/atau alat elektronik lainnya;
- c. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya;
- d. membawa dan menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lain.⁴⁸⁴

Di samping itu, muncul juga berita tentang pelarian tahanan atau narapidana⁴⁸⁵, sebagaimana diberitakan dalam salah satu media massa, sebagai berikut :

Zarishan alias Jais pintar memanfaatkan kesempatan. Tahanan kasus perampokan itu berhasil kabur dari kawalan sipir Rutan Kelas II-A Pontianak, Kalimantan Barat, saat membesuk ibunya yang sedang sakit di rumahnya di Gang Kamboja No.12, Jalan Tanungpura, Potianak Selatan, Selasa sore (22/7).⁴⁸⁶

Selanjutnya, juga dikatakan tentang adanya jaringan peredaran atau bahkan pabrik narkoba di Penjara/Lembaga Pemasyarakatan,⁴⁸⁷ seperti yang diberitakan di dalam salah satu media massa, sebagai berikut :

Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan masih menjadi sarang Pengendali sindikat peredaran narkoba internasional. Hal ini terbukti setelah Badan Narkotika Nasional, Jumat (14/9), menangkap Adam Wilson (42), narapidana LP Kembang Kuning,

⁴⁸⁴ Kompas, Kamis 28 Januari 2016, hlm. 1-15.

⁴⁸⁵ Tahanan adalah orang yang menjalani proses penahanan sebagaimana ditetapkan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan.

⁴⁸⁶ Jawa Pos, Kamis 24 Juli 2014, hlm.14; Kompas, Senin 22 September 2015, hlm. 22; Kompas, Selasa, 23 September 2015, hlm. 24; Kompas, Kamis 3 Desember 2015, hlm. 15; Kompas, Kamis 7 Januari 2016, hlm.15. Dalam kasus pelarian tersangka/terdakwa terdapat terdakwa yang melarikan diri setelah usai disidangkan di Pengadilan.

⁴⁸⁷ Kompas, Kamis 20 September 2012; Suara Merdeka, Selasa 14 Mei 2013, hlm. 31; Kompas, Rabu 22 April 2015, hlm.15; Kompas, Rabu 27 Januari 2016, hlm.1-15; Kompas, Kamis 4 Februari 2016, hlm. 23; Kompas, Sabtu 6 Februari 2016, hlm. 15.

Nusakambangan, asal Nigeria. Pria tersebut diduga merupakan otak peredaran sabu seberat 8,7 kilogram senilai Rp.17,4 miliar. Sabu diselundupkan ke Indonesia melalui Timor Leste lewat jalan darat.⁴⁸⁸ Juga berita tentang perkelahian, bahkan tidak jarang diakhiri dengan pembunuhan sesama narapidana dan berbagai berita negatif lainnya⁴⁸⁹, sebagaimana diinformasikan oleh salah satu media massa berikut ini :

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan Kabupaten Badung, Bali, mengamuk dan membakar fasilitas lembaga Pemasyarakatan, Selasa (21/2) malam. Perkelahian antar narapidana, Minggu, menjadi penyebab kerusuhan. Pemicu perkelahian, menurut Wakil Kepala Polda Bali Brigjen (Pol) Untung Yoga Ana, adalah masalah utang piutang di antara para narapidana (napi).⁴⁹⁰

Sebagaimana diberitakan di salah satu media massa, bahwa saat Handoyo Sudrajat diberitakan mundur dari jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dua bulan yang lalu, salah satu alasannya adalah ia gagal membentuk Bapasnas. Bapasnas atau Badan Pemasyarakatan Nasional adalah badan yang sedianya dibentuk pemerintahan SBY berdasarkan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan Presiden mengenai itu tidak kunjung ditandatangani hingga lengsernya Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo menghentikan pembentukan

⁴⁸⁸ Kompas, Sabtu 15 September 2012, hlm.23; Kompas, Selasa 18 September 2012, hlm. 21; Kompas, 31 Januari 2013, hlm.4; Kompas, Selasa 17 Maret 2015, hlm. 23; Suara Merdeka, Jumat 9 Januari 2015, hlm. 30; Suara Merdeka, Kamis 28 Mei 2015, hlm. 25.

⁴⁸⁹ Adrianus Meliala, 2015, *Bapasnas Jangan Dibatalkan*, Koran Sindo, Kamis, 27 Agustus 2015, hlm.4.

⁴⁹⁰ Kompas, Kamis 23 Februari 2012, hlm.1.

badan baru.⁴⁹¹

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro dengan mengutip pendapat Minoru Shikita menyatakan, terdapat tiga kerugian yang terjadi apabila proses peradilan pidana tidak bekerja sebagai suatu sistem yang terpadu (*integrated*), yaitu :

- a. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang mereka.
- b. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi sebagai sub sistem.
- c. karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁴⁹²

Di dalam KUHAP sebenarnya sudah terdapat beberapa hal ⁴⁹³ yang menunjukkan adanya syarat keterpaduan didalam pelaksanaannya sebagaimana diterangkan, sebagai berikut :

a. Pemberitahuan dimulainya penyidikan dan dihentikannya penyidikan.

Menurut Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Penyidik harus memberitahukan kepada Penuntut Umum, bahwa telah mulai dilakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Kemudian pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP dikatakan, dalam hal Penyidik menghentikan

⁴⁹¹ Adrianus Meliala, 2015, *Bapasnas Jangan Dibatalkan*, Koran Sindo, Kamis, 27 Agustus 2015, hlm.4

⁴⁹² Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Ketiga*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.85.

⁴⁹³ Beberapa lembaga merupakan sarana *kontrol horisontal* antar instansi penegak hukum.

penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya. Di samping itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 ayat (2) KUHAP, PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan atau penghentian penyidikan kepada Penyidik POLRI. Selanjutnya berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 107 ayat (3) KUHAP, PPNS menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

b. Permohonan penahanan lanjutan dan perpanjangan penahanan.

Dalam hal Penyidik hendak melakukan penahanan lanjutan, maka ia harus meminta izin kepada Penuntut Umum (Pasal 24 ayat (2) KUHAP). Kemudian, dalam hal Penuntut Umum hendak melakukan penahanan lanjutan, maka ia harus meminta izin kepada Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 25 ayat (2) KUHAP). Selanjutnya, dalam hal terjadi perpanjangan penahanan sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP, apabila Penyidik dan Penuntut Umum hendak melakukan perpanjangan penahanan, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 29 ayat (3) KUHAP). Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) KUHAP itu pula, apabila Pengadilan Negeri hendak melakukan perpanjangan penahanan, maka ia harus mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi dan apabila pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi hendak melakukan perpanjangan penahanan, ia harus mendapatkan ijin

dari Mahkamah Agung.

c. Penggeledahan rumah.

Dalam hal Penyidik hendak melakukan penggeledahan rumah, maka penggeledahan rumah itu harus dilakukan dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat atau dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ijin ini dapat dimintakan setelah dilakukan penggeledahan rumah tersebut (Pasal 33 ayat (1) *jo* Pasal 34 ayat (1) KUHAP).

d. Penyitaan.

Dalam hal Penyidik hendak melakukan penyitaan, maka penyitaan tersebut harus dilakukan dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP), kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ijin tersebut dapat dimintakan kemudian, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 38 ayat (2) KUHAP

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Dalam hal penyidik hendak melakukan penyitaan terhadap surat-surat atau tulisan lain yang disimpan oleh pejabat pemegang rahasia jabatan, maka harus mendapatkan persetujuan dari mereka atau atas ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri

setempat kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 43 KUHAP).

e. Praperadilan.

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP), tentang:

- 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka/terdakwa atau keluarga tersangka/terdakwa atau pihak lain atas kuasa tersangka/terdakwa;
- 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka/terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka/terdakwa yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (lihat Pasal 1 butir ke-10 KUHP).

Praperadilan diatur di dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP serta Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 KUHP. Dengan dikeluarkannya Keputusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, terjadi perluasan objek praperadilan, karena keputusan MK tersebut menetapkan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan merupakan objek praperadilan. Praperadilan merupakan lembaga yang digunakan untuk melakukan *kontrol horizontal* hakim terhadap Penyidik dan/atau Penuntut Umum.

f. Prapenuntutan.

Prapenuntutan merupakan tindakan Penuntut Umum mengembalikan Berkas Perkara (Berita Acara Pemeriksaan Pedahuluan/BAP) kepada Penyidik dengan disertai petunjuk hal-hal apa saja yang harus dilengkapi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk melengkapi Berkas Perkara tersebut. Prapenuntutan diatur di dalam Pasal 110 ayat (2) *jo* Pasal 138 ayat (2) KUHAP. Prapenuntutan akan ditindaklanjuti oleh Penyidik dengan melakukan penyidikan tambahan. Prapenuntutan merupakan lembaga yang digunakan untuk melakukan *kontrol horisontal* penuntut umum terhadap penyidik.

g. Pemeriksaan tambahan.

Pemeriksaan tambahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia harus dilakukan setelah dilakukannya ketentuan-ketentuan Pasal 110 ayat (2) dan (3) *jo* Pasal 138 ayat (2) KUHAP dan koordinasi dengan Penyidik POLRI.⁴⁹⁴ Di dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dikatakan, sebagai berikut :

Pasal 30 ayat (1) huruf e

Undang-Undang Kejaksaan Rep. Indonesia

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai

⁴⁹⁴ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.214.

berikut :

- 1) tidak dilakukan terhadap tersangka;
- 2) hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
- 3) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Namun ketentuan yang ada di dalam penjelasan pasal tersebut sulit sekali untuk dilaksanakan, sehingga berakibat pada pelaksanaan pasal tersebut (merupakan pasal yang *disfungsional*).

h. Penghentian Penuntutan.

Pasal 140 ayat (2) KUHAP menyatakan, bahwa Penuntut Umum harus memberitahukan tindakan penghentian penuntutan kepada Penyidik, Pejabat Rumah Tahanan Negara, Hakim dan Tersangka/Terdakwa atau Keluarga Tersangka/Terdakwa atau Penasihat Hukum yang bersangkutan.

i. Pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan.

Di dalam ketentuan Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP diatur mengenai kelembagaan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) yang bertugas mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan, mengamati perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan perilaku terpidana bersyarat serta memberikan saran-saran guna pembinaan narapidana/terpidana

bersyarat.

j. Forum komunikasi bersama antar instansi, seperti Forum

Makehjapol dan lain sebagainya baik dalam bentuk seminar, simposium dan kegiatan ilmiah lainnya ataupun dalam bentuk dikeluarkannya surat keputusan bersama yang mengatur mengenai masalah-masalah tertentu berkaitan dengan praktik penyelenggaraan aktivitas peradilan pidana. Misalnya : Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan No.E: 61-UM 06.07-Th.1997 tanggal 16 Mei 1997 tentang Tatacara Penahanan Tersangka Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai di RUTAN atau Cabang RUTAN, Surat Keputusan Kepolisian Republik Indonesia No.Pol: Skep/369/X/1985 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka peneliti sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief tentang “teori integralistik sistem peradilan pidana”, sebagai berikut :

Kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana bukan hanya diwujudkan dalam kekuasaan mengadili tetapi diimplementasikan ke dalam empat tahap kekuasaan (kekuasaan menyidik, kekuasaan menuntut, kekuasaan mengadili, dan kekuasaan melaksanakan pidana), yang merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang biasa disebut dengan istilah sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Adanya pejabat pengendali tertinggi merupakan konsekuensi logis dari manajemen sistem peradilan pidana yang terpadu, tanpa adanya pengendali tertinggi bekerjanya sistem peradilan pidana

bersifat *fragmentaris* dan *instansi sentris*.⁴⁹⁵

2. Sistem/Lembaga Peradilan Pidana Belum Mandiri

Lembaga Peradilan merupakan pelaksana dari kekuasaan negara kedua kekuasaan negara lainnya, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Di dalam kenyataan jaman modern saat ini di negara-negara demokratis modern sulit mengimplementasikan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang murni dan mutlak di antara ketiga cabang kekuasaan, baik mengenai fungsi, tugas maupun organ yang menjalankan fungsi tersebut. Hal ini dikarenakan tugas negara sudah demikian kompleksnya, sehingga doktrin tersebut harus dipahami sebagai doktrin pembagian kekuasaan (*distribution of powers*), yang berarti hanya fungsi pokoknya yang dipisahkan sedangkan untuk selebihnya ketiga cabang kekuasaan tersebut terjalin satu sama lain.⁴⁹⁶

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman diatur di dalam Bab IX. Kekuasaan Kehakiman mulai dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 25. Di dalam Pasal 24 dikatakan, sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁹⁷
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴⁹⁸

⁴⁹⁵ Barda Nawawi Arief, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Pustaka Magister, hlm.13-14, 22, 48, 52 dan 64.

⁴⁹⁶ Miriam Budiardjo, 1985, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm.222.

⁴⁹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat kali Perubahan/proses amandemen. Perubahan Pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan Kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Perubahan Ketiga disahkan pada tanggal 9 November 2001. Perubahan Keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Ketentuan ayat ini merupakan hasil proses amandemen ketiga.

⁴⁹⁸ Ketentuan ayat ini merupakan hasil proses amandemen ketiga.

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.⁴⁹⁹

Dengan demikian, yang dimaksud dengan badan peradilan menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi.⁵⁰⁰ Di dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Proses Amandemen dikatakan, sebagai berikut :

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan, sebagai berikut :

Pasal 1

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004

⁴⁹⁹ Ketentuan ayat ini merupakan hasil proses amandemen keempat.

⁵⁰⁰ Dalam tulisan ini, penulis tidak akan membahas Mahkamah Konstitusi karena tidak berkaitan dengan sistem peradilan pidana.

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pernyataan kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut dituangkan di dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan, sebagai berikut :

Pasal 3

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun bagian dari Penjelasan Umum yang menegaskan kemandirian hakim, sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Di dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan, sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.”

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak merupakan ketentuan yang bersifat universal, karena dituangkan di dalam Pasal 10 *The Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi, sebagai berikut :

*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation and of any criminal charge against him.*⁵⁰¹

Kekuasaan kehakiman dalam arti sempit atau kekuasaan mengadili selanjutnya diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang membedakan dalam lingkungan peradilan yang bersifat umum dan lingkungan peradilan yang bersifat khusus, yang terdiri dari empat lingkungan peradilan, yaitu:

- a. peradilan umum;
- b. peradilan militer;
- c. peradilan agama, dan
- d. peradilan tata usaha negara.

Masing-masing peradilan mempunyai kewenangan untuk mengadili masing-masing yang disebut sebagai suatu kompetensi. Dalam hal kekuasaan atau

⁵⁰¹ Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op.Cit., hlm.113.

wewenang mengadili ini terdapat dua macam kompetensi, yaitu :

- a. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) pada satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan yang lain. Kompetensi ini disebut sebagai kompetensi mutlak atau *absolute kompetentie*.
- b. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) di antara pengadilan yang satu dengan yang lain dalam satu lingkungan peradilan. Kompetensi ini disebut sebagai kompetensi relatif atau *relatieve kompetentie*.⁵⁰²

Dalam KUHAP terdapat dua macam wewenang yang berkaitan yaitu wewenang pemerintahan dan wewenang yudisial. Wewenang pemerintahan, misalnya wewenang penyidikan, wewenang penuntutan, dan lain sebagainya. Berdasarkan kebebasan bertindak ada dua macam wewenang, yaitu :

- a. wewenang terikat, yaitu apabila rumusan normanya mengharuskan pejabat yang bersangkutan terikat secara ketat terhadap apa yang telah digariskan
- b. wewenang bebas, yaitu apabila rumusan normanya memberikan kebebasan kepada pejabat yang bersangkutan dalam menggunakan wewenangnya.⁵⁰³

Jadi kriterianya adalah apakah terdapat suatu kebebasan bagi pejabat untuk melaksanakan wewenang tersebut (*discretionary power* atau *Freies Ermessen*) atau tidak. Wewenang bebas rawan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang, oleh sebab itu harus ada perlindungan hukum bagi

⁵⁰² Suryono Sutarto, 2008, *Hukum Acara Pidana Jilid II, Op.Cit.*, hlm.2.

⁵⁰³ Philipus Mandiri Hadjon, 1997, "Seminar Dwi Windu KUHAP": *Norma Hukum KUHAP Sebagai Kewenangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Rangka Perlindungan Bagi Rakyat (Tersangka/Terdakwa)*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 20 Desember 1997, hlm.1-3.

rakyat terhadap kemungkinan terjadinya hal demikian.⁵⁰⁴

Di samping itu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu pejabat juga harus memperhatikan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang sama atau lain kepada pejabat yang lain. Hal ini untuk menghindari terjadinya sengketa antar pejabat terhadap suatu masalah tertentu yang dapat berakibat tidak adanya suatu keterpaduan antar sub sistem.

Dalam masing-masing lingkup peradilan dimungkinkan adanya *differensiasi* atau *spesialisasi*, seperti dalam lingkup peradilan umum dimunculkan adanya Pengadilan Anak, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Perikanan. Pengadilan Anak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Adapun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada mulanya dibentuk berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian setelah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dibentuk lagi berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Perikanan dibentuk berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Di samping itu terdapat semacam *kuasi* pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum berupa pengadilan kehutanan dengan adanya ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-

⁵⁰⁴ *Ibid.*, hlm.1-3.

Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Selanjutnya di dalam Bab V. Badan-badan Lain yang Fungsinya Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan, sebagai berikut :

Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. penyelidikan dan penyidikan;
- b. penuntutan;
- c. pelaksanaan putusan;
- d. pemberian jasa hukum; dan
- e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Adapun yang dimaksud dengan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan badan yang menjalankan fungsi kepolisian. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai badan yang menjalankan fungsi kepolisian ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, sebagai berikut :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Presiden dapat mengakibatkan keberpihakan Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia demikian ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, sebagai berikut :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan rambu-rambu bahwa keberadaan dibawah Presiden ini tidak boleh disalahgunakan, sehingga mengakibatkan posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia itu terintervensi yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemuliaan/kewibawaan profesi kepolisian, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan berikut :

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik di bidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial.

Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

Selain Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalam pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan terdapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Undang-undang tersebut, KPK juga mempunyai fungsi penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Kemandirian lembaga KPK di dalam sistem peradilan pidana khususnya peradilan tindak pidana korupsi ditegaskan di dalam bunyi Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman selain Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dikatakan, sebagai berikut :

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

Selanjutnya di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dikatakan, antara lain :

Pembaruan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut dikatakan, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “secara merdeka” dalam ketentuan ini adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Termasuk ke dalam badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah Lembaga Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disingkat LAPAS) dan Balai Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disingkat BAPAS) yang berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mempunyai

tugas dan kewenangan membina Warga Binaan Pemasyarakatan (LAPAS dan LAPAS Anak) serta membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan (BAPAS).⁵⁰⁵

Menurut Mardjono Reksodiputro, konsepsi pemasyarakatan terpidana yang sudah lebih dari 30 (tiga puluh tahun), belum sempat secara kosepsional mengembangkan pemikiran tentang bentuk-bentuk pembinaan yang berbeda antara anak dengan orang dewasa serta antara orang dewasa wanita dengan orang dewasa pria. Hal ini tidak berarti bahwa dalam praktik pelaksanaan pemasyarakatan terpidana tidak diadakan perbedaan pembinaan. Pasti ada, tetapi dasarnya adalah tetap peraturan dan pengalaman “lama” yang dimodifikasi dengan prinsip-prinsip umum sistem pemasyarakatan yang berlaku.⁵⁰⁶

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan, sebagai berikut:

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.

⁵⁰⁵ Menurut Pasal 1 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan :

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 butir ke-1).
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 butir ke-2).
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 butir ke-3).
4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 butir ke-4).
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 butir ke-5).

⁵⁰⁶ Mardjono Reksodiputro, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Keempat*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 137.

(2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Bab III.

(3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Tata laksana kelembagaan dan keorganisasian dari LAPAS maupun BAPAS, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ada di tangan Menteri yang ditunjuk yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan pembantu/ kepanjangan tangan dari Presiden Republik Indonesia, sehingga dapat memungkinkan terjadinya intervensi di dalamnya yang dapat berakibat pada turunya kewibawaan lembaga peradilan pidana secara keseluruhan. Kemandirian LAPAS dan BAPAS ke depan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemandirian kekuasaan lembaga peradilan pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merubah LAPAS Anak menjadi

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (untuk selanjutnya disingkat LPKA), yaitu lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya (lihat Pasal 1 butir ke-20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak); RUTAN Khusus Anak menjadi Lembaga Penempatan Anak Sementara (untuk selanjutnya disingkat LPAS), yaitu tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung (lihat Pasal 1 butir ke-21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan membentuk Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (untuk selanjutnya disingkat LPKS), yaitu lembaga atau tempat pelayanan social yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak (lihat Pasal 1 butir ke-22 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Badan lain yang juga mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah lembaga pemberi jasa hukum, yaitu Penasihat Hukum.⁵⁰⁷ Pemberi jasa hukum berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah seorang atau lebih yang mempunyai profesi sebagai advokat.⁵⁰⁸

Di dalam kedudukannya sebagai suatu profesi yang mulia atau *officium nobile*, maka advokat memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum terutama bagi kaum miskin dan buta huruf secara cuma-cuma atau *probono*. Pemberian bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial dari profesi advokat dan sebagai bagian dari kontribusi sosial

⁵⁰⁷ KUHAP menggunakan istilah Penasihat Hukum untuk lembaga pelayanan jasa hukum dalam perkara pidana, misal dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut :“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

⁵⁰⁸ Sebelum keluarnya UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat di bidang pemberian jasa atau Pelayanan hukum/beracara di Peradilan terdapat Pengacara Praktik disamping Advokat. Dengan keluarnya UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat maka tidak ada lagi istilah Pengacara Praktik.

(*social contribution and social liability*).⁵⁰⁹ Kemandirian lembaga pemberi jasa hukum (advokat) dijamin di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

Keprihatinan atas permasalahan yang dihadapi para aparat penegak hukum yang termasuk ke dalam Catur Wangsa Penegak Hukum (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Penasihat Hukum) agar lebih meningkatkan pengertian, pemahaman dan ketrampilan profesinya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana diungkapkan oleh Abdurrahman, sebagai berikut :

Di samping itu kita pun menyadari sepenuhnya bahwa aparat penegak hukum kita adalah juga manusia yang sudah pasti tidak akan luput dari khilaf dan salah, sehingga ada saja kemungkinan seorang yang ditangkap dan dituduh telah melakukan suatu tindak pidana ternyata adalah seorang yang tidak berdosa, sehingga akan memeperkosa hak-hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi.

Menghadapi kenyataan yang demikian ini, maka persoalan tentang bantuan hukum mempunyai arti dan peranan yang sangat penting sekali dalam penanggulangan dan pemecahan masalah yang selalu bereksistensi dalam dua dimensi, yaitu sebagai salah satu sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak asasi manusia dari tindakan-tindakan sewenang-wenang, sehingga adalah wajar apabila masalah tentang bantuan hukum ini ditempatkan dalam skala prioritas dalam pembahasan.⁵¹⁰

Dalam memberikan bantuan hukum, penasihat hukum dapat berhubungan bebas dengan tersangka atau terdakwa, tetapi didasarkan

⁵⁰⁹ Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.145-146.

⁵¹⁰ Abdurrahman, 1980, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 112-113.

pada fungsi memperlancar proses peradilan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, posisi penasihat hukum dapat digambarkan, sebagai berikut :

1. Dalam pemeriksaan tersangka oleh penyidik, maka penasihat hukum selama pemeriksaan berjalan, pasif artinya kehadiran penasihat hukum hanya dapat mendengarkan dan melihat pemeriksaan tersebut (Pasal 115 ayat (1) KUHAP). Sudah barang tentu harapan penulis dalam praktek, di mana tersangka menghadapi kesulitan yang bersifat yuridis ia diijinkan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, sehingga pendampingan penasihat hukum pada tingkat penyidikan bermanfaat bagi kepentingan tersangka. Hal demikian posisi penasihat hukum *yuridis adviseur* atau *legal adviser*.

2. Dalam pemeriksaan tersangka di muka persidangan pengadilan negeri, maka penasihat hukum selama pemeriksaan terdakwa berjalan, bersikap aktif, artinya kehadiran penasihat hukum dapat menggunakan hak-haknya seperti yang dimiliki hakim dan jaksa, yakni hak bertanya jawab, termasuk *cross examination*, hak mengajukan pembuktian : baik saksi yang mengentengkan (saksi *a de charge*) maupun surat-surat atau alat-alat bukti lainnya, hak

mengucapkan pembelaan (*pledooi*). Dalam hal demikian posisi penasihat hukum sebagai *procurator* sekaligus *pleiter* atau *verdediger* (Belanda), pembela (Indonesia).⁵¹¹

Berkaitan dengan fungsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam perkara pidana merupakan hal yang baru, yang dalam hal ini kemudian memunculkan adanya wacana baru dalam sistem peradilan pidana yang disebut sebagai mediasi penal. Mediasi penal (*penal mediation*) sering disebut juga dengan *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters*. Di dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafbemiddeling* dan dalam istilah Jerman disebut sebagai *der aubergerichtliche tataugleich* serta dalam istilah Perancis disebut sebagai *de mediation penale*. Mediasi penal disebut juga dengan istilah *victim offender mediation* (VOM) atau *tater offer ausgleich* (TOA) atau *offender victim arrangement* (OVA), karena mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban.⁵¹²

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah *alternative dispute resolution* atau *apropriate dispute resolution* (ADR). ADR pada umumnya digunakan di dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Barda Nawawi Arief, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini pada prinsipnya kasus-kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun

⁵¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia, Latar Belakang dan Sejarahnya*, Cet. Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.

⁵¹² Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, hlm.1-2.

dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus-kasus pidana di luar pengadilan melalui berbagai *diskresi* aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (seperti : musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan sebagainya).⁵¹³

Selanjutnya dikatakan, bahwa praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah diselesaikan secara damai melalui mekanisme hukum adat, namun perkara tersebut tetap diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Namun dalam perkembangannya di berbagai negara terdapat kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Bahkan menurut Detlev Frehsee sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, meningkatnya penggunaan *restitusi* didalam proses pidana menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dengan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.⁵¹⁴

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal diintrodusir di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disebut dengan istilah *diversi*. Menurut undang-undang tersebut ada keharusan bagi Penyidik/Penuntut Umum/Hakim untuk mengupayakan dilakukannya mediasi penal dengan cara melakukan *diversi*, yang apabila proses *diversi* berhasil, maka perkara tersebut tidak dilanjutkan pada tahapan selanjutnya. Namun apabila gagal, maka perkara yang bersangkutan diproses lebih lanjut dan kemudian diserahkan pada tahapan selanjutnya.

⁵¹³ *Ibid.*, hlm.3-4.

⁵¹⁴ *Ibid.*, hlm.4-5.

Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2006 telah diundangkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635), yang kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 dilakukan perubahan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602). Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang tersebut, maka dibentuklah suatu lembaga yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disingkat LPSK). LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur di dalam Undang-undang (lihat bunyi Pasal 1 butir ke-5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang tersebut, LPSK bertanggung jawab kepada Presiden,⁵¹⁵ akan tetapi LPSK merupakan lembaga yang mandiri sebagaimana ditegaskan di dalam rumusan Pasal 11 yang berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
- (2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

⁵¹⁵ Lian Nury Sanusi, 2006, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Kawan Pustaka, Jakarta, hlm. 8

- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan LPSK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Menurut R. Soesilo, agar supaya Pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yaitu memberikan keputusan yang semata-mata berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran, maka tidak dapat dibenarkan adanya tekanan-tekanan atau pengaruh-pengaruh dari luar yang akan menyebabkan para hakim tidak bebas lagi dalam mengambil keputusan yang seadil mungkin.⁵¹⁶ Dengan demikian, meskipun kemandirian sistem peradilan pidana sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijamin, namun beberapa lembaga penegak hukum pendukung sistem peradilan pidana tidak bisa dijamin kemandiriannya, dikarenakan sebagai berikut :

Pertama, beberapalembaga penegak hukum berada di bawah kekuasaan/ di bawah pengaruh lembaga eksekutif karena secara kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indonesia; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab kepada Presiden dan Rumah Tahanan Negara (untuk selanjutnya disingkat RUTAN)⁵¹⁷ ; Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (untuk selanjutnya disingkat RUPBASAN)⁵¹⁸; Balai Pemasyarakatan (BAPAS) serta Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) bertanggung jawab kepada

⁵¹⁶ R. Soesilo, 1978, *Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik (Dalam penyelesaian perkara sebagai Penegak Hukum)*, Op. Cit., hlm. 5.

Termasuk di dalamnya lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

⁵¹⁷ Diatur berdasarkan Pasal 18-Pasal 25 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP *jo* Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

⁵¹⁸ Diatur berdasarkan Pasal 26-Pasal 34 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP *jo* Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan pembantu Presiden.

Kedua, proses seleksi pimpinan lembaga seperti Kapolri dan Pimpinan KPK yang mengharuskan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengakibatkan dapat terjadinya tarik ulur berbagai kepentingan (*conflict of interest*) yang berujung pada terganggunya kemandirian lembaga penegak hukum tersebut. Dalam kenyataannya, tidak hanya kedua lembaga tersebut di atas yang proses seleksinya melalui atau harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, masih ada beberapa lembaga antara lain : anggota Badan Pemeriksa Keuangan, anggota Komisi Yudisial, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Hakim Agung, Panglima TNI, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia.⁵¹⁹

Ketiga, pengajuan serta pengesahan perubahan (revisi) terhadap peraturan perundang-undangan menjadi alat tawar politik dari fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat.⁵²⁰ Romli Atmasasmita mengungkapkan, bahwa pasca reformasi, bandul kekuasaan di antara ketiga pilar kekuasaan negara telah berpindah dari eksekutif ke legislatif. Obsesi kekuasaan legislatif merambah ke kekuasaan yudikatif, yaitu lewat inisiatif DPR mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung (RUU Mahkamah Agung).⁵²¹

Keempat, sistem/lembaga peradilan pidana yang belum terpadu dapat mengakibatkan sistem/lembaga peradilan pidana menjadi tidak mandiri. Pengaruh lembaga-lembaga lain terutama lembaga eksekutif dan

⁵¹⁹ Kompas, Kamis 15 Oktober 2015, hlm.5.

⁵²⁰ Kompas, Rabu 9 Desember 2015, hlm.3.

⁵²¹ Romli Atmasasmita, 2012, "*Quo Vadis*" RUU Mahkamah Agung, Kompas, Selasa 25 September 2012, hlm. 6.

lembaga legislatif dapat membuat kinerja lembaga peradilan pidana yang tidak terpadu menjadi tidak mandiri.

Berkaitan dengan itu, Barda Nawawi Arief menyatakan “teori *independensi integral/sistemik* dari sistem peradilan pidana”. Barda Nawawi Arief dalam *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*, menyatakan sebagai berikut :

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri (*independen*) harus terwujud dalam keseluruhan proses/kekuasaan penegakan hukum pidana. *Independensi* sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan *independensi integral/sistemik* dan bukan *independensi parsial/fragmenter*. *Independensi* yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem di bawah koordinasi dan kendali satu pimpinan puncak yang meliputi “kekuasaan menyidik”, “kekuasaan menuntut”, “kekuasaan mengadili” dan “kekuasaan melaksanakan pidana”.⁵²²

Sering dikemukakan ungkapan, bahwa pengadilan adalah “benteng terakhir keadilan” di mana dua buah syaratnya adalah “sidang pengadilan yang bebas (*independent court*)” dan “hakim yang tidak berpihak (*impartial judge*)”. Dapat dipenuhinya kedua syarat tersebut banyak tergantung pada subsistem lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain itu memberi peluang untuk tumbuh dan berkembangnya syarat-syarat ini dalam Pengadilan ataukah tidak. Akan tetapi, walaupun peluang ini sudah diberikan masih diperlukan dukungan profesi hukum yang harus menumbuhkan dan mengembangkannya. Dalam keadaan di mana profesi hukum sendiri tidak menghargai kedua syarat tersebut di atas, maka mustahil pula “sidang pengadilan yang bebas” dan “hakim yang tidak berpihak” dapat berakar dan tumbuh dengan sehat. Sebaliknya, apabila profesi hukum, seperti advokat, jaksa dan hakim benar-benar sepaham dan menghayati kepentingan kedua syarat tadi,

⁵²² Barda Nawawi Arief, 2015, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm.21 dan 41.

dalam peluang yang sekecil-kecilnya pun kedua syarat tersebut dapat berakar dan bersemi. Ibarat tanaman, tanah yang subur adalah memang faktor yang menguntungkan, tetapi syarat utama adalah benih yang baik, karena itu memberikan kemungkinan hidup dalam tanah yang tidak subur pun dengan menambahkan pupuk dan air secukupnya.⁵²³

3. Sistem/Lembaga Peradilan Pidana Belum Berwibawa

Adi Sulistiyono mengatakan, bahwa Pengadilan sebagai salah satu pranata dari hukum modern telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dunia di semua negara di dunia melalui hukum positif yang telah diundangkan, karena di dalam masyarakat telah tercipta suatu pendapat umum, bahwa lembaga peradilan merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara guna menyelesaikan sengketa. Di samping itu, terdapat beberapa alasan lain yang mendorong masyarakat menyelesaikan sengketanya ke pengadilan, adalah :

- a. adanya kepercayaan, bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti yang mereka kehendaki,
- b. adanya kepercayaan, bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya,
- c. adanya kepercayaan, bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum,
- d. adanya anggapan, bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia.⁵²⁴

⁵²³ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Kelima*, Lab. Kriminologi UI dan Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 25-26.

⁵²⁴ Adi Sulistiyono, 2007, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, hlm.303-304.

Selanjutnya dikatakan, namun sayangnya kepercayaan masyarakat tersebut tidak mendapatkan respon yang memadai dari pengadilan. dalam realitasnya, peranan pengadilan belum bisa memenuhi harapan masyarakat. Tidak sedikit putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan melainkan sudah menjadi tempat untuk mencari kemenangan dengan segala cara serta sebagai tempat jual beli putusan. Kondisi yang demikian ini mengakibatkan pengadilan mengalami krisis kepercayaan dan kewibawaan di mata masyarakat para pencari keadilan.⁵²⁵

Di samping itu, krisis kepercayaan dan kewibawaan yang terjadi pada lembaga pengadilan juga disebabkan oleh antara lain :

- a. adanya tekanan dari pihak luar pada pengadilan dalam memutus perkara,
- b. rendahnya pengetahuan hakim dalam merespon perkembangan hukum,
- c. vonis hakim yang tidak bisa diprediksi dan tidak mencerminkan keadilan,
- d. jual beli vonis hakim, korupsi dan kolusi di lingkungan pengadilan,
- e. lamanya pihak yang bersengketa mendapatkan vonis yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
- f. puluhan ribu tunggakan perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung,
- g. Mahkamah Agung telah berubah menjadi sarang korupsi,
- h. rendahnya kredibilitas Mahkamah Agung.⁵²⁶

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana bukan merupakan sistem tertutup, sehingga memungkinkan adanya pengaruh sistem sosial terhadap pelaksanaan tugasnya, misalnya pengaruh perkembangan politik; ekonomi; sosial dan budaya; pertahanan dan keamanan; ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan sebagainya.

⁵²⁵ *Ibid.*, hlm.304 dan hlm.173.

⁵²⁶ Adi Sulistiyono, 2007, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Op.Cit., hlm.173-174.

Pengaruh regional maupun internasional juga harus diperhatikan, karena Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation Organization*) mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai universal yang diakui keberadaannya oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Untuk itu perlu disadari dan dihayati adanya *legal spirit* dalam profesionalisme lembaga-lembaga peradilan pidana, semangat pengabdian masyarakat, tanggung jawab sosial serta ketaatan terhadap kode etik profesi agar peradilan pidana yang baik dan berwibawa itu terwujud.⁵²⁷

Etika profesi dan budaya hukum adalah dua jenis pranata normatif yang membatasi kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial yang dilimpahkan kepada para hakim. Di banyak profesi, penegakan etika profesi dijalankan melalui otoritas asosiasi profesi. Khusus untuk profesi hakim, otoritas ini dilakukan bersama-sama oleh beberapa lembaga negara sekaligus. Etika profesi bersinggungan dengan budaya hukum internal. Artinya, jika etika profesi dijalankan dengan baik, maka budaya hukum internal profesi tersebut juga dalam kondisi yang sehat. Hal itu berarti komitmen individual dan kolektif dari si penyandang profesi menjadi sangat penting. Selanjutnya budaya hukum eksternal, yang tidak dapat direkayasa dengan menggunakan energi hakim (hakim-hakim inspirasional, seperti Artidjo Alkostar). Oleh sebab itu, hakim-hakim yang inspirasional wajib ditopang secara kelembagaan.⁵²⁸

Berkaitan dengan itu, di dalam *Introduction* dalam buku “*Lawyers and Justice, An Ethical Study*”, David Luban menyatakan sebagai berikut :

The very term “professional ethics” suggests something of the public character of professional discretion. The adjective qualifies the noun : the “ethics” at work is not the ethics of private engagement but of institutional life, and the professional will engage in ethical deliberation by asking herself questions about

⁵²⁷ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.216-217.

⁵²⁸ Anonymous, *Bahan Bacaan Klinik Etik dan Hukum, Buku I Materi Hukum*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 72-73.

*what her profession and its institutions ought to be doing. In short, the study of professional ethics must consider both individual conscience and social institutions, for if it does not consider both together, it will be incapable of considering either separately.*⁵²⁹

Kode etik profesi hakim merupakan wujud idealisme yang menunjukkan sifat-sifat dan sikap hakim saat menjalankan tugas yang luhur demi menegakkan hukum dan keadilan atas dasar kebenaran dan kejujuran dengan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan Negara serta diri sendiri. Sifat-sifat itu dilambangkan, sebagai : (1).Bintang, yang berarti Ketuhanan Yang Maha Esa; (2).Tirta (air), yang berarti harus membersihkan kotoran dunia; (3).Cakra, yaitu senjata yang membasmi segala kejahatan dan kedholiman untuk menegakkan keadilan; (4).Candra, yaitu bulan purnama raya yang menerangi segala kegelapan; dan (5).Sari, yaitu bunga melati yang semerbak wangi mengharumi dunia, berarti hakim itu harus berbudi luhur.⁵³⁰ Sikap hakim adalah tidak memihak dan bebas dari pengaruh siapa pun, tegas, sopan, sabar serta memberi landasan yang baik dan tidak berprasangka.⁵³¹

Di dalam lembaga Kejaksaan juga terdapat Tri Krama Adhyaksa yang merupakan landasan jiwa dari setiap warga Kejaksaan dalam meraih cita-cita luhurnya, terpatrit dalam trapsila yang meliputi tiga krama, yaitu :⁵³²

(1).Satya, adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia. Setiap warga Kejaksaan apapun pangkat atau jabatan yang dimilikinya wajib menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan tidak berkhianat. Kesemuanya itu mencerminkan sikap berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan yang dibuktikan dengan menjauhkan diri dari noda atau

⁵²⁹ David Luban, 1988, *Lawyers and Justice, An Ethical Study*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA, page xix.

⁵³⁰ Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Cet. II, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, hlm. 103.

⁵³¹ Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum, Cetakan II, Loc. Cit.*

⁵³² Liliana Tedjosaputro, 2003, *Ibid.*, hlm. 104-105.

hal-hal lain yang dapat merugikan keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan.

(2).Adhy, adalah kesempurnaan dalam bertugas yang berunsur utama pada kepemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia. Setiap warga Kejaksaan dalam melakukan semua perbuatan, baik di dalam maupun di luar dinas, selalu dilandasi dengan alasan-alasan yang benar sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya.

(3). Wicaksana, berarti bijaksana dalam tutur kata dan perilaku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan. Setiap warga Kejaksaan dalam menunaikan tugas dharma baktinya, di samping harus cakap, mampu dan terampil, harus pula membuktikan dirinya sebagai petugas yang matang dan dewasa dengan tanpa mengorbankan prinsip dan ketegasan, serta dapat bertindak bijaksana.

Di samping itu, untuk menjamin keberhasilan Kejaksaan dalam pelaksanaan dharma baktinya, masih terdapat subdoktrin sesuai dengan pembidangnya, yaitu :

(1).Indrya Adhyaksa untuk bidang intelijen, bidang ini dalam melaksanakan tugasnya bertrilogi : *hening, nastiti* dan *kerti* yang artinya peka, cermat dan tuntas;

(2).Kritya Adhyaksa untuk bidang operasi, bidang ini dalam melaksanakan tugasnya bertrilogi : *akan, titis* dan *waskita* yang artinya cepat, tepat dan cermat.

(3).Upakriya Adhyaksa untuk bidang pembinaan, bidang ini dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada : *asah, asih* dan *asuh*;

(4).Anukara Adhyaksa untuk bidang pengawasan umum, bidang ini dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada : *tata, titi* dan *tatas* atau teratur, teliti dan tepat.⁵³³

⁵³³ *Ibid.*, hlm. 105.

Di dalam Kepolisian juga terdapat kode etik sebagai pedoman pengamalan “Bhakti Dharma Waspada” dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, yaitu *Rastra Sewakotama Negara Janatama-Casanadharma*, sebagai berikut :⁵³⁴

Setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Rastra Sewakotama, yaitu :

- (1).Mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2).Berbakti demi keagungan Nusa dan Bangsa yang bersendikan Pancasila dan UUD 1945, sebagai kehormatan yang tertinggi;
- (3).Membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tekad juang pantang menyerah;
- (4).Menegakkan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat secara adil dan bijaksana;
- (5).Melindungi, mengayomi serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengayoman yang luhur.

Setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Janotama, yaitu :

- (1).Berdharma untuk menjamin ketenteraman umum bersama-sama warga masyarakat membina ketertiban dan keamanan demi terwujudnya kegairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin;

⁵³⁴ *Ibid.*, hlm. 105-107.

- (2).Menampilkan dirinya sebagai warga negara yang berwibawa dan dicintai oleh sesama warga negara;
- (3).Bersikap disiplin, percaya diri, tanggung jawab, penuh keikhlasan dalam tugas kesanggupan, serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat;
- (4).Selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja penuh keaktifan dan efisiensi serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya;
- (5).Memupuk rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan serta kesetiakawanan dalam lingkungan masyarakat;
- (6).Menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya.

Setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Casanadharma, yaitu :

- (1).Selalu waspada, siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugas;
- (2).Mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan;
- (3).Tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan dan mendahulukan cara-cara pencegahan daripada penindakan secara hukum;
- (4).Memelihara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;

- (5).Bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan lainnya dan peran serta masyarakat, memelihara dan meningkatkan kemandirian ABRI-Rakyat;
- (6).Meletakkan setiap langkah tugas sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan Nasional sesuai Amanat Penderitaan Rakyat.

Kode etik profesi tidak hanya terdapat pada hakim, jaksa dan anggota kepolisian (sebagai penyidik), melainkan juga advokat sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁵³⁵ Kode etik tersebut mencakup : (1).kepribadian advokat; (2).hubungan dengan klien; (3).hubungan dengan teman sejawat; (4).cara bertindak dalam menangani perkara; serta (5).pelaksanaan kode etik.⁵³⁶

Sejalan dengan pendapat di atas adalah apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa ketidakpercayaan masyarakat akan timbul dan kewibawaan hukum akan menurun manakala masyarakat melihat kenyataan bahwa penegak atau pengemban hukum justru melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang seharusnya ditegakkan (antara lain: nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kepercayaan dan cinta kasih antar sesama). Nilai kepercayaan merupakan salah satu nilai yang perlu selalu dipelihara, ditegakkan dan dilindungi. Masyarakat akan merasa aman, tertib dan damai manakala ada saling kepercayaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kepercayaan ini akan menjaga keharmonisan hubungan kemasyarakatan antara negara dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mencari penyelesaian kepada orang lain atau bahkan main hakim sendiri (*eigen richting*). Dengan kata lain, menegakkan wibawa penegak hukum mempunyai arti menegakkan kembali wibawa kepercayaan. Hal

⁵³⁵ *Ibid.*, hlm. 96.

⁵³⁶ *Ibid.*, hlm. 97.

demikian sesuai himbauan dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disingkat PBB). *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Geneva yang menyatakan, bahwa aparat penegak hukum harus menjadi *friends, partners and defenders of citizens*, sehingga perlu meningkatkan saling kepercayaan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.⁵³⁷

Kenyataan menunjukkan bahwa sistem/lembaga peradilan pidana belum berwibawa, karena beberapa hal :

Pertama, masih banyak aparat penegak hukum yang terjebak pada formalitas belaka, bukan mengutamakan pada pencarian dan penemuan kebenaran sejati (*ultimate truth*) yang merupakan tujuan dari proses peradilan.⁵³⁸ Hal yang demikian ini dapat menimbulkan terjadinya kasus-kasus yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan aparat penegak hukum dan bekerjanya hukum itu sendiri, misalnya : Kasus Marsinah, Kasus Udin, Kasus Lanjar Sriyanto,⁵³⁹ Kasus Ninik Setyowati⁵⁴⁰ dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut Mardjono Reksodiputro menambahkan, bahwa dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dalam arti luas dapat mendorong pelaku untuk lebih berani melakukan perbuatannya.⁵⁴¹

⁵³⁷ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung , hlm.6-7.

⁵³⁸ M. Yahya Harahap, 1997, "Seminar Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Suatu Tinjauan Penyidikan Dikaitkan dengan Pembuktian*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 20 Desember 1997), hlm.2-17.

⁵³⁹ Lanjar Sriyanto ditahan dan diadili akibat kecelakaan yang merenggut nyawa Saptaningsih (isterinya). Pada Januari 2010 Lanjar memboncengkan anak dan isterinya yang kemudian terjatuh saat menabrak mobil yang berhenti mendadak. Saat terjatuh itu isterinya terlindas mobil milik polisi yang bertugas di Ngawi. Lihat Kompas, Jumat 25 Januari 2013, hlm.1-15.

⁵⁴⁰ Ninik Setyowati yang sedang memboncengkan Kumaratih Sekar Hanifah (puterinya) pada Agustus 2012 disenggol truk yang mendahului sepeda motor yang dikendarai Ninik S., sehingga Ninik S. dan puterinya terjatuh dan terlindas roda truk. Ninik S. terluka parah dan puterinya tewas di TKP. Januari 2013 Ninik Setyowati ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Banyumas atas kasus tersebut. Lihat Kompas, Jumat 25 Januari 2013, hlm.1-15; Kompas, Sabtu 26 Januari 2013, hlm.1-15 dan Kompas, Minggu 27 Januari 2013, hlm.1-11.

⁵⁴¹ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, hlm.86.

Kedua, masih banyaknya aparat penegak yang belum bekerja secara profesional, melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi kewibawaan lembaga penegak hukum, atau bahkan melakukan suatu tindak pidana di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya atau melakukan suatu tindak pidana di luar menjalankan tugas dan kewajibannya. Menurut I Made Gelgel, masih adanya sementara aparat penegak hukum yang tidak atau kurang memiliki ciri-ciri sebagai aparat penegak hukum yang baik, yakni kemampuan profesional, pengetahuan, keterampilan serta integritas moral dan sikap mental yang memadai dapat mengakibatkan berkurangnya kewibawaan lembaga penegak hukum di mata masyarakat.⁵⁴²

Kondisi demikian ini dapat ditemukan secara faktual sebagaimana diinformasikan di dalam media cetak, seperti : “Polisi Mabuk Mengamuk, Acungkan Badik dan Pistol”⁵⁴³, ”DuaAnggota Polres Sukoharjo Ditangkap”⁵⁴⁴, ”Polisi Rusak Kantor Satpol PP”⁵⁴⁵, “Perwira Polri di Maluku Tewas”⁵⁴⁶, ”Lima Tahanan Kabur Seusai Persidangan”⁵⁴⁷, “Rendi Tewas oleh

⁵⁴² I Made Gelgel, 1997, “Seminar Dwi Windu KUHAP”, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan KUHAP dalam Bidang Penuntutan dan Hak-hak Perlindungan Korban*, (Surabaya : Universitas Airlangga, 20 Desember 1997), hlm.11.

⁵⁴³ Jawa Pos, Jumat 11 Desember 2015, hlm.8.
Dalam keadaan mabuk Brigpol. Amri mengamuk di tempat hiburan malam di Bone tgl. 10 Desember 2015. Dia sempat mencabut badik dan mengeluarkan senjata api jenis revolver serta mengancam pengunjung lain agar tidak ikut masuk ke toilet.

⁵⁴⁴ Suara Merdeka, Kamis 9 Oktober 2014, hlm.12.
Bripka Roni B.Rahardjo dan Brigadir Arif Jonathan ditangkap oleh Tim BNN pada Rabu 8 Oktober 2014 atas dugaan kepemilikan sabu-sabu seberat kurang lebih 145 gram.

⁵⁴⁵ Jawa Pos, Rabu 2 Desember 2015, hlm.4.
Puluhan oknum polisi yang diduga dari Direktorat Sabhara Polda Riau menyerang kantor Satpol PP Pekanbaru pada tanggal 1 Desember 2015. Mereka melakukan perusakan dan pengeroyokan, sehingga tiga anggota satpol PP menderita luka-luka.

⁵⁴⁶ Kompas, Selasa 5 Januari 2016, hlm.15.
AKBP Martin Mairuhu tewas dikeroyok sejumlah warga di Kab. Maluku Tengah, Maluku pada hari Minggu 3 Januari 2016. Brigpol. Mervin Haliwela anggota Polri (Polda Maluku) diduga terlibat.

⁵⁴⁷ Kompas, Kamis 3 Desember 2015, hlm.15.
Lima tahanan kasus narkoba yang ditangani Kejari Jakarta Utara kabur dari mobil tahanan seusai mengikuti persidangan Selasa 1 Desember 2015 (pukul 19.00 WIB).

Peluru “Nyasar” Polisi”⁵⁴⁸, ”Petinggi LP Narkotika Terancam Sanksi Berat”⁵⁴⁹, “Ganjil, Polisi Tak Akui Penganiayaan”⁵⁵⁰, “Satuan Narkoba Padang Tangkap Hakim dan Polisi”⁵⁵¹, dan lain sebagainya.⁵⁵²

Ketiga, proses penyidikan yang terlalu bersifat “memaksa” sehingga bertentangan dengan asas *fair trial*.⁵⁵³ Perlu diketahui bahwa *interogasi* terhadap tersangka dimaksudkan bukan hanya untuk mengejar keadilan akhir tetapi juga tidak boleh mengesampingkan proses awal, sehingga tetap harus memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia kepada tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana. Proses penyidikan yang bersifat “memaksa” demikian ini belum/tidak mencerminkan adanya prinsip *due process of law* (proses hukum yang adil), melainkan merupakan suatu *arbitrary process of law* (proses hukum yang sewenang-wenang berdasarkan kekuasaan aparat penegak penerapan hukum serta peraturan perundang-undangan secara formal, melainkan lebih luas dari itu).⁵⁵⁴ Proses penyidikan yang demikian ini berakibat sering terjadinya isi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan diingkari oleh terdakwa pada saat pemeriksaan

⁵⁴⁸ Kompas, Minggu 6 Desember 2015, hlm.10.

Rendi Anggara (11 th) warga Palembang, Sumatera Selatan, tewas tertembak di kepala akibat peluru *nyasar* polisi dalam pengejaran tersangka pengedar narkoba pada Sabtu siang 5 Desember 2015.

⁵⁴⁹ Suara Merdeka, Selasa 19 Mei 2015, hlm.10.

Kementerian Hukum dan HAM Jateng akan bertindak tegas terkait terungkapnya napi di LP Narkotika P. Nusakambangan yang mengendalikan peredaran narkoba dari dalam sel. Petinggi LP yang terbukti bersalah memuluskan peredaran narkoba tersebut terancam sanksi berat.

⁵⁵⁰ Koran Sindo, Jumat 23 Januari 2015, hlm.16.

Polisi mengeluarkan versi berbeda soal kejadian yang dialami Kuswanto, korban salah tangkap yang diduga dianiaya oleh anggota Polres Kudus.

⁵⁵¹ Kompas, Sabtu 22 Agustus 2015, hlm.23.

MYT, hakim PTUN Padang dan AK, anggota Polisi di Polda Sumatera Barat ditangkap Satuan Narkoba Polresta Padang pada Kamis 20 Agustus 2015 karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.

⁵⁵² Kompas, Selasa 1 September 2015, hlm.22.

Tiga warga Kel. Tanjung Ria, Kota Jayapura, Papua (Soleman Yom, Eliaser Awom dan Yafet Awom) diduga menjadi korban salah tangkap pihak kepolisian setempat pada 27 Agustus 2015.

⁵⁵³ Dalam Hukum Acara Pidana, asas *fair trial* menjadi satu dengan asas *speedy trial* yang dalam istilah Latinnya adalah asas *contante justitie*.

⁵⁵⁴ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Kelima*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.8-19.

di sidang Pengadilan

Keempat, masih sering terjadinya pemerasan yang dilakukan oleh kalangan aparat penegak hukum yang terjadi tidak hanya pada satu instansi saja, melainkan di tiap tahapan sistem peradilan pidana.⁵⁵⁵ Masih adanya permainan kolusi berupa persekongkolan, perbuatan yang curang atau suatu ketidakjujuran untuk membenarkan terjadinya kebohongan serta penipuan atau untuk memenangkan si pembohong atau si penipu dengan mengalahkan pihak yang jujur dan benar.⁵⁵⁶

Presiden Joko Widodo⁵⁵⁷ dalam pidato pada peringatan Hari Bakti Adhyaksa Ke-55 di Kejaksaan Agung Rabu 22 Juli 2015 menyatakan Kejaksaan Agung harus melakukan penegakan hukum yang memenuhi rasakeadilan masyarakat sekaligus menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ia tidak ingin mendengar lagi ada aparat penegak hukum yang memeras atau memperdagangkan perkara atau tuntutan serta menjadikan tersangka atau terdakwa sebagai ATM.⁵⁵⁸

Menurut Media Indonesia, sampai dengan tahun 2015 paling tidak terjadi beberapa kasus yang melibatkan penegak hukum, antara lain :

a. Polisi :

- 1) Tanggal 1 November 2013 : dua oknum polisi, yaitu Bripda RE dan Brigadir DI diduga memeras seorang warga Batam berinisial Hnr;
- 2) Tanggal 14 September 2014 : Aipda AS anggota Satlantas Polres Reskrim Polrestabes Semarang;
- 3) Tanggal 7 Mei 2015 : perwira polisi AKBP PN diduga memeras pemilik diskotek di Bandung sebesar Rp.5 miliar.

⁵⁵⁵ *Loc. Cit.*

⁵⁵⁶ *Loc. Cit.*

Lihat juga “Novel Tuding Budi Waseso Berbohong” dalam Suara Merdeka, Sabtu 30 Mei 2015, hlm. 1-7.

⁵⁵⁷ Ir. Joko Widodo adalah Presiden R.I. sejak Tahun 2014.

⁵⁵⁸ Media Indonesia, Kamis 23 Juli 2015, hlm.1.

b) Jaksa :

- 1) Tanggal 21 Juli 2006 : jaksa Cecep Sunarto dan Bordju Ronny memeras mantan Dirut Jamsostek Achmad Djunaedi sebesar Rp.550 juta;
- 2) Tanggal 4 September 2008 : jaksa Urip Tri Gunawan menerima suap dari Artalyta Suryani;
- 3) Tanggal 12 Februari 2011 : jaksa Dwi Seno Widjanarko memeras Kepala Kantor Pembantu BRI Ciputat;
- 4) Tanggal 21 November 2011 : jaksa Sistoyo menerima suap sebesar Rp.99,9 juta dari Edward;
- 5) Tanggal 14 Desember 2013 : Subri, Kepala Kejari Praya, Lombok Tengah NTB menerima suap Rp.213 juta dari pengusaha Lusi Ani Razak.

c. Hakim:

- 1) Tanggal 17 Agustus 2012 : hakim Kartini Marpaung dan Heru Kusbandono menerima suap dari Sri Dartutik sebesar Rp.150 juta dalam kasus APBD Kab. Grobogan;
- 2) Tanggal 22 Maret 2013 : Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi Tejocahyono menerima suap Rp.150 juta dalam kasus dana bansos Pemkot Bandung;
- 3) Tanggal 2 Oktober 2013 : Ketua MK Akil Mochtar menerima suap untuk kasus-kasus yang ada di MK;
- 4) Tanggal 9 Juli 2015 : hakim PTUN Medan Amir Fauzi, hakim Ginting dan panitera PTUN Medan Yusril Sofian menerima suap dari seorang pengacara yaitu Yagari Bastara.⁵⁵⁹

⁵⁵⁹ Media Indonesia, Kamis 23 Juli 2015, hlm. 1.
Lihat juga berita “Jaksa Tertangkap Peras Kontraktor” dalam Kompas, Jumat 3 Februari 2012, hlm.15.
Jaksa pada Kejari Batam Jufrizal, tertangkap tangan memeras kontraktor pemecah ombak pada Rabu 1 Februari 2012 malam.

Menurut Chryshnanda D.L., rendahnya tingkat kesejahteraan anggota Polri berakibat banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh polisi, sebagai berikut : (1).polisi korupsi (*police corruption*); (2).polisi brutal (*police brutality*); (3).polisi tidak peka (*police insensitivity*); dan polisi patah semangat (*police burn out*). Penyimpangan tersebut dilakukan oleh oknum polisi yang melanggar tugas dan tanggungjawabnya, serta tidak dapat memenuhi harapan masyarakat. Penyimpangan polisi seiring dengan jabatannya, semakin tinggi dan penting jabatan semakin besar daya pencemaran citra Kepolisian dan semakin merugikan masyarakat.⁵⁶⁰

Kelima, adanya penyalahgunaan ketentuan hukum acara atau *abuse of legal prosedure* atau *abuse of power* baik dilakukan untuk kepentingan pribadi, kelompok elit tertentu atau untuk kepentingan institusi itu sendiri atau lain-lain kepentingan. Termasuk di dalam *abuse of legal prosedure* atau *abuse of power* adalah masih maraknya praktik *kolusi*, *korupsi* dan *nepotisme* di dalam lembaga peradilan pidana yang dapat mengganggu keberadaan *intergrated* dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Berdasarkan indeks persepsi korupsi, Indonesia masih masuk jajaran negara-negara terkorup. Menurutsurvei *Transparency International*, skor IPK Indonesia adalah 3, beranjak 0,2 dari skor tahun lalu. Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 183 negara.⁵⁶¹

Adapun berdasarkan situasi korupsi di 117 negara pada tahun 2013 yang dikeluarkan *Transparency International*, Indonesia berada di posisi 64 negara paling korup (lebih baik daripada tahun 2012 dimana Indonesia berada pada posisi 60 negara paling korup).⁵⁶² Berkaitan dengan itu, menurut Teten Masduki, Sekjen *Transparency International* Indonesia untuk meningkatkan skor IPK di samping

⁵⁶⁰ Chrysnanda D.L., Tanpa Tahun, *Polisi Penjaga Kehidupan*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, hlm. 17 dan 67.

⁵⁶¹ Kompas, Jumat 2 Desember 2011, hlm.4.

Menurut Sekjen *Transparency International* Indonesia Teten Masduki, dengan skor 3 dari Skala 0-10 (0 berarti sangat korup, 10 berarti sangat bersih)

⁵⁶² Republika, Rabu 11 Juni 2014, hlm.2.

perbaikan regulasi perijinan adalah perbaikan menyeluruh pada institusi penegak hukum.⁵⁶³ Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam forum antikorupsi Indonesia keempat di Istana Merdeka Selasa 10 Juni 2014, Indonesia butuh waktu sekitar 45 tahun untuk bebas korupsi (dua hingga tiga kali lebih lama dibanding Hong Kong).⁵⁶⁴

Keenam, pengabaian perintah Presiden Joko Widodo kepada Kapolri untuk tidak menangkap Novel Baswedan menimbulkan kesan pembangkangan institusi Polri terhadap atasannya, kesan polisi versus polisi, serta berkesan menyudutkan dan mendiskreditkan lembaga kepresidenan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya kewibawaan Polri di mata publik.⁵⁶⁵

Ketujuh, intervensi lembaga/fraksi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap penanganan kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti terhadap Kejaksaan Agung.⁵⁶⁶ Intervensi juga dapat dilakukan pada saat *rekrutment*, misalnya terhadap panitia seleksi komisioner KPK dengan permintaan meloloskan orang tertentu yang merupakan “titipan”.⁵⁶⁷

Berkaitan dengan itu, William J. Chambliss dan Robert B. Seidman di dalam *Law, Order, and Power* mengemukakan : *In the case of the criminal-law-enforcing agencies, however, a far more significant factor is the pressures of the bureaucratic structure into which these agencies are shaped. Complex societies differ from primitive and transitional societies in many salient ways. Of all the differences perhaps none is more important for an understanding of the legal system than the fact that modern societies function through formal, bureaucratically structured organizations. And these bureaucratic institutions*

⁵⁶³ Kompas, Jumat 2 Desember 2011, hlm.4.

⁵⁶⁴ Republika, Rabu 11 Juni 2014, hlm.2.

Dr. Jend. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden R.I periode 2004-2009 dan periode 2009-2014.

⁵⁶⁵ Suara Merdeka, Minggu 3 Mei 2015, hlm.2.

⁵⁶⁶ Kompas, Sabtu 22 Agustus 2015, hlm.3.

⁵⁶⁷ Media Indonesia, Jumat 31 Juli 2015, hlm.11.

*function upon a permit granted by the largest bureaucratically organized institutions of all, the Government itself.*⁵⁶⁸

Kedelapan, sistem peradilan pidana belum terpadu dan belum mandiri sehingga mengakibatkan sub-subsistem dalam sistem peradilan pidana ataupun sistem peradilan pidana secara keseluruhan menjadi tidak berwibawa di mata masyarakat.

Menurut Ignatius Ridwan Widyadharma, etika dalam pergaulan hidup dibutuhkan untuk pula menjadikan manusia berperilaku baik. Hubungan antara hukum dan etika sangat erat. Etika didominasi oleh moral, oleh sebab itu seorang profesi hukum dalam menjalankan profesinya dibatasi oleh rambu-rambu dalam bentuk kode etik profesi yang bersangkutan.⁵⁶⁹ Selanjutnya dalam kesempatan lain dikatakan, bahwa kehidupan hukum selalu dikaitkan pada suatu tertib kemasyarakatan (*social order*) yang selalu bertujuan mempengaruhi dan memberi kelakuan umum dari masyarakat di segenap bidang kehidupan menurut garis-garis dan arah tujuan tertentu yang dikehendaki.⁵⁷⁰ Oleh karena itu, profesi hukum dalam suatu mekanisme kehidupan bernegara harus mampu mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan sesuai dengan martabat manusia. Kesadaran hukum yang hidup harus dapat diejawantahkan sebagai kesadaran di dalam hati nurani rakyat dalam arti pengetahuan dan ilmu yang dijalankan untuk menciptakan tegaknya hukum dan keadilan yang merata.⁵⁷¹ Pada kesempatan lain, dikatakan bahwa profesionalisme yaitu keahlian di dalam menjalankan karyanya wajib didukung oleh Etika Profesi sebagai dasar moralitas, sekaligus kedua hal tersebut yaitu profesionalisme dan etika profesi merupakan satu kesatuan yang

⁵⁶⁸ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts, California-London-Ontario, page 265.

⁵⁶⁹ Ignatius Ridwan Widyadharma, Tanpa Tahun, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hal. 35.

⁵⁷⁰ Ignatius Ridwan Widyadharma, 2001, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Penerbit Mimbar, Semarang, hlm. 13.

⁵⁷¹ *Ibid.*, hlm. 55.

manunggal.⁵⁷²

Berkaitan dengan hak tersebut di atas, perlu dikemukakan di sini mengenai “teori integritas”, bahwa hukum merupakan manifestasi dari nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan inilah yang hendak ditegakkan dan dilindungi lewat hukum. Menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Penegak hukum yang bersih dan berwibawa, jujur dan bermoral, tidak korup dan dapat dipercaya menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan terbentuk melalui “proses”. Proses pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai “*homo juridicus*” dan sebagai “*homo ethicus*” membutuhkan pendekatan rasional dan pendekatan kejiwaan.⁵⁷³ Kualitas sarjana hukum atau penegak hukum yang jujur, bersih/tidak korup, mampu menegakkan kebenaran dan keadilan tidak lahir dengan sendirinya, tetapi dia terlahir lewat “proses”. Oleh karena itu, harus juga dibentuk lewat proses pendidikan, baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di lingkungan profesi serta masyarakat luas.⁵⁷⁴

Jauh sebelumnya, R. Soesilo mengemukakan, oleh karena pada hakekatnya segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegakan hukum dan keadilan itu baik buruknya amat tergantung dari pada manusia-manusia pelaksananya, yaitu *the man behind the gun*, dalam soal ini adalah para hakim.⁵⁷⁵ Para penegak hukum haruslah jujur tidak dapat disuap, bebas merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh atau tekanan, baik dari dalam maupun dari luar.

⁵⁷² Ignatius Ridwan Widyadharma, 1996, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 15.

⁵⁷³ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 22-24.

⁵⁷⁴ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

⁵⁷⁵ R. Soesilo, *Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik (Dalam penyelesaian perkara sebagai Penegak Hukum)*, Op. Cit., hlm. 10.

Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, Nyoman Sarikat Putra Jaya mengemukakan, sebagai berikut :

Para penegak hukum, yaitu : polisi, jaksa, hakim dan advokat harus betul-betul profesional dan dimulai pembenahannya dari awal yaitu dari *recruitment*. *Recruitment* para penegak hukum haruslah secara terpadu dan ketat setelah melalui berbagai *test* kemudian dilakukan pendidikan/pelatihan khusus secara bersama-sama agar mereka mempunyai persamaan persepsi dan pandangan dalam penegakan hukum. Kode etik profesi jangan hanya menjadi pajangan semata.⁵⁷⁶

Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa banyak memang usaha yang dapat dilakukan untuk menuju kepada pembangunan hukum di negara kita. Namun demikian, pada hemat saya salah satu dari sekian banyak usaha penting adalah untuk menjadikan pengadilan kita suatu lembaga yang mempunyai kewibawaan yang tinggi. Oleh karena masalahnya memang tidak sederhana, maka menjadi kewajiban kita semualah untuk turut membantunya.⁵⁷⁷

4. Sistem/Lembaga Peradilan Pidana Belum Mencerminkan Peradilan yang Cepat, Sederhana dan Berbiaya Ringan

Pembicaraan terhadap sistem peradilan pidana tidak mungkin terlepas dari pembicaraan terhadap hukum acara pidana. Menurut Sudarto sebagaimana dikutip Suryono Sutarto, hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.⁵⁷⁸ Moeljatno berpendapat, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur

⁵⁷⁶ Nyoman Sarikat Putra Jaya, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 57.

⁵⁷⁷ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 109.

⁵⁷⁸ Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I, Op. Cit.*, hlm.2.

macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, apabila ada persangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.⁵⁷⁹

Moeljatno dan Bambang Poernomo menyatakan, bahwa terdapat tiga tingkatan dalam pengertian hukum acara pidana, sebagai berikut :

Pertama, pengertian sempit yaitu peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan dan eksekusi putusan hakim;

Kedua, pengertian luas yang diartikan bahwa di samping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, eksekusi putusan hakim, juga termasuk peraturan hukum tentang susunan peradilan, wewenang pengadilan serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekadar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana;

Ketiga, pengertian yang makin diperluas yaitu mengatur tentang alternatif jenis pidana, ukuran memperingan atau memperberat pidana dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pidana.⁵⁸⁰

Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum acara pidana dapat diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi hukum acara pidana dalam penerapannya. Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum merupakan tonggak pedoman bagi instansi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP serta menjadi patokan bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas

⁵⁷⁹ Moeljatno, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.1.

⁵⁸⁰ Bambang Poernomo, 1985, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Amarta Buku, Yogyakarta, hlm.14-15.

pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP. Tanpa memiliki pengertian yang senapas dengan jiwa yang terkandung dalam prinsip-prinsip hukum yang digariskan KUHAP, pasal-pasal KUHAP hanya akan menjadi rumusan mati dan kering serta tidak mampu mengemban penegakan hukum yang sejajar dengan jiwa dan semangat landasan filosofis serta landasan konstitusi.⁵⁸¹

Pada dasarnya asas-asas dalam hukum acara pidana dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu asas-asas yang berhubungan dengan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia (hak-hak asasi manusia) serta asas-asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan yang baik.⁵⁸² Salah satunya adalah asas yang menyatakan bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.⁵⁸³ Asas ini dikenal dengan istilah asas *contante justitie* atau *speedy trial principle* atau *fair trial principle*.⁵⁸⁴ Asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan menghendaki bahwa proses peradilan pidana atau badan-badan peradilan pidana dalam menjalankan proses peradilan pidana diharapkan dapat menyelesaikannya sesegera mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (**cepat**). **Sederhana** mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana harus dilakukan dengan *simple*, singkat dan tidak berbelit-belit. Sedangkan **biaya murah** mengandung pengertian bahwa biaya penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa sehingga terjangkau oleh para pencari keadilan, menghindari pemborosan serta tidak bermewah-mewahan yang hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang mampu/berharta saja.⁵⁸⁵

⁵⁸¹ M. Yahya Harahap, hlm. 35.

⁵⁸² *Ibid.*, hlm.19.

⁵⁸³ Pemilihan asas ini didasarkan pada landasan berpikir bahwa asas *openbaarheid* dan asas *onmiddelijkhed* bermuara juga pada asas *contante justitie*.

⁵⁸⁴ *Ibid.*, hlm.20.

⁵⁸⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Op. Cit., hlm.16.

Asas-asas hukum acara pidana sebagaimana dimaksud di atas tertuang di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sebenarnya merupakan *basic law* dari hukum acara pidana (KUHP), termasuk di dalamnya adalah asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan, sebagai berikut :

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang telah dirumuskan di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tidak bertele-tele dan berbelit-belit. Apalagi jika kelambatan penyelesaian kasus peristiwa tindak pidana itu disengaja, sudah barang tentu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia.⁵⁸⁶ Budaya “kriminal” dan budaya “menyangkal” yang berkembang dalam masyarakat menjadi faktor penyebab lambannya proses peradilan. Dengan banyaknya perkara yang terjadi, maka jelas akan menambah beban tugas penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Sikap cenderung “mengulur” proses peradilan yang dilakukan oleh beberapa advokat menjadi penyebab lambannya dan mahal nya biaya beracara. Ketegasan aparat penegak hukum dan menjaga independensinya menjadi yang utama untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.⁵⁸⁷

⁵⁸⁶ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.52.

⁵⁸⁷ Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 8.

Menurut M. Yahya Harahap, peletakan asas saja belum memberikan jaminan. Idealisme penegakan hukum yang dimiliki aparat penegak hukum yang paling menentukan, karena dengan dukungan idealisme yang kuat, aparat penegak hukum memahami kedudukan mereka bukan semata-mata “alat kekuasaan”, tetapi kelompok “manusia pelayan” atau *agency of service*. Kesadaran sebagai *agency of service* yang dapat menggugah mereka melaksanakan pelayanan hukum yang cepat, sederhana, tepat dan biaya ringan. Apalagi ternyata, sanksi atas pelanggaran asas tersebut tidak dijumpai di dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ataupun KUHAP), menyebabkan kekhawatiran dalam pelaksanaannya jika tanpa didukung moral dan idealisme.⁵⁸⁸

Di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan karakter dari kekuasaan kehakiman, sebagai berikut :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selanjutnya ketentuan tersebut dijabarkan di dalam Pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, sebagai berikut :

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Di dalam KUHAP sebenarnya sudah terdapat beberapa hal yang menunjukkan adanya penjabaran asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas ini dijabarkan lebih lanjut di dalam pasal-pasal KUHAP, antara lain :

⁵⁸⁸ *Ibid.*, hlm.53.

- a. Pasal 19 ayat (1) KUHAP (penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari);⁵⁸⁹
- b. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP (penyidik dapat melakukan penahanan untuk paling lama dua puluh hari dan penahanan lanjutan untuk paling lama empat puluh hari), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP (penuntut umum dapat melakukan penahanan untuk paling lama dua puluh hari dan penahanan lanjutan untuk paling lama tiga puluh hari), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP (hakim Pengadilan Negeri dapat melakukan penahanan untuk paling tiga puluh hari dan penahanan lanjutan untuk paling lama enam puluh hari), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP (hakim Pengadilan Tinggi dapat melakukan penahanan untuk paling lama tiga puluh hari dan penahanan lanjutan untuk paling lama enam puluh hari), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP (hakim Mahkamah Agung dapat melakukan penahanan untuk paling lama lima puluh hari dan penahanan lanjutan untuk paling lama enam puluh hari), serta Pasal 29 ayat (1) KUHAP (dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP, penyidik, penuntut umum maupun hakim (PN, PT, atau MA) dapat melakukan perpanjangan penahanan untuk paling lama dua kali tiga puluh hari);
- c. Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP (tersangka/terdakwa berhak segera diperiksa oleh penyidik dan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, diperiksa oleh penuntut umum dan untuk selanjutnya dapat diajukan ke Pengadilan serta diperiksa dan diadili oleh Pengadilan);

⁵⁸⁹ Penangkapan yang diatur di dalam KUHAP lebih mencerminkan asas *speedy trial* dibandingkan dengan penangkapan yang diatur di UU di luar KUHAP: Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (7 x 24 jam), Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (2 x 24 jam + 3 x 24 jam).

- d. Pasal 02 ayat (1) KUHAP (penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan);
- e. Pasal 107 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP (dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh PPNS, maka PPNS yang bersangkutan melaporkan peristiwa tersebut kepada Penyidik POLRI dan segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI);
- f. Pasal 110 ayat (1), (2), (3), KUHAP (penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan dalam hal penuntut umum berpendapat hasil penyidikan masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi, yang untuk itu penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan);
- g. Pasal 110 ayat (4) KUHAP (penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum); dan
- h. Pasal 140 ayat (1) KUHAP (penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan).

Penjabaran asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan itu dilakukan melalui, sebagai berikut :

- a. Pembatasan jangka waktu penangkapan⁵⁹⁰;

⁵⁹⁰ Untuk tindak pidana terorisme , penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama 7x24 jam. Lihat dalam Pasal 28 UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Untuk tindak pidana di bidang kehutanan, dapat dilakukan penangkapan untuk paling lama 2x24 jam, yang dapat diperpanjang untuk paling lama 3x24 jam (Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Negara RI Nomor 18 Tahun 2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

- b. Pembatasan jangka waktu penahanan, penahanan lanjutan dan perpanjangan penahanan pada masing-masing tahap pemeriksaan⁵⁹¹;
- c. Hak tersangka/terdakwa untuk segera diperiksa pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di sidang pengadilan;
- d. Kewajiban Penyelidik untuk segera melakukan penyelidikan;
- e. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dalam menangani suatu perkara;
- f. Penentuan kapan penyidikan dikatakan sudah selesai; serta
- g. Perintah untuk membuat surat dakwaan secepatnya.

Terdapat beberapa hal yang terjadi selama ini di dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang perlu diperhatikan untuk segera dibenahi dan diperbaiki agar dapat tercapai suatu sistem peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pertama, proses pemeriksaan perkara masih sering kurang terkoordinasi secara baik, sehingga berakibat pada pengesampingan asas *contante justitie* (peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan) yang pada akhirnya akan berakibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jalannya penegakan hukum serta berkurangnya kewibawaan aparat penegak hukum di mata masyarakat.

Kedua, di dalam sistem peradilan pidana pada umumnya sebagaimana didasarkan pada KUHAP (*lex generalis*) tidak terdapat adanya pembatasan jangka waktu pemeriksaan untuk masing-masing tahap pemeriksaan. Hal ini berbeda dengan di dalam *lex specialis*, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Pengadilan Tipikor, Undang-Undang

⁵⁹¹ Syarat yang harus dipenuhi adalah :

- a. tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Perikanan serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pembatasan jangka waktu pemeriksaan untuk tiap-tiap tahap pemeriksaan di dalam Pengadilan HAM, sebagai berikut :

- a. Tahap Penyidikan : 240 hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penyidik;
- b. Tahap Penuntutan : 70 hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima;
- c. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan pada Tingkat Pertama : 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM;
- d. Tahap Pemeriksaan Tingkat Banding : 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi; dan
- e. Tahap Pemeriksaan Tingkat Kasasi : 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

Adapun pembatasan jangka waktu pemeriksaan untuk tiap-tiap tahap pemeriksaan di dalam Pengadilan Tipikor, sebagai berikut :

- a. Tahap Penyidikan : tidak ada;
- b. Tahap Penuntutan : Penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak ada, Penuntutan yang dilakukan oleh KPK tenggang waktunya adalah 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas dari Penyidik;
- c. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan pada Tingkat Pertama : 120 hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor;
- d. Tahap Pemeriksaan Tingkat Banding : 60 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi;
- e. Tahap Pemeriksaan Tingkat Kasasi : 120 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung; dan

- f. Tahap Pemeriksaan Peninjauan Kembali : 60 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

Sedangkan pembatasan jangka waktu pemeriksaan pada masing-masing tahap pemeriksaan di dalam Pengadilan Perikanan, sebagai berikut :

- a. Tahap Penyidikan : 30 hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan (Pasal 73B ayat (6) Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Perikanan);
- b. Tahap Penuntutan : 10 hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap (Pasal 76 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Perikanan)⁵⁹²;
- c. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan pada Tingkat Pertama : 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum (Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Perikanan);
- d. Tahap Pemeriksaan Tingkat Banding : 30 hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi (Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Perikanan); dan
- e. Tahap Pemeriksaan Tingkat Kasasi : 30 hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Perikanan).

Di samping itu, juga terdapat pembatasan jangka waktu penahanan untuk masing-masing tahap pemeriksaan, sebagai berikut :

- a. Tahap Penyidikan : penahanan paling lama 20 hari penahanan lanjutan paling lama 10 hari (Pasal 73 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Perikanan);

⁵⁹² Terdapat ketentuan yang saling kontradiksi yaitu Pasal 76 ayat (5) dengan Pasal 76 ayat (9) UU Negara RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- b. Tahap Penuntutan : penahanan paling lama 10 hari + penahanan lanjutan paling lama 10 hari + perpanjangan penahanan paling lama 10 hari (Pasal 76 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Perikanan);
- c. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan pada Tingkat Pertama : penahanan paling lama 20 hari + penahanan lanjutan paling lama 10 hari (Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perikanan);
- d. Tahap Pemeriksaan Tingkat Banding : penahanan paling lama 20 hari + penahanan lanjutan paling lama 10 hari (Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perikanan); dan
- e. Tahap Pemeriksaan Tingkat Kasasi : penahanan paling lama 20 hari + penahanan lanjutan 10 hari (Pasal 83 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perikanan).

Meskipun tidak dibentuk pengadilan tersendiri, di dalam tindak pidana perusakan hutan (pembalakan liar) terdapat pembatasan jangka waktu pemeriksaan untuk masing-masing tahap pemeriksaan, sebagai berikut :

- a. Tahap Penyidikan : paling lama 90 hari sejak dimulainya penyidikan penyidikan (Pasal 39 huruf a Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) + penyidikan oleh penuntut umum dalam hal berkas perkara belum lengkap untuk paling lama 50 hari (Pasal 39 huruf b Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);
- b. Tahap Penuntutan : paling lama 25 hari terhitung sejak selesai penyidikan (Pasal 39 huruf c Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);
- c. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan pada Tingkat Pertama: paling lama 45 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

- d. Tahap Pemeriksaan Tingkat Banding : paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi (Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan); dan
- e. Tahap Pemeriksaan Kasasi : paling lama 50 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

Batasan tenggang waktu penahanan untuk masing-masing tahap pemeriksaan tidak diatur. Namun dengan melihat bahwa tenggang waktu penahanan tidak mungkin melebihi tenggang waktu penahanan, maka dapat dikatakan bahwa tenggang waktu penahanan untuk masing-masing tahap pemeriksaan, sebagai berikut :

- a. Tahap Penyidikan : paling lama 90 hari dalam hal berkas perkara dari penyidik lengkap atau 140 hari dalam hal berkas perkara dari penyidik belum lengkap⁵⁹³ ;
- b. Tahap Penuntutan : paling lama 25 hari;
- c. Tahap Pemeriksaan di Sidang pengadilan pada Tingkat Pertama : paling lama 45 hari kerja;
- d. Tahap Pemeriksaan Tingkat Banding : paling lama 30 hari kerja; dan
- e. Tahap Pemeriksaan Tingkat Kasasi : paling lama 50 hari kerja.

Tetapi, dalam hal penangkapan batasan tenggang waktunya lebih panjang atau lebih lama daripada tenggang waktu yang ditentukan di dalam KUHAP (satu hari atau 1x24 jam), yaitu 2x24 jam yang dapat diperpanjang untuk paling lama 3x24 jam (Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

⁵⁹³ Lebih lama dibandingkan dengan pengaturan menurut KUHAP.

Di dalam KUHAP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terdapat pembatasan jangka waktu pemeriksaan untuk masing-masing tahap pemeriksaan, melainkan hanya terdapat pembatasan jangka waktu penahanan untuk tiap-tiap tahap pemeriksaan, sebagai berikut :

a. Di dalam KUHAP :

- 1) Tahap Penyidikan : penahanan=20 hari + penahanan lanjutan=40 hari + perpanjangan penahanan=2x30 hari (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP serta Pasal 29 ayat (2) KUHAP);
- 2) Tahap Penuntutan : penahanan=20 hari + penahanan lanjutan 30 hari + perpanjangan penahanan= 2x30 hari (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP serta Pasal 29 ayat (2) KUHAP);
- 3) Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan pada Tingkat Pertama : penahanan=30 hari + penahanan lanjutan=60 hari + perpanjangan penahanan=2x30 hari (Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP serta Pasal 29 ayat (2) KUHAP);
- 4) Tahap Pemeriksaan Tingkat Banding : penahanan=30 hari + penahanan lanjutan= 60 hari+ perpanjangan penahanan=2x30 hari (Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP serta Pasal 29 ayat (2) KUHAP); dan
- 5) Tahap Pemeriksaan Tingkat Kasasi : penahanan=50 hari + penahanan lanjutan= 60 hari + perpanjangan penahanan= 2x30 hari (Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP serta Pasal 29 ayat (2) KUHAP).

b. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak :

- 1) Tahap Penyidikan : penahanan=7 hari+penahanan lanjutan=8 hari;
- 2) Tahap Penuntutan : penahanan=5 hari+penahanan lanjutan=5 hari;
- 3) Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan pada Tingkat Pertama : penahanan=10 hari+penahanan lanjutan=15 hari;
- 4) Tahap Pemeriksaan Tingkat Banding : penahanan=10 hari +

penahanan lanjutan=15hari; dan

- 5) Tahap Pemeriksaan Tingkat Kasasi :penahanan=15 hari+penahanan lanjutan=20 hari.

Apabila tenggang waktu penahanan tersebut di atas telah terpenuhi dan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa belum selesai, maka tersangka/terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Hal demikian bukan berarti bahwa pemeriksaan pada tahapan tersebut sudah selesai, melainkan pemeriksaan tetap dilanjutkan tetapitersangka/terdakwa sudah tidak berada dalam tahanan. Namun dalam hal terdapat pembatasan jangka waktu pemeriksaan, apabila jangka waktu pemeriksaannya sudah habis, maka mau tidak mau penahanannya harus dihentikan (tersangka/terdakwa harus dikeluarkan dari tahanannya),apabila tidak berarti penahanan tersebut merupakan penahanan yang tidak sah.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana yang baik harus dapat menjamin keadilan (*ensuring justice*), harus dapat menjamin keamanan warga masyarakat (*the savety of citizens*), harus dapat menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat (*publictrust and respect*).⁵⁹⁴ Putusan pengadilan yang berkeadilan tidak sekedar putusan yang pertimbangannya dapat diterima, tetapi juga sederhana, jelas, diputuskan dengan cepat dan mampu dieksekusi dengan cepat pula. Kecepatan jelas menjadi salah satu kunci. Ada kalanya pencarian keadilan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Padahal penundaan putusan berpotensi menimbulkan kerugian immaterial yang tidak sederhana jika menyangkut perkara pidana, di sisi lain terdapat kerugian materiil yang tidak murah terkait penundaan putusan kasus perdata.⁵⁹⁵ Faktanya, proses pemeriksaan perkara di MA tidak selalu cepat. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) menyebutkan, penyelesaian perkara mulai dari diterimanya di

⁵⁹⁴ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Op Cit.*, hlm.36.

⁵⁹⁵ Kompas, Sabtu 20 Februari 2016, hlm.5.

Biro Umum MA hingga dikirim kembali ke pengadilan pengaju rata-rata butuh waktu 528 hari (data terakhir 2014). Sebanyak 243 hari di antaranya justru untuk minutasi (pemberkasan) perkara dari tahap persiapan pembuatan putusan hingga dikirimkan kembali ke pengadilan pengaju. Sekitar 88 % putusan MA lebih banyak memuat bagian-bagian dari putusan pengadilan sebelumnya, 12 % putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan hakim agung.⁵⁹⁶ Padahal menurut SK Ketua MA Nomor 214/KMA/ SK/XII/2014, proses minutasi hingga dikirimkannya salinan putusan ke pengadilan pengaju hanya butuh waktu 102 hari atau kurang dari 3,5 bulan.⁵⁹⁷ Terdapat persoalan teknis yang mempengaruhi minutasi, antara lain : terbatasnya sumber daya untuk melakukan minutasi, adanya hakim agung yang tidak terlalu menguasai komputer, sehingga harus membaca berkas secara manual dan memerintahkan asistennya untuk mengetikkan putusan sehingga butuh waktu lama.⁵⁹⁸

Penyampaian putusan yang lambat ini membuka celah terjadinya akibat-akibat yang tidak diinginkan, seperti terpidana melarikan diri, menunda pengiriman salinan putusan kasasi dengan maksud untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi MA atau untuk menunda eksekusi.⁵⁹⁹ Sebagaimana diberitakan di media massa, suap ke Andri Trianto Sutrisna menjadi langkah awal dari skenario pengusaha Ichsan Suadi melalui pengacaranya, Awang Lazuardi Embat. Menurut R. Soesilo, bahwa peradilan harus secara sederhana, cepat dan murahitu untuk memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sedemikian itu. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang prosesnya berjalan bertahun-tahun. Biaya murah berarti serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh para pencari keadilan⁶⁰⁰.

⁵⁹⁶ Kompas, Sabtu 20 Februari 2016, hlm. 5.

⁵⁹⁷ Kompas, Rabu 17 Februari 2016, hlm. 3.

⁵⁹⁸ Kompas, Rabu 17 Februari 2016, hlm. 3.

⁵⁹⁹ Kompas, Senin 15 Februari 2016, hlm. 1 dan Kompas, Rabu 24 Februari 2016, hlm.2.

⁶⁰⁰ R. Soesilo, 1978, *Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik (Dalam penyelesaian perkara sebagai penegak hukum)*, Op. Cit., hlm. 4.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu dikemukakan di sini apa yang disampaikan oleh Sir Lord Denning sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali dalam *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum* tentang “*speedy trial*”, sebagai berikut : keadilan yang terlambat adalah bukan keadilan.⁶⁰¹

B. UPAYA-UPAYA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN GUNA MEWUJUDKAN REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA AGAR SISTEM PERADILAN INDONESIA TERPADU, MANDIRI DAN BERWIBAWA DENGAN BERLANDASKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

1. Reformasi Sistem Peradilan Pidana dan Pendekatan Manajemen Peradilan terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Reformasi di segala bidang yang mulai digulirkan setelah mundurnya H.M. Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia karena desakan yang sangat hebat dari para mahasiswa yang berunjuk rasa menjadi sesuatu kekuatan besar yang disebut sebagai “*people power*”, merupakan *moment* penting untuk melakukan reformasi di bidang hukum, di samping bidang politik dan ekonomi. Aspirasi rakyat yang tersumat/terkekang bahkan teramputasi oleh kekuasaan selama tiga puluh dua tahun mendapatkan salurannya. Para mahasiswa yang menyuarakan *aspirasi* rakyat menuntut adanya perubahan besar-besaran terhadap segala tatanan pemerintahan/ketatanegaraan di setiap bidang kehidupan. *Fenomena* unjuk rasa yang terjadi merupakan suatu *solusi* terhadap permasalahan yang dihadapi, karena tidak ada saluran resminya.⁶⁰² Menurut Karl Renner sebagaimana diungkapkan

⁶⁰¹ Achmad Ali, 2010, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 211.

⁶⁰² Bambang Dwi Baskoro, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm.51. Tiga puluh dua tahun dihitung sejak dimunculkannya Orde Baru pada Maret 1966 oleh Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI sampai dengan lengsernya H.M. Soeharto sebagai Presiden RI pada Mei 1998.

oleh Satjipto Rahardjo, “*The development of the law gradually works out what is socially reasonable*”. Dengan kata lain, hukum berkembang mencari jalannya sendiri agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat/apa yang diinginkan oleh masyarakat.⁶⁰³

Selanjutnya dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa selama tiga puluh dua tahun keadaan masyarakat Indonesia dalam keadaan “sakit”, yang secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bidang Sosial : adanya budaya *feudalistik* yang memunculkan budaya “kebapakan” dalam segala bidang, sehingga muncul *fenomena* “Asal Bapak Senang”, “ atas petunjuk”, “*mark up*”, dan lain sebagainya; sifat “*communal*” yang disalahtafsirkan menjadi “kekeluargaan”;
2. Bidang Politik : adanya hegemoni kekuasaan yang luar biasa besarnya karena Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Golongan Karya (GOLKAR), Birokrat dan Elit Pengusaha (Konglomerat) menjalin satu kekuatan di satu pihak berhadapan dengan rakyat di pihak lain; kehidupan politik berpuncak pada kekuasaan sehingga menjadi negara kekuasaan yang selalu menggunakan pendekatan kekuasaan dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; hal-hal yang bersifat *instabilitas* harus dilenyapkan dengan pendekatan kekuasaan;
3. Bidang Ekonomi : adanya “*kroni kapitalism*” atau “*ersatz capitalism*” yang melakukan pendekatan kepada penguasa untuk kelancaran usahanya tanpa menggunakan *skill* atau *profesionalisme* sehingga muncul praktik-praktik *monopoli*, *oligopoli* di dalam segala sektor perekonomian; munculnya “*technogless manufacture*”; perekonomian yang bersifat “*rent seekers economy*”.

⁶⁰³ *Loc.Cit.*

4. Bidang Hukum : hukum *terkooptasi* oleh kekuasaan, sebab terjadi *dominasi* atau *intervensi* kekuasaan dalam bidang hukum baik di tingkat penyusunannya (*legislation*), penegakannya (*enforcement*), maupun pengadilannya (*judiciary*); hukum tidak dihormati oleh penguasa sehingga rakyat juga tidak percaya pada hukum; hukum yang berlaku bersifat *semi authoritarian* atau *authoritarian* serta *state government dominant*.⁶⁰⁴

Apa yang dikemukakan tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soehardjo Sastrosোধardjo, sebagai berikut :

Pembangunan di bidang ekonomi memberikan kesempatan kepada kelompok bisnis, perbankan, dan birokrasi untuk menjalankan fungsinya dengan profesional dalam batas kewajaran yang jujur. Timbulnya kolusi antar tiga kelompok tersebut menyebabkan kegiatan dalam bisnis, perbankan dan birokrasi tidak transparan dan cenderung tiap-tiap pelaku bertindak untuk memperoleh keuntungan pribadi yang sebanyak-banyaknya. Dengan demikian faktor intern yang menyebabkan krisis moneter menurut pembicaraan di kalangan luas adalah korupsi, kolusi, monopoli, nepotisme, dan sebagainya. Sedangkan faktor ekstern ialah globalisasi, yang telah menciptakan suatu pasar global (global market) yang mendasarkan pada persaingan bebas dalam bidang industri, teknologi, permodalan, dalam wadah perdagangan bebas.⁶⁰⁵

Reformasi dalam bidang hukum di Indonesia mendesak untuk dilakukan, sebab dengan masuknya *paradigma* kekuasaan (*paradigma* lama) dalam bidang hukum selama ini mengakibatkan terjadinya *krisis hukum*. *Krisis hukum* itu terjadi manakala peranan hukum dalam masyarakat dipertanyakan, manakala *solusi hukum* untuk masalah sosial gagal menciptakan kepuasan. Sistem hukum Indonesia gagal menjalankan tugas dan fungsinya yaitu memberikan perlindungan

⁶⁰⁴ Bambang Dwi Baskoro, *Ibid.*, hlm.51-52.

⁶⁰⁵ Soehardjo Sastrosোধardjo, 1998, *Reformasi Politik dan Strukturisasi Ekonomi*, Kompas, 5 Maret 1998, hlm.4.

dan keadilan kepada masyarakat.⁶⁰⁶ Reformasi tidak hanya merupakan suatu perubahan, melainkan perubahan besar besaran sebab ada perubahan yang mendasar yaitu perubahan *paradigmatik*, dari *paradigma lama* ke *paradigma baru*.

Pada *paradigma lama* yang berintikan pada kekuasaan atau kekuatan memiliki ciri-ciri, sebagai berikut : adanya mayoritas tunggal yang mengontrol kekuasaan yang bersifat *hegemonial*; adanya pemusatan kekuasaan/kekuatan pada satu tangan sehingga *hegemoni* tersebut semakin besar; mementingkan *stabilitas* serta pertumbuhan atau pembangunan sebagai ideologinya, sehingga melawan pemerintah berarti anti pembangunan.

Sedangkan pada *paradigma baru* yang berintikan pada moral memiliki ciri-ciri, sebagai berikut : mengutamakan kemajemukan; mengutamakan kehidupan yang demokratis; mewujudkan masyarakat madani (*civil society*); mengutamakan *profesionalisme* dalam segala bidang.⁶⁰⁷

Dalam ilmu politik pengertian “reformasi” dibedakan, tetapi tidak dipertentangkan dengan pengertian “revolusi”. “Reformasi” menghendaki perubahan dalam sistem yang berlaku atau *a change within the system*. Sedangkan pada “revolusi” menghendaki *change of the system itself* (H. Roeslan Abdulgani dalam orasi ilmiah *Pancasila dan Reformasi* dalam rangka lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1998 di Gedung Pancasila Deparlu, Pejambon Jakarta).⁶⁰⁸ Selama beberapa puluh tahun terakhir, hukum menjadi sangat menderita, karena dampak negatif dari proses-proses politik dan ekonomi, khususnya politik merupakan kekuatan yang mampu mematahkan *otentisitas* bekerjanya hukum. Hukum menjadi sulit bekerja secara *otentik* dan *otonom*, sehingga menjadi terhambat

⁶⁰⁶ Bambang Dwi Baskoro, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm.52.

⁶⁰⁷ *Ibid.*, hlm.52-53.

Diambil dari pendapat Satjipto Rahardjo dalam diskusi di Jurusan Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP tanggal 23 Mei 1998 dengan tema *Reformasi Hukum, Politik dan Ekonomi*.

⁶⁰⁸ H.A. Arjoso, 1998, *Hakikat Reformasi Total, Tanggapan atas Tulisan J.B. Mangunwijaya*, Kompas, Selasa 21 Juli 1998, hlm.4.

dalam usahanya untuk mengatur dan memberikan perlindungan serta keadilan. Kekuatan dan kekuasaan negara serta pemerintah yang telah menjadi besar (Jaman Orde Lama politik menjadi panglima, sedangkan Jaman Orde Baru politik berubah menjadi panglima besar) itu sangat menghambat bekerjanya hukum di dalam masyarakat. *Stabilitas* politik yang *eksesif* menyulitkan berkembangnya demokrasi yang pada akhirnya juga menyulitkan kehadiran hukum secara *otonom* dan *otentik* di dalam masyarakat. Maraknya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) di segala bidang menambah tekanan pada *otentisitas* bekerjanya hukum. Hukum menjadi semakin terpuruk dan sekedar menjadi hiasan/pajangan (Satjipto Rahardjo, *Reformasi Hukum, Politik dan Ekonomi*, diskusi tanggal 23 Mei 1998).⁶⁰⁹

Apabila melihat pada sejarah bangsa Indonesia itu sendiri, maka ternyata yang namanya reformasi itu tidak hanya terjadi satu kali. **Pada tahun 1945**, terjadi reformasi karena dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan detik pengebolan tertib hukum kolonial sekaligus detik pembangunan tertib hukum nasional. **Kemudian**, pada tanggal 27 Desember 1949 dengan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat telah terjadi perubahan mendasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Republik Indonesia Serikat. **Selanjutnya**, pada tanggal 17 Agustus 1950 bentuk negara federasi ini berubah menjadi negara kesatuan kembali dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. **Kemudian**, dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 terjadi reformasi kembali, yaitu dari periode liberal ke arah Demokrasi dipimpin. **Selanjutnya**, pada bulan Maret 1966 terjadi reformasi 1966 dengan munculnya Orde Baru yang memiliki komitmen untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

⁶⁰⁹ Bambang Dwi Baskoro, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm.55. Diambil dari pendapat Satjipto Rahardjo dalam diskusi Jurusan Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP tanggal 23 Mei 1998 dengan tema *Reformasi Hukum, Politik dan Ekonomi*.

Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen. **Pada akhirnya,** pada bulan Mei 1998 terjadi reformasi 1998 dengan munculnya Orde Reformasi, yang juga mempunyai komitmen sama, yaitu ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen.

Reformasi hukum yang mendesak untuk dilakukan itu dikarenakan gagalnya sistem hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya bukan semata-mata karena kegagalan lembaga hukum dalam masyarakat. Kegagalan dari suatu lembaga dalam masyarakat tidak berdiri sendiri, sebab lembaga-lembaga dalam masyarakat saling berhubungan satu sama lain secara *sistematik* dan *sinergis* sedemikian rupa sehingga kegagalan pada suatu bidang merupakan kegagalan pula dari fungsi bekerjanya lembaga-lembaga lain dalam satu masyarakat. Di samping itu *reformasi hukum* yang hendak dilakukan dan sedang dilakukan harus meliputi *reformasi* seluruh unsur sistem hukum, yakni : substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (aparatur pelaksana hukum, penegak hukum dan pembuat hukum) serta budaya hukum (semangat penyelenggara negara, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat dan lain sebagainya). Dengan demikian, reformasi hukum itu meliputi pada tahap atau tingkat *formulasi/legislasi* (tahap pembuatan peraturan perundang-undangan), tahap atau tingkat *aplikasi* atau *enforcement* (tahap penegakan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan) serta tahap atau tingkat *eksekusi* atau *judiciary* di tingkat peradilan.

Menurut Barda Nawawi Arief, reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) serta pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*). Bahkan dalam situasi krisis saat ini yang penting justru pembaharuan aspek immateriil

dari hukum, yaitu pembaharuan budayahukum, etika/moral hukum dan ilmu/pendidikan hukum. Aspek immateriil dari pembaharuan hukum inilah seyogyanya lebih diutamakan, apalagi apabila sasaran utamanya adalah penegakan keadilan. Terlebih lagi hakikat pembaharuan/pembangunan hukum bukan terletak pada aspek formal (seperti terbentuknya undang-undang baru), struktur kelembagaan dan mekanisme/prosedur baru, bertambahnya bangunan dan sarana/prasarana lainnya yang serba baru), melainkan justru terletak pada aspek immateriil ini, yaitu membangun budaya dan nilai-nilai kejiwaan dari hukum.⁶¹⁰

Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmann dalam *The Legal System : A Social Science Perspective*, sebagai berikut :

Jelas bahwa struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi.⁶¹¹

Selanjutnya dikatakan oleh Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, bahwa jika salah satu unsur tersebut di atas berubah, maka seluruh sistem dan

⁶¹⁰ Barda Nawawi Arief, 1998, *Reformasi Hukum dan Keadilan*, Kompas, Kamis 23 April 1998, hlm.4.

⁶¹¹ Lawrence M. Friedmann, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.15-19. Terjemahan dari Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, Penerjemah M. Khozim.

unsur-unsur lainnya juga harus berubah. Perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan, apabila tidak disertai oleh perubahan yang searah di bidang peradilan, rekrutmen para penegak hukum dan pendidikan hukumnya, reorganisasi birokrasi, penyelarasan proses dan mekanisme kerja, modernisasi segala sarana dan prasarana, serta pengembangan budaya dan perilaku hukum masyarakat yang mengakui hukum sebagai suatu yang sangat diperlukan bagi pergaulan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang damai, tertib, adil dan sejahtera.⁶¹²

Sistem peradilan pidana yang pada tujuan jangka panjangnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat ternyata pada kenyataannya dalam usaha mencapai tujuan tersebut menggunakan cara-cara yang tidak sejahtera (*unwelfare*). Hal demikian ini pernah dikemukakan oleh Fokkema (pada tahun 1978) sebagaimana dikutip Muladi, sebagai berikut : *“The criminal justice system, then, is a system which differs from most other social systems because it produces “unwelfare” on a large scale. Its immediate output maybe : imprisonment, stigmatization, dispossession and in many countries, even today death and torture”*.⁶¹³ (Sistem peradilan pidana, pada akhirnya, sebagai suatu sistem yang berbeda dibandingkan dengan sebagian terbesar sistem sosial lain, sebab ia menghasilkan sesuatu yang “tidak sejahtera” dalam skala besar. Ia segera menghasilkan keluaran (*output*) yang mungkin berupa : pemenjaraan (perampasan kemerdekaan), cap buruk (*stigmatisasi*), perampasan hak-hak tertentu atau hak milik serta di banyak negara, bahkan sampai hari ini terdapat pidana mati dan pidana badan berupa penyiksaan). Permasalahan *stigmatisasi* bahkan menggagalkan keberhasilan *proses resosialisasi* yang merupakan salah satu tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, J. Andenaes sebagaimana dikutip Muladi menyatakan, bahwa sistem peradilan pidana dapat

⁶¹² Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, hlm. 5-6.

⁶¹³ Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm.2.

digambarkan sebagai suatu permainan moralitas, bahkan juga merupakan upacara degradasi.⁶¹⁴

Menurut Muladi, tidak boleh terlalu berharap pada peranan sistem peradilan pidana sebagai pengendali kejahatan. Ia hanya merupakan salah satu sarana dalam politik kriminal (*criminal policy*). Ia hanya berfungsi terhadap kejahatan yang tercatat/dilaporkan/diadukan sebagai masukan yang terkadang tidak dapat berfungsi secara maksimal demi menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (*public order*) dengan hak-hak individual (*individual rights*). Oleh sebab itu, penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum yang ketat.⁶¹⁵ Untuk itu dibutuhkan pula adanya keserempakan, keselarasan dan keseimbangan antara pelaksanaan *sarana penal* dengan *sarana non penal* dalam usaha menanggulangi kejahatan.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai subsistem struktural berupa aparat penyelidik dan penyidik, aparat penuntut umum, aparat pengadilan, aparat rumah tahanan negara dan aparat penitensier serta melibatkan lembaga penasihat hukum dan lembaga perlindungan saksi dan korban. Dengan demikian penerapan hukum pidana harus dipandang dari tiga dimensi, sebagai berikut:

- a. Penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem normatif, yakni penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana;
- b. penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antar berbagai aparat penegak hukum sebagaimana tersebut di atas;
- c. penerapan hukum pidana dipandang merupakan sistem sosial dalam arti,

⁶¹⁴ *Loc. Cit.*

⁶¹⁵ *Ibid.*, hlm.3.

bahwa dalam mendefinisikan dan mereaksi tindak pidana harus pula diperhitungkan dari berbagai *perspektif pemikiran* yang ada di dalam lapisan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara aturan hukum, praktik administratif dan perilaku sosial.⁶¹⁶

Sebagaimana telah disinggung di muka, bahwa sistem peradilan pidana yang merupakan sistem terbuka (*open system*) memiliki beberapa karakteristik, seperti :

- a. adanya *importation of energy*.

Sebagai bagian dari struktur sosial ia memerlukan pembaharuan energi baik melalui lembaga lain, manusia dan lain sebagainya. Energi ini dapat berupa nilai-nilai dasar, nilai-nilai instrumental yang bersifat domestik dan nilai-nilai yang bersumber pada kecenderungan-kecenderungan internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.

- b. adanya *the throughput*.

Proses *transformasi energi* yang membawa misi menciptakan produk-produk baru, materi-materi baru, sumber daya berkualitas baru dan bentuk-bentuk pelayanan berkualitas baru yang secara keseluruhan dan berkesinambungan menciptakan *reorganisasi* masukan.

- c. adanya *the output*.

Keluaran harus dievaluasi dan dikaji dengan baik, sehingga menciptakan dinamika pembaharuan hukum.

⁶¹⁶ *Ibid.*, hlm.40-41.

- d. adanya *system of cycles of events*.

Sistem peradilan pidana harus memperhatikan siklus kejadian-kejadian yang diharapkan akan memperkuat dinamika sistem. Diskresi-diskresi hukum yang terjadi karena kelemahan-kelemahan substansi hukum, kurangnya sarana dan prasarana hukum akan baik bilamana dievaluasi dan dijadikan masukan bagi pembaharuan hukum.

- e. adanya *negative entropy*.

Terjadinya *entropi negatif* berbahaya bagi kehidupan hukum. Proses *entropi* adalah *a universal law of nature in which all forms of organization move toward disorganization or death* (Suatu kaidah *universal* dari alam dalam mana semua bentuk organisasi bergerak ke arah *disorganisasi* atau mati).⁶¹⁷ Kualitas pembuatan hukum, penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan elemen-elemen penting agar terjadi entropi yang demikian ini.

- f. adanya *information input*, yaitu masukan-masukan berupa informasi-informasi.
- g. adanya *negative feedback*, yaitu adanya umpan balik yang bersifat negatif sebagai sarana kontrol.
- h. adanya *steady state*, yaitu kondisi konstan untuk menghentikan proses entropi.
- i. adanya perkembangan ke arah *diferensiasi* dan *elaborasi* yang bersifat *spesifikasi* dan *profesionalisme*.
- j. adanya integrasi dan koordinasi sebagai suatu kebutuhan.⁶¹⁸

⁶¹⁷ Muladi, 1996, "Seminar Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan di Indonesia", *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Nasional Bidang Hukum pada Pelita-VII*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 20 Nopember 1996), hlm.1-4.

⁶¹⁸ *Loc. Cit.*

Sebagai sistem yang bersifat fisik (*physical system*) terkait struktur hukum dan substansi hukum yang berupa norma-norma dan aturan-aturan aktual serta pola perilaku manusia yang ada dalam sistem tersebut. Sedangkan sebagai sistem yang bersifat abstrak (*abstract system*) terkait budaya hukum. Budaya hukum merupakan hal yang amat penting, sebab sistem hukum akan mati atau tidak berdaya tanpa adanya budaya hukum. Oleh sebab itu ia merupakan bagian sentral dari pembangunan di bidang hukum.⁶¹⁹ Adapun budaya hukum yang harus ditonjolkan adalah keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara pemikiran-pemikiran tersebut di bawah ini :

- a. Tujuan hukum: ketertiban (*order*)-*legitimasi-kompetensi*;
- b. Legitimasi: *perlindungan sosial-kejujuran prosedural-keadilan substantif*;
- c. Pengaturan: *subordinasi* pada asas dan kebijakan;
- d. Pembenaan: *formalisme-pengetahuan kognitif-partikularistik purposive*;
- e. Diskresi: *oportunistik-berorientasi pada tujuan*;
- f. Moralitas: *komunal-institusional-civilisasi antar pertanggung-jawaban subjektif* dengan kemanfaatan sosial;
- g. Politik : integrasi antara aspirasi hukum dan politik.⁶²⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka konsep hukum modern yang mensyaratkan sifat *uniform, transaksional, universalistik, birokratik, rasional, profesional, teknikal, politikal, hierarchikal* dan menganut ajaran pemisahan kekuasaan harus dikaji dalam konteks keserasian, keselarasan dan keseimbangan hal-hal tersebut.⁶²¹

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma-norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus benar-benar memahami spirit hukum yang

⁶¹⁹ *Ibid.*, hlm.5-6.

⁶²⁰ *Ibid.*, hlm.6.

⁶²¹ *Loc.Cit.*

mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembentukan undang-undang.

Sisi lain yang terkait dalam proses pembentukan undang-undang adalah keserempakan, keselarasan dan keseimbangan antara kepatuhan hukum yang ditanamkan dari atas oleh penguasa (*legal awareness*) dengan kesadaran hukum yang merupakan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*). Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran, bahwa penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti (pengaruh perkembangan politik; ekonomi; sosial budaya; pertahanan dan keamanan; ilmu pengetahuan dan teknologi; pendidikan dan lain sebagainya). Namun perlu diingat bahwa komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersurat dan tersirat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas-asas negara hukum yang berlaku di kalangan bangsa-bangsa yang beradab dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks sebagaimana disebutkan di atas.⁶²²

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerempakan, menyelaraskan dan menyeimbangkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶²³ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Pendapat-pendapat masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukum dan kesadaran

⁶²² *Ibid.*, hlm.1.

⁶²³ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali, Jakarta, hlm.3.

hukum masyarakat terutama pendapat-pendapat mengenai hukum itu sendiri.⁶²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, di antara kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, faktor penegak hukum menempati posisi sentral. Hal ini dikarenakan dua hal, yaitu :

- a. peraturan perundang-undangan itu penyusunannya dan penerapannya dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri;
- b. penegak hukum itu dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengidentifikasi/mengartikan hukum itu sama dengan petugas/penegak hukum itu sendiri sebagai pribadi. Hal ini berakibat baik buruknya hukum selalu dikaitkan dengan pola perilaku para penegak hukum yang menurut pendapat mereka merupakan pencerminan dari hukum baik sebagai struktur maupun sebagai proses.

Oleh sebab itu para penegak hukum : harus memiliki kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat; harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat luas); harus mampu menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat luas; harus dapat memanfaatkan pola-pola tradisional tertentu sehingga menggairahkan masyarakat luas; harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.⁶²⁵

⁶²⁴ *Ibid.*, hlm.33.

⁶²⁵ *Ibid.*, hlm.24, 33 dan 53.

Kembali pada masalah pembentukan hukum, yang mana pada dasarnya hukum itu adalah aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu.⁶²⁶ Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa peraturan perundang-undangan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan/penegakan hukum. Menurut M. Dimiyati Hartono, di dalam menentukan kriteria mengenai pelaksanaan/penegakan hukum terdapat tiga tolok ukur yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. perangkat lunak yang berupa peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan yang terdiri dari perangkat keras berupa aparatur negara dalam berbagai jenjang serta termasuk ke dalamnya adalah sarana dan prasarana yang dimilikinya.
- c. masyarakat di mana hukum itu dilaksanakan.⁶²⁷

Memang disadari bahwa peraturan perundang-undangan adalah produk politik/produk pemerintahan yang sedang berkuasa pada masa itu, namun harus disadari bahwa “*politics are to be adopted to the laws, and not the law to the politics.*”⁶²⁸ Hal demikian ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang dijalankan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶²⁹ baik secara harfiah maupun menurut jiwanya, semangatnya atau yang dikenal dengan *Geistlichen Hintergrund*-nya, yaitu pemerintahan yang mampu mewujudkan persamaan dan kedudukan antara sesama warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, pemerintahan demokratis yang mampu mewujudkan keadilan dan

⁶²⁶ M. Dimiyati Hartono, 1997, *Lima Langkah Membangun Pemerintahan yang Baik*, Ind. Hill-Co., Jakarta, hlm.2.

⁶²⁷ *Loc.Cit.*

⁶²⁸ *Ibid.*, hlm.18.

⁶²⁹ Setelah Reformasi Mei 1998 UUD 1945 telah mengalami proses amandemen sampai empat kali, yaitu : Amandemen I disahkan 19-10-1999, Amandemen II disahkan 18-08-2000, Amandemen III disahkan 10-11-2001 serta Amandemen IV disahkan 10-08-2002.

perikemanusiaan serta mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.⁶³⁰ mewujudkan pemerintahan yang baik harus dilakukan langkah-langkah yang disebut sebagai “Panca Langkah Eka Karsa”, sebagai berikut :

- a. Kesadaran dan penghayatan adanya hubungan erat dan timbal balik antara hukum dengan politik dalam praktik penyelenggaraan negara. Hukum secara normatif memberikan landasan pada politik yang diterapkan, menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam menggunakan kekuasaan yang ada, memberikan cara atau menetapkan prosedur bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan negara. Kesadaran dan penghayatan terhadap fungsi hukum dan fungsi kekuasaan dapat mencegah terjadinya pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis serta dapat mengikis habis tujuan menghalalkan segala cara dengan penerapan moral dan etika dalam penyelenggaraan negara.
- b. Kesadaran bahwa stabilitas nasional bukanlah sesuatu yang statis melainkan sesuatu yang dinamis dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang terus berubah secara dinamis sesuai dengan perkembangan jaman.
- c. Kesadaran terhadap pentingnya peranan ABRI⁶³¹ sebagai salah satu kekuatan sosial politik yang riil yang memiliki peranan dominan namun dapat bersifat desesif dalam situasi tertentu
- d. Kesadaran akan kondisi lingkungan budaya pembangunan nasional, lingkungan hukum dan ketatanegaraan terhadap kondisi dan tantangan masa depan dalam memasuki abad globalisasi (abad ke-21) dengan mempersiapkan diri serta memanfaatkan peluang yang ada dalam usaha

⁶³⁰ M.Dimyati Hartono, 1997, *Op.Cit.*, hlm.xiv.

⁶³¹ Setelah Reformasi Mei 1998 istilah/lembaga ABRI diganti/kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

mewujudkan keadilan sosial bagi sesama manusia dalam segala bidang. Oleh sebab itu perlu dirubah cara pendekatan pemecahan masalah-masalah yang tadinya menggunakan *power approach* menjadi *legal approach* serta perubahan sikap mental dari “penguasa” menjadi “penyelenggara negara”.

- e. Memberikan kepastian hukum tentang deskripsi kewenangan dan batas waktu jabatan secara jelas kepada seorang pemimpin untuk menghadapi tantangan era abad XXI.⁶³²

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar terjadi keserempakan, keselarasan dan keseimbangan dalam pembentukan hukum dan penegakannya, sebagai berikut :

- a. Para penegak hukum harus menyadari sepenuhnya bahwa supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu refleksi dan bahkan merupakan prakondisi sistem pemerintahan yang demokratis dan berwibawa.⁶³³
- b. Para penegak hukum harus menyadari sepenuhnya bahwa fungsi hukum yang sangat menonjol adalah sebagai sarana pengintegrasikan kepentingan-kepentingan (sebagaimana dikatakan oleh Dias dan Gillies : *law as an integrative mechanism*).⁶³⁴
- c. Adanya kesadaran dan keharusan hakim untuk selalu menggali nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat (Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) diarahkan untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dengan kemanfaatan. Dengan pemahaman yang *komprehensif integral* yang demikian akan

⁶³² *Ibid.*, hlm.92-97.

⁶³³ Muladi, 1997, “Sarasehan Renungan Kemerdekaan tentang Masalah-masalah Hukum”, *Penegakan Hukum dan Peningkatan Demokrasi di Indonesia*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 16 Agustus 1997, hlm. 2.

⁶³⁴ *Ibid.*, hlm.8.

dihayati, bahwa para penegak hukum harus bijaksana di dalam *menetralisasikan* kesenjangan antara spirit hukum yang asli (*original legal spirit*) dengan spirit hukum yang berkembang pada saat dilakukannya penegakan hukum (*actual legal spirit*).⁶³⁵

- d. Kesadaran bahwa kode etik profesi merupakan “*internal disciplinary law*” yang perlu ditegakkan guna menegakkan wibawa peradilan dan disiplin profesi yang menunjang peradilan sehingga dapat terwujud peradilan yang bersih dan berwibawa. Perlu diusahakan agar profesi hukum penasihat hukum menempati posisinya sebagai subsistem peradilan pidana.⁶³⁶
- e. Pendidikan hukum harus diarahkan pada pendidikan profesional yang mengajarkan kepada ekspertis hukum secara memadai dan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi dalam bentuk etika profesi dan kesejawatan yang tinggi.⁶³⁷ Hal yang demikian ini dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat.

Selama beberapa dekade, pengadilan sebagai salah satu pranata hukum modern telah mendapat kepercayaan dari masyarakat dunia. Hal ini dikarenakan negara melalui hukum positif yang telah diundangkan menciptakan pendapat umum dalam masyarakat, bahwa lembaga peradilan merupakan suatu mekanisme yang disediakan negara untuk menyelesaikan sengketa. Di samping itu, terdapat beberapa alasan yang mendorong masyarakat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, yaitu :

- a. kepercayaan, bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti yang mereka kehendaki;
- b. kepercayaan, bahwa pengadilan merupakan lembaga yang

⁶³⁵ *Ibid.*, hlm.2.

⁶³⁶ Muladi, 1996, “Seminar Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan di Indonesia”, *Op. Cit.* , hlm.10.

⁶³⁷ *Loc.Cit.*.

mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya;

- c. bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia;
- d. bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.⁶³⁸

Namun, sayangnya kepercayaan masyarakat sebagaimana dimaksud di atas tidak mendapatkan respon yang memadai dari pengadilan, sehingga dalam realitasnya pengadilan belum memenuhi harapan masyarakat. Bahkan tidak sedikit putusan pengadilan yang malahan menimbulkan masalah. Krisis pengadilan yang parah demikian berakibat masyarakat tidak lagi mempercayai kredibilitasnya.⁶³⁹

Berangkat dari berbagai pendapat di muka, berkaitan dengan aspek immateriil dari sistem hukum, khususnya dalam hal ini adalah sistem peradilan pidana terdapat aspek manajerial di dalamnya. Reformasi dapat diarahkan pula pada reformasi manajemen peradilan pidana yang selama ini belum tertata secara efektif dan efisien. Berangkat dari apa yang disampaikan oleh H.M. Anton Athoillah, bahwa di dalam pengertian manajemen terdapat aktivitas yang saling berhubungan baik dari sisi fungsionalitasnya maupun dari sisi tujuan yang ditargetkan sebelumnya, yang terdiri dari :

- a. sistem peradilan pidana merupakan organisasi yang menjadi wadah utama adanya manajemen peradilan (masih bersifat parsial);

Dengan menggunakan teori manajemen dari H. M. Anton Athoillah⁶⁴⁰, maka Organisasi sebagai wadah utama manajemen dalam lingkup tema ini adalah sistem peradilan pidana Indonesia, yang dapat

⁶³⁸ Adi Sulistiyono, 2006, *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*, UNS Press, Surakarta, hlm.18-19.

⁶³⁹ *Ibid.*, hlm.19.

⁶⁴⁰ H.M. Anton Athoillah, 2010, *Dasar-dasar Manajemen*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, hlm.16-17.

dikatakan terdiri dari dua sistem, yaitu sistem peradilan pidana dalam keadaan normal dan sistem peradilan pidana dalam keadaan luar biasa. Sistem peradilan pidana dalam keadaan normal adalah sistem peradilan pidana tanpa melihat pengadilan tipikor sebagai sistem peradilan pidana tersendiri yang mempunyai ciri-ciri tersendiri, sedangkan sistem peradilan pidana dalam keadaan luar biasa adalah sistem peradilan pidana di mana di dalamnya terdapat pengadilan tipikor sebagai sistem peradilan pidana tersendiri.⁶⁴¹ manajer, yang memimpin dan memikul tanggung jawab penuh dalam organisasi (masih bersifat parsial);

- b. Dalam hal ini, manajer adalah pimpinan dari sistem peradilan pidana. Lalu, siapa yang memimpin dan memikul tanggung jawab penuh di dalam organisasi tersebut atau siapa yang menjadi manajernya. Di dalam sistem peradilan pidana sebagai suatu organisasi, terdapat sub-subsistem yang berupa organisasi-organisas pula dengan pimpinan-pimpinan tersendiri selaku manajernya. Kapolri untuk Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; Panglima TNI untuk Penyidik TNI Angkatan Laut; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Penyidik PNS tertentu, Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan, Pejabat Lapas, Rutan dan Rupbasan; Jaksa Agung untuk Penyidik dan Penuntut Umum Kejaksaan Republik Indonesia; Pimpinan KPK untuk Penyidik dan Penuntut Umum KPK;⁶⁴² Ketua BNN untuk Penyidik BNN; Ketua Komnas HAM untuk Penyelidik Pelanggaran HAM yang berat; Ketua LPSK untuk Pejabat LPSK, merupakan manejer-manajer puncak pada masing-masing lembaga yang dapat dikatakan manajer-manajer menengah. Lalu, siapa yang menjadi manajer dari

⁶⁴¹ Pengadilan Tipikor memiliki fungsi koordinasi dan supervisi yang diserahkan kepada KPK. Hal ini berbeda dengan pengadilan pidana pada umumnya (berdasarkan KUHAP), Pengadilan Anak, Pengadilan HAM dan Pengadilan Perikanan.

⁶⁴² Pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

keseluruhan organisasi tersebut (manajer puncak). Tidak ada. Hal ini berarti sistem peradilan pidana sebagai suatu organisasi tidak memiliki manajer (manajer puncak) atau dapat dikatakan jalan sendiri-sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK didudukkan sebagai manajer puncak dari sistem peradilan pidana pemberantasan tindak pidana korupsi (melakukan tugas dan fungsi koordinasi serta supervisi). Di dalam KUHAP atau Peraturan perundang-undangan di luar KUHAP kecuali Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak disebutkan adanya manajer puncak dari keseluruhan sistem, melainkan manajer pada masing-masing subsistem dan itu berdasarkan Undang-undang yang mengatur keorganisasian/instansional yang ada pada masing-masing subsistem yang bersangkutan terpisah secara sendiri-sendiri. Barda Nawawi Arief, sejak tahun 1998 di dalam buku *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*⁶⁴³ mengusulkan Mahkamah Agung⁶⁴⁴ sebagai “pejabat pengendali” yang mengawasi seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pengadilan dijatuhkan dan dilaksanakan/dieksekusi.

Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, Organisasi merupakan suatu unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas dua atau lebih orang, yang berfungsi dalam suatu basis kontinu untuk mencapai suatu tujuan bersama atau serangkaian tujuan, demikian pula

⁶⁴³ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 33. Lihat pula Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 34-36.

⁶⁴⁴ Yang dimaksud adalah Ketua Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung di bawah kendali Ketua Mahkamah Agung.

dengan sistem peradilan pidana sebagai suatu organisasi. Adapun orang-orang yang mengawasi aktivitas orang lain dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dalam organisasi disebut sebagai manajer (kadang disebut sebagai administrator).⁶⁴⁵ Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge menggabungkan kelima fungsi manajemen Henry Fayol menjadi empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian⁶⁴⁶, sebagai berikut :

- 1) Fungsi Perencanaan, mencakup mendefinisikan tujuan, menyusun strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengembangkan serangkaian rencana untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan aktivitas.
- 2) Fungsi Pengorganisasian, mencakup menentukan tugas-tugas apa yang akan dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas ini dikelompokkan, siapa yang melapor kepada siapa, dan dimana keputusan harus dibuat.
- 3) Fungsi Kepemimpinan, mencakup memotivasi dan mengarahkan aktivitas serta mengoordinasikan orang-orang yang ada di dalam organisasi, memilih saluran komunikasi yang paling efektif, serta menyelesaikan konflik di antara anggota.
- 4) Fungsi Pengendalian, mencakup memastikan semua hal berjalan sebagaimana mestinya, mengawasi kinerja organisasi dan membandingkannya dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya, sehingga apabila ada banyak deviasi maka menjadi tugas manajemen untuk mengembalikan organisasi ke jalur yang

⁶⁴⁵ Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, 2015, *Organizational Behavior*, Pearson Education Inc., New Jersey, USA, Ratna Saraswati dan Febriella Sirait, *Perilaku Organisasi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2015, hlm.2.

⁶⁴⁶ *Loc. Cit.*

Berangkat dari pendapat Henri Fayol, bahwa manajer melakukan lima fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi dan pengendalian.

benar (pengawasan , perbandingan dan koreksi potensial).⁶⁴⁷

Adapun Henry Mintzberg sebagaimana dikutip Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, mengemukakan bahwa manajer melaksanakan sepuluh peran atau serangkaian perilaku yang berbeda tetapi berhubungan satu dengan yang lain, yaitu *peran interpersonal* (peran figur pemimpin berkaitan dengan tanggung jawab yang bersifat seremonial dan simbolis, peran pemimpin dan peran perantara); *peran informasional* (peran pengawas, peran penyebar dan peran juru bicara) serta *peran memutuskan* (peran wirausaha, peran pengendali gejolak, peran pengalokasi sumber daya dan peran negosiator).⁶⁴⁸

- c. aturan main dalam organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (masih bersifat parsial)

Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan baik yang mengatur kelembagaan ataupun yang mengatur proses beracara dalam sistem peradilan pidana. Aturan main dalam organisasi yang disebut sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari organisasi yang disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana (Indonesia) secara keseluruhan tidak ada, karena tidak ada suatu pengaturan untuk keseluruhan organisasi (sistem peradilan pidana Indonesia) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang merupakan unit-unit pendukung dari sistem peradilan pidana (instansi-instansi yang ada di dalam sub-subsistem sistem peradilan pidana) tersebut. Yang ada hanyalah peraturan perundang-undangan yang mengatur keorganisasian/instansional yang ada pada masing-masing lembaga yang terdapat di dalam masing-masing subsistem yang bersangkutan secara terpisah berdiri sendiri-sendiri.

⁶⁴⁷ *Ibid.*, hlm.2-3.

⁶⁴⁸ *Ibid.*, hlm.3-4.

- d. tujuan organisasi, yang ditetapkan sebelumnya (masih bersifat parsial);

Dalam hal ini adalah tujuan sistem peradilan pidana sebagai suatu organisasi. Menurut Muladi, tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu :

- 1) tujuan jangka pendek, berupa resosialisasi (pemasyarakatan kembali pelaku tindak pidana), rehabilitasi (pemulihan kembali nama baik pelaku tindak pidana) dan reedukasi (pendidikan kembali pelaku tindak pidana);
- 2) tujuan jangka menengah, berupa pengendalian kejahatan seminimal mungkin, baik yang bersifat preventif (pencegahan), represif (pemaksaan) maupun kuratif (penyembuhan);
- 3) tujuan jangka panjang, berupa menciptakan kesejahteraan masyarakat.⁶⁴⁹

Tujuan organisasi tersebut tidak tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, baik itu di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP ataupun Undang-undang Kelembagaan/keorganisasian/instansional masing-masing subsistem dari system peradilan pidana.

- e. perencanaan, yang di dalamnya mengandung berbagai program yang akan dilaksanakan (masih bersifat parsial);

Dalam hal ini adalah tugas-tugas, kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan ataupun profesi-profesi yang ada di dalam lembaga-lembaga yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, di dalam lembaga

⁶⁴⁹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., hlm.vii.

kejaksaan terdapat profesi yang disebut sebagai jaksa yang mempunyai kewenangan-kewenangan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 30 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut :

Pasal 30

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.⁶⁵⁰

Pada lembaga Kepolisian⁶⁵¹ terdapat ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang, Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan, sebagai berikut :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan, sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

⁶⁵⁰ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan R I, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 213-214.

⁶⁵¹ Berdasarkan Pasal 20 UU Negara RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalam Kepolisian Negara RI terdapat pegawai negeri berupa anggota Polri dan PNS.

Pada lembaga Kepolisian ini terdapat jabatan fungsional penyidik Dan penyidik pembantu (Pasal 12 ayat (1) UU Kepolisian Negara RI).

- f. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga , harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, di dalam Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kewenangan-kewenangan Kepolisian, sebagai berikut :

Pasal 15

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggukangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanaan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selanjutnya, ditetapkan di dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

Pasal 16

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.
- f. Pengarahan, yang memberikan jalan kepada sumber daya manusia yang ada dalam organisasi (masih bersifat parsial);

Sebagai contoh, di dalam lembaga kejaksaan terdapat terdapat persyaratan untuk dapat diangkat menjadi jaksa sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut :

Pasal 9

- 1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berijazah paling rendah sarjana hukum;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;

- g. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h. pegawai negeri sipil.

- 2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, maka Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia). Di dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia dikatakan, bahwa Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan, sedangkan Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan. Selanjutnya, di dalam Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung, sebagai berikut :

Pasal 20

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g.

Sedangkan, syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Jaksa Agung ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (3), sebagai berikut :

Yang dapat diangkat menjadi Wakil Jaksa Agung adalah Jaksa Agung Muda, atau yang dipersamakan dengan memperhatikan jenjang dan jabatan karir.

Adapun syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung Muda ditetapkan di dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), sebagai berikut :

- 1) Yang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung Muda adalah Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang berpengalaman sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi atau jabatan yang dipersamakan dengan jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi.
- 2) Jaksa Agung Muda dapat diangkat dari luar lingkungan Kejaksaan dengan syarat mempunyai keahlian tertentu.

Sedangkan, syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri⁶⁵² ditetapkan di dalam Pasal 28, sebagai berikut :

Pasal 28 Undang-Undang Kejaksaan R.I.

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri adalah Jaksa yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung.⁶⁵³

- g. teknik-teknik dan mekanisme pelaksanaan kegiatan organisasi, yang dalam hal ini adalah struktur organisasi masing-masing lembaga yang merupakan bagian dari sub-subsistem dari sistem peradilan pidana serta mekanisme penyelesaian penanganan perkara (masih bersifat parsial);

⁶⁵² Di tiap-tiap provinsi dibentuk Kejaksaan Tinggi sebagai pelaksana tugas di daerah hokum provinsi yang bersangkutan di mana terdapat Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai unsur pimpinan yang dibantu beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana. Sedangkan di tiap-tiap Kabupaten/Kota dibentuk Kejaksaan Negeri dengan Kepala Kejaksaan Negeri sebagai unsur pimpinan yang dibantu beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana di mana di Kejaksaan Negeri tertentu dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri dengan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagai unsure pimpinan dengan dibantu beberapa orang unsur pelaksana.

Dalam manajemen terdapat teknik-teknik yang kaya dengan nilai-nilai estetika kepemimpinan dalam mengarahkan, memengaruhi, mengawasi dan mengorganisasikan semua komponen yang saling menunjang untuk tercapainya tujuan yang dimaksudkan.⁶⁵⁴ Sedangkan, teknik-teknik dan mekanisme pelaksanaan kegiatan organisasi secara keseluruhan tidak ada, yang ada hanyalah pengaturan mengenai teknik-teknik dan mekanisme pelaksanaan kegiatan masing-masing unit (lembaga) yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terutama keorganisasian/instansional yang ada pada masing-masing lembaga yang terdapat dalam masing-masing subsistem yang bersangkutan secara terpisah berdiri sendiri-sendiri.

- h. pengawasan terhadap semua aktivitas organisasi agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan (masih bersifat parsial);

Pengawasan terhadap semua aktivitas organisasi agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan pelaksanaan fungsi pengendalian. Pengawasan merupakan tugas manajer (manajer puncak, manajer menengah dan manajer lini pertama).⁶⁵⁵ Dalam hal ini terdapat pengawasan internal dan pengawasan eksternal;

- i. sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan perencanaan (masih bersifat parsial);

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh system peradilan pidana sebagai organisasi sebenarnya lengkap, karena merupakan lembaga pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai hak

⁶⁵⁴ H.M. Anton Athoillah, 2010, *Dasar-dasar Manajemen, Op.Cit.*, hlm.16.

⁶⁵⁵ Lihat dalam Richard L. Daft, 2010, *New Era of Management*, Cengage Learning, New York, USA, Terjemahan Tita Maria Kanita, *Era Baru Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.11

untuk difasilitasi oleh negara. Sarana dan prasarana tersebut, antara lain : gedung perkantoran lengkap dengan fasilitasnya, perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan, seperti mobil tahanan, dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya perangkat peraturan perundang-undangan sebagai sarana legitimasi pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing subsistem.

- j. penempatan personalitas sesuai dengan keahlian atau profesionalitas pekerjaan masing-masing (masih bersifat parsial);

Penempatan personalitas sesuai dengan keahlian atau profesionalitas pekerjaan masing-masing sudah dilakukan oleh masing-masing unit (masing-masing lembaga yang terdapat di dalam subsistem dari sistem peradilan pidana) secara terpisah. *Rekrutment* serta pelatihan terhadap sumber-sumber daya manusia juga dilakukan oleh masing-masing unit tersebut. Pengarahan yang memberikan jalan kepada sumber daya manusia untuk meniti jenjang karir yang tersedia juga terdapat di dalam masing-masing unit tersebut.

Sebagai perumpamaan, di dalam lembaga Kejaksaan terdapat ketentuan Pasal 29 ayat (1) *jo* ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan, bahwa pada Kejaksaan selain terdapat pegawai negeri yang menduduki jabatan fungsional jaksa, juga terdapat pegawai negeri bukan jaksa sebagai tenaga ahli atau tenaga tata usaha. Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia dapat diangkat tenaga ahli bukan pegawai negeri.

- k. evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan, yang dalam hal ini dapat berupa pemberhentian dengan hormat ataupun pemberhentian tidak dengan hormat apabila sumber daya organisasi melakukan pelanggaran-pelanggaran (masih bersifat parsial);

Di samping melakukan pengawasan, seorang manajer melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan oleh manajer yang ada di bawahnya dan kinerja para *employee*. Evaluasi berupa mekanisme pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat terhadap *employee* yang bersangkutan diatur di dalam peraturan perundang-undangan kelembagaan/instansi yang bersangkutan. Sebagai contoh, di dalam lembaga/instansi Kejaksaan Republik Indonesia terdapat ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan berikut :

Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :

- a. permintaan sendiri;
- b. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- c. telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun;
- d. meninggal dunia;
- e. tidak cakap dalam menjalankan tugas.

Selanjutnya, di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan, sebagai berikut :

Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;

- c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- e. melakukan perbuatan tercela.

Pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan melalui mekanisme sidang Majelis Kehormatan Jaksa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (2) *jo* ayat (3) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan setelah Jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa yang dibentuk dengan penetapan Jaksa Agung.

Mekanisme pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat juga ditetapkan untuk para “manajer” sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan, sebagai berikut :

Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- d. berakhir masa jabatannya;
- e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Kemudian, di dalam Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan, sebagai berikut :

Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- d. berakhir masa jabatannya;
- e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Selanjutnya, di dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan, sebagai berikut :

- (1) Dalam hal Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda dinilai melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Presiden atas usul Jaksa Agung dapat memberhentikan sementara dari jabatannya sebelum diambil tindakan pemberhentian tersebut.
 - (2) Ketentuan tentang pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), berlaku pula terhadap Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda.
1. pertanggungjawaban akhir dari semua aktivitas yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajiban personal organisasi (masih bersifat parsial);

Selain itu, seorang manajer harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban/melakukan pertanggungjawaban akhir dari semua aktivitas yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajiban personal organisasi. Sebagai contoh, di dalam lembaga Kejaksaan, Jaksa Agung mempertanggungjawabkan semua aktivitas kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia.⁶⁵⁶

Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian pendahuluan, bahwa di dalam pengertian manajemen terdapat sistem administrasi dan sistem organisasi, sehingga dalam penulisan ini menggunakan pendekatan manajemen administratif dan pendekatan manajemen birokratis.⁶⁵⁷ Dalam pendekatan manajemen administratif, terdapat empat belas prinsip manajemen dari Henry Fayol yang diringkas oleh Ulber Silalahi menjadi tiga prinsip utama, yaitu :

- a. Prinsip-prinsip Struktural (*structural principles*), yang terdiri atas pembagian kerja, kesatuan arah, sentralisasi, otoritas, dan hirarki.
- b. Prinsip-prinsip Proses (*process principles*), yang terdiri atas keadilan, disiplin, *remunerasi*, kesatuan komando, dan mengutamakan kepentingan umum.
- c. Prinsip-prinsip Hasil Akhir (*end-result principles*), yang terdiri atas keteraturan, stabilitas, inisiatif dan solidaritas kelompok.⁶⁵⁸

Adapun pendekatan manajemen birokratis dipelopori oleh Max Weber, yang menurut Don Hellriegel dan John W. Slocum sebagaimana dikutip Ulber Silalahi, pendekatan manajemen birokratis adalah suatu pendekatan manajemen ideal untuk organisasi besar yang menekankan pada aturan-aturan, seperangkat hirarki, pembagian kerja yang jelas dan tuntas, mengikuti prosedur-prosedur serta menitikberatkan pada struktur keorganisasian secara menyeluruh.⁶⁵⁹ Menurut Ulber Silalahi dengan mengutip pendapat

⁶⁵⁶ Lihat H.M. Anton Athoillah, 2010, *Dasar-dasar Manajemen*, Op.Cit., hlm.16-17. Lihat Pasal 37 ayat (2) UU Negara RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁶⁵⁷ Ulber Silalahi, 2011, *Asas-asas Manajemen*, Refika Aditama, Bandung., hlm.87. Menurut Ulber Silalahi pendekatan administratif ini dipopulerkan kembali pada kurun waktu 1960-an oleh, antara lain George R. Terry serta Koontz dan O'Donnel.

⁶⁵⁸ *Ibid.*, hlm.91.

⁶⁵⁹ *Ibid.*, hlm.92.

dari Don Hellrieger dan J. W. Slocum serta Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, manajemen birokrasi menggambarkan suatu cetak biru rasional tentang bagaimana organisasi harus beroperasi dalam cara rasional.⁶⁶⁰

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick ada tiga tipe bentuk tahap organisasi, yaitu *Tahap Prabirokrasi*, *Tahap Birokrasi* serta *Tahap Pascabirokrasi*. Tahap Prabirokrasi ada pada masyarakat tradisional, sedangkan Tahap Birokrasi ada pada masyarakat sekarang ini dan menuju ke arah perkembangan Tahap Pascabirokrasi sebagai suatu cita-cita masyarakat modern.⁶⁶¹ Suatu instansi merupakan suatu birokrasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. mempunyai tujuan tertentu yang bersifat eksplisit dan publik dengan menetapkan yurisdiksi tertentu.
- b. memiliki kekuasaan secara hirarkis yang terbagi lagi dalam bidang kompetensi dan bersifat tertutup dalam bentuk rasionalitas formal.
- c. adanya peraturan yang bersifat terkodifikasi yang merupakan kerangka acuan bertindak/beraktivitas serta difokuskan pada pengaturan secara administratif.
- d. pembuatan/pengambilan keputusan bersifat sistematis, rutin, memakai delegasi terbatas dan asumsi masyarakat dunia yang stabil mengubah unsur-unsur terklarifikasi dengan mudah dan membuat pengaturan subjek.
- e. pejabat sebagai seorang profesional penuh yang berdedikasi tinggi pada organisasi, tidak ada pilihan secara personal serta penunjukan jenjang karir atas dasar kepantasan dengan penekanan

⁶⁶⁰ *Loc. Cit.*

⁶⁶¹ Philippe Nonet and Philip Selznick, 1978, "*Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*", Fitzhenry & Whiteside Ltd., Toronto, hlm.22.

pada senioritas serta masa kerja.⁶⁶²

Lembaga-lembaga peradilan pidana masing-masing merupakan suatu organisasi dan secara keseluruhan sebagai suatu sistem sebenarnya sistem peradilan pidana itu sendiri adalah suatu organisasi, organisasi maha besar yang terdiri dari organisasi-organisasi besar. Organisasi didefinisikan secara formal sebagai suatu entitas sosial yang diarahkan oleh tujuan dan dibangun secara sengaja. *Entitas sosial* berarti terdiri atas dua atau lebih orang. *Diarahkan oleh tujuan* berarti dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya profit, kenaikan upah bagi para anggotanya, atau memberikan kepuasan sosial. *Dibangun secara sengaja* berarti bahwa ada pembagian tugas dan tanggung jawab pencapaian tugas tersebut dibebankan kepada para anggota organisasi.⁶⁶³

Menurut I. S. Susanto, dalam istilah “lembaga” terkandung 2 (dua) macam pengertian, yaitu :

- a. sebagai pranata-pranata, yang mengatur hubungan antar manusia dalam bermasyarakat yang berkisar pada hal-hal tertentu atau untuk kepentingan-kepentingan tertentu;
- b. sebagai wadah atau organisasi untuk memberikan kekuatan pada lembaga itu sendiri.

Menurut I.S. Susanto, suatu lembaga memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. selalu berkaitan dengan tujuan tertentu atau selalu berorientasi pada tujuan tertentu;
- b. memiliki peranan yang dimainkan dalam kehidupan masyarakat;
- c. adanya pengakuan dari masyarakat terhadap lembaga tersebut

⁶⁶² *Loc.Cit.*

⁶⁶³ Richard L. Daft, 2010, *New Era of Management, Op. Cit.*, hlm.9

dan hal demikian ini sudah membudaya.

Lembaga-lembaga pada masyarakat modern sebagaimana diungkapkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menampakkan ciri yang khas sebagai suatu birokrasi. Lembaga sebagai suatu birokrasi memiliki ciri-ciri tertentu sebagaimana telah diuraikan di muka. Menurut Peter A. Blau dalam *Beaureaucracy in Modern Society*, bahwa birokrasi memiliki dua wajah, yakni pada satu sisi ia mampu menangani masalah-masalah yang diperlukan oleh masyarakat modern guna membantu masyarakat luas. Sedangkan pada sisi lain, ia dapat mengancam kehidupan demokratis masyarakat luas. Oleh sebab itu, kita harus dapat menyeimbangkan dua sisi yang berlawanan dari birokrasi tersebut. Organisasi merupakan suatu sistem dalam mana sebagai suatu sistem, organisasi merupakan suatu sistem terbuka, sehingga lingkungan organisasi akan mempengaruhi keseluruhan kinerja organisasi dan strategi manajemen, baik masukan, proses transformasi serta keluaran. Menurut Ulber Silalahi, terdapat dua tipe lingkungan manajemen yaitu lingkungan luar dan lingkungan dalam. Lingkungan dalam dan lingkungan luar tersebut berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas manajerial, sehingga responsivitas dan penyesuaian kebijakan manajemen terhadap lingkungannya penting dan menentukan kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan. Oleh sebab itu, kemampuan adaptabilitas organisasi terhadap lingkungannya menjadi indikator dari efektivitas organisasi yang bersangkutan.⁶⁶⁴

Selanjutnya oleh Ulber Silalahi dikatakan, bahwa lingkungan organisasi atau lingkungan manajemen dapat diartikan sebagai

⁶⁶⁴ Ulber Silalahi, 2011, *Asas-asas Manajemen, Op. Cit.*, hlm.118.

keseluruhan elemen baik di dalam maupun di luar batas organisasi baik yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas manajerial untuk mencapai tujuan organisasional. Lingkungan dalam (*internal environment*) ialah keseluruhan komponen yang ada di dalam suatu organisasi yang menentukan kelangsungan aktivitas manajerial, sedangkan lingkungan luar (*external environment*) ialah keseluruhan komponen yang ada di luar suatu organisasi yang berpotensi secara signifikan mempengaruhi aktivitas manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.⁶⁶⁵

Lingkungan luar dari suatu organisasi dapat berupa : politik dan hukum, yang dapat berupa risiko politik, guncangan politik, legislasi, ancaman terorisme; ekonomi, yang dapat berupa kondisi ekonomi, pembangunan ekonomi, infrastruktur; sosial dan budaya, yang dapat berupa nilai-nilai sosial budaya, bahasa, keagamaan (tabu, sakral, dan lain-lain).⁶⁶⁶ Lingkungan luar dapat menjadi peluang (*opportunity*) atau dapat menjadi ancaman (*threats*), sedangkan lingkungan dalam dapat menjadi kekuatan (*strength*) atau dapat menjadi kelemahan (*weakness*). Analisis suatu organisasi dengan melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu organisasi serta melihat bagaimana menggunakan peluang serta mengatasi ancaman-ancaman yang mungkin timbul terhadap organisasi tersebut dikenal dengan sebutan Analisis *S.W.O.T*. Menurut Michael Allison dan Jude Kaye sebagaimana dikutip oleh Ulber Silalahi, Analisis *SWOT* (akronim dari *Strength*, *Weakness*, *Opportunity* dan *Threats*) adalah pandangan sekilas yang menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan internal organisasional yang paling penting dan peluang serta ancaman atau hambatan eksternal organisasional yang paling

⁶⁶⁵ *Ibid.*, hlm.118-119.

⁶⁶⁶ Lihat Richard L. Daft, 2010, *New Era of Management*, *Op.Cit.*, hlm. 135.

penting. Analisis *SWOT* memberikan suatu lingkungannya. Ia juga harus membantu menciptakan strategi yaitu membuat keuntungan maksimum dari kekuatan dan peluang dengan meminimalisasi kelemahan serta hambatan.⁶⁶⁷

Lembaga peradilan pidana sebagai organisasi penegakan hukum pidana tentu saja tidak boleh meninggalkan etika di dalam tugas dan fungsinya. Hal tersebut diungkapkan oleh Linda Klebe Trevino, Laura P.Hartman dan Michael Brown (*"Moral Person and Moral Management"* dalam *California Management Review* 42) sebagaimana dikutip Richard L. Daft⁶⁶⁸

Sistem peradilan pidana merupakan subsistem penegakan hukum dan merupakan subsistem sosial, sehingga kultur penegakan hukum dan aspek kemasyarakatan harus diperhatikan.⁶⁶⁹ Lawrence M. Friedmann sebagaimana dikutip Muladi menyatakan *"legal culture is the climate social force and social thought which determi how law is used, avoided or abused."*⁶⁷⁰

⁶⁶⁷ *Ibid.*, hlm.253-256.

⁶⁶⁸ Richard L. Daft, 2010, *New Era of Management, Op. Cit.*, hlm.192.

⁶⁶⁹ Muladi dengan mendasarkan pada Tap.MPR RI No.IV/MPR RI/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 dimana sekarang ini MPR RI tidak lagi mengeluarkan Ketetapan tentang GBHN sehingga arah kebijakan itu kemudian diatur di dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

⁶⁷⁰ Muladi, 1997, "Seminar Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Koordinasi dalam Penyidikan*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 20 Desember 1997), hlm.2.

2 Sistem Peradilan Pidana dalam Kajian Perbandingan

Studi perbandingan hukum telah dimulai sejak Aristoteles (384-322 SM), yang meneliti 153 konstitusi Yunani dan beberapa kota lainnya, kemudian Solon (640-558 SM) melakukan studi perbandingan hukum ketika menyusun hukum Athena.⁶⁷¹ Dalam melakukan penelitian perbandingan hukum, sebaiknya dipergunakan patokan yang pernah diberikan oleh Jerome Hall, sebagai berikut :

*Comparative laws is a composite of social knowledge of positive law, distinguished by the fact that, in its general aspect, it is intermediate between the knowledge of particular laws and legal institutions, on the one side, and the universal knowledge of them at the other extreme.*⁶⁷²

Selanjutnya, oleh Jerome Hall menyatakan, bahwa :

*The Conclusions typically reached in comparative legal study can be restated in the following form-in these two or three countries, the problems consisted of such and such common elements, the social context A, B, C, were found, the relevant trends and interrelationships were such and such, and so on.*⁶⁷³

Secara sosiologis, menurut Thomas Ford Hoult sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, perbandingan dijelaskan sebagai berikut : *the systematic study about two or more societies..... for the purpose of indicating significant*

⁶⁷¹ Romli Atmasasmita, 2009, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Penerbit PT. Fika-hati Aneska, Jakarta, hlm. 1.

⁶⁷² Jerome Hall, 1963, *Comparative Law and Social Theory*, Louisiana State University Press, Louisiana, USA, pg. 32.

⁶⁷³ *Ibid.*, pg. 33.

*differences between and the likeness among the societies and question.*⁶⁷⁴ Dalam *Black's Law Dictionary* secara yuridis, *comparative jurisprudence* adalah *the study of the principle of legal science by the comparison of various systems of law. Comparative* diartikan sebagai *proceeding by the method of comparison, estimated by comparison and founded by comparison.*⁶⁷⁵ W.L.G. Lemaire sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita menyatakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan) mempunyai lingkup : (isi dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya.⁶⁷⁶ Hessel Yntema sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita mengemukakan, *comparative law is simply another name for legal science and integral part of the more comprehensive universe of social science, or like other branches of science it has a universal humanistic outlook: it contemplates that while the technique may vary, the problems of justice are basically the same in time and space throughout the world* (Perbandingan hukum hanya suatu nama lain untuk hukum dan merupakan bagian yang menyatu dari suatu ilmu sosial, atau seperti cabang ilmu lainnya perbandingan hukum memiliki wawasan yang universal; sekalipun caranya berlainan, masalah keadilan pada dasarnya sama baik menurut waktu dan tempat di seluruh dunia).⁶⁷⁷

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh PAF Lamintang, hukum pidana materiil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri; jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan

⁶⁷⁴ Romli Atmasasmita, 2009, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Op. Cit., hlm. 11.

⁶⁷⁵ Romli Atmasasmita, 2009, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Loc. Cit.

⁶⁷⁶ Romli Atmasasmita, 2009, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Loc. Cit.

⁶⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 11-12.

bilamana hukuman itu dijatuhkan.⁶⁷⁸ Adapun hukum pidana formal mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. Pengaturan hukum pidana materiil ditemukan di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Pengaturan hukum pidana formal terdapat di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. KUHP maupun KUHP merupakan suatu “kodifikasi”, yang merupakan corak khas sistem hukum Eropa Kontinental. Kodifikasi undang-undang menjadi sebuah kitab sebagai dasar hukum utama menjadi ciri utama keluarga hukum Eropa Kontinental atau keluarga hukum *Romano-Germanic* atau keluarga hukum *Civil Law*.

Sistem hukum di berbagai negara dapat dikelompokkan ke dalam keluarga hukum (*family law*) berdasarkan asal-usul, sejarah perkembangannya, cara penerapannya dan lembaga-lembaga penerap hukumnya, dan sebagainya. Tolib Effendi dengan mengutip pendapat Rene David dan John E.C. Brierly menyatakan, pembagian keluarga hukum dari segi sejarah dan perkembangannya, yaitu :

- (1).keluarga hukum Eropa Kontinental;
- (2).keluarga hukum Anglo Saxon;
- (3).keluarga hukum sosialis;
- (4).keluarga hukum agama; dan
- (5).keluarga hukum kedaerahan.⁶⁷⁹

Sedangkan, Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, menentukan sedikitnya ada lima keluarga hukum, yaitu :

- (1).keluarga hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*);
- (2).keluarga hukum Anglo Amerika (*Common Law System*);

⁶⁷⁸ P.A.F. .Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.11.

⁶⁷⁹ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 32.

- (3).keluarga hukum Timur Jauh (*Far East Law System*);
- (4).keluarga hukum Timur Tengah (*Middle East Law System*); dan
- (5).keluarga hukum negara-negara Sosialis (*Socialist Law Family*).⁶⁸⁰

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum ini, antara lain : *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (istilah Bahasa Inggris); *Droit Compare* (istilah Bahasa Perancis); *Rechtsvergelijking* (istilah Bahasa Belanda; dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Bahasa Jerman).⁶⁸¹ Ada pendapat yang membedakan antara *Comparative Law* dengan *Foreign Law*, yaitu :

Tabel III

Perbedaan antara *Comparative Law* dengan *Foreign Law*

<i>Comparative Law</i>	<i>Foreign Law</i>
Mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya.	Mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

Keterangan : tabel dari penulis dengan mengambil materi dari Barda N.A.

Di dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan, bahwa *Comparative Jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law*).⁶⁸² W. Ewald sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa

⁶⁸⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2014, *Politik Hukum*, Op. Cit., hlm. 46.

⁶⁸¹ Barda Nawawi Arief, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Rev, Cet.X, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

⁶⁸² Barda Nawawi Arief, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Rev., Cet.X., Loc. Cit.

perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.⁶⁸³ Rudolf D. Schlessinger sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengemukakan, antara lain :

(1). *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk

memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu;

(2). *Comparative Law* bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum,

bukan suatu cabang hukum (*is not a body of rules and principles*);

(3). *Comparative Law* adalah teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum (*is the technique of dealing with actual foreign law elements of a legal problem*).⁶⁸⁴

Keluarga hukum Eropa Kontinental berlandaskan pada hukum Romawi yang mengacu pada hukum yang berlaku pada masa Kaisar Justinianus (483-565 Masehi). Keluarga hukum ini dianut oleh negara Jerman dan negara Perancis serta negara-negara bekas jajahan mereka dan sebagian besar negara-negara Eropa. Keluarga hukum Eropa Kontinental atau keluarga hukum *Civil Law* merupakan keluarga hukum tertua dan paling banyak berpengaruh di dunia. Keluarga hukum *Anglo Saxon* atau disebut juga keluarga hukum *Common Law* berasal dari Inggris dan negara-negara bekas jajahannya, seperti India, Malaysia, Singapura, Australia dan Amerika Serikat. Keluarga hukum ini dianggap lahir sejak tahun 1066 Masehi. Ciri utama keluarga hukum ini adalah penggunaan yurisprudensi (*precedent*) sebagai sumber hukum utamanya, sehingga dalil-dalil hukum itu bergerak dari “*case per case*”. Para ahli hukum Eropa Kontinental menganggap keluarga hukum *Anglo Saxon* tidak terorganisir. Negara Indonesia memiliki ciri

⁶⁸³ *Ibid.*, hlm. 3-4.

⁶⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

keluarga hukum Eropa Kontinental, mengingat negara Indonesia pernah dijajah oleh negara Belanda dan negara Belanda pernah dijajah oleh negara Perancis.⁶⁸⁵

a.Sistem Peradilan Pidana Belanda

Sistem peradilan pidana menurut *Black's Law Dictionary* adalah institusi kolektif, di mana seorang pelaku tindak pidanamelaluisuatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan. Sistem ini memiliki tiga komponen, yaitu : penegak hukum (kepolisian, *sheriff*, *marshal*), proses persidangan (hakim, penuntut umum, penasihat hukum terdakwa) dan lembaga koreksi (petugas pasyarakatan, petugas probasi dan petugas *parole*), yang selengkapnya adalah, sebagai berikut :

*Criminal justice system is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has have three components : law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defence lawyers) and corrections (prison officer, probation officers and parole officers).*⁶⁸⁶

Secara praktik, Belanda adalah negara yang paling baik dalam menjalankan sistem peradilan pidana dalam arti hubungan yang serasi, seirama antara semua instansi yang terkait dalam peradilan pidana.⁶⁸⁷ Lembaga pengadilan, penuntut umum, kepolisian negara dan imigrasi berada dalam satu struktur organisasi, yaitu Kementerian Kehakiman. Sistem peradilan pidana Belanda terdiri dari Kepolisian,

⁶⁸⁵ Tolib Effendi, 2013, SPP, Perbandingan Komponen dan Proses SPP di Beberapa Negara, *Ibid.*, hlm. 30-35.

⁶⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

⁶⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

Penuntut Umum, Pengadilan, Dinas Probasi dan Penasihat Hukum.⁶⁸⁸

Kepolisian di Belanda terbagi dalam 25 (dua puluh lima) unit regional dan satu polisi nasional dengan berbagai macam Divisi Pembantu, yaitu :

- a. Polisi lalu lintas;
- b. Polisi kereta api;
- c. Polisi air;
- d. Polisi penerbangan;
- e. Polisi gunung dan satuan anjing pelacak;
- f. Dukungan operasional dan koordinasi;
- g. Perlindungan kerajaan dan anggota diplomatik;
- h. Layanan logistik;
- i. Dinas intelijen nasional;
- j. Dinas hubungan internasional;
- k. Dinas penerapan investigasi khusus, dan
- l. Investigasi kriminal nasional.

Pembagian wilayah (*region*) tergantung pada kepadatan penduduk, tingkat kejahatan dan kepadatan gedung. Tiap-tiap *region* dibagi lagi ke dalam beberapa wilayah dan divisi.⁶⁸⁹

Kepolisian Belanda atau *National Police Service Agency* berada di bawah Kementerian Internal dan Hubungan Kerajaan (*Ministry of the Interior and*

⁶⁸⁸ *Loc.Cit.*

⁶⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

Kingdom Relations) serta Kementerian Kehakiman (*Ministry of Justice*), di samping berada di bawah kewenangan Walikota masing-masing. Walikota memegang kewenangan di dalam penegakan hukum pidana dan dalam menjalankan tugasnya walikota membawahi kepolisian dan penuntut umum (ada di bawah pengawasan Penuntut Umum Tertinggi). Di samping itu, dalam sistem peradilan pidana Belanda, fungsi penyidikan dimiliki oleh lembaga kepolisian dan *Openbaar Ministerie*.⁶⁹⁰

Sumber tindakan kepolisian untuk melakukan penyidikan terdiri dari dua macam, yaitu laporan masyarakat dan hasil penyelidikan polisi. Berdasarkan dua sumber tadi, kepolisian berusaha mencari dan menemukan tersangka; alat bukti; meminta keterangan saksi, tersangka dan korban. Atas tindakan-tindakan tersebut, kepolisian membuat laporan tertulis (*process verbaal*). Namun, dalam hal polisi tidak yakin akan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau karena tidak adanya cukup bukti terjadinya tindak pidana, maka kepolisian berhak untuk mengesampingkan atau menolak perkara tersebut karena tidak berwenang (*bevoegdheidssepot*) atau menolak secara bebas (*beleidssepot*).⁶⁹¹

Jika perkara tersebut ternyata merupakan perkara ringan (*overtredigen*), maka polisi dapat menyelesaikan perkara tersebut melalui transaksi atau polisi dapat menghadapkan tersangka tersebut ke pengandilan dengan yurisdiksi terbatas. Dengan dibawahnya tersangka ke pengadilan dengan yurisdiksi terbatas, maka proses dialihkan ke penuntut umum dan penuntut umum memiliki kewenangan untuk menawarkan kepada tersangka kemungkinan transaksi (*transactie methet openbaar ministerie*) atau perkara dibawa ke pengadilan rendahan (*kantongerecht*).⁶⁹²

⁶⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 38-42.

Openbaar ministerie adalah Lembaga penuntut umum yang di Indonesia dipegang oleh Kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi sampai dengan Kejaksaan Agung.

⁶⁹¹ *Ibid.*, hlm. 51.

⁶⁹² *Loc. Cit.*

Struktur organisasi lembaga penuntut umum terdiri dari *District Openbaar Ministerie*⁶⁹³ pada tingkat pertama dan *Openbaar Ministerie*⁶⁹⁴ pada tingkat banding dan paling atas adalah *Openbaar Ministerie*⁶⁹⁵ pada Mahkamah Agung. Ada 19 (sembilan belas) *District Openbaar Ministerie* pada 19 (sembilan belas) Pengadilan Negeri (*District Court*), antara lain : Hertogenbosch; Breda; Maastricht; Roermond; Arnhem; Zutphen; Zwolle; Almelo; The Hague; Rotterdam; Dordrecht; Middelburg; Amsterdam; Alkmaar; Haarlem; Utrecht; Leeuwarden; Groningen dan Assen. Terdapat 5 (lima) *Openbaar Ministerie* pada Pengadilan Tingkat Banding, yaitu : Hertogenbosch; Arnhem; The Hague; Amsterdam dan Leeuwarden. Pada *Openbaar Ministerie* ini terdapat *Substituut Officieren van Justitie*, *Officieren van Justitie* serta *Hoofd Officier van Justitie*.⁶⁹⁶ Pada tingkat banding (*Gerechtshof*) terdapat *Advocaten General*.⁶⁹⁷

Openbaar Ministerie pada tingkat Mahkamah Agung mempunyai kedudukan istimewa sebab bertanggungjawab dalam memberi nasihat kepada Mahkamah Agung berkaitan dengan keputusan-keputusan dalam kasasi dan peninjauan kembali. Nasihat yang disampaikan mencerminkan pendapat pribadi. Penuntut umum berkewajiban melakukan penyidikan tindak pidana, melakukan penuntutan dan memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan dijalankan secara tepat.⁶⁹⁸ Tugas-tugas *Openbaar Ministerie*, sebagai berikut :⁶⁹⁹

a. *Investigating criminal offences* (Penyidikan tindak pidana)

Secara teknis, pengumpulan barang bukti; pemeriksaan terhadap saksi, tersangka dan korban; penangkapan terhadap tersangka; pembuatan

⁶⁹³ Semacam Kejaksaan Negeri di Indonesia.

⁶⁹⁴ Semacam Kejaksaan Tinggi di Indonesia.

⁶⁹⁵ Semacam Kejaksaan Agung di Indonesia.

⁶⁹⁶ *Substituut Officieren van Justitie* atau Jaksa-jaksa Pengganti (Indonesia), *Officieren van Justitie* atau Jaksa (Indonesia) dan *Hoofd Officier van Justitie* atau Kepala Kejaksaan Negeri (Indonesia).

Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Op. Cit., hlm. 42-44.

⁶⁹⁷ Semacam Jaksa Agung di Indonesia.

⁶⁹⁸ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Op. Cit., hlm. 44.

⁶⁹⁹ *Ibid.*, hlm.45-47.

laporan dan berkas perkara merupakan wewenang dan tanggungjawab polisi. Namun, penuntut umum bertanggungjawab atas adanya penyidikan dan memastikan bahwa polisi menjalankan peraturan dan prosedur berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 141 *Wetboek van Strafvordering*, yang berwenang melakukan penyidikan, adalah :

- 1) Penuntut umum;
- 2) Polisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan c, dan anggota kedua sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Kepolisian Belanda tahun 1993;
- 3) Kepolisian Militer Kerajaan yang ditunjuk berdasarkan kerja sama antara Menteri Kehakiman dengan Menteri Pertahanan;
- 4) Penyidik dari Lembaga Penyidik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Lembaga Penyidik Khusus.

Kedudukan *Openbaar Ministerie* sebagai penyidik juga diatur di dalam *Wet Bijzondere Opsporings bevoegdheden* atau *The Special Power of Investigation Act* yang berlaku mulai Februari 2000. Penuntut Umum juga bertanggungjawab terhadap penyidikan yang dilakukan oleh lembaga lain, seperti Badan Intelijen dan Penyidik Keuangan (*Fiscal Intelligence and Investigation Service*) dan Penyidikan Ekonomi (*Economic Investigation Service*).

b. *Prosecuting offenders* (melakukan penuntutan)

Penuntut Umum memiliki monopoli untuk menetapkan kasus-kasus mana yang akan dihadapkan ke Pengadilan. Menurut Pasal 9 ayat (1) *Wetboek van Strafvordering*, penuntut umum bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan di dalam daerah hukumnya. Disebutkan “bertanggungjawab”, bukan “wajib menuntut” mempunyai arti bahwa penuntut umum bisa melakukan penuntutan atau tidak melakukan penuntutan dengan berbagai

pertimbangan.

- c. *Making sure that sentences are carried out properly* (melakukan eksekusi)

Openbaar Ministerie bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan Pengadilan. *Openbaar Ministerie* dapat menjalankan pengaruhnya selama beberapa lama seseorang harus menjalani pidana dan dapat juga menanggukkan eksekusi terhadap hukuman yang dijatuhkan.

Setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari polisi, penuntut umum memiliki beberapa pilihan terhadap perkara tersebut, antara lain :

- a. membebaskan perkara tersebut dengan dalih tidak beralasan (kekuasaan untuk tidak menuntut/*nonpresekusi*). Pembebasan perkara tersebut disebut juga dengan penolakan (*sepot*) yang dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu :
 - 1) penolakan karena alasan tidak berwenang (*bevoegdheidssepot*);
 - 2) penolakan berdasarkan kebijakan (*beleidssepot*);
- b. tindak pidana ringan dan tindak pidana serius dengan kriteria-kriteria tertentu dapat mengadakan transaksi dengan pelaku dengan catatan pelaku tindak pidana setuju untuk membayar sejumlah uang tanpa penghukuman (Pasal 74 *Wetboek van Strafrecht*);
- c. membebaskan kasus tersebut setelah memanggil pelaku tindak pidana dan menegurnya karena perbuatan tersebut;
- d. menetapkan untuk memberikan pembebasan bersyarat (*voorwaardelijksepot*) dengan menggunakan syarat berupa penggantian kerugian kepada korban, menyerahkan ke Departemen Sosial untuk dibina atau pusat rehabilitasi medis atau menempatkannya untuk masa percobaan (*probasi*);
- e. meminta kepada polisi untuk melengkapi atau menambah informasi mengenai kasus tersebut atau meminta laporan sosial atau kejiwaan

dari Kepala Probasi atau psikiater;

- f. mengajukan perkara tersebut ke Hakim Komisaris (*Rechter Commissaris*) untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum mengambil keputusan;
- g. dapat menangguhkan keputusannya untuk menuntut atau tidak hingga batas waktu penuntutan telah berakhir;
- h. dapat mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan.⁷⁰⁰

Dalam hal Penuntut umum menganggap berkas perkara belum lengkap, maka Penuntut umum meminta kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan disertai petunjuk apa-apa yang harus dilengkapi. Penuntut umum berwenang meminta Hakim Komisaris untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya hanya dapat dimulai atas permohonan Penuntut umum. Setelah pemeriksaan pendahuluan selesai, Penuntut umum hanya memiliki beberapa pilihan terhadap perkara tersebut, yaitu :

- a. tidak melakukan penuntutan lebih lanjut dan menolak perkara;
- b. melakukan transaksi dengan pelaku tindak pidana sebagaimana telah diuraikan di atas;
- c. memerintahkan diadakan pemeriksaan Pengadilan.⁷⁰¹

Struktur organisasi pengadilan di Belanda menurut Pasal 2 Undang-Undang tentang Organisasi Pengadilan (*Wet op de Rechterlijke Organisatie* atau *Act of 18 April 1827 on the Composition of the Judiciary and the Organisation of the Justice System* terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *District Court*, *Appeal Court* dan *Supreme Court*.⁷⁰² Menurut Pasal 42-45 *Act of 18 April 1827 on the Composition of the Judiciary and the Organisation of the Justice System*, *District Court* memiliki yurisdiksi untuk memeriksa pada tingkat pertama terhadap, yaitu :

⁷⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 52-53.

⁷⁰¹ *Ibid.*, hlm. 53-54.

⁷⁰² *Ibid.*, hlm. 39.

- a. perkara sipil/perdata;
- b. perkara administrasi;
- c. perkara pajak, dan
- d. perkara pidana.

Selain itu, Belanda juga memiliki pengadilan khusus (*special tribunal*) yang memiliki yurisdiksi khusus berkaitan dengan hukum administrasi.⁷⁰³ Hakim yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal atau hakim majelis tergantung pada perkara yang diperiksa, namun pada umumnya adalah hakim tunggal (*unus judex*). Pemberlakuan hakim tunggal dan hakim majelis ini juga berlaku bagi Pengadilan Tingkat Banding. Hakim tunggal diperuntukkan bagi perkara-perkara, antara lain :

- a. perkara berkaitan dengan pelaku di bawah umur;

Hakim pengadilan remaja (*kinderrechter*) memeriksa perkara yang menyangkut remaja usia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan inimirip yang diatur di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.

- b. perkara-perkara ringan;

Hakim polisi (*politierechter*) memeriksa perkara-perkara dengan tuntutan pidana maksimum tidak melebihi 6 (enam) bulan penjara.⁷⁰⁴ Selain perkara-perkara tersebut, perkara-perkara yang dapat diperiksa oleh hakim tunggal ataupun hakim majelis, yaitu :

- c. perkara tindak pidana ekonomi;

Hakim polisi ekonomi (*economische politierechter*) memeriksa perkara-perkara yang diatur dalam Undang-Undang Pidana Ekonomi.

perkara yang berhubungan militer; dan

⁷⁰³ *Ibid.*, hlm. 40.

⁷⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 41.

d.perkara-perkara yang serius dan rumit.⁷⁰⁵

Penuntut umum berkewajiban membuat surat dakwaan dan segera menyerahkan panggilan sidang kepada terdakwa. Penuntut umum tidak boleh mengubah surat dakwaan atau mencabut perkara tersebut, apabila perkara tersebut sudah mulai diperiksa di Pengadilan. Hakim memerankan hakimaktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan komunikasi tiga arah antara hakim, penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukumnya. Para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan wajib menjawab semua pertanyaan yang diajukan terhadapnya. Pada perkara yang diperiksa oleh hakim polisis atau Pengadilan tingkat rendahan biasanya diputus secara sekaligus, namun untuk perkara yang diperiksa oleh hakim majelis keputusan diambil setelah 2 (dua) minggu.⁷⁰⁶

Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusan adalah, sebagai berikut :

- a. Pengadilan harus menetapkan fakta-fakta apa yang tekalah diperoleh dalam mengambil keputusan tersebut, sejauh mana hubungan antara fakta-fakta tersebut dengan perbuatan terdakwa;
- b. Apabila Pengadilan berkeyakinan bahwa dakwaan belum terbukti, maka Pengadilan akan menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*);
- c. Apabila fakta-fakta yang diduga dalam penuntutan itu telah terbukti, namun menurut hukum tidak memenuhi syarat delik yang didakwakan, maka Pengadilan akan membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);
- d. Apakah perbuatan seperti yang dicakup dalam definisi delik melawan hukum memiliki dasar yang kuat dan membenarkannya. Apabila tidak ada dasar untuk membenarkannya, Pengadilan akan membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);

⁷⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 41-42.

⁷⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 54-55.

- e. Apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang patut dicela ataukah tidak.⁷⁰⁷

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi, khusus untuk perkara ringan hanya dapat diajukan kasasi. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum terhadap keputusan yang belum dilaksanakan dan penggunaan upaya hukum ini dapat menangguhkan pelaksanaan eksekusi putusan. Upaya hukum biasa, antara lain :

- a. *Hoger beroep* (banding), memeriksa kasus kembali secara sempurna;
- b. *Casatie*;
- c. *Verzet*, keberatan yang diajukan ketika putusan dijatuhkan kepada terdakwa secara *in absentia* (*verstekvonnis*). Terhadapnya dilakukan pemeriksaan ulang dengan kehadiran terdakwa.⁷⁰⁸

Di samping itu, ada upaya hukum luar biasa yang dapat digunakan setelah upaya hukum biasa telah dipergunakan, sehingga putusan pengadilan sudah dilaksanakan. Upaya-upaya hukum luar biasa, terdiri dari :

- a. *Casatie in het belang van de wet* (kasasi demi kepentingan hukum); dan
- b. *Herziening* (peninjauan kembali).⁷⁰⁹

Apabila upaya hukum biasa telah dilakukan dan Mahkamah Agung menolaknya, maka eksekusi dapat segera dilakukan oleh Penuntut umum. Menurut Pasal 553 *Wetboek van Strafvordering*, bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan dilakukan oleh Penuntut umum. Dalam pelaksanaan putusan Pengadilan melibatkan Dinas Probasi. Struktur organisasi Dinas Probasi Belanda sangat berbeda dengan dinas sejenis di beberapa Negara. Dinas Probasi membuat laporan-laporan kepada Penuntut umum sebelum penjatuhan hukuman dan

⁷⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 55-56.

⁷⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

⁷⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 56-57.

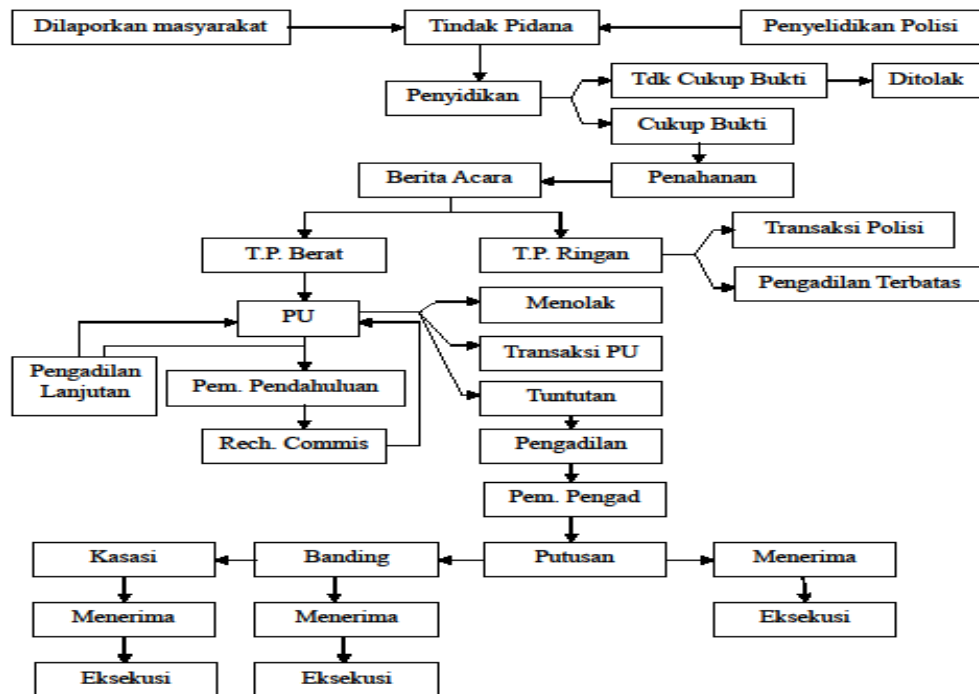
memberikan bantuan dan rehabilitasi berkaitan dengan pembebasan bersyarat serta pidana bersyarat. Dinas Probasi membawahi lembaga-lembaga, sebagai berikut :

- a. *Probation and After Care Association (Algemene Reclassering Vereniging)*.
Lembaga ini berfungsi untuk memberikan perawak umum bagi mereka yang telah dibebaskan dari penjara.
- b. *Consultatie Bureau's voor Alcohol en Drugs*.
Pusat konsultasi untuk masalah alkohol dan obat-obatan terlarang ini memberikan informasi dan bantuan berkaitan dengan ketergantungan alkohol dan obat-obatan terlarang.
- c. Dewan Probasi, yang merupakan pejabat probasi dari dinas sipil yang terdiri dari pejabat masyarakatan, pegawai Rumah Sakit serta profesi di bidang psikologi klinik dan psikiater.⁷¹⁰

⁷¹⁰ *Ibid.*, hlm. 48-49 dan 57.

Secara garis besar dalam bentuk skema (BAGAN XI I) dapat dilihat, sebagai berikut :

BAGAN XII
Skema Sistem Peradilan Pidana Belanda



b.Sistem Peradilan Pidana Inggris

Henry Fielding sebagaimana dikutip oleh Tholib Effendi menyatakan, bahwa tindakan polisi harus diarahkan untuk pencegahan kejahatan sebagai upaya untuk mengontrolnya. Dalam hal penyidikan, kinerja kepolisian berada di bawah perintah dan pengawasan penuntut umum. Tanpa konsultasi sedini mungkin dengan penuntut umum, niscaya perkaranya kurang berhasil di persidangan. Sebelum tahun 1986, penuntut umum bagi perkara-perkara ringan adalah polisi (*Police prosecutor*). Bagi perkara-perkara agak berat penuntut umumnya adalah pengacara yang disebut *solicitor* yang mempunyai Kantor Pengawasan *Solicitor* (*The Office for Supervision of Solicitors*) dan Pengadilan Disipliner *Solicitor* (*The Solicitor's Disciplinary Tribunal*).⁷¹¹ Pada 1 Oktober 1986 dibentuk *Crown Prosecution Service* yang dipimpin oleh *Director of Public Prosecutions*.⁷¹²

Kepolisian dapat melakukan penangkapan dengan menggunakan surat penangkapan atau tanpa menggunakan surat penangkapan. Surat penangkapan dikeluarkan oleh pengadilan *magistrate*, atas dasar keyakinan bahwa adanya keterlibatan seseorang atas tindak pidana yang terjadi, di mana sebelumnya kepolisian mengajukan informasi berkaitan dengan adanya tindak pidana dan tersangka sebagai pelakunya. Kewenangan kepolisian melakukan penangkapan tanpa surat penangkapan diatur di dalam Pasal 24 *Police and Criminal Evidence Act* 1984 yang diubah dengan Pasal 110 *Serious Organised Crime and Police Act* 2005. Di Inggris, penangkapan bisa dilakukan oleh penduduk sipil dengan syarat-syarat tertentu yang biasa disebut *Citizen's Arrest* yang diatur dalam *Serious Organised Crime and Police Act* 2005.⁷¹³ Setelah melakukan penangkapan, polisi akan mengembangkan penyidikan guna menemukan dan mengumpulkan alat bukti, sebelum diputuskan apakah akan melakukan penuntutan ataukah tidak. Jika polisi tidak mampu untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup, perkara

⁷¹¹ *Ibid.*, hlm. 59-63.

⁷¹² *Ibid.*, hlm. 64.

⁷¹³ *Ibid.*, hlm. 83-87.

tidak dilanjutkan.⁷¹⁴ Selanjutnya, tanggung jawab untuk melakukan penuntutan diserahkan kepada *Crown Prosecutor Service* (untuk selanjutnya disingkat *CPS*).

Berkaitan dengan penuntutan perkara pidana, ada tiga sistem penuntutan yang diterapkan, yaitu :

1).*Public Prosecutions*.

Di dalam sistem ini, penuntut umum yang berwenang menangani perkara berat dan dapat mengganggu ketenteraman, antara lain : penyuapan, korupsi, kejahatan yang korbannya meninggal dunia, pembocoran rahasia negara, kejahatan yang sulit pembuktiannya, dan lain sebagainya.

2).*Police Prosecutions*.

Di dalam sistem ini, terhadap perkara-perkara yang bersifat biasa atau sederhana polisi melakukan penyidikan dan menuntut terdakwa di Pengadilan.

3).*Prosecutions by Private Citizen and Bodies*.

Sistem ini menyatakan bahwa sebagai penuntut umum adalah orang-orang pribadi atau badan umum, sedangkan polisi hanya membantu dalam pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti atau alat bukti lainnya.⁷¹⁵

Di dalam Pasal 6 ayat (2) *Prosecution of Offences Act 1985* memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk mengambil alih suatu *private*

⁷¹⁴ *Ibid.*, hlm. 87.

⁷¹⁵ *Ibid.*, hlm. 64-65.

prosecution menjadi *public prosecution*.⁷¹⁶ Di Inggris istilah “*prosecutions*” bukan berarti penuntutan di muka persidangan saja, melainkan termasuk segala pemeriksaan oleh polisi dan pemeriksaan pendahuluan.⁷¹⁷ Di dalam *CPS* terdapat *solicitors* dan *barristers* dan diketuai oleh *solicitor* atau *barrister* dengan pengalaman minimal sepuluh tahun. Setiap perkara yang diterima oleh *CPS* akan diperiksa untuk kemudian diputuskan apakah akan dilakukan proses penuntutan ataukah tidak. Setiap perkara yang diajukan ke *CPS* akan melewati dua tahap pengujian sebelum perkara tersebut akan dilanjutkan ke proses penuntutan. **Tahap pertama**, tahap pemeriksaan kelengkapan alat bukti. Pada tahap ini, penuntut umum harus dipuaskan dengan adanya alat bukti yang lengkap dan dapat dipercaya. Alat bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum (Misal : alat bukti yang diperoleh melalui penggeledahan rumah tanpa ijin), meskipun relevan tidak bisa digunakan di persidangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Tholib Effendi, dalam *Point 5.4 Code for Crown Prosecutor*, sebagai berikut :

“*When deciding whether there is enough evidence to prosecute, Crown Prosecutors must consider whether the evidence can be used and is reliable.*”

Tahap kedua, tahap pemeriksaan ada/tidaknya kepentingan publik/kepentingan umum (*public interest*).⁷¹⁸

Lord Shawcross sebagaimana dikutip oleh Tholib Effendi menyatakan kepentingan umum itu, sebagai :

“*It has never been the rule in this country-I hope it never*

⁷¹⁶ *Ibid.*, hlm. 65.

⁷¹⁷ *Loc. Cit.*

⁷¹⁸ *Ibid.*, hlm. 66-68.

will be- that suspected criminal offences must automatically be the subject of prosecution". Yang artinya, ini tidak pernah diatur di negara ini-semoga tidak pernah-bahwa seorang tersangka pelaku tindak pidana harus secara otomatis menjadi subjek penuntutan.⁷¹⁹

Kepentingan umum harus dipertimbangkan dalam setiap perkara di mana terdapat cukup bukti untuk diadili. Terdapat beberapa faktor yang dapat memperkuat untuk dilakukan penuntutan, antara lain:

- 1). tindak pidana dilakukan terhadap seseorang yang melayani kepentingan umum, seperti polisi atau petugas pemasyarakatan, dokter, dan lain sebagainya;
- 2). tersangka merupakan pejabat yang berwenang atau dapat dipercaya;
- 3). bukti-bukti dapat menunjukkan bahwa tersangka adalah otak atau perencana tindak pidana;
- 4). korban tindak pidana mengalami trauma atau ketakutan atau menderita gangguan kejiwaan;
- 5). tindak pidana dilakukan di hadapan atau di dekat anak-anak;
- 6). tindak pidana dilakukan atas dasar berbagai bentuk diskriminasi terhadap etnis atau suku bangsa, jenis kelamin, agama/kepercayaan, pandangan politik, dan lain sebagainya;
- 7). tindak pidana membawa korban yang luas dalam arti wilayah dan sebagainya.⁷²⁰

⁷¹⁹ *Ibid.*, hlm. 68.

⁷²⁰ *Ibid.*, hlm. 68-69.

Sedangkan beberapa faktor kepentingan umum yang dapat mempengaruhi keputusan untuk tidak melakukan penuntutan, antara lain :

- 1). Pengadilan memaksakan untuk memberikan hukuman denda;
- 2). tindak pidana dilakukan sebagai hasil dari kesalahan murni atau kesalahpahaman;
- 3). penuntutan sepertinya akan membawa dampak yang buruk terhadap kesehatan fisik dan mental korban, selalu mengingatkan akan terjadinya tindak pidana;
- 4). terdakwa sudah lanjut usia atau ketika melakukan tindak pidana menderita gangguan mental berat atau menderita sakit fisik, kecuali jika perbuatan tersebut serius atau terdapat kemungkinan perbuatan tersebut dapat diulang;
- 5). tersangka telah mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.⁷²¹

Penuntutan suatu tindak pidana dapat dimulai dengan mendakwa (*charge*) sebagai tindak lanjut penangkapan atau pemanggilan ke pengadilan (*summons*). Dalam perkara pidana di Inggris dikenal adanya sistem jaminan, pembebasan tersangka dari tahanan sebelum persidangan dengan janji akan membayar sejumlah uang jika tersangka melarikan diri (sama halnya di Indonesia dengan “penangguhan penahanan”) yang diatur dalam *The Bail Act 1976*.⁷²² Adapun prosedur beracara di Pengadilan *Magistrate* ataupun *Crown Court*, sebagai berikut :

- 1).Tindak Pidana Ringan (*Summary Offences*);

Tindak pidana ini disebutkan di dalam undang-undang atau tidak disebutkan di dalam undang-undang, tetapi tidak mencantumkan pidananya

⁷²¹ *Ibid.*, hlm. 69-70.

⁷²² *Ibid.*, hlm. 89-90.

dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana ini hanya bisa diajukan ke Pengadilan *Magistrate*. Terdakwa dapat membuat pernyataan bersalah atau tidak bersalah dan jika menyatakan bersalah, maka pengadilan langsung menjatuhkan hukuman.

2).Tindak Pidana Sedang (*Offences Triable only on Indictment/Indictable Offences*);

Tindak pidana ini dapat diidentifikasi melalui dua cara, yaitu :

- a).Undang-Undang merumuskan dengan mencantumkan pidana maksimum;
- b).Tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam *Magistrate's Court Act* 1980.

Tindak pidana ini dapat diadili oleh Pengadilan *Magistrate* ataupun Pengadilan Kerajaan (*Crown Court*).

Apabila terdakwa menyatakan bersalah dan pernyataan itu dikemukakan di depan sidang dengar pendapat, maka Pengadilan akan menjatuhkan hukuman. Apabila terdakwa menolak menyatakan bersalah, maka persidangan dimulai dengan dengar pendapat. Hakim akan menerima atau menolak yurisdiksi tersebut. Apabila hakim menolak, maka perkara tersebut diserahkan ke Pengadilan Kerajaan. Hakim menerima, keputusan dikembalikan kepada Terdakwa, apakah tetap disidangkan di Pengadilan *Magistrate* ataukah dilimpahkan ke Pengadilan Kerajaan.

3).Tindak Pidana Berat (*Offences Triable Either Way*);

Tindak pidana yang termasuk tindak pidana berat, yaitu : pemerkosaan, perampokan, pembunuhan. Tindak pidana ini hanya bisa diadili oleh *Crown Court*.⁷²³

Proses peradilan pidana di Inggris menggunakan *sistem juri (Crown Court)*, yang dipilih secara acak dari pusat data *Jury Central Summoning Bureau* (untuk selanjutnya disingkat *JCSB*) di London. Petugas Pengadilan akan mengeluarkan daftar yang disebut *Panels juri*. Kriteria-kriteria seseorang dapat dipilih menjadi juri sebagaimana dimaksud dalam *Criminal Justice Act 2003* yang menggantikan *Juries Act 1974*, antara lain :

- 1). berusia antara 18-70 tahun dan terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum;
- 2). berdomisili di Inggris Raya sejak usia 13 tahun, paling sedikit 5 tahun;
- 3). tidak mengalami gangguan mental, dan
- 4). tidak didiskualifikasi.⁷²⁴

Adapun alasan-alasan yang menyebabkan seseorang didiskualifikasi adalah :

- a).berada dalam jaminan;
- b).pernah dihukum lima tahun penjara atau lebih;
- c).selama sepuluh tahun terakhir pernah :

- (1).menerima hukuman;

⁷²³ *Ibid.*, hlm. 91-93.

⁷²⁴ *Ibid.*, hlm. 80-81.

- (2).menjalani hukuman kurungan ;
- (3).menjalani rehabilitasi (masa percobaan);
- (4).menjalani hukuman dari masyarakat;
- (5).menerima perawatan atas obat-obatan dan pengawasan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.⁷²⁵

Seseorang tidak boleh menjadi juri, apabila :

- 1). orang tersebut pernah menjadi juri dalam dua tahun terakhir;
- 2). anggota militer secara penuh, jika meninggalkan militer akan berpengaruh terhadap kegiatan militer;
- 3). seseorang berdasarkan *JSCB* menunjukkan menderita penyakit, telah memiliki rencana liburan, memiliki masalah dengan perawatan anak, berada di bawah komitmen kerja, berada di bawah komitmen belajar atau keterlibatan pribadi dalam perkara atau saksi dalam perkara tersebut, memiliki keterbatasan dalam bahasa Inggris atau keterbatasan fisik, seperti buta, tuli, dan lain-lain.⁷²⁶

Terdakwa berhak menolak sebagian atau seluruh juri dengan alasan tertentu setelah nama-nama juri dipilih, demikian pula dengan penuntut umum mempunyai hak yang sama. Keberatan-keberatan itu akan dibicarakan dalam sidang pada saat dengar pendapat awal.⁷²⁷

Di Inggris, pengadilan mempunyai tiga struktur dasar yang berbeda, yaitu : pengadilan perdata dan pengadilan pidana; pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding; pengadilan superior dan pengadilan inferior.

⁷²⁵ *Ibid.*, hlm. 80.

⁷²⁶ *Ibid.*, hlm. 80-81.

⁷²⁷ *Ibid.*, hlm. 81.

Pengadilan Tingkat Pertama mengadili pada tingkat pertama perkara-perkara pidana dan Pengadilan Banding mempertimbangkan penerapan prinsip-prinsip hukum pada kasus yang pernah didengar pada pemeriksaan tingkat pertama, mempertimbangkan isu-isu dan fakta-fakta yang aktual. Sedangkan pengadilan superior memeriksa perkara yang penting dan atau sulit tanpa adanya pembatasan area atau jumlah uang yang disengketakan. Adapun pengadilan inferior memiliki batas yurisdiksi geografi dan atau finansial dan pada umumnya memeriksa perkara-perkara ringan.⁷²⁸

Pengadilan-pengadilan *superior*, terdiri dari :

1).*House of Lords*;

Pengadilan ini tidak memeriksa bukti dari saksi-saksi, melainkan mempertimbangkan argumentasi hukum dan bukti-bukti dokumen. Dalam perkara pidana, pengadilan ini memeriksa perkara banding yang diajukan oleh Pengadilan Banding atau Pengadilan Tinggi (*Court of Appeal*). Perkara akan diperiksa oleh 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hakim banding (*Lords of Appeal in Ordinary*).⁷²⁹

2).Pengadilan Banding (*Court of Appeal*);

Pengadilan ini tidak memeriksa bukti dari saksi-saksi, melainkan mempertimbangkan argumentasi hukum dan bukti-bukti dokumen. Di dalam perkara menggunakan hakim majelis yang berjumlah minimal 3 (tiga) orang. Di dalam perkara-perkara yang penting umumnya diperiksa oleh 5 (lima) atau 7 (tujuh) hakim. Pengadilan ini mempunyai yurisdiksi mengadili perkara-perkara banding, namun juga perkara-perkara yang dilimpahkan oleh :

⁷²⁸ *Ibid.*, hlm. 70-71.

⁷²⁹ *Ibid.*, hlm. 71-72.

- a). Banding dari *Crown Courts* melawan putusan bersalah atau pemidanaan atau keduanya;
- b). Diajukan oleh Penuntut Umum Tertinggi terkait dengan putusan bebas;
- c). Diajukan oleh Penuntut Umum Tertinggi terkait dengan putusan yang terlalu toleran/ringan;
- d). Diajukan oleh Komisi Pemantau Perkara Pidana (*Criminal Cases Review Commission*).

Pengadilan ini dipimpin oleh seorang *Lord Chief Justice* yang dibantu oleh para hakim yang disebut *Lord Justice*.⁷³⁰

3).Pengadilan Tinggi;

Terdapat 3 (tiga) divisi, yaitu :

- a). *Queen's Bench Division*;
- b). *Chancery Division*;
- c). *Family Division*.

Perkara pidana berupa banding dari Pengadilan *Magistrate* dan dari *Crown Court* untuk pemeriksaan tanpa *juri* diperiksa oleh *Queen's Bench Division*.⁷³¹

4).Pengadilan Kerajaan (*Crown Court*).

Pengadilan Kerajaan mempunyai yurisdiksi untuk pemeriksaan tingkat pertama dalam hal :

- a). persidangan dengan dakwaan oleh *juri*;

⁷³⁰ *Ibid.*, hlm. 72-73.

⁷³¹ *Ibid.*, hlm. 73.

b). kasus-kasus di mana Pengadilan *Magistrate* telah menolak yurisdiksi sebelum disidangkan;

c). putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan *Magistrate* di mana Pengadilan *Magistrate* memiliki pertimbangan bahwa keputusan tersebut tidak cukup kuat.

Pengadilan Kerajaan mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa perkara banding yang diajukan oleh terdakwa atas putusan bersalah atau pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan *Magistrate*.⁷³²

4). Pengadilan Banding Urusan Ketenagakerjaan (*Employment Appeal Tribunal*).

Pengadilan ini mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa perkara banding dari pengadilan ketenagakerjaan dalam hal pertimbangan hukumnya.⁷³³

Adapun pengadilan-pengadilan *inferior*, sebagai berikut :

1). *Country Courts*.

Pengadilan ini adalah pengadilan tingkat rendah yang hanya memeriksa perkara perdata.

2). *Magistrates Courts* (Pengadilan *Magistrate*).

Pengadilan ini adalah pengadilan pada tingkat pertama untuk perkara pidana. Pengadilan ini memeriksa :

1). persidangan awal tindak pidana;

2). pengajuan jaminan;

⁷³² *Ibid.*, hlm. 74.

⁷³³ *Ibid.*, hlm. 75.

3).dikeluarkannya surat panggilan dan surat penangkapan/penahanan atau penggeledahan;

4).pernyataan bersalah;

5).proses awal *crown court* atau penjatuhan hukuman.⁷³⁴

3).Pengadilan Koroner.

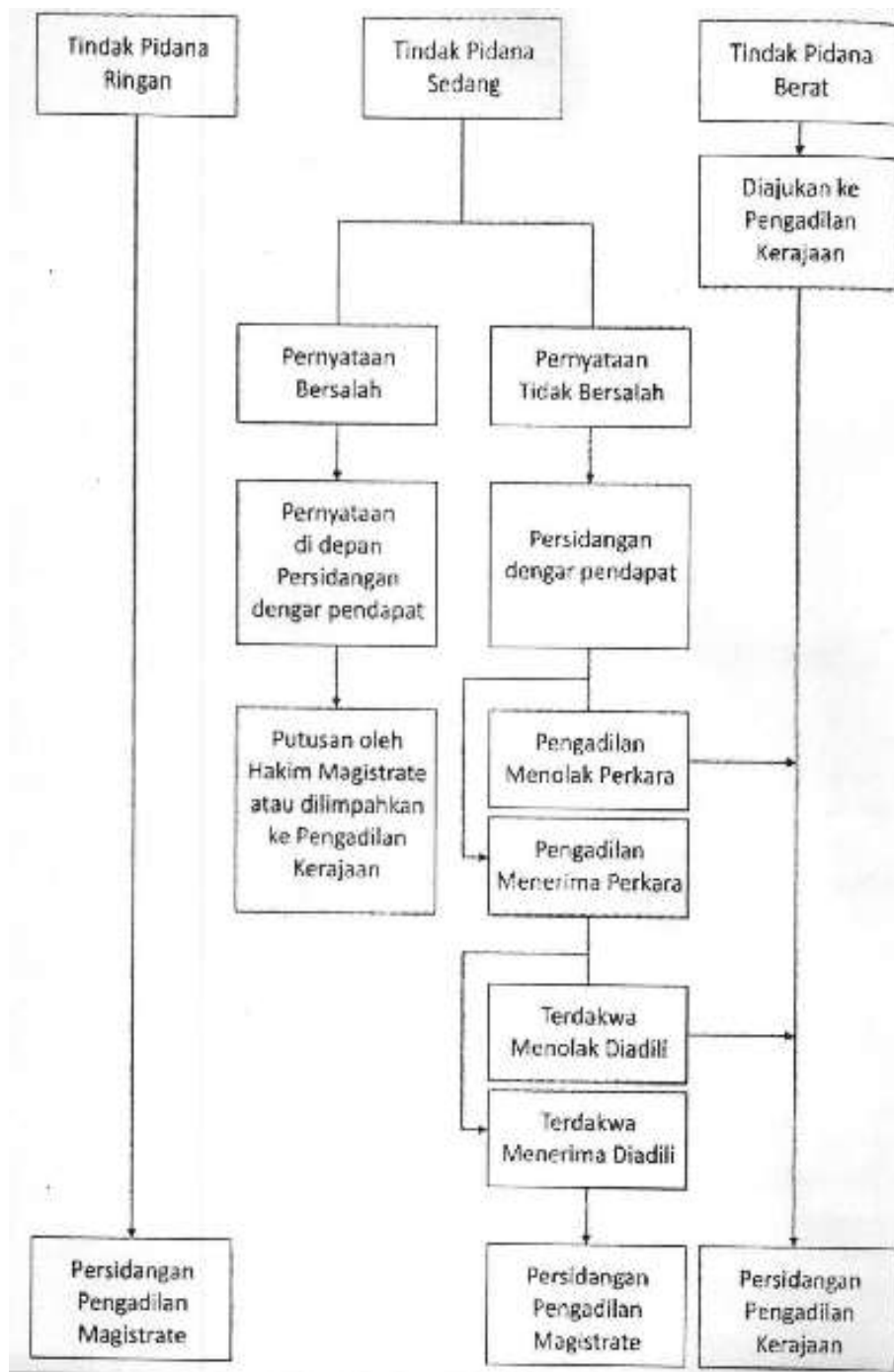
4).Pengadilan Militer.

Di samping itu, ada pengadilan yang disebut dengan Pengadilan Yurisdiksi Khusus (*Tribunal*). Setiap *court* adalah *tribunal*, sedangkan tidak semua *Tribunal* adalah *court*. *Court* bersifat permanen sedangkan *tribunal* bersifat *ad hoc*.⁷³⁵

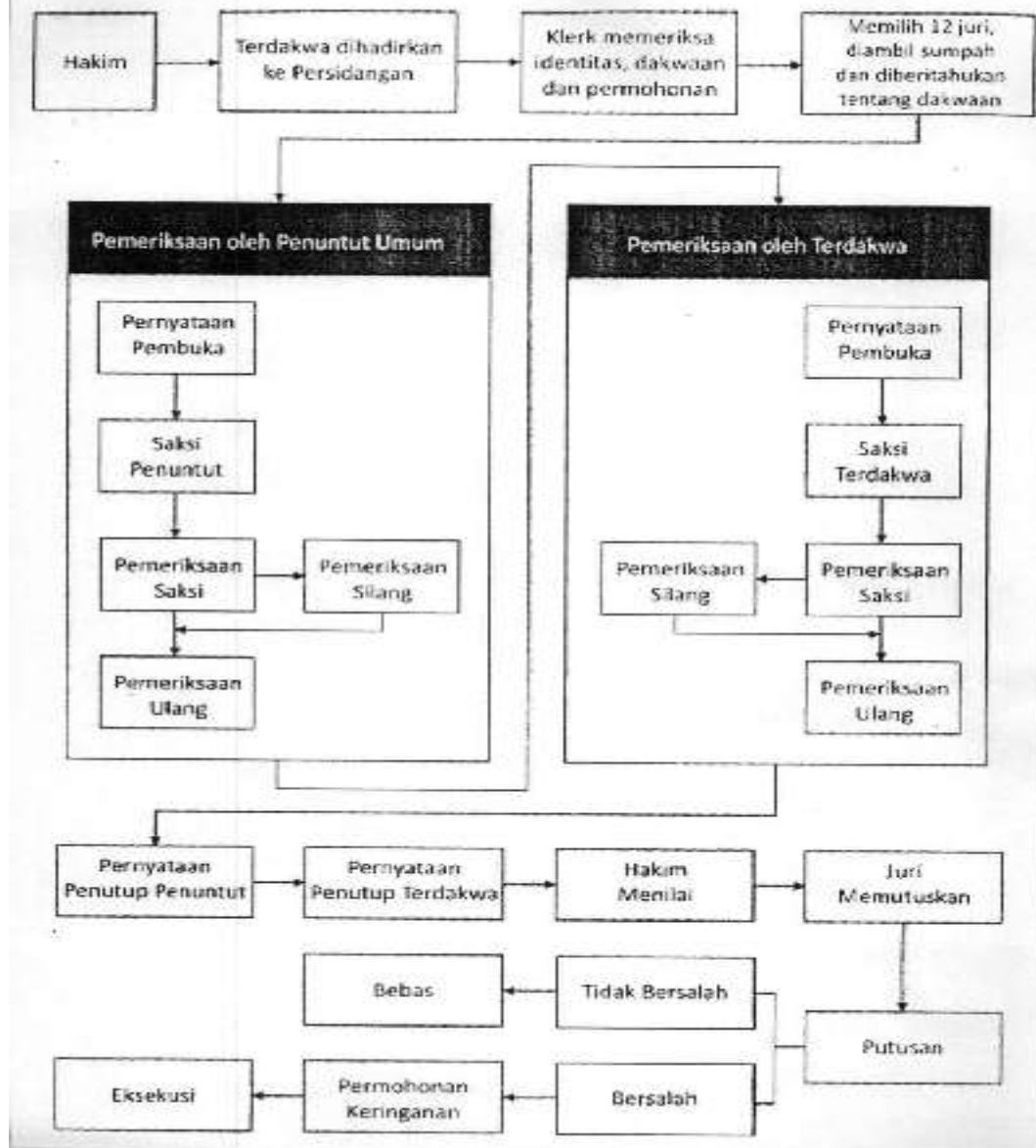
Jika digambarkan dalam bentuk skema, maka Sistem Peradilan Pidana Inggris (Pengadilan Magistrate) dapat dilihat seperti pada Bagan XIII dan Bagan XIV (Pengadilan Kerajaan) di bawah ini :

⁷³⁴ *Loc. Cit.*

⁷³⁵ *Ibid.*, hlm 76-77.



Alur Persidangan di Pengadilan Kerajaan



c. Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat

Di dalam sistem peradilan pidana, kepolisian adalah pintu masuk perkara pidana. Kepolisian di Amerika Serikat terdiri dari :

1). *Sheriff's Departments* (Polisi Lokal/Daerah);

Lembaga kepolisian ini di bawah pimpinan *Sheriff* dengan dibantu para *deputy. Sheriff* bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan layanan penegakan hukum, merawat penjara kota dan sebagai petugas pengadilan kota. Keberadaan *sheriff* sudah ada sejak dahulu, sebelum koloni-koloni Inggris datang ke Amerika Serikat.⁷³⁶

2). *Municipal Police* (Polisi Kota Praja);

Kepolisian kota praja berfungsi untuk melindungi kota dan warganya dari kejahatan. Lembaga kepolisian ini di bawah pimpinan *Marshal* yang dipilih tiap dua tahun sekali.⁷³⁷

3). *State Police* (Polisi Negara Bagian);

Lembaga kepolisian ini muncul karena perkembangan jaman. Pelaku kejahatan dari satu negara bagian kemudian lari ke negara bagian lain/lintas negara bagian. Untuk lebih mengefektifkan proses penanggulangan kejahatan yang terjadi, maka dibentuklah lembaga ini, di samping mengingat bentuk negara adalah negara federal.⁷³⁸

⁷³⁶ *Ibid.*, hlm. 102.

⁷³⁷ *Ibid.*, hlm. 101.

4). *Federal Bureau Investigation* (untuk selanjutnya disingkat *FBI*);

Pada tahun 1935, Kongres mengubah nama *Bureau of Investigation* menjadi *Federal Bureau Investigation* yang mempunyai yurisdiksi melakukan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana federal (ada sekitar 185 jenis tindak pidana).⁷³⁹

5). *Drug Enforcement Administration* (untuk selanjutnya disingkat *DEA*);

Pada tahun 1973, Kongres menyetujui penggabungan beberapa biro yang berkaitan dengan narkoba menjadi satu biro, yaitu *Drug Enforcement Administration* yang mempunyai kewenangan utama mengatur distribusi dan penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.⁷⁴⁰

6). *Immigration and Naturalization Service* (untuk selanjutnya disingkat *INS*).

Agensi ini berdiri tahun 1891, yang bertanggung jawab untuk mengatur hukum imigrasi dan naturalisasi yang berkaitan dengan keluar masuknya warga negara asing ke Amerika Serikat.⁷⁴¹

Penahanan merupakan prosedur awal dalam sistem peradilan pidana Amerika. Ada dua tipe penahanan, yaitu : penahanan dengan surat perintah penahanan dan penahanan tanpa surat perintah penahanan (95% penahanan dilakukan tanpa surat perintah penahanan). Penahanan tanpa surat perintah terjadi apabila tindak pidana itu terjadi di hadapan polisis atau polisi mendapatkan

⁷³⁸ *Ibid.*, hlm. 101-102.

⁷³⁹ *Ibid.*, hlm. 102-103.

⁷⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 103.

⁷⁴¹ *Ibid.*, hlm. 103-104.

informasi tentang akan dilakukannya suatu tindak pidana. Surat perintah penahanan dikeluarkan dalam hal ada laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana dan atas laporan tersebut telah dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam perkara tertentu, kepolisian tidak melakukan penahanan, misal : pelanggaran lalu lintas, kenakalan remaja, dan perkara ringan lainnya. Dalam perkara perkosaan, kepolisian tidak melakukan penahanan karena korban sulit untuk diajak kerja sama karena ketakutan akan publisitas. Pada tahun 1991, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan, bahwa polisi dapat melakukan penahanan tanpa surat perintah penahanan hingga 48 jam tanpa sidang tentang apakah penahanan itu dibenarkan ataukah tidak.⁷⁴²

Ketika seorang tersangka ditahan, diberitahukan tentang hak-haknya. Hak-hak tersangka ini dikenal dengan *Miranda Rule*.⁷⁴³ Isi dari *Miranda Rule* adalah, sebagai berikut :

Anda ditahan. Sebelum kami mengajukan pertanyaan, anda harus mengerti apa hak-hak anda.

Anda mempunyai hak untuk tetap diam. Anda tidak wajib mengatakan apa pun kepada kami kapan saja atau menjawab pertanyaan. Apa yang anda katakan dapat digunakan untuk melawan anda di pengadilan.

Anda memiliki hak untuk berbicara kepada seorang pengacara untuk memperoleh nasihat sebelum kami menanyai anda dan memintanya bersama anda selama proses tersebut. Jika anda tidak mampu mengupayakan seorang pengacara dan ingin pengacara, maka seorang

⁷⁴² *Ibid.*, hlm. 123-124.

⁷⁴³ Doktrin ini dikenal sejak tahun 1966. Doktrin ini bermula dari seorang Tersangka yang ditahan tanpa diberitahukan tentang hak-haknya, akhirnya Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Ernesto Miranda menerima sidang pengadilan ulang. Sejak keputusan itu, sebelum kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, tersangka diberitahukan hak-haknya.

pengacara akan disediakan untuk anda.

Jika anda ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan sekarang tanpa kehadiran seorang pengacara anda masih memiliki hak untuk berhenti menjawab kapan saja. Anda juga mempunyai hak untuk berhenti menjawab kapan saja hingga anda berbicara kepada seorang pengacara.⁷⁴⁴

Selanjutnya, dilakukan proses pencatatan dengan meminta keterangan atas fakta-fakta seputar terjadinya tindak pidana. Setelah itu, dihadirkan di depan hakim. Tersangka diberitahukan tentang dakwaannya serta hak-haknya. Pada proses ini dimungkinkan adanya proses jaminan untuk pembebasan bersyarat dan ini bukan merupakan hak tersangka, sehingga adakalanya permohonan ini akan ditolak dengan alasan-alasan tertentu. Proses dilanjutkan dengan dengar pendapat awal (*preliminary hearing*). Pada tahun 1975, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa dengar pendapat awal diperuntukkan guna menentukan apakah ada alasan cukup kuat guna mengajukan tersangka ke proses persidangan selanjutnya. Penuntut umum mengajukan kasusnya dan tersangka bisa memeriksa saksi-saksi dan mengajukan bukti-bukti yang meringankan. Apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan, maka perkara tidak dilanjutkan. Namun, apabila penuntut umum mampu membuktikan, maka perkara dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.⁷⁴⁵

Penuntut umum adalah pejabat yang memegang peringkat teratas dalam komunitas penegak hukum, penuntut umum dipilih atau ditunjuk. Penuntut umum bertanggung jawab atas seluruh koordiansi yang berkaitan dengan aktivitas pengadilan, karena mewakili pemerintah. Penuntut umum di Amerika Serikat, terdiri dari :

⁷⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 125.

⁷⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 125-126.

1).Penuntut Umum Federal (*United States Attorney/Federal Attorney*);

Setiap wilayah federal memiliki satu penuntut umum federal dengan dibantu satu atau lebih asisten penuntut umum. Penuntut Umum Federal bertanggung jawab untuk menuntut kasus-kasus pidana di wilayah Pengadilan Federal. Para penuntut umum federal diangkat oleh Presiden dan dikukuhkan oleh Senat, sedangkan asisten penuntut umum diangkat oleh *United States Attorney General*. Terdapat 93 (sembilan puluh tiga) kantor Penuntut Umum Federal yang ada di 50 (lima puluh) negara bagian Amerika Serikat. Masing-masing penuntut umum membawahi kantor-kantor penuntut umum federal.⁷⁴⁶

2).Penuntut Umum Negara Bagian (*State Attorney/District Attorney*);

Penuntut Umum Negara Bagian adalah pejabat yang menuntut orang-orang yang didakwa melanggar Undang-Undang Pidana Negara Bagian. Masing-masing Negara Bagian mempunyai aturan sendiri-sendiri, Penuntut Umum Negara Bagian sebagian besar dipilih oleh pejabat daerah, sebagian diangkat bergantung pada negara bagian masing-masing. Tidak semua perkara diterima untuk disidangkan di Pengadilan, beberapa di antaranya ditolak atau tidak dituntut dengan alasan tertentu.⁷⁴⁷

⁷⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 104-106.

⁷⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 106.

3). *General Attorney*;

Masing-masing Negara Bagian mempunyai seorang *General Attorney*⁷⁴⁸ yang berfungsi sebagai pejabat hukum utama. Di sebagian besar negara bagian, pejabat ini dipilih berdasarkan suara pendukung di seluruh negara bagian. *General Attorney* dapat mengeluarkan pendapat di dalam menafsirkan suatu aspek dari Undang-Undang Negara Bagian yang belum diterapkan di Pengadilan.⁷⁴⁹

4). *The Defense Attorney* (Kuasa Hukum Publik);

Kuasa hukum publik (*the defense attorney*) disediakan oleh negara untuk terdakwa yang tidak mampu membayar jasa seorang pengacara. Di beberapa negara bagian, kuasa hukum publik merupakan pejabat lokal yang diangkat dan berhubungan dengan pemerintah daerah. Kuasa hukum publik ini baru muncul pada tahun 1963 dalam kasus *Gideon versus Wainwright*.⁷⁵⁰

Bagi negara bagian yang masih menjalankan sistem juri agung, pada umumnya juri agung beranggotakan 16 (enam belas) hingga 23 (dua puluh tiga) warga negara dari wilayah negara bagian tersebut yang dipilih secara acak berdasarkan daftar pemilih pada pemilihan umum. Proses juri agung ini bersifat *ex parte* (satu pihak), artinya tersangka atau penasihat hukumnya tidak diperkenankan untuk hadir selama proses juri agung bahkan tidak mengetahui kapan proses juri agung itu dilaksanakan dan siapa saja yang bertugas sebagai

⁷⁴⁸ Mirip dengan Jaksa Agung di Indonesia.

⁷⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 106-107.

⁷⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 107.

juri agung. Hanya pihak yang mewakili negara negara seperti polisi dan penuntut umum yang hadir dalam proses juri agung ini. Juri agung mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

- 1).menentukan apakah tersangka harus diajukan ke proses persidangan dengan dakwaan bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, dan
- 2).sebagai kontrol terhadap penuntut umum yang mungkin memanfaatkan jabatannya untuk mendakwa seseorang bersalah dengan alasan politik atau alasan pribadi.⁷⁵¹

Keputusan juri agung tidak harus mutlak, beberapa negara bagian mengatur cukup 2/3 (dua pertiga) atau 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara untuk menentukan dilakukannya penuntutan atau menolak dilakukannya penuntutan. Selain juri agung (*grand jury*) ada pula yang disebut juri kecil (*petit jurors*) untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Juri kecil berjumlah tidak kurang dari 15 (lima belas) orang dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) orang, namun pada umumnya 12 (dua belas) orang.⁷⁵²

Dalam hal melakukan penuntutan, maka proses selanjutnya adalah pemanggilan terdakwa (*arraignment*), yaitu proses menghadirkan terdakwa ke persidangan. Penuntut umum membacakan dakwaannya di hadapan sidang pengadilan terbuka. Terdakwa diberitahukan mengenai haknya didampingi penasihat hukum atau apabila tidak mampu, maka negara yang akan menyediakan secara cuma-cuma. Terdakwa dapat menyatakan dirinya bersalah (*plea of guilty*), menyatakan tidak menentang dakwaan atau fakta-fakta yang disebutkan, menyatakan tidak melakukan tindak pidana (*holo centendere*), mengaku tidak bersalah karena alasan ketidakwarasan, *ne bis in idem*, atau menyatakan tidak

⁷⁵¹ *Ibid.*, hlm. 126-128.

⁷⁵² *Ibid.*, hlm. 120.

bersalah telah melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Apabila terdakwa menyatakan dirinya bersalah, maka pengadilan akan mengesahkan pernyataan tersebut. Namun, apabila terdakwa menyatakan tidak bersalah, maka hakim akan menjadwalkan satu hari untuk dilakukannya proses persidangan formal.⁷⁵³

Pada tingkat negara bagian atau federal paling tidak 90% perkara tidak pernah sampai ke pengadilan, karena telah terjadi kesepakatan antara penasihat hukum terdakwa dengan penuntut umum (*plea of guilty/plea bargaining*). Hakim bersifat pasif dan tidak turut serta dalam proses ini, tetapi hakim berperan dalam hal memastikan bahwa prosedur legal dan konstitusional telah diikuti, tidak ada paksaan dan lain sebagainya. Terdapat beberapa kesepakatan di dalam proses pernyataan bersalah, yaitu :

1).Pengurangan dakwaan;

Pengurangan dakwaan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu : mengurangi jumlah dakwaan atau mengurangi keseriusan dakwaan. Pengurangan jumlah dakwaan dapat berupa penghapusan dakwaan lainnya dalam hal terdakwa didakwa lebih dari satu tindak pidana. Pengurangan keseriusan dakwaan terjadi dalam hal terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana didakwa pasal berlapis. Pengurangan dakwaan ini memiliki dampak menghindari catatan pelanggaran hukum yang dapat membawa stigma sosial, misalnya : didakwa melakukan perkosaan dengan adanya pernyataan bersalah dakwaan diubah menjadi penyerangan atau tindak pidana yang tidak berhubungan dengan

⁷⁵³ *Ibid.*, hlm. 128-129.

tindak pidana susila.⁷⁵⁴

2).Pengurangan hukuman;

Usaha utama dari bentuk kesepakatan ini adalah mendapatkan masa percobaan sebagai hukuman, atau hukuman penjara dengan waktu tertentu dengan masa percobaan terlebih dahulu, atau untuk mendapatkan hukuman lebih ringan dalam dakwaan yang disusun berlapis.⁷⁵⁵

Ada kalanya terdakwa memperoleh hukuman yang lebih buruk dibandingkan dengan apa yang diharapkan setelah menyatakan bersalah, namun kesepakatan tersebut memberikan konsekuensi bahwa terdakwa akan diperlakukan lebih lunak dan menghindari publisitas tentang perkara tersebut.⁷⁵⁶

Pengadilan formal merupakan hak yang dijamin oleh Amandemen Keenam dan Amandemen Keempatbelas, bagi terdakwa yang telah didakwa melakukan tindak pidana federal maupun tindak pidana negara bagian. Terdakwa mempunyai hak-hak konstitusional selama pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagai berikut :

- 1). Terdakwa berhak untuk mendapatkan sidang pengadilan terbuka dan cepat sebagaimana diatur di dalam Amandemen Keenam;
- 2). Terdakwa berhak untuk diperiksa oleh juri yang tidak berpihak sebagaimana diatur di dalam Amandemen Keenam;
- 3). Terdakwa berhak diadili di tempat di mana tindak pidana tersebut dilakukan;
- 4). Terdakwa berhak untuk diinformasikan mengenai isi dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum;

⁷⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 129-130.

⁷⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 130.

⁷⁵⁶ *Loc. Cit.*

- 5). Terdakwa berhak untuk *dikonfrontasikan* dengan saksi-saksi yang memberatkan;
- 6). Terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam semua tingkatan pemeriksaan;
- 7). Terdakwa berhak untuk tidak diadili dalam perkara yang sama sebagaimana diatur di dalam Amandemen Kelima;
- 8). Terdakwa berhak untuk tidak dipaksa sebagai saksi yang memberatkan dirinya sendiri;
- 9). Terdakwa berhak mendapatkan perlindungan atas bukti-bukti yang diperoleh secara *illegal* untuk digunakan memberatkan dirinya.⁷⁵⁷

Setelah hakim menetapkan untuk dilakukan persidangan formal, tahapan-tahapan selanjutnya adalah demikian :

1).Pemilihan Juri;

Terdakwa diberi hak untuk memilih apakah pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan juri atau pemeriksaan oleh hakim. Hak terdakwa untuk menggunakan juri tercantum di dalam Pasal 3 ayat (2) Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan, bahwa persidangan untuk seluruh tindak pidana, kecuali dalam perkara *impeachment* akan dilakukan oleh juri. Demikian pula di dalam Amandemen Keenam disebutkan, bahwa dalam semua tuntutan atas tindak pidana, terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan pengadilan yang cepat dan terbuka, dilakukan oleh suatu juri yang tidak memihak dari negara bagian dan distrik di mana tindak pidana tersebut dilakukan. Dalam hal terdakwa menggunakan juri, proses pertama adalah pemilihan juri. Juri untuk perkara tindak pidana berat (*felonies*) pada

⁷⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 131.

umumnya terdiri dari 12 (dua belas) orang juri (tidak ada pengaturan di dalam Konstitusi), walaupun ada negara bagian yang menggunakan juri kurang dari 12 (dua belas) orang untuk tindak pidana biasa (*misdemeanor*).⁷⁵⁸

Proses *Voir Dire* (mengatakan kebenaran), sekelompok calon juri dipanggil untuk hadir di persidangan terbuka, mereka ditanya tentang kualifikasi mereka di dalam pelayanan juri. Penuntut umum maupun kuasa hukum mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ataupun khusus kepada calon juri, misalnya apakah mereka warga negara Amerika Serikat, apakah mereka pernah diadili dalam perkara pidana, apakah mereka memahami bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Penuntut umum ataupun kuasa hukum berhak menolak calon juri dengan meminta Pengadilan untuk mengeluarkan calon juri tanpa memberikan alasan. Setelah proses tanya jawab selesai dan telah terpilih kurang lebih 12 (dua belas) orang, para juri tersebut diambil sumpahnya oleh panitera.

Di beberapa negara bagian, selain memilih 12 (dua belas) juri tersebut juga memilih juri pengganti yang berfungsi ketika salah satu atau beberapa orang juri tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai juri dalam

persidangan.⁷⁵⁹

2). Pernyataan Pembuka;

Penuntut umum menyampaikan pernyataan pembuka untuk memberikan gambaran umum kepada anggota juri, karena mereka adalah orang awam yang tidak mengetahui peraturan perundang-undangan dan prosedur peradilan pidana. Selanjutnya, kuasa hukum terdakwa menyampaikan hal yang

⁷⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 132.

⁷⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 132-133.

serupa.⁷⁶⁰

3). Alasan Hukum Penuntut Umum;

Penuntut umum mengajukan bukti-bukti yang dikumpulkan dalam perkara tersebut, yaitu bukti fisik dan bukti keterangan saksi. Bukti fisik dapat mencakup sidik jari, tes darah, dokumen-dokumen atau barang-barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana. Bukti keterangan saksi adalah saksi-saksi yang diajukan untuk didengar keterangannya berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Terhadap bukti-bukti fisik yang diajukan, terdakwa atau kuasa hukum terdakwa dapat mengajukan keberatan. Keberatan diterima, maka bukti-bukti tersebut diminta untuk tidak dipertimbangkan dalam persidangan. Keberatan ditolak, maka bukti-bukti fisik tersebut ditandai oleh petugas pengadilan sebagai bagian dari catatan resmi. Terhadap bukti keterangan saksi, dapat juga dilakukan pemeriksaan silang dengan tujuan untuk membantah keterangan saksi atau membuat bingung saksi, sehingga dapat mengakibatkan keterangannya tidak akurat atau membingungkan.⁷⁶¹

4). Alasan Hukum Kuasa Hukum Terdakwa;

Terdakwa/kuasa hukum terdakwa diberikan hak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti fisik untuk membantah argumen penuntut umum.

Terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan ketidakbersalahannya,

⁷⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 133-134.

⁷⁶¹ *Ibid.*, hlm. 134.

melainkan menunjukkan bahwa bukti-bukti yang diajukan penuntut umum tidak meyakinkan. Penuntut umum juga memiliki hak untuk mengajukan bukti-bukti bantahan, dan atas bantahan tersebut kuasa hukum dapat memberikan jawaban atas bantahan tersebut (dalam sistem peradilan pidana Indonesia dikenal dengan *replik-duplik*). Selanjutnya, masing-masing pihak mengajukan argumen penutup.⁷⁶²

5).Instruksi Hakim⁷⁶³;

Hakim berperan pasif dalam proses persidangan, namun bersikap netral karena memastikan kedua belah pihak mengajukan kasusnya semaksimal mungkin dalam batas-batas koridor hukum yang berlaku. Hakim berhati-hati dalam menginstruksikan kepada juri mengenai unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan, pemberian opsi kepada juri tentang keputusan yang diambil, juga mengenai beban pembuktian tetap ada pada Penuntut Umum sesuai asas *presumption of innocence*, termasuk prosedur bagaimana menghubungi hakim apabila masih ada pertanyaan, dan lain sebagainya.⁷⁶⁴

6).Keputusan Juri.

Juri melakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan, tidak ada pihak manapun yang berpartisipasi di dalam proses ini, termasuk hakim. Juri

⁷⁶² *Ibid.*, hlm. 135-136.

⁷⁶³ Tolib Effendi menggunakan kata “instruksi juri”.

⁷⁶⁴ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana, Op. Cit.*, hlm. 136-137.

disterilkan, bahkan dilarang membaca/mendengar berita berkaitan dengan perkara tersebut. Untuk perkara tertentu, juri dikarantina oleh hakim sehingga tidak mendapatkan pengamatan dari publik. Jika juri mengalami kebuntuan dan tidak dapat mencapai suatu keputusan, maka akan melaporkan kepada hakim. Hakim dapat berusaha meyakinkan juri untuk mengambil suatu keputusan, jika tidak hakim akan membubarkan juri dan menggelar persidangan baru mulai dari awal. Keputusan juri harus bersifat mutlak atau bulat yang menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah, maka langsung dinyatakan bebas saat itu juga. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, maka proses berlanjut ke tahap selanjutnya.⁷⁶⁵

7).Tahap Setelah Pemeriksaan Persidangan.

Setelah terdakwa dinyatakan bersalah, masih ada proses selanjutnya yaitu keputusan hukuman yang diberikan yang dinyatakan secara resmi oleh pengadilan. Hukuman paling ringan adalah percobaan dan hukuman paling berat adalah hukuman mati. Untuk menciptakan konsistensi dan membatasi ketimpangan dalam penentuan hukuman, maka pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian menyusun Akta Pembaharuan Penentuan Hukuman pada tahun 1987.⁷⁶⁶

⁷⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 137-138.

⁷⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 138-139.

Setiap orang berhak untuk menyatakan banding atas keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Permohonan banding didasarkan atas pendapat terjadinya kesalahan hukum dalam proses persidangan. Setelah permohonan banding ditolak, maka akan dilakukan eksekusi. Secara umum, terdapat empat tujuan penjatuhan hukuman/pidana, yaitu :

- a). pencegahan;
- b). membatasi gerak pelaku tindak pidana;
- c). rehabilitasi; dan
- d). hukuman atau sekedar pembalasan.

Pengadilan memiliki empat pilihan di dalam penjatuhan hukuman, yaitu :

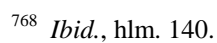
- a). denda, sering dijatuhkan dengan hukuman percobaan;
- b). hukuman kurungan selama batas waktu tertentu, umumnya digabungkan dengan hukuman percobaan;
- c). beberapa bentuk pemidanaan, pemidanaan (*in carceration*) adalah penjatuhan hukuman kepada terdakwa dalam sebuah *institusi* selama waktu tertentu, pemidanaan ini dapat berupa pemasyarakatan atau penempatan di penjara.
- d). percobaan atau gabungan di antaranya.⁷⁶⁷

Persidangan di satu Negara Bagian tidak sama persis dengan di Negara Bagian yang lain, namun sebagian besar adalah demikian. Persidangan perkara tindak pidana biasa (*misdemeanor*) tidak serumit tindak pidana berat (*felonies*)

⁷⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 138-140.

Skema Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dapat digambarkan, (lihat skema Bagan XV dan Bagan XVI) sebagai berikut :

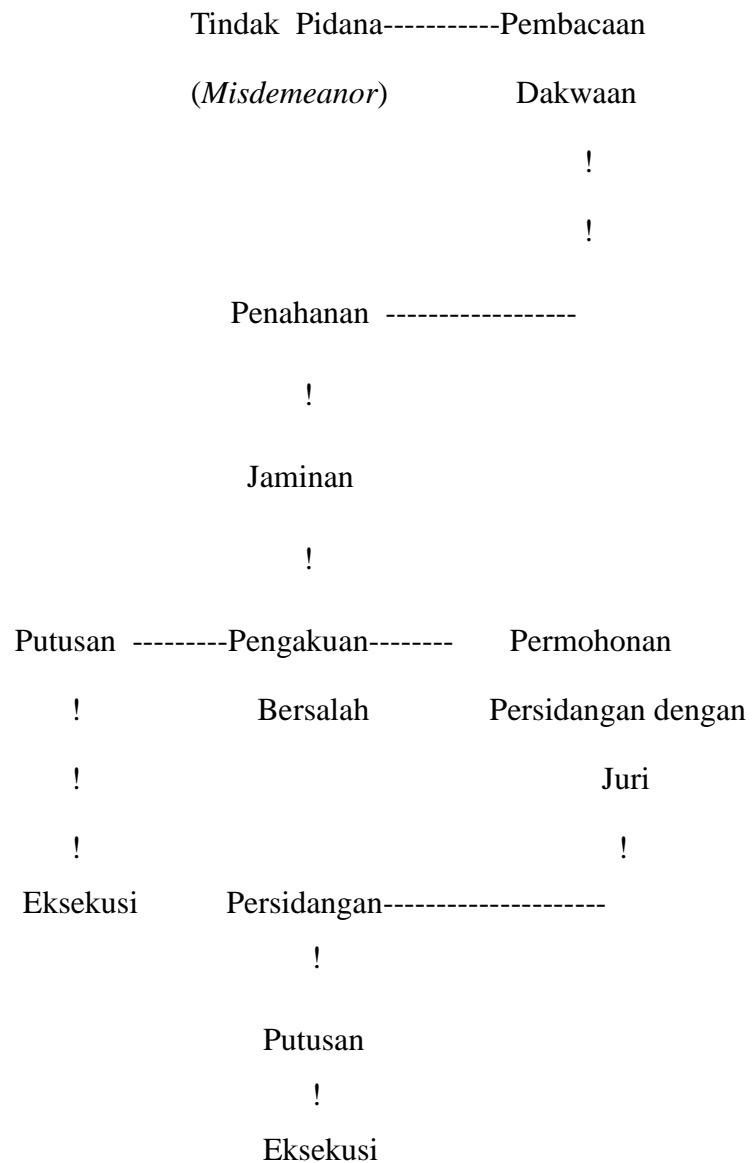
Skema Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat



BAGAN XVI

Skema Alur Persidangan dalam Perkara Tindak Pidana Biasa

(*Misdemeanor*)



Disadur dari Robert D. Pursley, 1977

Tolib Effendi, 2013

Pengadilan federal memiliki jenjang dan pengadilan negara bagian juga, namun kesemuanya itu berpuncak di Mahkamah Agung Amerika Serikat.

1).Pengadilan Negara Bagian;

Tidak ada dua negara bagian yang benar-benar serupa dalam organisasi Pengadilanannya. Setiap negara bagian bebas memilih sistem kelembagaannya dan bebas *mengadopsi* sistem mana saja. Beberapa negara bagian telah membentuk sistem pengadilan yang bersatu, beberapa negara bagian lain masih menggunakan sistem pengadilan yang membingungkan dan tumpang tindih.⁷⁶⁹ Pengadilan-pengadilan negara bagian dapat dibagi ke dalam empat kategori yang menunjukkan jenjang pengadilan, yaitu :

a).Pengadilan Rendah dengan Yurisdiksi Terbatas;

Pengadilan ini memiliki nama sebagaimana digunakan beberapa Negara Bagian, seperti : Pengadilan Hakim Bantu, Pengadilan Kotapraja, Pengadilan Kota, Pengadilan Hubungan Rumah Tangga, dan lain-lain. Yurisdiksi pengadilan ini terbatas pada kasus-kasus ringan seperti pelanggaran ringan (*infraction*) dan tindak pidana biasa yang disebut *misdemeanor*, seperti : pelanggaran lalu lintas, kasus yang melibatkan remaja, kasus yang berkaitan dengan hubungan rumah tangga. Pengadilan ini hanya bisa menjatuhkan pidana denda terbatas yang nilainya tidak lebih

⁷⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 108-110

dari US \$ 1.000 dan hukuman kurungan tidak lebih dari satu tahun. Pengadilan ini tidak dicatat dan hakim yang memeriksa perkara tidak wajib berpendidikan formal. Putusan pengadilan ini dapat banding ke pengadilan rendah dengan yurisdiksi umum yang dikenal dengan Pengadilan *De Nevo* (Pengadilan Baru).⁷⁷⁰

b).Pengadilan Rendah dengan Yurisdiksi Umum;

Sebagian negara bagian memiliki pengadilan rendah utama yang menangani kasus-kasus pidana yang lebih serius dan sebagai pengadilan tingkat banding dari pengadilan rendah dengan yurisdiksi terbatas. Pengadilan ini biasa terbagi ke dalam distrik atau wilayah yudisial. Pengadilan ini mempunyai banyak nama, seperti : Pengadilan Distrik, Pengadilan Wilayah dan Pengadilan Tinggi. Hakim diwajibkan bergelar sarjana hukum serta terdapat pegawai kepaniteraan yang bertugas mencatat jalannya pengadilan.⁷⁷¹

c).Pengadilan Banding Menengah;

Pengadilan ini tergolong relatif baru dalam sistem pengadilan negara bagian Amerika Serikat. Pada tahun 1995, ada 39 (tiga puluh sembilan) negara bagian yang memiliki pengadilan banding menengah. Pengadilan banding menengah bertujuan meringankan beban kerja dari pengadilan

⁷⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 110-111.

⁷⁷¹ *Ibid.*, hlm. 111.

tertinggi negara bagian. Di beberapa negara bagian pengadilan banding menengah bersidang dengan jumlah hakim yang lengkap atau memenuhi *kuorum*, sementara ada yang bersidang dengan *panelis* yang *permanen* atau berpindah-pindah.⁷⁷²

d).Pengadilan Akhir;

Setiap negara bagian memiliki suatu pengadilan akhir, kecuali Negara Bagian Oklahoma dan Texas yang memiliki dua pengadilan tertinggi. Kedua negara bagian tersebut memiliki suatu Mahkamah Agung dengan yurisdiksi yang terbatas, yaitu memeriksa kasasi dalam perkara-perkara perdata dan merupakan pengadilan banding pidana atas perkara-perkara pidana. Pengadilan akhir ini memiliki yurisdiksi dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang negara bagian, sehingga di beberapa negara bagian pengadilan ini disebut sebagai Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, Mahkamah Yudisial Agung atau Mahkamah Agung Banding.⁷⁷³

2).Pengadilan Federal;

Pengadilan Federal mulai muncul setelah Konstitusi Amerika Serikat diratifikasi oleh negara-negara bagian. Dalam sidang Kongres pada tahun 1789, muncul dua kelompok, kelompok yang satu berpendapat perlu

⁷⁷² *Ibid.*, hlm. 111-112.

⁷⁷³ *Ibid.*, hlm. 112-113.

dibentuk pengadilan rendah federal dan kelompok yang lain berpendapat tuntutan federal harus didengar terlebih dahulu di pengadilan-pengadilan negara bagian, sehingga muncul kesepakatan yang tertuang di dalam Akta Yudikatif pada tahun 1789. Berdasarkan Akta Yudikatif dibentuklah suatu Mahkamah Agung yang terdiri dari satu orang hakim ketua dan lima orang hakim anggota; tiga pengadilan wilayah yang masing-masing terdiri dari dua orang hakim agung dan seorang hakim distrik; juga dibentuk 13 (tiga belas) pengadilan distrik yang masing-masing diketuai oleh seorang hakim distrik.⁷⁷⁴

a).Pengadilan Distrik Amerika Serikat;

Pengadilan Distrik memeriksa perkara-perkara di mana penuntut umum Amerika Serikat memiliki alasan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang pidana Amerika Serikat. Pengadilan distrik sebagai pengadilan rendah dari sistem hukum federal, terdapat 94 (sembilan puluh empat) pengadilan distrik. Setiap negara bagian memiliki satu atau lebih distrik bergantung luas wilayahnya/jumlah populasi, misalnya : Negara Bagian California, Negara Bagian New York dan Negara Bagian Texas masing-masing memiliki empat distrik. Pemeriksaan perkara di pengadilan distrik dilakukan oleh hakim tunggal yang memiliki latar

⁷⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 113.

belakang pendidikan hukum yang baik. Sebelum menduduki jabatan sebagai hakim pengadilan distrik, pada umumnya mereka telah menjabat sebagai hakim negara bagian.⁷⁷⁵

b).Pengadilan Banding Amerika Serikat;

Terdapat 12 (dua belas) pengadilan banding (*circuit court*) tingkat federal yang bertanggung jawab memeriksa kembali perkara-perkara di pengadilan distrik dalam batas-batas wilayah tertentu. Tujuan pemeriksaan kembali di tingkat banding, yaitu :

Pertama, para hakim di Pengadilan Banding diminta untuk memantau kinerja pengadilan distrik pengadilan distrik dan mengawasi penerapan serta penafsiran tentang undang-undang nasional dan undang-undang negara bagian. Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Banding tidak mencari bukti-bukti faktual yang baru, melainkan mengkaji catatan pengadilan distrik untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.

Kedua, para hakim Pengadilan Banding memeriksa perkara lebih dahulu dibanding dengan hakim Mahkamah Agung dan membentuk apa yang disebut dengan klaim yang layak ditinjau kembali.⁷⁷⁶

⁷⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 113-115.

⁷⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 115-116.

Pengadilan Banding pada umumnya diperiksa oleh tiga orang hakim dalam wilayah tersebut, beberapa negara bagian menetapkan jumlah yang bervariasi. Perkara-perkara tertentu yang dianggap penting, diperiksa oleh suatu lembaga yang disebut *En-Banc*, yaitu semua hakim banding yang ada di wilayah tersebut.⁷⁷⁷

c).Mahkamah Agung Amerika Serikat;

Mahkamah Agung Amerika Serikat memiliki yurisdiksi dalam perkara-perkara tertentu yang dibawa oleh atau diajukan terhadap duta besar, konsul asing dalam perkara antara Amerika Serikat dengan negara bagian dan perkara-perkara negara bagian dengan warga negara bagian atau negara bagian lain. Mahkamah Agung Amerika Serikat merupakan satu-satunya pengadilan federal yang disebutkan namanya di dalam Konstitusi Amerika Serikat. Mahkamah Agung Amerika Serikat dianggap sebagai suatu pengadilan banding karena tidak memiliki yurisdiksi tersendiri, kecuali gugatan antara dua atau lebih pengadilan negara bagian. Perkara banding dapat sampai ke Mahkamah Agung Amerika Serikat melalui dua jalur utama, yaitu :

- a).perkara banding dapat datang dari semua pengadilan konstitusional dan teritorial federal atau pengadilan legislatif federal;

⁷⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 116.

b).Mahkamah Agung Amerika Serikat dapat menggelar perkara banding dari pengadilan akhir negara bagian.⁷⁷⁸

Mahkamah Agung Amerika Serikat memeriksa perkara secara majelis yaitu 9 (sembilan) orang.

Hakim agung dan hakim distrik semuanya ditunjuk oleh Presiden Amerika Serikat dengan persetujuan mayoritas suara dari Senat. Selama berkelakuan baik, semua hakim mengabdikan seumur hidup. Hakim tidak bisa dipecat, kecuali atas tuduhan pengkhianatan, penyuapan atau pelanggaran atau kejahatan berat lainnya. Walaupun diangkat oleh Presiden Amerika Serikat berdasarkan alasan subjektif (mempunyai pandangan politik yang sama), namun saat menjabat hakim boleh mengkritisi pemerintahan atau program pemerintahan tanpa takut dipecat/diberi sanksi selama tidak melanggar undang-undang.⁷⁷⁹

Pada bagian akhir dari sistem peradilan pidana Amerika Serikat terdapat lembaga koreksi, yang dalam hal ini ada dua bentuk lembaga koreksi, yaitu :

- 1) pemasyarakatan (*in carceration*), yaitu menyerahkan pelaku tindak pidana pada lembaga pemasyarakatan;
- 2) pemasyarakatan berdasarkan pembatasan alternatif, termasuk di dalamnya adalah pembebasan bersyarat, percobaan (pidana bersyarat) dan

⁷⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 116-117.

⁷⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 117-119.

pengalihan sebelum persidangan.⁷⁸⁰

3. Upaya-upaya Guna Mewujudkan Peradilan Pidana yang Terpadu, Mandiri dan Berwibawa dengan Berlandaskan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Semakin maju suatu negara khususnya di dalam pertumbuhan sosial ekonominya semakin maju dan berkembangnya suatu jenis tindak pidana yang merupakan hasil sampingannya. Kejahatan di bidang sosial ekonomi semakin kompleks karena keterkaitannya dengan kebijakan Pemerintah di bidang sosial ekonomi. Bentuk-bentuk kejahatan jenis ini antara lain meliputi tindak pidana di bidang perbankan; perpajakan; perdagangan; pelanggaran terhadap hak konsumen; kejahatan administrasi seperti pelanggaran terhadap sanitasi, kecurangan terhadap publik, kecurangan dalam asuransi, kecurangan terhadap pemerintah dan lain sebagainya membutuhkan aparat penegak hukum yang tangguh, mempunyai motivasi kerja yang tinggi, pengalaman profesional yang tinggi guna penyidikan dan penuntutan terhadap tindak-tindak pidana tersebut. Membutuhkan kerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu, mengikutsertakan tenaga-tenaga ahli di bidangnya (ahli akuntansi, ahli komputer, dan sebagainya).⁷⁸¹

Langkah-langkah menuju keterpaduan sebenarnya memang sudah ada baik secara substansial maupun struktural, karena dalam pengertian sistem sebenarnya harus terkandung adanya suatu keterpaduan antara sub-subsistem pendukungnya. Namun dalam praktiknya ternyata masih tampak adanya gejala *fragmentaris* yang menunjukkan kurang adanya keterpaduan (suatu *integrated*). Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan agar terwujud adanya sistem peradilan pidana yang terpadu, mandiri dan berwibawa dengan berlandaskan cepat, sederhana dan biaya ringan,

⁷⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 122.

⁷⁸¹ Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief., 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.97-100.

antara lain sebagai berikut :

a. Perencanaan.

Perencanaan (*planning*), di dalamnya terkandung berbagai program yang akan dilaksanakan. Perencanaan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menentukan tujuan organisasi.⁷⁸² Perencanaan berarti mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi di masa mendatang serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya.⁷⁸³ Peraturan perundang-undangan harus disusun sebagai suatu kesatuan integral dengan keseluruhan kebijakan/poses/sistem penegakan hukum pidana. Kesatuan integral yang dimaksud tidak hanya pada mekanisme/ prosesnya, tetapi juga pada spirit/jiwa/idenya yaitu bahwa kekuasaan/ kewenangan suatu subsistem merupakan bagian integral dari kebijakan / kekuasaan / kewenangan penegakan hukum yang merupakan kekuasaan yang bebas, mandiri dan merdeka. Adanya kesadaran atas kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu (*integrated crime policy*) yang berdasarkan pada statistik kriminal terpadu (*integrated crime statistic*) serta profil kejahatan (*crime profile*) yang dikaitkan dengan perkembangan kejahatan yang terjadi baik secara kuantitas maupun kualitas.⁷⁸⁴ Juga disadari adanya saling ketergantungan (*interdependensi*) antara angka penyelesaian perkara (*clearance rate*), angka pemidanaan (*conviction rate*), disparitas pidana, angka pemidanaan kembali (*reconviction rate*) serta proses penegakan hukum (*law making process*) dan kepatuhan/kesadaran hukum (*law*

⁷⁸² Richard L. Daft, 2010, *New Era of Management*, *Op. Cit.*, hlm.212-213.

Perencanaan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menentukan tujuan organisasi.

⁷⁸³ *Ibid.*, hlm.7.

⁷⁸⁴ Muladi, "Seminar Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Op. Cit.*, hlm.3.

awareness).⁷⁸⁵ Menurut Taverne sebagaimana dikutip oleh I Made Gelgel, bukan rumusan undang-undangnya yang menjamin kebaikan pelaksanaan hukum acara pidana, tetapi hukum acara pidana yang jelek dapat menjadi baik, apabila pelaksanaannya ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik.⁷⁸⁶

Keterpaduan sistem peradilan pidana harus diarahkan pada penanggulangan kejahatan yang berlandaskan *precise justice* .yang mengandung unsur *precise, and minute fact finding justice, managed by a group of well trained and hard working professionals* meskipun sulit di dalam pengimplementasiannya terutama karena sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terbuka.⁷⁸⁷

Pertama, pada dasarnya hukum itu mempunyai kekuatan memaksa yang dapat diterima oleh masyarakat luas yang bersumber pada pranatanya dan penegakan hukumnya. Oleh sebab itu, dimensi moral harus dimasukkan ke dalam dua hal tersebut di atas agar dapat menjamin terlaksananya penegakan hukum secara baik dan guna memberi perlindungan pada masyarakat luas. Yang kesemuanya itu beroperasi melalui aparat penegak hukum yang berada dalam wadah suatu lembaga/organisasi. Menurut Muladi, sikap *fragmentaris* dalam penegakan hukum tidak akan terjadi, apabila aparat penegak hukum dilandasi visi dan misi yang sama bahwa sistem peradilan pidana pada dasarnya mempunyai tujuan akhir yakni mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan sosial (*social protection*). Masing-masing struktur penegak hukum sebenarnya hanya merupakan subsistem dari sistem yang besar, yang kesendiriannya tidak akan bermakna apa-apa. Dalam hal demikian, pendidikan para penegak hukum

⁷⁸⁵ *Loc.Cit.*

⁷⁸⁶ I Made Gelgel, *Op. Cit.*, hlm.12.

⁷⁸⁷ *Ibid.*, hlm.92-93.

yang relatif terintegrasi dapat memecahkan sebagian kendala.

Kedua, pengaturan tentang perlindungan korban kejahatan dalam hukum pidana materiil maupun dalam hukum pidana formal, terutama tentang restitusi sebagai pidana alternatif serta kemudahan dalam *access to justice and fair treatment*.⁷⁸⁸ Di samping adanya *Code of Conduct* yang bersifat sektoral, perlu secara integral diatur tentang *Code of Conduct* penegak hukum Indonesia yang mengacu pada *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*.⁷⁸⁹ Penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni :

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa ada kecualinya.
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual (hak asasi manusia).
- 3) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁷⁹⁰

⁷⁸⁸ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.18.

⁷⁸⁹ *Ibid.*, hlm.19..

⁷⁹⁰ *Ibid.*, hlm.58.

Ketiga, untuk mewujudkan peradilan pidana yang baik dan berwibawa harus mengandung hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mencerminkan asas-asas dasar prosedural, yang terdiri dari :
 - a. penyadaran bahwa kewenangan untuk menangani tindak pidana merupakan kewenangan negara.
 - b. pemantaban mengenai apa yang dinamakan *mechanism for juridical control*.
 - c. penetapan kriteria-kriteria yang jelas terhadap yang dimaksud dengan *discretionary powers*.
 - d. penegakan prinsip kebebasan peradilan pidana (*independence judiciary principle*).
- 2) Mencerminkan asas-asas prosesual, yang terdiri dari :
 - a. penyadaran bahwa setiap perseorangan dan lembaga baik publik maupun privat harus bekerja sama dengan lembaga peradilan apabila diminta.
 - b. penghindaran terjadinya penundaan yang tidak beralasan (*undue delay*).
- 3) Menjamin perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, yang terdiri dari:
 - a. adanya jaminan bahwa tersangka didampingi penasihat hukum sejak tahap pemeriksaan pendahuluan, kecuali yang bersangkutan menolak.
 - b. pelaksanaan hak untuk didampingi penerjemah apabila diperlukan.

- c. pelarangan terhadap penggunaan kekerasan, ancaman, iming-iming dan sebagainya untuk memperoleh pengakuan dari tersangka/terdakwa.
- d. penetapan sanksi pidana atau administratif (disiplin) yang tegas kepada para penegak hukum yang melanggar asas-asas peradilan.
- e. keharusan penolakan oleh pengadilan terhadap bukti-bukti yang diperoleh secara tidak sah.
- f. jaminan terhadap dimungkinkannya bantuan hukum pada setiap tahap peradilan pidana yang dipilih secara bebas, termasuk pada saat yang bersangkutan harus menjalani pidananya.
- g. adanya jaminan terhadap kerahasiaan komunikasi antara terdakwa dengan penasihat hukumnya.
- h. adanya jaminan negara terhadap kebebasan praktik profesional penasihat hukum (pengacara praktik/advokat) .
- i. asas proporsionalitas dalam penggunaan upaya-upaya paksa hendaknya selalu digunakan dengan mempertimbangkan secara khusus gravitas untuk tindak pidananya dengan segala konsekuensinya.
- j. asas *speedy trial* sedapat mungkin harus selalu ditegakkan.
- k. penahanan hendaknya selalu memperhitungkan keabsahan penahanan dan kebutuhan akan penahanan terhadap tersangka/terdakwa (*ultima ratio principles*).
- l. tindakan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia harus dihindarkan dalam penahanan.

- m. peradilan *in absentia* sedapat mungkin harus dihindarkan.
 - n. saksi ahli sedapat mungkin harus diajukan ke depan persidangan.
 - o. harus ada jaminan terhadap asas praduga tidak bersalah dan asas *in dubio pro reo*.
 - p. negara harus membuat pengaturan tentang kemungkinan untuk perbaikan, apabila terjadi *judicial error* atau *malfunctioning of the administration of justice*.
- 4) Menjamin pemenuhan hak-hak korban kejahatan. Korban harus selalu mendapatkan pelayanan dan bantuan yang diperlukannya di dalam memperoleh keadilan dan mengatasi akibat-akibat negatif yang timbul karena tindak pidana yang dialaminya.
- 5) Penyadaran tentang kewajiban negara di dalam memberikan keadilan. Negara sebagai pemegang kekuasaan wajib menyelenggarakan latihan-latihan terpadu untuk menghasilkan penegak-penegak hukum yang profesional, berintegritas moral yang tinggi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas tersebut, di samping pelbagai hukum positif yang sudah ada, kiranya perlu dikaji asas-asas yang terkandung di dalam:
- a. RUU-KUHP dan RUU-KUHAP.
 - b. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*.
 - c. *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.
 - d. *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*.
 - e. *Principles of Medical Ethics Relevant to the Role of Health*

Personnel, Particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

- f. *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of those Facing the Death Penalty.*
- g. *UN-SMR for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules).*
- h. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.*
- i. *Basic Principles on the Independence of the Judiciary.*
- j. *International Bill of Human Rights.*⁷⁹¹

Keempat, sedangkan di dalam bidang pelaksanaan pidana, antara lain:

- 1) membantu pemecahan masalah-masalah sosial dan hukum yang dihadapi oleh narapidana;
- 2) membantu menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum dan kesadaran keadilan masyarakat;
- 3) membantu tata laksana pemasyarakatan dalam usahanya menuju kepada tercapainya reintegrasi sosial antara terpidana dan masyarakat.⁷⁹²

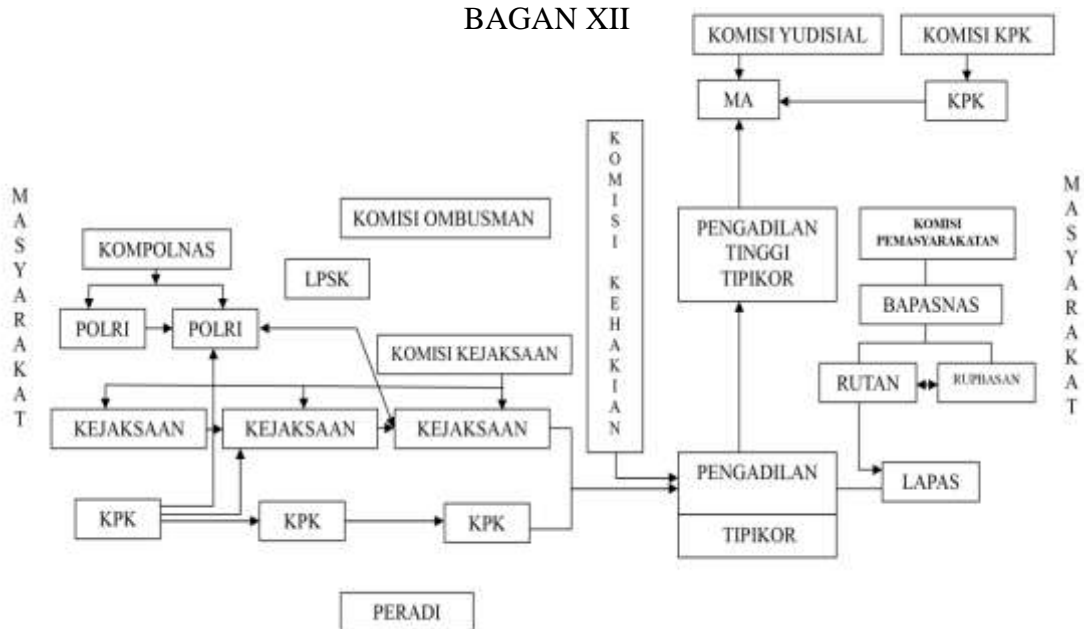
Tujuan organisasi, yaitu tujuan sistem peradilan pidana perlu dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

⁷⁹¹ *Ibid.*, hlm.217-219.

⁷⁹² Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.103-104.

kelembagaan secara keseluruhan dari subsistem sistem peradilan pidana baik itu tujuan jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Dalam sistem peradilan pidana dalam keadaan luar biasa (darurat korupsi), penyidikan dilakukan oleh Penyidik POLRI dan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan dengan pengawasan dari KPK. Pengawasan dari KPK dengan maksud dapat mengambil alih tugas penyidikan dan/atau penuntutan dari POLRI/Kejaksaan. Pemeriksaan sidang pengadilan oleh Hakim Tipikor, pemeriksaan tingkat banding oleh Hakim Tipikor Tingkat Banding dan pemeriksaan tingkat kasasi oleh Hakim Agung Tipikor. Pada tahap eksekusi ada BAPASNAS yang membawahi RUTAN dan RUPBASAN.

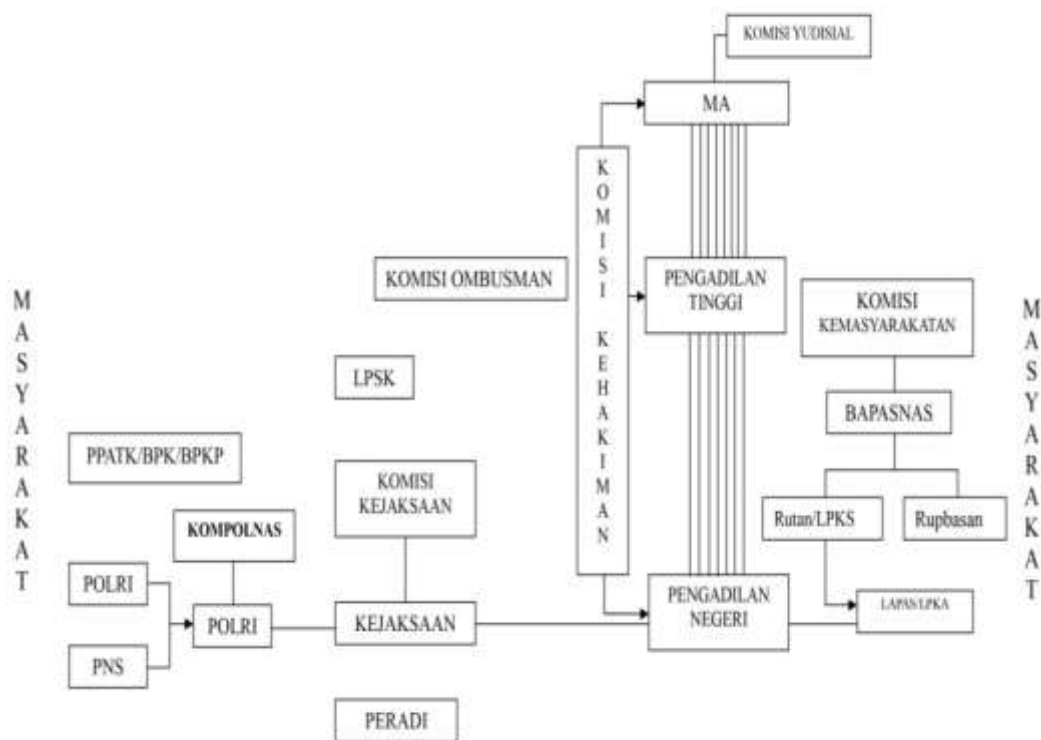
BAGAN XII



Pada bagian lain, dalam sistem peradilan pidana dalam keadaan normal, penyidikan harus terpusat pada POLRI, sehingga Penyidik lain selain POLRI harus ditempatkan sebagai PPNS atau Penyidik bukan PPNS yang bekerja di bawah koordinasi dan

supervisi Penyidik POLRI. Penuntutan hanya terpusat pada Kejaksaan. Pemeriksaan di sidang pengadilan hanya ada satu pengadilan dengan beberapa kamar, seperti kamar pelanggaran HAM yang berat, kamar tindak pidana korupsi, kamar anak, kamar tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup, kamar tindak pidana perikanan. Adanya lembaga baru yaitu BAPASNAS yang membawahi RUTAN dan RUPBASAN.

BAGAN XIII



b. Pengelolaan.

Pengelolaan (*organizing*) biasanya dilakukan setelah perencanaan dan mencerminkan bagaimana organisasi mencoba mewujudkan perencanaan. Pengelolaan mencakup menentukan tugas, mengelompokkan tugas, mendelegasikan otoritas dan mengalokasikan

sumber daya di seluruh organisasi.⁷⁹³ Keterampilan bermasyarakat suatu organisasi dikenal dengan istilah perilaku organisasi (*organizational behavior*) yang oleh Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge disebut sebagai suatu studi mengenai apa yang orang-orang lakukan dalam sebuah organisasi dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kinerja organisasi. Beberapa tema/topik di dalam perilaku organisasi, antara lain : motivasi, perilaku dan kekuasaan pemimpin, komunikasi interpersonal, struktur dan proses kelompok, pengembangan dan persepsi sikap, proses perubahan, konflik dan negosiasi serta rancangan kerja.⁷⁹⁴ Pendekatan sistemik mengharuskan keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing subsistem ke arah tercapainya tujuan bersama yang harus dihayati bersama serta membutuhkan adanya *konsultasi periodik* dan koordinasi bersama.⁷⁹⁵ Menurut Pasal 4 KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Kemudian, dalam Pasal 5 ayat (1) dan

(1) KUHAP dijelaskan, sebagai berikut :

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang;
 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. mencari keterangan dan barang bukti;
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

⁷⁹³ *Loc. Cit.*

⁷⁹⁴ Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, 2015, *Organizational Behavior*, Pearson Education Inc., New Jersey, USA, Terjemahan Ratna Saraswati dan Febriella Sirait, *Perilaku Organisasi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hlm.5-6.

⁷⁹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Kedua, Op. Cit.*, hlm.140-147.

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledaha dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Selanjutnya dalam Pasal 11 KUHAP, dinyatakan sebagai berikut:

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Kemudian, di dalam Pasal 12 KUHAP dikatakan, sebagai berikut :

(1) Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Adapun tugas dari penyidik adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: (1). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang,
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
 - i. mengadakan penghentian penyidikan,
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Sedang dalam Pasal 8 ayat (1) KUHAP ditegaskan, sebagai berikut:

Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Sedangkan mengenai tugas penuntutan dilaksanakan oleh jaksa

yang diberi wewenang oleh undang-undang (Pasal 13 KUHAP).

Adapun tugas dari penuntut umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 KUHAP, adalah sebagai berikut :

Pasal 14

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Tugas penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan

undang-undang (Pasal 15 KUHAP), sama seperti Penyelidik, Penyidik Pembantu dan Penyidik yang mempunyai tugas di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pasal 9 KUHAP).

Tugas Pengadilan Negeri adalah berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya atau dalam keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam undang-undang (Pasal 84 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) KUHAP, Pasal 85 dan dan Pasal 86 KUHAP). Sedangkan, Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding (Pasal 87 KUHAP). Adapun, Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi (Pasal 88 KUHAP), sekaligus menjadipengadilan tertinggi bagi semua lembaga pengadilan.

Tugas RUTAN adalah sebagai tempat tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Adapun, tugas RUPBASAN adalah sebagai tempat benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan , penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk

barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim (Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana⁷⁹⁶ dan Anak Didik Pemasarakatan⁷⁹⁷ (Pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan). BAPAS adalah pranata (tempat) untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan (Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan). BAPASNAS menggantikan kedudukan kedua lembaga tersebut dengan perluasan terhadap semua jenis pidana. Sumber daya manusia

c. Kepemimpinan.

Menurut George R. Terry sebagaimana dikutip oleh Soehardi Sigit, *leadership* (kepemimpinan) *is the relationship in which one person, the leader, influences others to work together willingly on related task to attain that which the leader desire*. Sedangkan Robert Tanebaum mendefinisikan *leadership* sebagai *interpersonal influence excercised in a situation and directed, through the communication process, toward the*

⁷⁹⁶ Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Pasal 1 butir ke-7 UU Negara R.I. Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan).

⁷⁹⁷ Istilah Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil) sekarang ini sudah tidak ada.

attainment of specialized goal or goals. Adapun Koontz and O'Donnell mendefinisikan *leadership* sebagai *as the art of inducting subordinates to accomplish the assignments with zeal and confidence*.⁷⁹⁸

Kepemimpinan (*leading*) berarti menggunakan pengaruh untuk memotivasi *employee* guna mencapai tujuan-tujuan organisasional. Kepemimpinan berarti menciptakan nilai-nilai dan budaya bersama, mengomunikasikan tujuan-tujuan kepada *employee* di seluruh organisasi serta menyuntikkan semangat untuk memperlihatkan kinerja tertinggi kepada *employee*. Kepemimpinan mencakup proses memotivasi seluruh divisi, seluruh lembaga dan seluruh subsistem, di samping para individu (*employee*) yang bekerja secara langsung dengan para manajer (manajer puncak, manajer menengah ataupun manajer lini pertama).⁷⁹⁹ Dalam manajemen terdapat teknik-teknik yang kaya dengan nilai-nilai estetika kepemimpinan dalam mengarahkan, memengaruhi, mengawasi dan mengorganisasikan semua komponen yang saling menunjang untuk tercapainya tujuan yang dimaksudkan.⁸⁰⁰ Perilaku lembaga-lembaga pendukung sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri daripada kepentingan bersama dapat menambah kesulitan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana dalam usaha mewujudkan suatu keterpaduan. Di samping itu, instansi penegak hukum telah berubah menjadi suatu kelompok elit tertentu yang secara eksklusif memiliki nilai-nilai sendiri yang berlaku bagi para anggotanya demi kepentingan tersebut. Intervensi terhadap nilai-nilai demikian dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi kelompok serta adanya pengaruh pemegang kekuasaan membuat kelompok-kelompok demikian menjadi berhati-hati dalam setiap aktivitas mereka agar tidak mengganggu

⁷⁹⁸ Suhardi Sigit, 1983, *Teori Kepemimpinan dalam Manajemen*, Penerbit Armurrita, Yogyakarta , hlm. 2.

⁷⁹⁹ Ricard L. Daft, hlm.8.

⁸⁰⁰ H.M. Anton Athoillah, hlm.16.

aktivitas mereka.⁸⁰¹

Marshall Sashkin dan Molly G. Sashkin dengan mengutip pendapat James Mc Gregor Burns mengemukakan, tipe-tipe kepemimpinan mulai dari kepemimpinan kharismatik; kepemimpinan transformasional, para pemimpin mentransformasikan para pengikutnya menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih mampu mengarahkan dirinya sendiri; dan kepemimpinan transaksional, sebatas sebuah transaksi antara seorang pemimpin dengan pengikut atau bawahan.⁸⁰²

Tabel IV

Pola Hubungan Pemimpin-Bawahan Menurut Tipe Kepemimpinan

Tipe Kepemimpinan	Kepemimpinan Karismatik	Kepemimpinan Transaksional	Kepemimpinan Transformasional
Hasil kepemimpinan	Kepatuhan. Dicapai melalui identifikasi diri dengan pemimpin.	Kinerja. Diperoleh melalui imbalan dan/atau hukuman.	Tindakan independen. Dituntun oleh internalisasi nilai-nilai bersama.
Motif kekuasaan pemimpin	Kontrol atas orang lain.	Kontrol bersama orang lain.	Pemimpin dan bawahan yang diberdayakan dituntun oleh suatu visi bersama.
Motif kekuasaan bawahan	Pengikut yang memiliki ketergantungan	Orang-orang yang berperstasi secara independen.	Saling tergantung bawahan yang diberdayakan sebagai mitra kerja.

Marshall Sashkin dan Molly G. Sashkin Th.2003

Keterangan : tiga pola interaksi pemimpin-pengikut/bawahan

Kepemimpinan harus bisa memotivasi sumber daya-sumber daya

⁸⁰¹ Douglas Hay dalam *Property, Authority and The Criminal Law* dalam buku *Law and Ideology*.

⁸⁰² Marshall Sashkin dan Molly G. Sashkin, 2011, *Leadership That Matters*, 2003, Terj. Rudolf Hutaeruk, *Prinsip-prinsip Kepemimpinan*, Penerbit Erlangga, hlm. 31-35 dan 77.

organisasional agar tercapai nilai-nilai budaya bersama. Organisasi yang mengemban tugas kepemimpinan dalam sebuah organisasi diharapkan menetapkan tujuan-tujuan dan berpartisipasi dalam komunikasi serta dalam proses pengambilan keputusan.⁸⁰³ Henry Fayol sebagaimana dikutip oleh Soehardi Sigit berpendapat terdapat syarat-syarat kualitas untuk menjadi manajer (pemimpin), yaitu :

- (1).fisikal (sehat, kuat dan energik, perilaku);
- (2).mental (kemampuan untuk mengerti dan belajar, kekuatan mental dan kemampuan menyesuaikan);
- (3).moral (energik, kejujuran dan kemauan untuk menerima tanggung jawab, inisiatif, cekatan dan setia, bermartabat);
- (4).edukasional (pengenalan secara umum terhadap berbagai masalah yang tidak termasuk fungsi yang dilaksanakan);
- (5).teknikal (khusus tugasnya); dan
- (6).pengalaman (yang timbul dari kerja wajar).⁸⁰⁴

Kepemimpinan (Indonesia) yang berasal dari Astha brata (delapan watak) mengajarkan watak, sekaligus perbuatannya, gayanya atau lakunya (*style*), yaitu :⁸⁰⁵

- (1).Watak (Sifat) Bumi, yaitu selalu berbudidarma suka memberikan kesenangan kepada orang. Yang dibudidarmakan itu ialah kekayaan yang dihasilkan oleh dirinya.
- (2).Watak (Sifat) Air atau Samudra, yaitu selalu dapat menampung segala

⁸⁰³ Raymond J. Burby, Tanpa Tahun, *Prinsip-prinsip Pokok Leadership (Kepemimpinan)*, terj., M. Manullang, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 24.

⁸⁰⁴ Suhardi Sigit, 1982, *Perkembangan Pikiran-pikiran Manajemen dan Pendekatan-pendekatannya*, Penerbit Armurrita, Yogyakarta, hlm. 22.

⁸⁰⁵ Suhardi Sigit, 1983, *Teori Kepemimpinan dalam Manajemen*, Op. Cit., hlm. 53-55.

macam persoalan tanpa emosional, yang berarti penuh kesabaran, penuh memberi maaf, tanpa dendam. Dalam bahasa Jawa : *anggelarake samudra apura paramarta, angenaki ati ora rengatan, cinidhukan pulih ora ana labete.*

(3).Watak (Sifat) Api, yaitu dapat membersihkan segala sesuatu yang kotor, memanaskan kepada yang kedinginan, memberi semangat hidup bagi yang lemah, jika diambil tidak akan berkurang, dan jalannya dapat lambat dapat pula cepat seperti kilat. Bersikap adil, tetap tegak dan tegas tidak pandang bulu.

(4).Watak (Sifat) Angin, yaitu tiada henti-hentinya selalu mengadakan pengamatan, melihat segala perilaku dan tingkahnya orang, dapat bergaul dengan siapapun dan di manapun, tanpa mengingat waktu, tanpa pamrih apapun di dalam menyelami dan melayani kehidupan orang banyak.

(5).Watak (Sifat) Matahari, yaitu tidak tergesa-gesa (grusa-grusu) dalam melaksanakan kehendak, segala sesuatu direncanakan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan setapak demi setapak (detik demi detik) tetapi pasti dan tidak mengalami kesukaran. Dalam bahasa Jawa : *sareh ing karsa rereh ing pangarah, ora sadaya-daya antuka sabarang kang diarah, lakune angarah-arrah, patrape angirih-irih, pamrihe ora rekasa anggone amisena.*

(6).Watak (Sifat) Bulan, yaitu muka berseri-seri menunjukkan halusnya budi, dapat membuat orang turut tenteram, dapat memberi penerang-

an kepada orang yang sedang dalam kegelapan (kegelapan hati) dan membuat orang yang sedih menjadi gembira.

(7).Watak (Sifat) Bintang, yaitu tetap tegak di tempatnya, tidak takut menghadapi bahaya, tidak berubah-ubah kehendaknya, tabah hatinya, terus terang sehingga dapat dijadikan pedoman dan suri tauladan bagi orang lain (rakyat).

(8).Watak (Sifat) Mendhung (Awan Hitam), yaitu berani memberi hukuman, tetapi juga berani memberi hadiah/ganjaran/nugraha kepada siapapun juga. Diartikan berpengaribawa, tetapi bermanfaat bagi orang banyak (rakyat).

Ki Hajar Dewantara mencetuskan tiga gaya kepemimpinan, yaitu :

- (1).*Hing ngarsa sung tuladha*, artinya seorang pemimpin, di depan ia harus menjadi suri tauladan;
- (2).*Hing madya mangun karsa*, artinya seorang pemimpin, di tengah-tengah yang dipimpin ia harus dapat memberi semangat atau menimbulkan kehendak bagi yang dipimpin;
- (3).*Tut wuri handayani*, artinya seorang pemimpin, di belakang yang dipimpin ia harus mengawasi supaya bersama-sama yang dipimpin dapat mencapai tujuan dengan selamat.

Tiga gaya kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara tersebut, kemudian dikembangkan menjadi sebelas asas kepemimpinan dalam Tentara Nasional Indonesia,⁸⁰⁶ sebagai berikut :

- (1).Takwa, yaitu taat dalam menjalankan perintah-perintah dan menjauhi

⁸⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 56-57.

larangan-larangan Tuhan;

(2).*Hing ngarsa sung tuladha*;

(3).*Hing madya mangun karsa*;

(4).*Tut wuri handayani*;

(5).*Waspada purba wisesa*, yaitu harus selalu waspada dan oleh sebab itu perlu penglihatan yang tajam ke depan dan melakukan koreksi terhadap yang sudah dilakukan sejak awal sampai akhir;

(6).*Ambeg parama arta*, yaitu dapat mendahulukan sesuatu yang lebih penting dari yang lainnya;

(7).*Prasaja*, yaitu bersikap wajar, sederhana dan tidak berlebihan;

(8).*Satya*, yaitu loyal (setia) baik terhadap atasan, teman, bawahan dan organisasinya (satunya);

(9).*Gemi nastiti*, yaitu melakukan sesuatu dengan hemat dan berhati-hati;

(10).*Belaka*, yaitu jujur dan terbuka terhadap pihak lain; dan

(11).*Legawa*, yaitu kerelaan dan keikhlasan menyerahkan sesuatu kepada pihak lain (misalnya menyerahkan jabatan).

d. Pengendalian Sumber Daya-Sumber Daya Organisasional.

Pengendalian (*controlling*) berarti memonitor aktivitas karyawan, menentukan apakah organisasi sejalan dengan tujuannya dan melakukan/membuat koreksi-koreksi apabila diperlukan. Manajer harus memastikan bahwa organisasi (lembaga atau subsistem) mereka bergerak menuju tujuan-tujuannya. Berbagai kecenderungan (*trend*) pemberdayaan telah mendorong banyak organisasi untuk mengutamakan pelatihan *employee* untuk memonitor dan mengoreksi diri sendiri daripada melakukan pengendalian atas-bawah. Fungsi hukum yang sangat

menonjol adalah sebagai sarana pengintegrasi kepentingan-kepentingan sehingga supremasi hukum merupakan *prakondisi* sistem pemerintahan yang demokratis, oleh sebab itu *elemen-elemen* pendukung sistem peradilan pidana serta atas perlunya *koordinasi vertikal* dan *horisontal* sehingga dapat mewujudkan pengadilan sebagai “benteng terakhir keadilan” yang memenuhi syarat “sidang pengadilan yang bebas” dan “hakim yang tidak berpihak”, hakim yang menduduki posisi sentral harus selalu menjaga keserempakan, keselarasan dan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Di samping itu, penegak hukum menempati posisi sentral dalam penegakan hukum pidana sehingga pelaksanaan penegakan hukum pidana harus dilaksanakan oleh aparaturnya yang profesional, berintegritas moral dan berdedikasi yang tinggi, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengharuskan penghayatan terhadap tujuan bersama dan *konsultasi periodik* atau koordinasi bersama serta kuatnya penegakan kode etik profesi guna terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa serta pendidikan terhadap para ekspertis hukum diarahkan pada profesionalisme dan keterpaduan. Perencanaan disertai adanya integrasi yang bermakna *the achievement of unification through shared norms and values* atau “prestasi bersama atas kesepakatan kesediaan menerima norma dan nilai-nilai yang dihayati bersama” yang tidak hanya bersifat fisik belaka melainkan juga bersifat abstrak, misalnya: Makehjapol.⁸⁰⁷ Pengawasan internal dilakukan terhadap masing-masing lembaga subsistem dari sistem peradilan pidana diserahkan pada mekanisme masing-masing secara *intern*. Pengawasan eksternal, seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial ditingkatkan kinerjanya/kewenangannya dengan titik sentralnya pada Komisi Yudisial.

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga memegang manajemen di bidang administratif, personal dan finansial serta sarana dan prasarana. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggung jawab dan tantangan, karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tanggung jawab Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud termaktub di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian *direvisi* melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan terakhir dengan melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁸⁰⁸ Justifikasi tersebut juga termuat di dalam berbagai Undang-undang, antara lain : Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung *jo* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum *jo* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Tugas dan peranan Mahkamah Agung menjadi semakin menantang, ketika kian banyak pengadilan khusus dibentuk di bawah suatu lingkungan peradilan, antara lain : Pengadilan Anak, Pengadilan

⁸⁰⁸ Mahkamah Agung RI, 2010, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, hlm.1.2.

HAM dan Pengadilan Tipikor. Selain itu, ada berbagai dinamika yang secara *intensif* berkembang yang harus dihadapi dengan langkah *persuasif*, *antisipatif* dan jika perlu dengan tindakan *korektif*.

Misalnya, Mahkamah Agung harus melakukan langkah-langkah *konkrit* berkaitan dengan adanya upaya dan kebijakan yang lebih serius mengenai pemberantasan mafia hukum yang dicanangkan Presiden melalui pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum pertanggal 31 Desember 2009.⁸⁰⁹

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, Mahkamah Agung telah melaksanakan berbagai program dengan capaian, antara lain :

- a. program reformasi birokrasi yang berfokus pada peraturan organisasi, perbaikan tata kerja, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan sistem remunerasi dan manajemen dukungan teknologi serta informasi.
- b. pembentukan kelompok-kelompok kerja (POKJA) pembaruan peradilan khusus untuk mempercepat implementasi agenda prioritas pembaruan peradilan.
- c. terkikisnya tunggakan perkara dari 20.314 perkara pada tahun 2004 hingga 11.479 perkara pada tahun 2009.
- d. upaya meningkatkan kualitas hukum dan aparat peradilan melalui pembangunan Pusat Pendidikan di Megamendung Jawa Barat dan pembenahan kurikulum serta mengembangkan kualifikasi pengajar.
- e. perbaikan sistem *rekrutmen* calon hakim dan perbaikan seleksi Ketua Pengadilan.
- f. mendorong keterbukaan informasi melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang

⁸⁰⁹ *Ibid.*, hlm.2-3.

Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

- g. penguatan sistem pengawasan internal dan penguatan hubungan dengan Komisi Yudisial.⁸¹⁰

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2008 keberhasilan program dan capaian yang diperoleh baru mencapai 30%. Dari penilaian organisasi atau *Organizational Diagnostic Assesment (ODA)* pada tahun 2009 kinerja lembaga peradilan tetap mendapat sorotan dari berbagai kalangan, antara lain mengenai : informasi proses peradilan yang tertutup, biaya berperkara tinggi, masih sulitnya akses masyarakat miskin dan terpinggirkan serta proses penyelesaian perkara yang dirasakan masih sangat lama.⁸¹¹

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) yang dituangkan di dalam Cetak Biru yang baru yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan meliputi pembenahan di seluruh aspek peradilan termasuk mengakomodasi inisiatif pembaruan peradilan pada pengadilan tingkat bawah. Cetak Biru Pembaruan Pengadilan 2010-2035 ini memuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Cetak Biru ini diarahkan melalui pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (*the framework of courts excellence*) yang terdiri dari 7 (tujuh) area peradilan yang agung yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni *driver* (pengarah/pengendali), *system and enabler* (sistem dan penggerak) serta *result* (hasil), yaitu :

- a. kepemimpinan dan manajemen pengadilan (komponen *driver*);
- b. kebijakan-kebijakan pengadilan;

⁸¹⁰ *Ibid.*, hlm.3.

⁸¹¹ *Loc. Cit.*

- c. sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keuangan;
- d. penyelenggaraan persidangan (b, c dan d adalah komponen *system and enabler*);
- e. kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan;
- f. pelayanan pengadilan yang terjangkau;
- g. kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan (e, f dan g adalah komponen *result*).⁸¹²

Proses *ODA* melibatkan seluruh pemangku kepentingan Pengadilan. Berdasarkan hasil *ODA* ditemukan permasalahan yang mengemuka dari Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya terkait dengan dua fungsi, yaitu fungsi peradilan dan fungsi pengawasan. Sehubungan dengan perbaikan internal, maka fungsi administrasi dan pengaturan menjadi sangat penting untuk membentuk organisasi yang kuat. Dari semua itu, diperlukan adanya pemimpin yang mampu menjadi model keteladanan.⁸¹³ Untuk itu Mahkamah Agung telah berhasil merumuskan visi badan peradilan. Adapun Visi Badan Peradilan yang telah berhasil dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009 adalah **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”**.⁸¹⁴

Adapun Misi Badan Peradilan sebagaimana dirumuskan di dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah, sebagai berikut :

- a. menjaga kemandirian badan peradilan;
- b. memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- d. meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁸¹⁵

⁸¹² *Ibid.*, hlm.3-4.

⁸¹³ *Ibid.*, hlm.5.

⁸¹⁴ *Ibid.*, hlm.13.

⁸¹⁵ *Ibid.*, hlm.15.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang nantinya akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya hukum dari badan peradilan. Nilai-nilai utama yang dimaksud adalah, sebagai berikut :

1. kemandirian kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), yang terdiri dari kemandirian institusional (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), yaitu bahwa Badan Peradilan adalah lembaga yang mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, serta kemandirian fungsional (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), yaitu bahwa setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. integritas dan kejujuran (Pasal 24A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
3. akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
4. responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 c Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
5. keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 13 dan Pasal 52

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

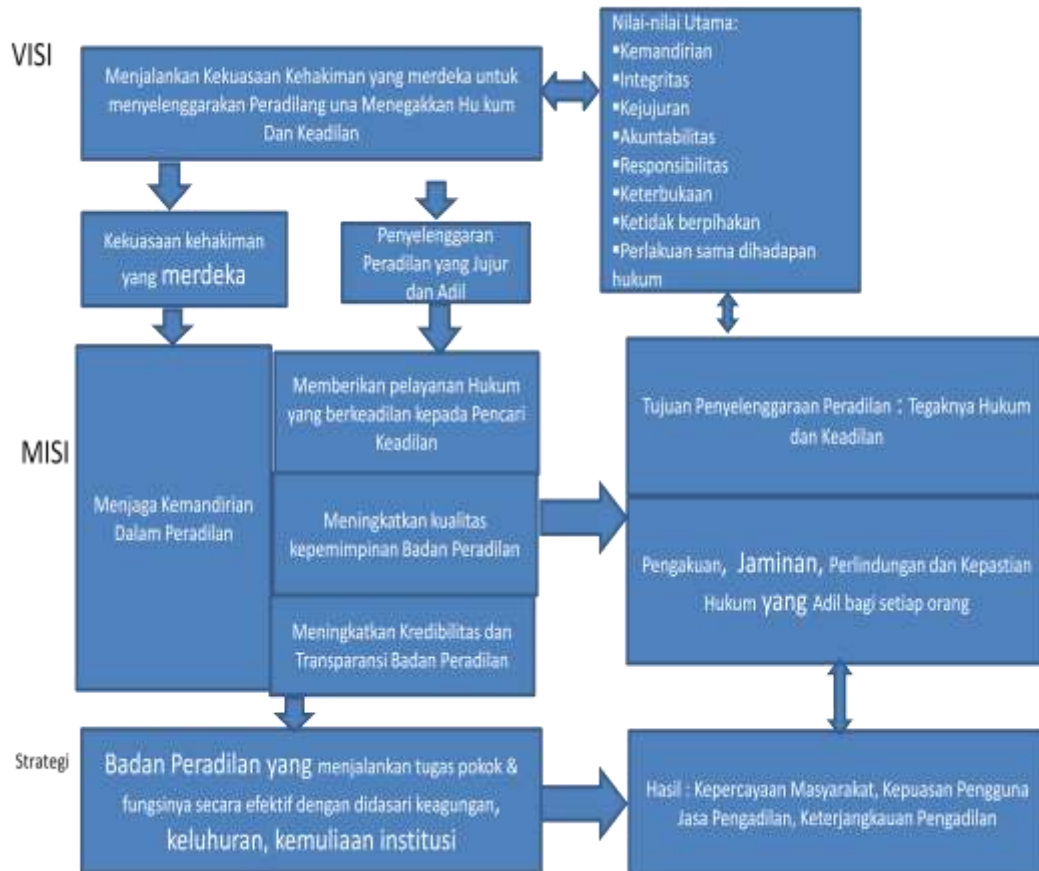
6. ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
7. perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).⁸¹⁶

Dengan menggunakan bagan maka visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu Organisasi dapat digambarkan sebagai berikut :

⁸¹⁶ *Ibid.*, hlm.18-20.

BAGAN XIV

VISI DAN MISI MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI ORGANISASI



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini belum menunjukkan keterpaduan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan lembaga/proses peradilan pidana di Indonesia :
 - a. belum terpadu, karena :
 - 1) masih tampak adanya gejala *fragmentaris* dan *instansional sentris* pada sub-subsistem pendukung sistem peradilan pidana, yang bahkan dapat terjadi di antara lembaga yang terdapat di dalam subsistem tersebut;
 - 2) belum/tidak adanya *the top of leader* dari keseluruhan sistem peradilan pidana;
 - 3) proses pemeriksaan perkara masih kurang terkoordinasi secara baik karena *ego sektoral* pada masing-masing instansi sehingga mengabaikan asas *contante justitie*;
 - 4) masih adanya ketentuan hukum yang kurang jelas atau ketentuan hukum yang tumpang tindih;
 - 5) ketidaksinkronan, ketidakserasian dan ketidakharmonisan hubungan antar lembaga;
 - 6) belum/tidak adanya mekanisme pengawasan eksternal terhadap keseluruhan subsistem dalam system peradilan pidana;
 - 7) tidak berfungsinya *fungsi supervisi* dan *fungsi koordinasi* KPK dalam sistem peradilan pidana pemberantasan tindak pidana

korupsi;

- 8) belum/tidak adanya lembaga yang disertai tugas dan kewenangan menjalankan putusan atau pidana berikut siapa *leader*-nya.

b. belum mandiri, karena :

- 1) beberapa lembaga penegak hukum berada di bawah kekuasaan atau di bawah pengaruh lembaga eksekutif;
- 2) proses seleksi pimpinan lembaga penegak hukum yang mengharuskan adanya persetujuan dari DPR RI;
- 3) revisi terhadap peraturan perundang-undangan menjadi alat tawar politik dari fraksi-fraksi yang ada di DPR RI;
- 4) sistem/lembaga peradilan pidana belum terpadu sehingga mengakibatkan sistem/lembaga peradilan pidana belum mandiri.

c. belum berwibawa, karena :

- 1) masih banyak aparat penegak hukum yang hanya mengejar formalitas belaka (keadilan formal);
- 2) masih banyak aparat penegak hukum yang belum bekerja secara profesional;
- 3) masih adanya proses penyidikan yang terlalu bersifat memaksa sehingga bertentangan dengan asas *fair trial*;
- 4) masih sering terjadi adanya pemerasan yang dilakukan oleh kalangan aparat penegak hukum;
- 5) masih sering terjadi adanya *abuse of legal procedure* dan *abuse of power*;
- 6) pengabaian perintah Presiden selaku kepala Negara Republik Indonesia;
- 7) intervensi lembaga/fraksi DPR terhadap penanganan kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum;

- 8) sistem peradilan pidana belum terpadu dan mandiri sehingga mengakibatkan sistem peradilan pidana belum berwibawa.
- d. belum mencerminkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, karena :
 - 1) proses pemeriksaan masih sering kurang terkoordinasi secara baik sehingga mengesampingkan asas *contante justitie*;
 - 2) di dalam *lex generalis* tidak terdapat adanya pembatasan jangka waktu pemeriksaan untuk masing-masing tahap pemeriksaan. Agar sistem peradilan pidana dapat mencapai tujuan jangka pendek (resosialisasi, rehabilitasi dan reedukasi), tujuan jangka menengah (pengendalian kejahatan berupa preventif, represif dan kuratif) serta jangka panjang (kesejahteraan masyarakat) serta dapat menjamin keadilan, keamanan warga negara, menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat terhadap hukum yang berlaku, maka sistem peradilan pidana yang terpadu, mandiri, berwibawa, cepat, sederhana dan berbiaya ringan harus berhasil diwujudkan.
2. Untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu, mandiri, berwibawa, cepat, sederhana dan berbiaya ringan diperlukan adanya reformasi manajemen sistem peradilan pidana, dengan maksud agar :
 - a. memudahkan di dalam menilai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang suatu instansi penegak hukum;
 - b. memudahkan di dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh suatu instansi penegak hukum;
 - c. terwujud efektivitas dan efisiensi dari seluruh sistem peradilan pidana;
 - d. kembali atau menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum;
 - e. mencegah pelaku untuk lebih berani melakukan tindak pidana.

Dengan menggunakan pendekatan manajemen dari H.M. Anton Atoillah, bahwa terdapat aktivitas yang saling berhubungan, yang terdiri dari :

- a. sistem peradilan pidana merupakan organisasi (besar) yang menjadi wadah utama keberadaan manajer peradilan yang masih bersifat parsial yang dapat dibedakan dalam sistem peradilan pidana dalam keadaan normal dan dalam keadaan luar biasa;
- b. yang baru ada manajer masing-masing organisasi kecil dan belum ada manajer puncak untuk keseluruhan organisasi (organisasi besar);
- c. aturan main atau AD/ART masing-masing organisasi kecil dan belum ada AD/ART untuk keseluruhan organisasi (organisasi besar);
- d. tujuan sistem peradilan pidana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang belum ditetapkan sebagai tujuan organisasi kecil, karena merupakan bagian-bagian dari keseluruhan organisasi (organisasi besar);
- e. perencanaan yang di dalamnya terkandung berbagai program yang akan dilaksanakan, diarahkan pada perencanaan organisasi besar;
- f. pengarahan sumber daya manusia yang masih bersifat parsial (dalam organisasi kecil) dialihkan pada pengarahan sumber daya manusia dalam organisasi besar;
- g. teknik-teknik dan mekanisme pelaksanaan kegiatan organisasi (bersifat parsial) diarahkan pada mekanisme pelaksanaan kegiatan organisasi besar;

- h. pengawasan terhadap semua aktivitas organisasi agar tidak menyimpang yang dapat berupa pengawasan internal dan eksternal;
- i. sarana dan prasarana relatif sudah mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi;
- j. penempatan personalitas sesuai dengan keahlian atau profesionalitas pekerjaan masing-masing;
- k. pertanggungjawaban akhir dari semua aktivitas yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajiban personal organisasi kepada manajer puncak dan manajer puncak bertanggung jawab kepada rakyat.

Dengan menggunakan pendekatan perilaku organisasi dari Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, maka dapat dikemukakan upaya-upaya yang harus dilakukan agar terwujud adanya sistem peradilan pidana yang terpadu, mandiri dan berwibawa dengan berlandaskan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, antara lain sebagai berikut :

- a. Perencanaan, mengajukan usul perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi “payung” bagi sistem keorganisasian dalam masing-masing subsistem (organisasi-organisasi kecil) dengan meletakkan tujuan sistem peradilan pidana sebagai tujuan organisasi-organisasi kecil serta Mahkamah Agung sebagai *top leader*-nya, sehingga tidak ada masalah dalam hal terjadi “mutasi” sumber daya manusia;
- b. Pengelolaan, mencakup menentukan dan mengelompokkan tugas, mendelegasikan otoritas dan mengalokasikan sumber

daya organisasional;

- c. Kepemimpinan, yaitu menggunakan pengaruh untuk memotivasi sumber daya guna organisasional mencapai tujuan organisasi;
- d. Pengendalian Sumber-sumber Daya Organisasi, yaitu memonitor dan mengawasi aktivitas sumber daya organisasional serta sekaligus melakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan arah dari tujuan semula yakni tujuan sistem peradilan pidana.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan pada kesempatan ini berkaitan dengan tema penulisan hukum ini, sebagai berikut :

1. Seharusnya para aparat penegak hukum sering bertemu dalam pertemuan-pertemuan ilmiah yang diselenggarakan baik oleh kalangan akademisi ataupun praktisi guna menambah wawasan dalam pelaksanaan tugas mereka sehari-hari dan atasan harus memberi kesempatan yang sebesar-besarnya kepada mereka untuk dapat menghadirinya.
2. Hal-hal yang didapat dari pertemuan-pertemuan ilmiah sebagaimana tersebut di atas seharusnya dibahas bersama-sama di instansi mereka oleh para atasan mereka dengan dihadiri rekan-rekan sejawat mereka untuk bahan-bahan masukan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
3. Seharusnya dalam diri para aparat penegak hukum ada penghayatan atas kebersamaan sebagai satu kesatuan dari suatu sistem penegakan hukum pidana dan penanggulangan kejahatan yang terpadu.

4. Seharusnya dalam diri para aparat penegak hukum ada penghayatan bahwa peraturan perundang-undangan yang buruk apabila dilaksanakan dengan semangat penyelenggaraan yang baik akan menghasilkan kebaikan / keberhasilan dibanding dengan peraturan perundang-undangan yang baik tetapi dilaksanakan dengan semangat penyelenggaraan yang jelek.

C. IMPLIKASI

Dibutuhkan adanya *visi* dan *misi* bersama yang harus dihayati oleh aparat penegak hukum yang merupakan sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana. Visi dan misi bersama tersebut dapat dirumuskan dengan mencontoh pada visi dan misi badan peradilan yang telah berhasil dirumuskan oleh Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Adji, Oemar Seno, 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Cet.II, Jakarta : Penerbit Erlangga.

Adji, Oemar Seno dan Indriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Jakarta : Penerbit Diadit Media.

Afiah, Ratna Nurul, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta : Penerbit Akademika Pressindo.

Ali, Achmad, 2010, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel dalam Bidang Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Ali, Achmad, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cet. IV, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2012, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Ali, As'ad Said, 2010, *Negara Pancasila*, Cet. III, Jakarta : Penerbit Pustaka LP3ES.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Amin, S.M., 1971, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita.

Anonymous, 1975, *The Fisheries Law*, Tokyo, Japan : National Federation of Fishermen's Co-operative Associations.

- Anonymous, 1982, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta : Dep. Kehakiman Republik Indonesia.
- Anonymous, 1997, *Perjuangan Merebut Benteng Keadilan*, Jakarta : Tim Pembela Demokrasi Indonesia.
- Anonymous, 2000, *KUHAP Lengkap*, Cet. II., Jakarta : Sinar Grafika.
- Anonymous, 2002, *UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002)*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Anonymous, 2009, *Undang-Undang Peradilan Umum*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing.
- Anonymous, 2009, *Bunga Rampai : Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Komisi Yudisial Rep. Indonesia.
- Anonymous, 2010, *Himpunan Undang-Undang Tentang Tipikor, Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Agama dan PTUN*, Yogyakarta : Pustaka Fahima.
- Anonymous, 2012, *Refleksi daan Rekonstruksi Ilmu Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Thafa Media.
- Anonymous, 2015, *Bahan Bacaan Klinik Etik dan Hukum, Buku I Materi Hukum*, Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Anleu, Sharyn L. Roach, 2010, *Law and Social Change*, Second Edition, Los Angeles-London-New Delhi-Singapore : Sage Publication Ltd.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Cet. II, Bandung : Penerbit Widya Padjadjaran.

- Arifin, 2007, Pendidikan Anak Berkonflik Hukum, Model Konvergensi Antara Fungsionalis dan Religius, Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Arief, Barda Nawawi, Tanpa Tahun, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Penerbit CV. Ananta.
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2008, *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang : Penerbit Pustaka Magister.
- , 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Kencana

Prenada Media Group.

-----, 2009, *RUU KUHP Baru Sebuah Restruturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

-----, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

-----, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta : Penerbit Genta Publishing.

-----, 2012, *RUU KUHP Baru Sebuah Restukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

-----, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

-----, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*, Semarang : Pustaka Magister.

-----, 2015, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.X, Jakarta : Penerbit PT. Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi, 20013, *Manajemen Penelitian*, Edisi Revisi, Jakarta : Penerbit PT. Rineka Cipta.

- Aspinall, Edward and Greg Fealy Ed., 2010, *Soeharto's New Order and its Legacy, Essays in Honour of Harold Crouch*, Canberra, Australia : ANU E Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet.I., Jakarta : Penerbit Balai Pustaka.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. III, Jakarta : Konstitusi Press.
- Asyhadie, H. Zaeni dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Athoillah, M Anton, 2010, *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung : Penerbit Pustaka Setia.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung : Penerbit Bina Cipta.
- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Atmasasmita, Romli, 2009, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta : Penerbit PT. Fikahati Aneska.
- Atmasasmita, Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Kencana Prenada Media.

- Atmasamita, Romli, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Group.
- Backer, Lary Cata, 2007, *Harmonizing Law in an Era of Globalization, Convergence, Divergence and Resistance*, Durham, North Caroline : Caroline Academic Press.
- Baskoro, Bambang Dwi, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- , 2011, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Suatu Pengantar)*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2012, *Pengadilan Anak di Indonesia (Suatu Pengantar dan Reorientasi)*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Baskoro, Bambang Dwi, 2016, *Buku Ajar Hukum Eksekusi Pidana*, Semarang : LP2MP Universitas Diponegoro.
- Batubara, Marwan dkk., 2008, *Skandal BLBI : Ramai-ramai Merampok Negara*, Jakarta : Penerbit Haekal Media Center.
- Beccaria, Cesare, 2011, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Terj., Wahmuji, 1764, *An Essay on Crimes and Punishment*, Milan, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Blau, Peter M. Dan Marshall W. Meyer, Tanpa Tahun, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, Edisi II, Jakarta : UI Press.
- Brannen, Julia, 1999, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta : Fak. Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda.
- Budiardjo, Miriam, 1985, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia.
- Burby, Raymond J., Tanpa Tahun, *Prinsip-prinsip Pokok Leadership*

- (*Kepemimpinan*), terj. , M. Manulang, Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- Chambliss, William J. and Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order and Power*, Massachussets, California-London-Ontario : Addison-Wesley Publishing Company.
- Daft, Richard L., 2008, *New Era of Management* : New York, USA : Cengage Learning.(edisi terjemahan oleh Tita Maria Kanita. 2010. *Era Baru Manajemen*. Jakarta : Penerbit Salemba).
- Davis, Gordon B., 1974, *Management Information System Coceptual Foundation Structure and Development*, Tokyo-Sidney : Mc Graw-Hill.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka.
- Dermawan, Mohammad Kemal dan Mohammad Irvan Oli'i, 2015, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta : FISIP UI-Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta : Sinar Grafika.
- D.L., Chrysnanda, Tanpa Tahun, *Polisi Penjaga Kehidupan*, Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Dimyati, Khudzaifah, 2014, *Pemikiran Hukum : Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Genta Publishing.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut K.U.H.A.P.*, Bandung: Alumni.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*,

- Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XIV., Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Dreikurs, Rudolf dan Pearl Cassel, 1986, *Disiplin Tanpa Hukuman*, terj., *Discipline without Tears*, Bandung : Penerbit CV. Remadja Karya.
- Dunn, William N., 1988, *Analisa Kebijakan Publik*, Cet. III, terj., Muhadjir Darwis, *Public Policy Analysis*, Yogyakarta : Penerbit Hanindita Graha Widya.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho dan Marco P. Sumampouw Ed., 1997, *Manajemen dalam Era Globalisasi*, Jakarta : Penerbit Elex Media Komputindo.
- Dwiyanto, Agus, 2010, *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*, Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Dworkin, R.M., 2013, *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar*, terj., Yudi Santosa, Yogyakarta : Penerbit Merkid Press.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Taufiq, 2008, *Demokrasi Sama Dengan Tanggung Jawab*, Jakarta : Penerbit HIPASBI.
- Effendi, Taufiq, 2008, *Jati Diri Bangsa Indonesia, Menuju Indonesia Jaya*, Jakarta : Penerbit Exatama Mediasindo.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Jakarta : Pustaka Yustisia.

Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Malang : Penerbit Setara Press.

Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective* :New York: Russel Sage Foundation. (edisi terjemahan oleh M. Khozim. 2011. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Nusa Media).

Faisal, Sanapiah, 1981, *Dasar dan Teknik Menyusun Angket*, Surabaya : Penerbit Usaha Nasional.

Faisal, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang, Penerbit Yayasan Asih Asah Asuh Malang.

Farida, Ai Siti, 2011, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung : CV. Pustaka Setia.

Fisher, B. Aubrey, 1986, *Teori-teori Komunikasi, Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksional, dan Pragmatis*, terj. Soejono Trimo, *Perspective on Human Communication*, Bandung : Penerbit Remadja Karya

Friedrich, Carl Joachim, 2010, *Filsafat Hukum, Perspektif Historis*, Cet. III, terj., Raisul Muttaqien, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, Bandung : Penerbit Nusa Media.

Fukuyama, Francis, 2004, *The End of History and The Last Man*, terj. , M.H. Amrullah, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, Yogyakarta : Penerbit Qolam.

Gelinas, Jacques, 2003, *“Juggernaut Politics” : Understanding The Predatory of Globalization*, London, England : Oxford University Press.

Gie, The Liang, 1992, *Haluan Ilmu Bagi Pembangunan Nasional Indonesia*, terj., Achmad Marzuq Mas’udi, *Managing the Building of Science in a Developing Country : Science Policy for Indonesia’s National*

- Development, Yogyakarta : Penerbit Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi.
- , 1993, *Keadilan Sebagai Landasan Bagi Etika Administrasi Pemerintahan dalam Negara Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- Gumilang, A., 1991, *Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Bandung : Penerbit Angkasa.
- Gosita, Arif, 1983, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Edisi I., Jakarta : Penerbit Akademika Pressindo.
- , 2004, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Jakarta : Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Penerbit Bina Ilmu.
- Hadin, Ahmad Fikri, 2013, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Penerbit Genta Press.
- Hamzah, Andi, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Arikha Media Cipta.
- Hamzah, Amirudin, 2003, *Kebutuhan Surat dalam Praktek Proses Pidana (Proses Beracara)*, Cet. III, Bandung : C.V. Mandar Maju.
- Hamid, Hamrat dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Handoko, T. Hani, Tanpa Tahun, *Manajemen*, Edisi II, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UGM.

- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi II, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Hariani, Dyah, 2013, *Buku Ajar Asas-asas Manajemen*, Semarang : LP2MP Universitas Diponegoro.
- Harmon, Michael M. dan Richard T. Mayer, 2014, *Teori Organisasi Untuk Administrasi Publik*, terj., *Organization Theory for Public Administration*, Saut Pasaribu, Yogyakarta : Penerbit Kreasi Wacana.
- Hartono, M. Dimiyati, 1997, *Lima Langkah Membangun Pemerintahan yang Baik*, Jakarta : Ind.Hill-Co.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesiapada Akhir Abad Ke-20*, Cet.II, Bandung : Penerbit Alumni.
- Hay, Douglas, *Property, Authority and Criminal Law* dalam *Law and Ideology*.
- Himawan, Charles, 2006, *Hukum Sebagai Panglima*, Cet. II, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Hoefnagels, G. Peter, 1973, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland.

- Hoesein, Zainal Arifin, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Husein, Harun M., 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Penerbit Bayu Media Publishing.
- Ida, Laode, 2010, *Negara Mafia, Cet. II*, Yogyakarta : Penerbit Galangpress.
- Indrayana, Denny, 2008, *Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor*, Jakarta : Penerbit Buku KOMPAS.
- Isma'il, Fu'ad Farid dan Abdul Hamid Mutawalli, 2012, *Cara Mudah Belajar Filsafat (Barat dan Islam), Cet. II*, Yogyakarta : IRCiSoD.
- Isnaeni, Mohamad, 1971, *Hakim dan Undang-Undang*, Semarang : Penerbit Ikatan Hakim Indonesia Cabang Semarang.
- Isra, Saldi, 2009, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, Jakarta : Penerbit Buku KOMPAS.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2014, *Politik Hukum*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2014, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- J.L.K., Valerie dkk, 2000, *Wajah Hukum di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo*, SH, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Johansjah, J., 2008, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta : Kesaint Blanc.
- Joeniarto, 1984, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cet. II, Jakarta : Penerbit Bina Aksara.
- Jones, Charles O. , 1996, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Cet. III, terj. Ricky Istamto, *An Introduction to the Study of Public Policy*, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Kaligis, O.C., 2006, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Bandung : Penerbit PT. Alumni.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2014, *Sejarah Hukum di Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT. Suara Harapan Bangsa.
- Karjadi, M., 1979, *Tindakan dan Penyidikan di Tempat Kejadian Perkara*, Bogor : Penerbit Politeia.
- Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Paradigma.
- Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila, Edisi Reformasi*, Yogyakarta : Penerbit Paradigma.
- Kelsen, Hans, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cet. VII, terj., Raisul Muttaqien, *General Theory of Law and State*, New York, Russel and Russel, Bandung : Penerbit Nusa Media.

- Koentjaraningrat, 1985, Pengantar Ilmu Antropologi, Cet. V, Jakarta : Penerbit Aksara Baru.
- Lamintang, P.A.F., 2011, Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, Cet.IV., Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Lebacqz, Karen, 2015, Teori-teori Keadilan, terj. Yudi Santosa, Six Theories of Justice, 1986, Bandung : Penerbit Nusa Media.
- Loqman, Loebby, 1991, Beberapa Ikhwal di dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Loqman, Loebby, 2002, Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian, Jakarta : Penerbit Datacom.
- Luban, David, 1988, *Lawyers and Justice, An Ethical Study*, Princeton, New Jersey, USA : Princeton University Press.
- Lubis, M. Sofyan dan M. Haryanto, 2008, Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia, Yogyakarta : Penerbit Juxtapose.
- Maclean, Robert Klitgaard Ronald dan Abaroa H. Lindsey Parris, 2005, Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, Edisi III, terj., Masri Maris, *Corrupt Cities. A Proctica! Guide to Cure and Prevention*, Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Marwan, M. dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya : Penerbit Reality Publisher.
- Martitah, 2013, Mahkamah Konstitusi, dari Negative Legislature ke Positive Legislature, Jakarta : Penerbit Konstitusi Press.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. VIII, Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Milovanovic, Dragan, 1994, *A Primer in The Sociology of Law*, New York, USA : Harrow and Heston Publisher.
- MD., Mohamad Mahfud, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Gama Media.
- Moedjiono, Imam, 2002, *Kepemimpinan dan Keorganisasian*, Yogyakarta : UII Press.
- Moeljatno, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Penerbit Universitas Gajah Mada.
- Moleong, Lexy J., 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Press.

- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII - Press.
- Muhammad, Rusli, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia, Beserta Putusan Kontroversial*, Yogyakarta : UII-Press.
- Mujahidin, Ahmad, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT. Refika Aditama.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi dan Sulaiman Mubarak, Tanpa Tahun, *Masalah Bantuan Hukum oleh Pegawai Negeri*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni.
- , 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif Teoretis dan Praktik*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Mustofa, H. Wildan Suyuthi, 2013, *Kode Etik Hakim, Edisi II*, Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- N.D., Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, Cet. II*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Nonet, Philippe and Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*, Toronto : Fitzhenry & Whiteside Ltd.

Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju.

Nasution, A. Karim, 1972, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Jakarta : Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Nusantara, Abdul Hakim dkk, 1986, *Studi Kasus Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Penerbit Djambatan.

Oesman, Oetoyo dan Alfian, 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi*, Cet. II, Jakarta : Penerbit BP7 Pusat.

Pamungkas, E.A., 2010, *Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hakim di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Navila Idea.

Poernomo, 1982, *Pandangan Terhadap Azas-azas Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Penerbit Liberty.

Poernomo, Bambang, 1985, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Amarta Buku.

Poernomo, Bambang, 1988, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.

-----, 1993, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Dalam Undang-Undang RI No.8 Th 1981, Yogyakarta : Penerbit Liberty.

Poerwadarminta, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka.

Pramono, Widyo, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. III, Bandung : Penerbit PT. Alumni.

Prinst, Darwan, 1993, *Praperadilan dan Perkembangannya di dalam Praktek*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Cet. X, Bandung : Penerbit Sumur Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cet. III Edisi III, Jakarta : Penerbit PT. Refika Aditama.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999), Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta PT.Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto, Tanpa Tahun, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Penerbit Sinar Baru.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Penerbit Angkasa.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Cet. II, Bandung : Penerbit Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 1993, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta : BPHN.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta : Penerbit KOMPAS.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cet. III, Jakarta : Penerbit KOMPAS.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangaunan Hukum Nasional, Yogyakarta : Genta Publishing.

Rahardjo, Satjipto, 2010, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Cet. II, Yogyakarta : Genta Publishing.

Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.

Rawls, John, 2011, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Cet. II, terj., Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, A Theory of Justice, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.

Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu*, Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu*, Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Kedua*, Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

-----, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Ketiga*, Jakarta Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

-----, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Keempat*, Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Diponegoro.

-----, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan, Buku Kelima*, Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

- Robbins, Stephen P. and Timothy A. Judge, 2015, *Organizational Behavior*, New Jersey, USA : Pearson Education Inc., *Perilaku Organisasi*, Terj. Ratna Saraswati dan Febriella Sirait, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Rosyidi, Lili, 1982, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Rosyidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet.III., Jakarta : Penerbit Aksara Baru.
- Saleh, K. Wantjik, 1985, *Pelengkap K.U.H. Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Samekto, FX. Adji, 2013, *Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Bandar Lampung : Penerbit Indepth Publishing.
- Sanusi, Lian Nury, 2006, *UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : Penerbit Kawan Pustaka.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 1995, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Cet. III, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Sashkin, Marshall dan Molly G. Sashkin, 2003, *Leadership That Matters*, Terj. 2011, Rudolf Hutaaruk, *Prinsip-prinsip Kepemimpinan*, Penerbit Erlangga.

Sastrosoehardjo, Soehardjo, 1991, *Konstitusi dan Demokrasi*, Semarang : Penerbit

Dahara Prize.

Sembiring, Jimmy Joses, 2009, *Legal Officer, Panduan Mengelola Perizinan,*

Dokumen, HaKI, Ketenagakerjaan dan Masalah Hukum di Perusahaan,

Jakarta : Penerbit Visi Media.

Setiono, 2010, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta :

PDIH Fakultas Hukum UNS.

Setiardja, A. Gunawan, 1991, *Filsafat Pancasila, Bagian II : Moral Pancasila*, Cet.

VI, Semarang : Universitas Diponegoro.

-----, 1997, *Filsafat Pancasila, Bagian I*, Semarang : Universi-

tas Diponegoro.

Shidarta Ed., 2012, *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan,*

Eksistensi dan Implikasi, Jakarta : Penerbit Epistema Institute.

Sianturi, S.R. dan Mompang L. Panggabean, 1996 , *Hukum Penitensia di*

Indonesia, Jakarta : Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM.

Silalahi, Ulber, 2011, *Asas-asas Manajemen*, Bandung : Penerbit PT. Refika

Aditama.

Sigit, Soehardi, 1982, *Perkembangan Pikiran-pikiran Manajemen dan*

Pendekatan-pendekatannya, Yogyakarta : Penerbit Armurrita.

-----, 1983, *Teori Kepemimpinan dalam Manajemen*, Yogyakarta :
Penerbit Armurrita.

Sirajuddin, dan Zulkarnain, 2006, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik,
Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, Bandung : Penerbit Citra
Aditya Bakti.

Soedirjo, 1984, *Kasasi dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi)*, Edisi II, Jakarta :
Penerbit Akademika Pressindo.

-----, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta : Penerbit
Akademika Pressindo.

Soeharto, H., 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak
Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung :
Penerbit Refika Aditama.

Soejono dan H. Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan
Penerapan*, Cet.II, Jakarta : Penerbit PT. Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas
Indonesia Press.

Soekanto, Soerjono, 1988, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. IX, Jakarta : Penerbit
CV. Rajawali.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
Jakarta : Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, 2013, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet. XXII, Jakarta :
Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 1988, *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui
Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Penerbit Ind-Hill-Co.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.V, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soeroso, R., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.XIII, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Soerodibroto, R. Soenarto, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Edisi V, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R., 1978, *Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik (Dalam Penyelesaian Perkara Sebagai Penegak Hukum)*, Bogor : Politeia.
- Soesilo, R., 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Penerbit Politeia.
- Soetomo, A., 1989, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita.
- Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1972, *Kamus Hukum*, Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita.

- Subekti, 1955, *Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan*, Cet. II, Jakarta : Penerbit Soeroengan.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Sulistiyono, Adi dan Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo, Masmedia Buana Pustaka.
- Sulistiyono, Adi, 2006, *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*, Surakarta : UNS Press.
- , 2007, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta : LPP UNS dan UNS Press.
- , 2008, *Negara Hukum : Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, Surakarta : LPP UNS-UNS Press.
- , 2008, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, Surakarta : LPP UNS-UPT. UNS Press.
- Sumadi, H. Ahmad Fadil, 2013, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan, Fungsi Manajemen Mahkamah Agung terhadap Pengadilan di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945*, Malang : Setara Press.
- Sunaryo, Sidik, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet. III, Malang : UMM Press.
- Sunyoto, Danang, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Penerbit CAPS (Center for Academic Publishing Service).

- Supanto, 2010, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Supanto dan Prasetyo Hadi Purwandoko dkk, 2011, *Criminal Policy Memberantas Pembajakan Program Komputer*, Surakarta : Penerbit LPP UNS dan UNS Press.
- Supramono, Gatot, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Supriyanto, Stefanus, 2013, *Filsafat Ilmu*, Jakarta : Penerbit Prestasi Pustaka Publisher.
- Suriasumantri, Jujun S., 2009, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Suryabrata, Sumadi, 1992, *Metodologi Penelitian*, Cet.VII, Jakarta : Penerbit CV. Rajawali.
- Suryabrata, Sumadi, 2014, *Metodologi Penelitian*, Cet.25, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryono, Hassan, 2008, *Ilmu Negara, Suatu Pengantar ke dalam Politik Hukum Kenegaraan*, Surakarta : LPP UNS-UPT. UNS Press.
- Suseno, Franz Magnis, 1993, *Etika Politik : Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Susanto, Anthon F., 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis, Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Susanto, Anthon F., 2015, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Penerbit Setara Press, Malang.

- Sutiyoso, Bambang, 2012, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta : UII Press.
- Sutarto, Suryono, 2004, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2008, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Suwondo, Kutut dkk, 2009, *Merenung Pembangunan, Punjung Tulis 70 Tahun Liek Wilardjo*, Salatiga : F.T.E. dan Program Pascasarjana Studi Pembangunan UKSW.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, 2012, *Hukum Dagang di Indonesia*, Bandung : Penerbit CV. Pustaka Setia.
- Tauda, Gunawan A., 212, *Komisi Negara Independen, Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta : Penerbit Genta Publishing.
- Tanya, Bernard L., 2011, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Yogyakarta : Penerbit Genta Publishing.
- Tanya, Bernard L. dkk., 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Penerbit Genta Publishing.

- Taufiq, Muhammad, 2014, *Keadilan Substansial, Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Tedjosaputro, Liliana, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum, Cet.II*, Semarang : Penerbit Aneka Ilmu.
- Toffler, Alvin, 1989, *The Third Wave*, Sri Koesdyantinah SB, Terj.1992, *Gelombang Ketiga (Bagian Kedua)*, Jakarta : Penerbit Pantja Simpati.
- Tunggal, Hadi Setia, 2002, *Undang-Undang Grasi (UU No.22/2002)*, Jakarta : Penerbit Harvarindo.
- Tresna, R., 1975, *Komentari atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri atau HIR*, Cet.V, Jakarta : Penerbit PT. Pradnya Paramita.
- Utrecht, E., 1961, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet. VI, Jakarta : Penerbit Ichtiar.
- Vago, Steven, 1997, *Law and Society*, Edisi V, Upper Saddle River, New Jersey USA : Prentice Hall.
- Van Gerven, W., 1973, *Het Beleid van de Rechter*, NV. Scriptoria, Antwerpen, Belanda, Hartini Tranggono, Terj. 1990, *Kebijaksanaan Hakim*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Vredenburg, 1978, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia.
- Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

Wibawa, Samodra, 1994, Kebijakan Publik, Proses dan Analisis, Jakarta :

Penerbit Intermedia.

Wibawa, Samodra, 2005, Reformasi Administrasi, Bunga Rampai Pemikiran

Administrasi Negara/Publik Yogyakarta : Penerbit Gava Media.

Widyadharma, Ignatius Ridwan, Tanpa Tahun, Etika Profesi Hukum dan

Keperanannya, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

Widyadharma, Ignatius Ridwan, 1996, Etika Profesi Hukum, Semarang : Badan

Penerbit UNDIP.

Widyadharma, Ignatius Ridwan, 2001, Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum,

Semarang : Penerbit Mimbar.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum : Konsep dan Metode*, Malang : Setara

Press.

-----, 2013, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan*

Hukum, Malang : Penerbit Setara Press.

Wilardjo, Liek, 1990, Realita dan Desiderata, Yogyakarta : Duta Wacana

University Press.

Wiwoho, Jamal, 2006, Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen Keempat

UUD 1945, Surakarta : UPT UNS Press.

Wiwoho, Jamal, 2007, Aspek Hukum dalam Bisnis, Cet. II, Surakarta : UPT. UNS

Press.

Wiwoho, Jamal, 2008, Pengantar Hukum Bisnis, Surakarta : LPP UNS-UPT. UNS Press.

Wojowasito dan Poerwodarminto, 1980, *Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Bandung : Penerbit Hasta.

Yudho, Winarno dkk, 2002, Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten, Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, Jakarta : ELSAM, HUMA dan WALHI.

Yudowidagdo, Hendrasto dan Anang Suryanata dkk, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT. Bina Aksara.

Yuniarsih, Tjutju dan Suwatno, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cet. III, Bandung : Penerbit Alfabeta.

Zulkarnain, 2013, Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana, Malang : Setara Press.

Seminar/Lokakarya/Sarasehan/Pidato Pengukuhan/Orasi Ilmiah :

Arief, Barda Nawawi, 20 Nopember 1997, “Seminar Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Kebijakan Legislatif Tentang Kewenangan Penyidikan dalam Konteks Kebijakan Penegakan Hukum Pidana yang Integral*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Arinanto, Satya, 20 Nopember 1997, "Seminar Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Pokok-pokok Pikiran tentang Pengalokasian Kewenangan Penyidikan dalam Peraturan Perundang-undangan (Kebijakan Legislatif)*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Effendi, Taufiq, Mei 2008, "Seminar Pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara", *Permasalahan dan Peningkatan Kinerja SDM Aparatur Negara Menghadapi Persaingan Global*, Semarang : Universitas Diponegoro.

Effendi, Taufiq, 1 Agustus 2008, "Seminar Reformasi Birokrasi Menuju Pelayanan Publik Yang Baik Dalam Rangka Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Rakyat", *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Maju dan Sejahtera*, Semarang : Universitas Diponegoro.

Fadjar, H.A. Mukthie, 20 februari 2010, Orasi Ilmiah, Mahkamah Konstitusi dan Perkembangan Hukum di Indonesia, Malang : Universitas Brawijaya.

Gelgel, I Made, 20 Desember 1997, "Seminar Dwi Windu KUHAP", *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan KUHAP dalam Bidang Penuntutan dan Perlindungan Hak-hak Korban*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Hadjon, Philipus Mandiri, 20 Desember 1997, "Seminar Dwi Windu KUHAP", *Norma Hukum KUHAP Sebagai Kewenangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Rakyat (Tersangka/Terdakwa)*, Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

- Harahap, M.Yahya, 20 Nopember 1997, “Seminar Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Suatu Tinjauan Penyidikan Dikaitkan dengan Pembuktian*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Arif, 16 September 2016, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Kuliah Umum, Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro.
- Muladi, 20 Nopember 1996, “Seminar Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Nasional Bidang Hukum pada Pelita-VII*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Muladi, 16 Agustus 1997, “Sarasehan Renungan Kemerdekaan Tentang Masalah-masalah Hukum”, *Penegakan Hukum dan Peningkatan Demokrasi di Indonesia*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Muladi, 20 Nopember 1997, “Seminar Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Koordinasidalam Penyidikan*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Reksodiputro, Mardjono, 30 Oktober 1993, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sularto, R.B., 2012, Orasi Imiah, *Pendekatan Humanistik terhadap Sistem Peradilan Pidana (Sebuah Dialektika dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Susanto, I.S., 1988, *Membangun Kriminologi yang Bercirikan Indonesia*, Masalah-masalah Hukum Nomor 3 Th.XIII-1988, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sutarto, Eddhi, 20 Nopember 1997, “Seminar Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-undangan :

Herziene Inlandsch Reglement Stb. 1941 Nomor 44.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1/Drt./1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Pengadilan-pengadilan Sipil.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Ijin Kepada Dokter dan Dokter Gigi;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16/Prp/1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18/Prp/1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2/Pnps./1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbanagan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbanagan;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Internet :

<https://id-id.facebook.com/DivHumasPolri/posts/425807430781452> diunduh

tanggal 17 Januari 2016.

www.hukumonline.com diunduh tanggal 15 Desember 2015 jam 17.00 wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/KomiteNasKeselamatanTransportasi> diunduh tanggal

5 Desember 2015 jam 10.00 wib.

www.jamalwiwoho.com diunduh tanggal jam

Jurnal, Karya tulis lain :

Arief, Barda Nawawi, 1998, *Reformasi Hukum dan Keadilan*, Kompas : Kamis 23 April 1998, hlm. 4.

Arjoso, H.A., 1998, *Hakikat Reformasi Total, Tanggapan atas Tulisan J.B. Mangunwijaya*, Kompas : Selasa 21 Juli 1998.

Atmasasmita, Romli, 2012, "*Quo Vadis*" *RUU Mahkamah Agung*, Kompas : Selasa 25 September 2012.

Awaluddin, Hamid, 2015, *Kriminalisasi Diskresi*, Kompas : Jumat 28 Agustus 2015, hlm. 7.

Fariz, Donald, 2012, *Defisit Penyidik KPK*, Kompas : Kamis 27 September 2012, hlm. 7.

Hiariej, Eddy O.S., 2005, *Menyandera dengan Status Tersangka*, Kompas : Rabu 21 Januari 2015, hlm. 7.

Karman, Yonki, 2015, *Politik (dan) Hukum*, Kompas : Rabu 21 Januari 2015, hlm. 7.

Kristiadi, J., 2015, *Meruwat Lakon Gugurnya KPK*, Kompas : Selasa 13 Oktober 2015.

Lesmana, Tjipta, 2009, *Biang Keladi Bernama Anggoro*, Suara Merdeka : Selasa 3 November 2009, hlm. 6-11.

Marta, M. Fajar, 2015, *Korupsi Membuat Indonesia Terempas*, Kompas : Rabu 16 September 2015, hlm. 5.

Meliala, Adrianus, 2015, *Bapasnas Jangan Dibatalkan*, Koran Sindo : Kamis, 27 Agustus 2015, hlm. 4.

Ponto, Soleman B., 2015, *Antara Direktorat, KPLP dan Bakamla*, Kompas :
Senin 13 Juli 2015, hlm. 7.

Rifai, Amzulian, 2015, *Mengawasi Pelayanan Publik*, Kompas : Rabu 4
November 2015, hlm. 6.

Sastrosoehardjo, Soehardjo, 1998, *Reformasi Politik dan Strukturisasi Ekonomi*,
Kompas : 5 Maret 1998, hlm. 4.

Sudarto, 1987, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Masalah-masalah Hukum,
Edisi Khusus, Th.XVII.

Surat Kabar/Majalah/Tabloid/Buletin :

Media Indonesia, Selasa 3 November 2009

Suara Merdeka, Kamis 10 September 2009

Suara Merdeka, Rabu 27 Juni 2012

Suara Merdeka, Rabu 8 Agustus 2012

Suara Merdeka, Sabtu 27 April 2013

Kompas, Jumat 30 Oktober 2009

Kompas, Rabu 14 Desember 2011

Kompas, Rabu 1 Agustus 2012

Kompas, Sabtu 4 Agustus 2012

Kompas, Kamis 25 April 2013

Kompas, Jumat 26 April 2013